



BUKU I

KONDISI EKSTING ARSITEKTUR SPBE

**Pemerintah Kota Batam
2022 - 2026**

WELCOME TO BATAM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat & Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.



Implementasi SPBE dievaluasi oleh evaluator dari Kemenpan-RB setiap tahunnya dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kota Batam berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun kajian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya kajian perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu juga dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Batam dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana ini agar dapat meningkatkan indeks SPBE ialah dengan berpedoman pada Perpres 95/2018 dan mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu dengan melakukan *reverse engineering* terhadap parameter dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam kajian ini telah memenuhi dengan konteks evaluasi dalam SPBE. Dalam Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK dengan harapan agar Pemerintah Kota Batam dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.

Daftar Isi

Daftar Isi	3
Bab I	
Pendahuluan	6
Latar Belakang	7
Maksud dan Tujuan	10
Landasan Hukum	10
Landasan Teori	12
TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK	12
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	12
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	15
Bab II	
Visi, Misi Strategi SPBE	23
Visi RPJMD	24
Strategi Peningkatan SPBE	25
Inisiatif Strategis SPBE	27
Bab III	
Analisa Kondisi Eksisting SPBE	29
Kebijakan & Management	30
Kebijakan	30
Manajemen	30
Arsitektur Proses Bisnis	31
Katalog Proses Bisnis	32
Arsitektur Data	87
Katalog Entitas Data	87
Analisis Diagram Data	133
Arsitektur Layanan	138
Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi	138

Layanan Perencanaan	139
Layanan Penganggaran	143
Layanan Keuangan	145
Layanan Pengelolaan Aset	149
Layanan Kepegawaian	151
Layanan Kinerja Pegawai	155
Layanan Kearsipan Dinamis	158
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	161
Layanan Pengaduan Publik	164
Layanan Data Terbuka	166
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	168
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	170
Layanan JDIH	172
Layanan Perizinan	177
Layanan Kesehatan	179
Layanan Pendidikan	181
Layanan Kependudukan	182
Katalog Layanan	192
Analisis Diagram Layanan	221
Arsitektur Aplikasi Eksisting	223
Katalog Aplikasi Eksisting	223
Analisis Diagram Aplikasi Eksisting	252
Diagram Integrasi Antar Aplikasi	254
Arsitektur Infrastruktur	261
Infrastruktur SPBE	261
Pusat Data Pemko Batam	261
Perangkat Server – Server	263
Teknologi	264
Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)	264
Jaringan Intra Daerah	265
Topologi Jaringan	265
Jaringan Antar Gedung Komplek Pemko (Campus Network)	266

Jaringan Internet	267
Jaringan Nirkabel (WiFi)	267
Jaringan Server Farm	268
Perangkat Jaringan	269
Sistem Penghubung Layanan Daerah	270
Arsitektur Keamanan	272
Kebijakan Keamanan SPBE	272
Standar Operasi Prosedur (SOP)	274
Perangkat Keamanan SPBE	275
Penilaian Keamanan	275
Bab IV	
Analisa Kesenjangan SPBE	276
Analisa Kesenjangan SPBE	277

Bab I

Pendahuluan

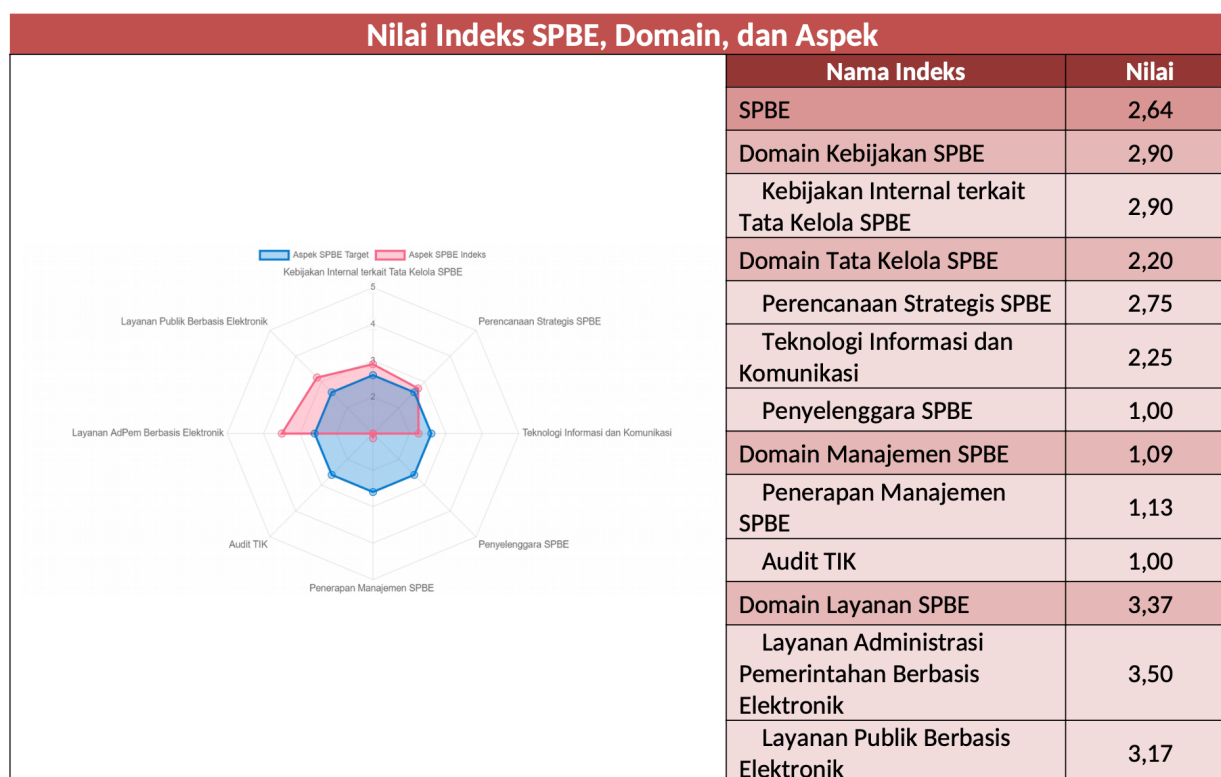
1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan keberadaan dan fungsi infrastruktur digital yang sangat esensial dan strategis. Menyadari hal itu, pemerintah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 30,5 triliun rupiah pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2021. Jumlah tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*). Pemerintah mencoba mengoptimalkan belanja tersebut agar dapat mencapai target Pembangunan Nasional dengan *better spending* yaitu penghematan belanja infrastruktur TIK dan Aplikasi Umum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan sebanyak 47 indikator. Instrumen ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejalan dengan hal tersebut Kota Batam juga telah melakukan evaluasi SPBE secara eksternal dengan hasil sebagai berikut ini.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BATAM

2,64
(Baik)



Gambar 1.1.1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 di Pemerintah Kota Batam ini akan menjadi baseline dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.

Dokumen ini disusun menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kota Batam khususnya di masa mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan internal dan publik dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Urgensi dalam mengimplementasikan SPBE dengan baik tentunya sejalan dengan Perda Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dimana visi yang merupakan gambaran kondisi atau keadaan Kota Batam yang akan diwujudkan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan internal pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya *Internet of Things* (IoT). Adanya pemanfaatan IoT ini menghasilkan kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data *basic*. Atas dasar ini maka pelayanan pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Selain itu, Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahannya ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu upaya guna mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan memodernisasi birokrasi pemerintahan yang memfokuskan pada orientasi pelayanan publik kepada kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Aktivitas pemerintahan ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Baik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *“Leading Sector”* di bidang pengembangan dan pengelolaan TIK maupun OPD-OPD lain saat ini menggunakan berbagai sistem informasi yang mana pertumbuhannya terus meningkat. Ketidakseragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE yang digunakan menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan proses pemeliharaan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas

terkait dengan implementasi *Smart Government* sehingga membuat proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.



Gambar 1.1.2. Kondisi Anggaran TIK Pemerintah (Sumber: Paparan Kemenkeu)

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Pelayanan yang dikenal dengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan alur birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.



Gambar 1.1.3. Kebijakan Pengembangan SPBE

Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar-benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Batam berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kajian terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Batam dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Batam. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kota Batam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kota Batam 2022-2026 ini adalah:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kota Batam dalam mengimplementasikan SPBE di Kota Batam.
2. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Batam agar implementasi SPBE di Kota Batam menjadi lebih terarah dan komprehensif.
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kota Batam yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Sementara tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kota Batam 2022-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kota Batam agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Batam 2022-2026 untuk peningkatan indeks SPBE di Kota Batam.

1.3. Landasan Hukum

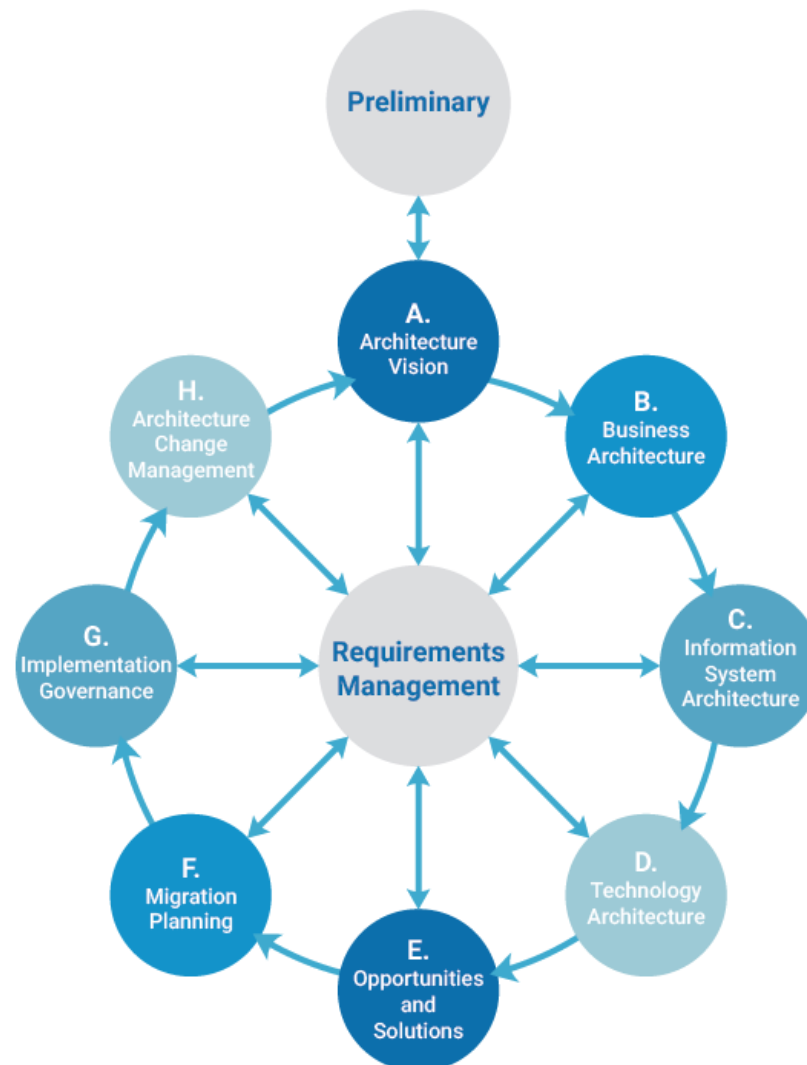
Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di Kota Batam ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
12. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

1.4. Landasan Teori

1. TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK



Gambar 1.4.1 Tata Kelola (TOGAF)

Penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam framework TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk kepada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah agar SPBE menjadi terpadu dan diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

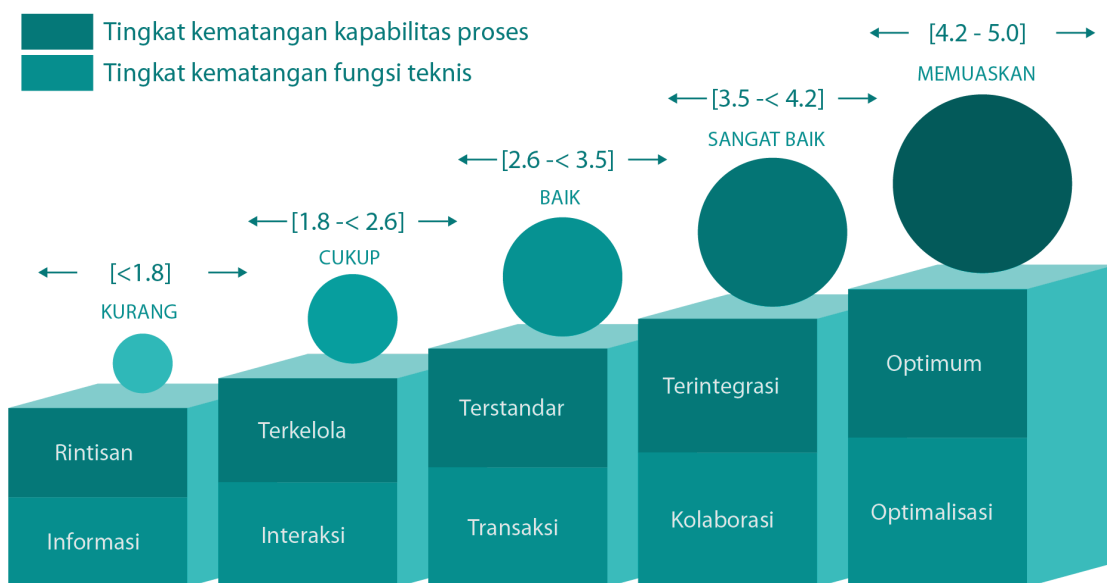


Gambar 1.4.2 Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Untuk mengimplementasikan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM. Terdapat 3 tahapan penting dalam kesuksesan SPBE:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak.
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi).
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progress penerapan Arsitektur SPBE khususnya Roadmap, Kondisi permasalahan eksisting SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kota Batam saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 1.4.3 Tingkat Kematangan Proses SPBE

Tabel 1.4.1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

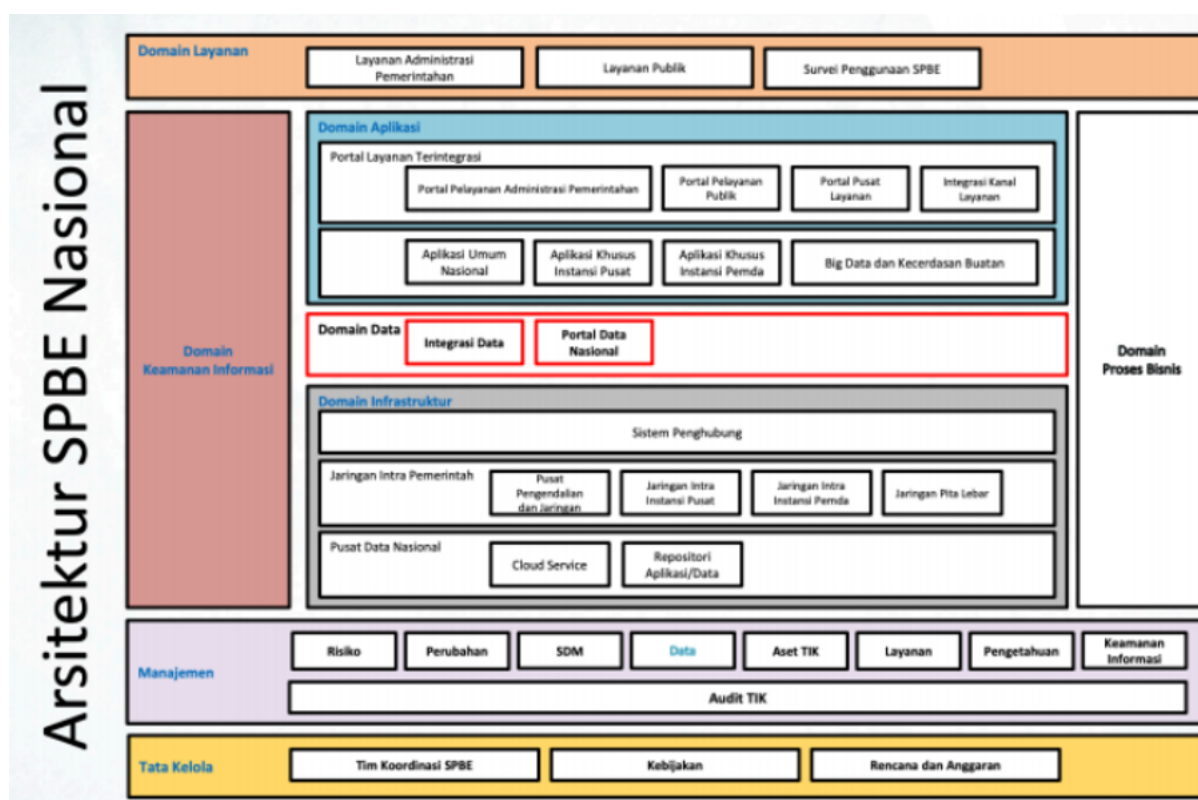
Tabel 1.4.2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Dalam Perpres 95/2018 telah dijelaskan mengenai Arsitektur SPBE Nasional sebagai pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Daerah. Keberhasilan penerapan SPBE Daerah dalam penyelenggaraan alur hidup pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE dalam institusi. Gambaran arsitektur SPBE dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.4.4 Domain Arsitektur SPBE

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara Proses bisnis, Data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh Manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan Tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah.

Setiap layer arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang kemudian saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Dalam proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE, langkah awal yang harus disusun terlebih dahulu adalah bidang Tata Kelola. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan,

aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang Tata Kelola dimulai dengan membentuk Tim Koordinasi, menentukan Kebijakan, dan menyusun Rencana dan Anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk Manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Institusi. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Hal-hal yang harus ditentukan dalam proses penentuan manajemen adalah

- Manajemen Resiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen SDM
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Perubahan

Selanjutnya manajemen yang dilakukan mencakup hal-hal dalam mendukung pengembangan arsitektur lainnya. Arsitektur yang akan dikelola pertama adalah arsitektur proses bisnis, disini proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan paling efektif dan efisien. Dari arsitektur proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

- Portal layanan administrasi pemerintah
- Portal layanan publik
- Portal pusat layanan
- Integrasi kanal layanan

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan bersifat umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Aplikasi umum nasional
- Aplikasi khusus instansi pusat
- Aplikasi khusus instansi pemda
- Big data dan kecerdasan buatan

Pembangunan aplikasi tentunya mengacu pada data yang dikelola oleh instansi, dalam arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dan portal data nasional.

Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur, arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan

dalam pelayanan yang ada. Dalam arsitektur infrastruktur dibagi menjadi 2 jenis yaitu infrastruktur Jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi. Termasuk didalamnya ada diantaranya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya ada cloud services dan repositori aplikasi / data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilindungi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini adalah: privasi/kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh instansi. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survey penggunaan aplikasi SPBE.

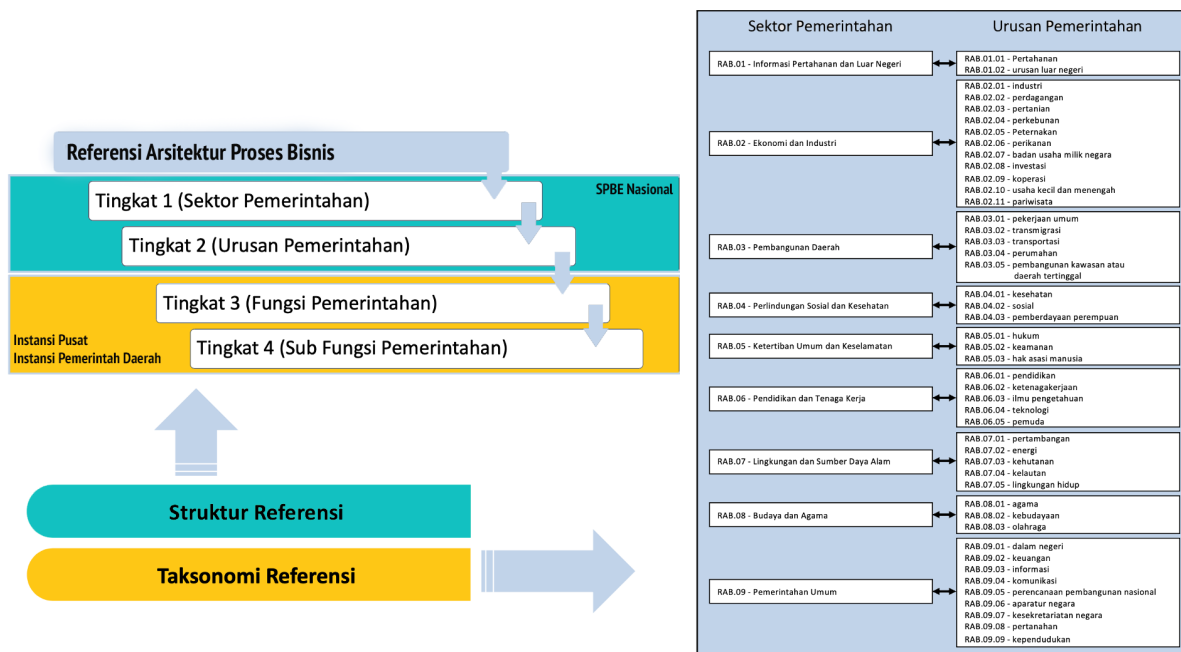
Dalam Arsitektur SPBE Nasional terdapat enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD), dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur proses bisnis dijelaskan pada gambar berikut ini.



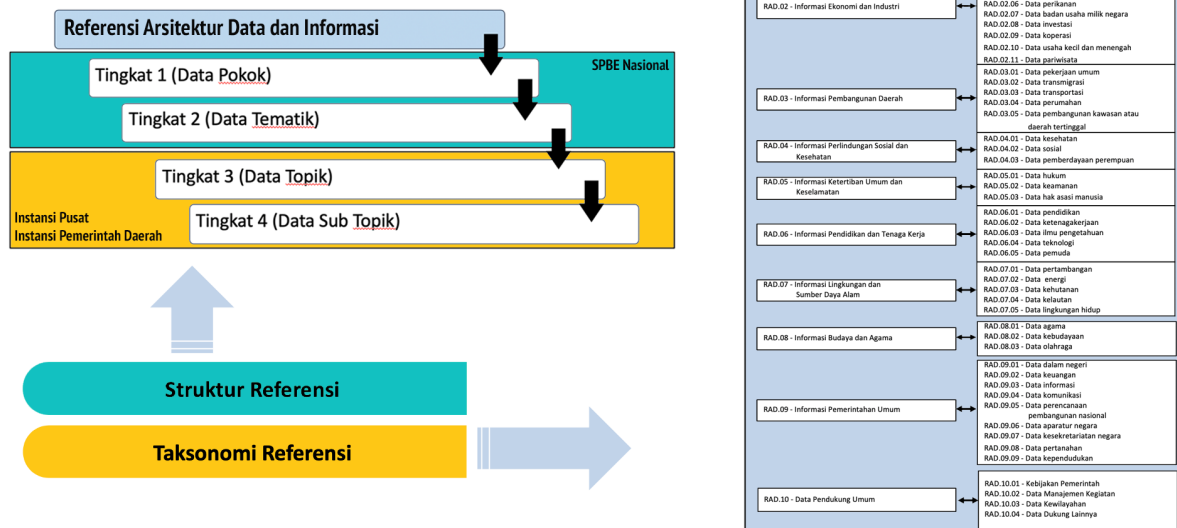
Gambar 1.4.5 Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi kedalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur data dijelaskan pada gambar berikut ini.



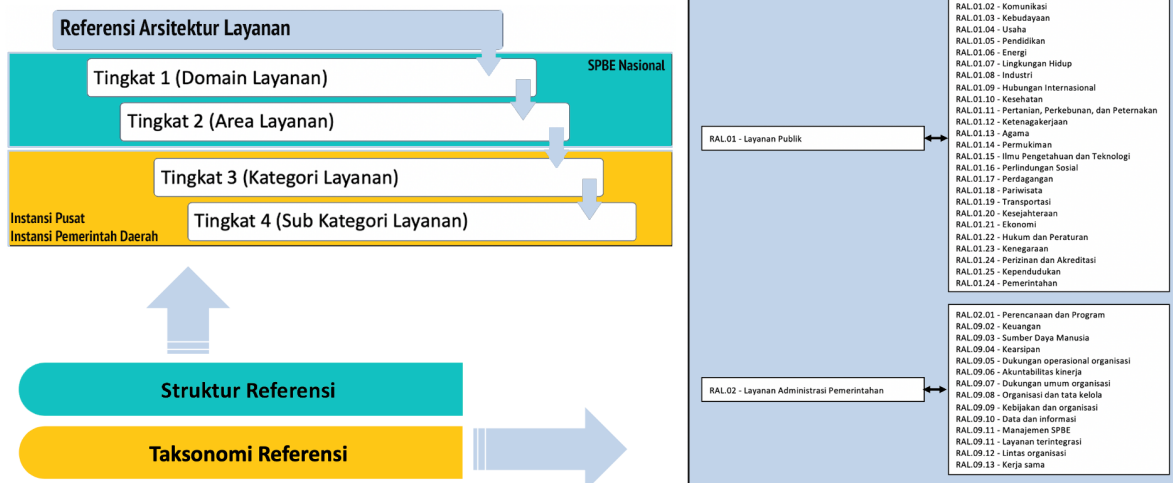
Gambar 1.4.6 Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur layanan dijelaskan pada gambar berikut ini.



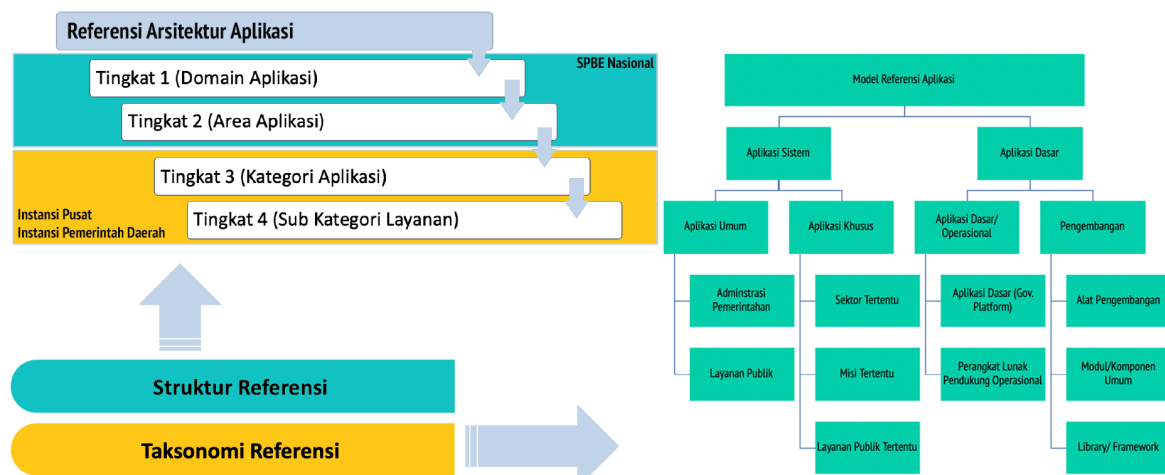
Gambar 1.4.7 Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



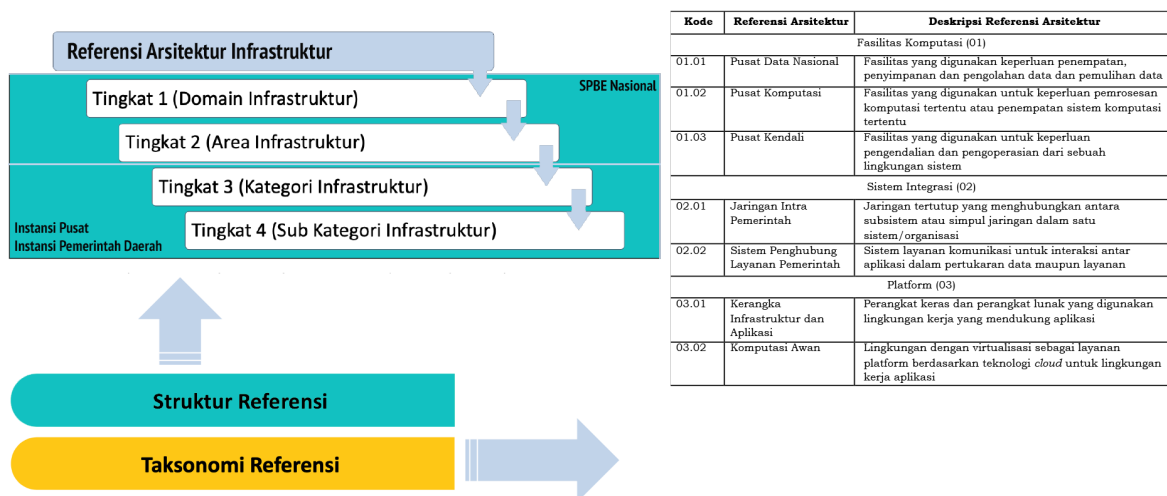
Gambar 1.4.8 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut ini.



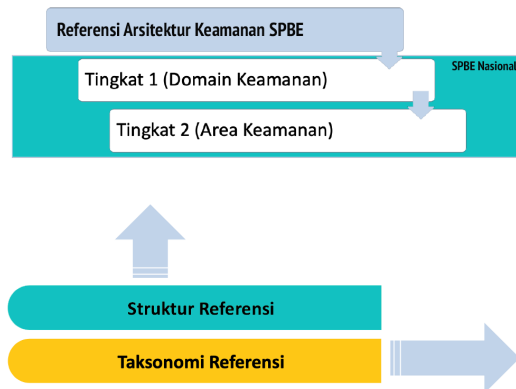
Gambar 1.4.9 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelalkan Keamanan (03)		
03.01	Kelalkan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelalkan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelalkan keamanan.
03.02	Kelalkan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelalkan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelalkan keamanan.

Gambar 1.4.10 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

Bab II

Visi, Misi Strategi

SPBE

2.1. Visi RPJMD

Visi SPBE Nasional adalah

"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."

Visi SPBE Nasional perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kota Batam.

Visi Pemerintah Kota Batam adalah

"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"

Dengan mengacu pada dua hal pondasi strategi dalam arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2022 - 2026 berfokus pada peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka mencapai visi SPBE, maka misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.



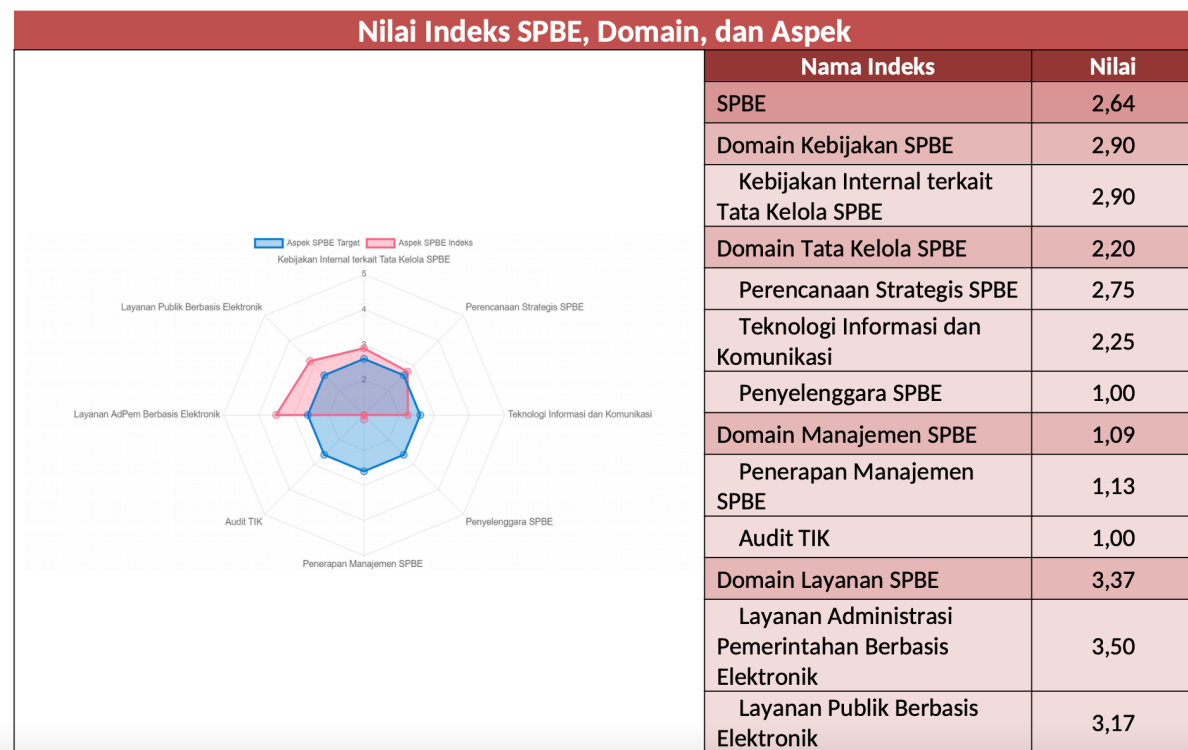
Gambar 2.1.1 Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Indeks SPBE Kota Batam tahun 2021, Strategi Peningkatan Indeks SPBE yang perlu dituju yakni dengan meningkatkan seluruh domain yang meliputi: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE agar bisa mencapai target level 3 (tiga).

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BATAM

2,64
(Baik)



Gambar 2.2.1 Indeks SPBE Kota Batam

Jika dilihat pada nilai indeks diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini belum seluruhnya perangkat daerah di Kota Batam aktif berkolaborasi dalam implementasi SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices*

Tabel 2.2.1 Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat. 	Tim Koordinasi SPBE
2	Indikator 11-13 terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Rencana	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. 	Tim Koordinasi SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
	Anggaran SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat. Menuangkan substansi Peta Rencana SPBE ke dalam RKPD. 	
3	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data / Server yang terpusat milik pemko Batam yang dikelola oleh Diskominfo. Server pemko Batam terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik pemko Batam. 	Tim Koordinasi SPBE
4	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan konektivitas ke seluruh OPD (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya. Memastikan seluruh ruangan OPD tercover radius Access Point. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik pemko Batam. 	Tim Koordinasi SPBE
5	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Mendefinisikan tugas dan fungsi, Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai yang tertuang dalam peta rencana. Melakukan pembaharuan tugas dan fungsi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai kondisi yang akan datang. 	Tim Koordinasi SPBE
6	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE dengan melibatkan seluruh perangkat daerah pemko. Batam. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE 	Tim Koordinasi SPBE
7	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	<ol style="list-style-type: none"> Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan pemko. Batam sesuai pedoman yang ditetapkan. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE. 	Tim Koordinasi SPBE

2.1. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei diperoleh sebelas inisiatif sebagai prioritas pengembangan Layanan SPBE di Kota Batam yaitu:

1. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE;
2. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
3. Pengembangan Sistem Informasi guna mendukung implementasi layanan SPBE, antara lain:
 - a. Sistem Informasi Perencanaan
 - b. Sistem Informasi Penganggaran
 - c. Sistem Informasi Keuangan
 - d. Sistem Informasi Pengadaan
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Sistem Informasi Kearsipan
 - g. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
 - h. Sistem Informasi Pengawasan Internal Pemerintah
 - i. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - j. Sistem Informasi Kinerja Pegawai
 - k. Sistem Informasi Pengaduan Publik
 - l. Sistem Informasi Data Terbuka
 - m. Sistem Informasi Administrasi Internal lainnya
 - n. Sistem Informasi Publik Sektor

Sistem Informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh kementerian.

1. Melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat;
2. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan TIK;
3. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik unit kerja);
4. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh OPD seperti: SOP Pembangunan Aplikasi oleh pihak ketiga;
5. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung.

Bab III

Analisa Kondisi

Eksisting SPBE

3.1. Kebijakan & Management

A. Kebijakan

Kota Batam telah menerapkan beberapa layanan untuk administrasi pemerintah maupun layanan publik sektoral, akan tetapi dalam pengembangan layanan SPBE selama ini belum didukung oleh kebijakan internal hal ini juga terlihat pada hasil evaluasi SPBE Kota Batam tahun 2021 untuk domain kebijakan indeksnya masih di angka 2.90 sehingga penilaian pengelolaan layanannya dinilai masih kurang maksimal. Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan kebijakan yang perlu ada dalam penerapan SPBE yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Mandatory Kebijakan SPBE Daerah

#	Mandatory	Keterangan
1	Kebijakan Tim koordinasi SPBE	Sudah ada
2	Kebijakan Manajemen Data	Sudah ada
3	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah ada
4	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah ada
5	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah ada
6	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ada
7	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah ada
8	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah ada
9	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah ada
10	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah ada

Berdasarkan dari 10 Mandatory kebijakan SPBE yang perlu disusun, 10 kebijakan SPBE telah disusun oleh Pemerintah Kota Batam.

B. Manajemen

Dalam pengembangan dan penerapan SPBE tentunya harus diimbangi juga dengan penerapan manajemennya guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi, layanan SPBE tanpa adanya penerapan manajemen yang benar bisa berimplikasi pada pelayanan yang buruk meskipun sudah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE yakni: SDM (people) ->

Manajemen (process) -> Layanan IT (technology). Atas dasar inilah dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang perlu ada dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Mandatory Manajemen SPBE Daerah

#	Mandatory	Keterangan
1	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Sudah Dilakukan
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Sudah Dilakukan
3	Penerapan Manajemen Data	Sudah Dilakukan
4	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum Dilakukan
5	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum Dilakukan
6	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum Dilakukan
7	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum Dilakukan
8	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum Dilakukan

Berdasarkan dari 8 Mandatory Manajemen SPBE yang perlu dilakukan saat ini baru 3 jenis manajemen yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam, Oleh karena itu kedepannya perlu menerapkan seluruh domain manajemen SPBE. Hal ini dirasa wajar dikarenakan saat ini belum seluruh domain manajemen ditetapkan pedomannya oleh instansi pusat terkait, dari 8 manajemen tersebut baru 3 manajemen yang sudah ditetapkan pedoman manajemen SPBE-nya, yaitu: Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan dan Manajemen Data.

3.2. Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen SOTK. pemetaan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional. Arsitektur Proses Bisnis ini terdiri atas: Katalog Proses Bisnis dan Matriks Proses Bisnis x Aktor yang ditunjukkan sebagai berikut ini.

A. Katalog Proses Bisnis

Katalog Proses Bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi walikota. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis pemerintah kota batam. Dimana untuk Level 1 & 2 nya mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 3 hingga level 5 mengacu pada proses bisnis daerah.

Tabel 3.2.1 Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh OPD di Kota Batam

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.01-	Pertahanan Negara	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01-	Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.01-	Pendidikan Politik	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.02-	Etika Budaya Pelaksanaan Politik	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.03-	Peningkatan Demokrasi	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.04-	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.05-	Perwakilan dan Partai Politik	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.01.01.06-	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.07-	Pemantauan Situasi Politik di Daerah	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.08-	Pendaftaran dan Pemberdayaan Ormas	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.09-	Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.10-	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.11-	Ideologi Wawasan Kebangsaan	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.12-	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.13-	Kerjasama Intelijen	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.14-	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.15-	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.01.01.16-	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.01.17-	Penanganan Konflik di Daerah	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara	BTH.01.01-Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Pertahanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.01.02-	Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	RAB.01. Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01. Pertahanan	RAB.01.01.01 Pertahanan Negara		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BTH.02-	Pengelolaan Perdagangan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.02. Perdagangan			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BTH.02.01-	Pengelolaan Perdagangan dan Peningkatan Pertumbuhan IKM	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.02. Perdagangan	RAB.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BTH.03-	Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01-	Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.01-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.02-	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.03-	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.03.01.04-	Pendampingan Unit Usaha dan Produk Hewan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	Pertanian BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.05-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.06-	Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.07-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.08-	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.09-	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijau Pakan Ternak	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BTH.03.01.10-	Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	BTH.03.01-Peningkatan Pola Pangan Harapan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.04-	Perikanan Budidaya	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan			Dinas Perikanan
BTH.04.01-	Peningkatan Budidaya Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya		Dinas Perikanan
BTH.04.01.01-	Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.02-	Pembudidayaan Ikan Di Darat	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.03-	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (Pemantauan Kesehatan Ikan dan Kualitas Air)	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.04-	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (Penyerahan Bantuan Obat)	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.05-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.06-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.04.01.07-	Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	BTH.04.01-Peningkatan Budidaya Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.05-	Pembinaan Perikanan Regional	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan			Dinas Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.05.01-	Peningkatan Perekonomian Nelayan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional		Dinas Perikanan
BTH.05.01.01-	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	BTH.05.01-Peningkatan Perekonomian Nelayan	Dinas Perikanan
BTH.05.01.02-	Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	BTH.05.01-Peningkatan Perekonomian Nelayan	Dinas Perikanan
BTH.06-	Pengelolaan Hasil Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan			Dinas Perikanan
BTH.06.01-	Peningkatan Hasil Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan		Dinas Perikanan
BTH.06.01.01-	Bimbingan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	BTH.06.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.06.01.02-	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	BTH.06.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.06.01.03-	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	BTH.06.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.06.01.04-	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	BTH.06.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.07-	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan			Dinas Perikanan
BTH.07.01-	Peningkatan Hasil Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.04 Pemberdayaan Masyarakat Perikanan		Dinas Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.07.01.01-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.04 Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	BTH.07.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.07.01.02-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.04 Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	BTH.07.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.07.01.03-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.04 Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	BTH.07.01-Peningkatan Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
BTH.08-	Pembinaan Penanaman Modal Regional	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.08.01-	Peningkatan Investasi Daerah	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.08.01.01-	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	BTH.08.01-Peningkatan Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.08.01.02-	Promosi Penanaman Modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	BTH.08.01-Peningkatan Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.08.01.03-	Pengelolaan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	BTH.08.01-Peningkatan Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.08.01.04-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	BTH.08.01-Peningkatan Investasi Daerah	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.09-	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.09.01-	Pengelolaan Pelayanan Perizinan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.10-	Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Koperasi			Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
BTH.10.01-	Pertumbuhan Koperasi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Koperasi	RAB.02.09.02 Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.11-	Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.11.01-	Pertumbuhan UMKM	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.03 Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.12-	Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.12.01-	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Ekonomi Mikro	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.12.01.01-	Pembinaan BLUD	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	BTH.12.01-Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Ekonomi Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
BTH.12.01.02-	Pembinaan BUMD	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	BTH.12.01-Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Ekonomi Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.13-	Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Pariwisata			Dinas Kebudayaan Pariwisata
BTH.13.01-	Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Batam	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional		Dinas Kebudayaan Pariwisata
BTH.14-	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.01-	Peningkatan Sarana Pembangunan Di Wilayah Hinterland	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02-	Penyediaan Infrastruktur Kota	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.01-	Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.02-	Normalisasi / Restorasi sungai	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.03-	Operasi dan pemeliharaan kanal banjir	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.04-	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.05-	Pelebaran jalan menambah lajur	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.06-	Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.14.02.07-	Pembangunan jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.08-	Pembangunan jembatan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.09-	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.10-	Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.11-	Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.12-	Pembangunan sistem drainase perkotaan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.13-	Pembangunan Traffic Light	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.14-	Pemeliharaan berkala jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.15-	Pemeliharaan rutin jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.16-	Pemeliharaan Sarpras Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.17-	Pemeliharaan Traffic Light	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.14.02.18-	Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.19-	Peningkatan saluran drainase perkotaan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.20-	Penyediaan Angkutan Umum	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.21-	Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.22-	Penyediaan perlengkapan jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.23-	Penyediaan Sarpras Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.24-	pengembangan jaringan jalan dan jembatan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.25-	Pengembangan sistem drainase perkotaan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.26-	Razia dan Pengawasan LLAJ	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Perhubungan
BTH.14.02.27-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.02.28-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaa n Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.14.02.29-	Rekonstruksi jalan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BTH.14.02-Penyediaan Infrastruktur Kota	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.14.03-	Penyediaan Infrastruktur Di Daerah Hinterland	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
BTH.15-	Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.15.01-	Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.16-	Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan			Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01-	Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan		Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.01-	Penelitian, Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.02-	Penelitian, Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.03-	Penelitian, Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Pengembangan Wilayah	
BTH.16.01.04-	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.05-	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.06-	Monitoring, Evaluasi Pembangunan Daerah	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.07-	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.08-	Penyusunan Dokumen RENJA	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.09-	Penyusunan Dokumen RENSTRA	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Pengembangan Wilayah	
BTH.16.01.10-	Penyusunan Dokumen RPJMD	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.16.01.11-	Penyusunan Dokumen RPJPD	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	BTH.16.01-Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
BTH.17-	Penyelenggaraan Perumahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan			Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.01-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.02-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Pemakaman)	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.03-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.17.01.04-	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.05-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.06-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.17.01.07-	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	BTH.17.01-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan
BTH.18-	Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05. Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.18.01-	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05. Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.19-	Tata Ruang Tanah	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06. Pertanahan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
BTH.19.01-	Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06. Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
BTH.20-	Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06. Pertanahan			Dinas Pertanahan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.20.01-	Pengelolaan Pertanahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06. Pertanahan	RAB.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan		Dinas Pertanahan
BTH.21-	Pembinaan Kependudukan Regional	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01-	Peningkatan Administrasi Kewilayahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.01-	Pelayanan Umum (Kartu Kuning)	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.02-	Pelayanan Umum (KTP, KK) Sub Kegiatan Administrasi Umum	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.03-	Pelayanan Umum (Surat Pindah)	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.04-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.05-	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, dan RAS	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.06-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.21.01.07-	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (RT, RW, dan LPM)	RAB.03. Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07. Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	BTH.21.01-Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.22-	Pembinaan Kesehatan Regional	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan			Dinas Kesehatan
BTH.22.01-	Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional		Dinas Kesehatan
BTH.22.02-	peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional		Dinas Kesehatan
BTH.22.03-	Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional		Dinas Kesehatan
BTH.23-	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan			Dinas Kesehatan
BTH.23.01-	Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.23.01.01-	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	BTH.23.01-Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
BTH.23.01.02-	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	BTH.23.01-Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.23.01.03-	Pengadaan obat dan vaksin	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	BTH.23.01-Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
BTH.23.01.04-	Pengawasan Alat Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	BTH.23.01-Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
BTH.24-	Pelayanan Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan			Dinas Kesehatan
BTH.24.01-	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.24.01.01-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.01-Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.01.02-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.01-Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.01.03-	Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.01-Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.02-	Penerbitan izin rumah sakit kelas C & D	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.24.03-	Penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.24.04-	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.24.04.01-	Pelaksanaan kesehatan Bayi Baru Lahir	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.02-	Pelaksanaan Kesehatan Lansia	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.03-	Pelayanan Kesehatan Balita	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.04-	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.05-	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.06-	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.24.04.07-	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.08-	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.09-	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (Lebih 60 Th)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.10-	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Usia 7-12 th)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.11-	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Usia 15-29 Th)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.12-	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.13-	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.24.04.14-	Pembangunan Puskesmas	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.15-	Pengadaan prasarana & pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.16-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.17-	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.18-	Penyelidikan Epidemiologi	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.04.19-	Penyusunan Renja Dinas Kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
BTH.24.05-	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.24.06-	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.24.07-	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan
BTH.25-	Pengawasan Obat dan Makanan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan			Dinas Kesehatan
BTH.25.01-	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan		Dinas Kesehatan
BTH.25.02-	Penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi tempat pengelolaan makanan(TPM)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan		Dinas Kesehatan
BTH.25.03-	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan		Dinas Kesehatan
BTH.25.04-	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan		Dinas Kesehatan
BTH.26-	Pembinaan Sosial Regional	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01-	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.01-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.02-	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.26.01.04-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.05-	Pemberian Bimbingan Sosial	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.06-	Pengelolaan Data Fakir Miskin	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.07-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.08-	Peningkatan Pelayanan Kedaruratan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.09-	Peningkatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga (ABCV)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.10-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.11-	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.12-	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.26.01.13-	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.26.01.14-	Penyediaan Makanan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
BTH.27-	Pembangunan Manusia	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial			Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.27.01-	Perencanaan bidang Pembangunan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.04 Pembangunan Manusia		Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.27.01.01-	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.04 Pembangunan Manusia	BTH.27.01-Perencanaan bidang Pembangunan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.28-	Pemberdayaan Perempuan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03. Pemberdayaan Perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BTH.28.01-	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03. Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
BTH.29-	Penegakan Hukum	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan			Bagian Hukum
BTH.29.01-	Bantuan Hukum	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum		Bagian Hukum
BTH.29.01.01-	Advokasi Bantuan Hukum	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum	BTH.29.01-Bantuan Hukum	Bagian Hukum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.29.02-	Penataan Produk Hukum	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum		Bagian Hukum
BTH.29.02.01-	Penyusunan Keputusan Walikota	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum	BTH.29.02-Penataan Produk Hukum	Bagian Hukum
BTH.29.02.02-	Penyusunan Peraturan Walikota	RAB.05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Keamanan	RAB.05.02.04 Penegakan Hukum	BTH.29.02-Penataan Produk Hukum	Bagian Hukum
BTH.30-	Pendidikan Anak Usia Dini	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan			Dinas Pendidikan
BTH.30.01-	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan
BTH.30.01.01-	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	Dinas Pendidikan
BTH.30.01.02-	Penambahan Ruang kelas Baru PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	Dinas Pendidikan
BTH.30.01.03-	Pengadaan Mebel Sekolah PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	Dinas Pendidikan
BTH.30.01.04-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	Dinas Pendidikan
BTH.30.01.05-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Kepala Sekolah TU PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas PAUD	Dinas Pendidikan
BTH.30.01.06-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas PAUD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02 Pendidikan Anak Usia Dini	BTH.30.01-Peningkatan Kualitas dan	Dinas Pendidikan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Aksesibilitas PAUD	
BTH.31-	Pendidikan Dasar	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan			Dinas Pendidikan
BTH.31.01-	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar		Dinas Pendidikan
BTH.31.01.01-	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.02-	Penambahan Ruang kelas Baru SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.03-	Pengadaan Mebel Sekolah SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.04-	Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.05-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Kepala Sekolah TU SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.06-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.31.01.07-	Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah SD	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Dasar	BTH.31.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD	Dinas Pendidikan
BTH.32-	Pendidikan Menengah	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan			Dinas Pendidikan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.32.01-	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah		Dinas Pendidikan
BTH.32.01.01-	Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.02-	Penambahan Ruang kelas Baru SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.03-	Pengadaan Mebel Sekolah SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.04-	Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.05-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Kepala Sekolah TU SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.06-	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.32.01.07-	Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah SMP	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Menengah	BTH.32.01-Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMP	Dinas Pendidikan
BTH.33-	Bidang Ketenagakerjaan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01-	Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan		Dinas Tenaga Kerja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.33.01.01-	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.02-	Fasilitasi Job Fair	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.03-	Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.04-	Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.05-	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.06-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.07-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.08-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.09-	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.33.01.10-	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.11-	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.12-	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.13-	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.14-	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.15-	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.16-	Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.33.01.17-	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	BTH.33.01-Peningkatan Kualitas Kompetensi Naker	Dinas Tenaga Kerja
BTH.34-	Pengembangan Pemuda	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.34.01-	Peningkatan Kesejahteraan Pemuda	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.05.02 Pengembangan Pemuda		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.34.01.01-	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.05.02 Pengembangan Pemuda	BTH.34.01-Peningkatan Kesejahteraan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.34.01.02-	Partisipasi Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.05.02 Pengembangan Pemuda	BTH.34.01-Peningkatan Kesejahteraan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.34.01.03-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.05.02 Pengembangan Pemuda	BTH.34.01-Peningkatan Kesejahteraan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.34.01.04-	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Sukarelawan Pemuda	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.05.02 Pengembangan Pemuda	BTH.34.01-Peningkatan Kesejahteraan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.34.01.05-	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	BTH.26.01-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.35.01-	Peningkatan Kesejahteraan Olahraga	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.06.01 Pembudayaan Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.35.01.01-	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.06.01 Pembudayaan Olahraga	BTH.35.01--Peningkatan Kesejahteraan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.35.01.02-	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.06.02 Peningkatan Prestasi Olahraga	BTH.35.01--Peningkatan Kesejahteraan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.35.01.03-	Partisipasi dan Keikutsertaan Penyelenggaraan Kejuaraan	RAB 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05. Pemuda	RAB.06.06.02 Peningkatan Prestasi Olahraga	BTH.35.01--Peningkatan Kesejahteraan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BTH.36-	Sumber Daya Alam dan Ekosistem	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.36.01-	Fasilitasi SDA	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.36.01.01-	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.01-Fasilitasi SDA	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.36.01.02-	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.01-Fasilitasi SDA	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.36.01.03-	Pengelolaan Sumber Daya Alam Energi dan Air	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.01-Fasilitasi SDA	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.36.02-	Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
BTH.36.02.01-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.02-Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah
BTH.36.02.02-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.02-Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah
BTH.36.02.03-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	BTH.36.02-Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.37-	Pelestarian Lingkungan Hidup	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01-	Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.01-	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.02-	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin PPLH	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.03-	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.04-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.05-	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.06-	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.07-	Pembuatan dan Pelaksanaan Klhs Rencana Tata Ruang	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.08-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.37.01.09-	Pemungutan Retribusi Daerah (Pelayanan Persampahan)	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.10-	Penanganan Sampah	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.11-	Pengadaan Belanja Modal Alat Ukur	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.12-	Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.13-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.14-	Pengurangan Sampah	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.37.01.15-	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan	RAB.07. Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	BTH.37.01-Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
BTH.38-	Pembinaan Kepustakaan	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.38.01-	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.38.01.01-	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	BTH.36.01-Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.38.01.02-	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	BTH.36.01-Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39-	Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01-	Pengelolaan Administrasi Umum	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.01-	Penanganan Perkara Gugatan Perdata	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.02-	Tata Usaha Negara	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.03-	Pengadaan Mebel (Belanja Modal)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.04-	Pengelolaan Surat Keluar	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.05-	Pengelolaan Surat Masuk	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.39.01.06-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.07-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Non Tender)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.39.01.08-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Tender)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.09-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.10-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.11-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.12-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Metode Non Tender)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.13-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Metode Tender)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.14-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.15-	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja Jasa)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum
BTH.39.01.16-	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja Modal)	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	BTH.37.01-Pengelolaan Administrasi Umum	Bagian Umum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.40-	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri			Bagian Tata Pemerintahan
BTH.40.01-	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum		Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.40.01.01-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.01-Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.40.01.02-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.01-Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
BTH.40.02-	Pengelolaan Tata Pemerintahan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum		Bagian Tata Pemerintahan
BTH.40.02.01-	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.02-Pengelolaan Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
BTH.40.02.02-	Gaji dan Tunjangan ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.02-Pengelolaan Tata Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.40.02.03-	Penataan Administrasi Pemerintahan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.02-Pengelolaan Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
BTH.40.02.04-	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	BTH.38.02-Pengelolaan Tata Pemerintahan	Bagian Administrasi Pembangunan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.41-	Pemerintahan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri			Bagian Tata Pemerintahan
BTH.41.01-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.04 Pemerintahan Daerah		Bagian Kerjasama
BTH.41.02-	Fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.04 Pemerintahan Daerah		Bagian Kerjasama
BTH.41.03-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.04 Pemerintahan Daerah		Bagian Kerjasama
BTH.42-	Pembinaan Keuangan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.42.01-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.43-	Pembinaan Keuangan Instansi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.43.01-	BPOP KDH dan WKDH	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.01 Pembinaan Keuangan Instansi		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44-	Keuangan Negara	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.01-	Anggaran dan Akuntansi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.02-	Pembukuan dan Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.02.01-	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.02-Pembukuan dan Pengembangan,	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
	Daerah				Evaluasi dan Sistem Informasi	
BTH.44.02.02-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.02-Pembukuan dan Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.02.03-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.02-Pembukuan dan Pengembangan, Evaluasi dan Sistem Informasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.03-	Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.03.01-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.03-Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.03.02-	Penagihan Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.03-Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.03.03-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.03-Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.44.03.04-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.03-Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.44.03.05-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.42.03-Pendataan, Penetapan dan Pelaporan, dan Penagihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45-	perbendaharaan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01-	Pengelolaan Perbendaharaan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01.01-	Penyusunan RKA	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	BTH.43.01-Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01.02-	Penetapan DPA	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	BTH.43.01-Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01.03-	Pembuatan SPD/SPP/SPM	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	BTH.43.01-Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01.04-	Penerbitan SPPD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	BTH.43.01-Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.45.01.05-	Pemindahbukuan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	BTH.43.01-Pengelolaan Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.46-	Keuangan Negara	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.46.01-	Pengelolaan Akuntansi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.46.01.01-	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.44.01-Pengelolaan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.46.01.02-	Penyusunan Laporan Akuntansi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.02 Keuangan Negara	BTH.44.01-Pengelolaan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BTH.47-	Pengadaan dan Manajemen Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01-	Pengelolaan Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01.01-	Pengadaan Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01.02-	Pendistribusian Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01.03-	Pemanfaatan Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01.04-	Pemeliharaan Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.01.05-	Penghapusan Aset	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.02-	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.03-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.04-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.47.05-	Pengelolaan Barang dan Jasa	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.05.01-	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.05-Pengelolaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.47.05.02-	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	BTH.45.05-Pengelolaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
BTH.48-	Pengelolaan Data Statistik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi			Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.48.01-	Pelayanan Statistik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik		Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.48.01.01-	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	BTH.46.01-Pelayanan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.48.01.02-	Membangun Metadata Statistik Sektoral	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	BTH.46.01-Pelayanan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.48.01.03-	Peningkatan Kapasitas SDM Mutu Statistik Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	BTH.46.01-Pelayanan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49-	Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi			Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49.01-	Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik		Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49.01.01-	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	BTH.47.01-Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.49.01.02-	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	BTH.47.01-Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49.01.03-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	BTH.47.01-Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49.01.04-	Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	BTH.47.01-Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.49.01.05-	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	BTH.47.01-Pelayanan Informasi Publik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50-	Pembinaan Komunikasi Regional	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi			Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01-	Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional		Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.01-	Pelaksanaan Konferensi Pers	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.02-	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.03-	Manajemen Komunikasi Krisis	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.04-	Monitoring Informasi Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.50.01.05-	Evaluasi Isu Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.06-	Pelayanan Informasi Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.07-	Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.08-	Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.09-	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.10-	Monitoring Aduan Masyarakat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.50.01.11-	Pengumpulan Pendapat Umum	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.04. Komunikasi	RAB.09.04.01 Pembinaan Komunikasi Regional	BTH.48.01-Pelayanan Komunikasi dan Kehumasan	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.51-	Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional			Sekretariat DPRD
BTH.51.01-	Fasilitasi Administrasi Pembangunan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional		Sekretariat DPRD
BTH.51.01.01-	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.01-Fasilitasi Administrasi Pembangunan	Sekretariat DPRD

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.51.01.02-	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.01-Fasilitas Administrasi Pembangunan	Sekretariat DPRD
BTH.51.02-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional		Sekretariat DPRD
BTH.51.02.01-	Kunjungan Kerja DPRD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.02-	Pembahasan APBD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.03-	Pembahasan KUA - PPAS	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.04-	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.05-	Pembahasan Peraturan Daerah / Produk Hukum	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.06-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.51.02.07-	Pembentukan Peraturan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.08-	Pembentukan Peraturan DPRD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.09-	Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.10-	Penyusunan Naskah Akademik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.11-	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.12-	Rapat Dengar Pendapat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
BTH.51.02.13-	Rapat Paripurna	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.05. Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.52-	Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01-	Bidang Pengembangan Aparatur	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01.01-	Pengelolaan Administrasi Diklat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.01-Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01.02-	Pengelolaan Sertifikasi ASN Pengiriman Peserta Diklat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.01-Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01.03-	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.01-Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01.04-	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.01-Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.01.05-	Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.01-Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.02-	Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.02.01-	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.02-Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.02.02-	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.02-Pengadaan, Pemberhentian,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Informasi dan Fasilitas	
BTH.52.02.03-	Penyusunan Rencana Kebutuhan ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.02-Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.52.02.04-	Pelaksanaan Pengadaan ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	BTH.50.02-Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53-	Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.01-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.02-	Gaji KDH/WKDH	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.03-	Kelembagaan dan Analisa Jabatan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.03.01-	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.03-Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.03.02-	Penataan Kelembagaan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.03-Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.04-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.53.05-	Mutasi dan Promosi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.01-	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.02-	Pengelolaan Mutasi ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.03-	Pengelolaan Mutasi Pindah Keluar PNS	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.04-	Pengelolaan Mutasi Pindah Masuk PNS	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.05-	Pengelolaan Pelantikan Pejabat	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.53.05.06-	Pengelolaan Promosi ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	BTH.51.05-Mutasi dan Promosi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.54-	Akuntabilitas Kinerja	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Bagian Organisasi
BTH.54.01-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja		Bagian Organisasi
BTH.55-	Pembinaan Reformasi Birokrasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Bagian Organisasi
BTH.55.01-	Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi		Bagian Organisasi

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.55.01.01-	Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	BTH.53.01-Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
BTH.56-	Akuntabilitas Kinerja	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.56.01-	Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.56.01.01-	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	BTH.54.01-Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.56.01.02-	Pembinaan Disiplin ASN	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	BTH.54.01-Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.56.01.03-	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	BTH.54.01-Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
BTH.57-	Manajemen Pelayanan Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Bagian Organisasi
BTH.57.01-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik		Bagian Organisasi
BTH.57.01.01-	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.01-Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
BTH.57.01.02-	Penyusunan Laporan SKM	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.01-Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.57.01.03-	Penyusunan Peta Proses Bisnis	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.01-Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
BTH.57.01.04-	Penyusunan SOP	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.01-Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
BTH.57.02-	Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.01-	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.02-	Pengadaan Buku dan Formulir yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.03-	Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.04-	Peningkatan Administrasi Kependudukan Keliling	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.05-	Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.06-	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.07-	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Publik	
BTH.57.02.08-	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.09-	Penyusunan Profil Kependudukan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.57.02.10-	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BTH.58-	Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01-	Penyelenggaraan e-Government	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)		Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.01-	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub-domain	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.02-	Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.03-	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.04-	Pendampingan Pembangunan Aplikasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.58.01.05-	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.06-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.07-	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Komunikasi Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.08-	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.09-	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Penyediaan Jaringan Internet)	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.10-	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Sewa Link CCTV)	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.11-	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.12-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.13-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.58.01.14-	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.58.01.15-	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)	BTH.56.01-Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika
BTH.59-	Kearsipan Nasional	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.59.01-	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.08 Kearsipan Nasional		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.59.01.01-	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.08 Kearsipan Nasional	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.59.01.02-	Penciptaan dan Pembangunan Arsip Dinamis	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.08 Kearsipan Nasional	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.59.01.03-	Pengawasan Arsip Dinamis	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.06. Aparatur Negara	RAB.09.06.08 Kearsipan Nasional	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
BTH.60-	Ketahanan Nasional	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.60.01-	Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.60.01.01-	Fasilitasi Keprotokolan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	BTH.58.01-Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.60.01.02-	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	BTH.58.01-Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.60.01.03-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	BTH.58.01-Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.60.01.04-	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	BTH.58.01-Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.60.01.05-	Reses	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	BTH.58.01-Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
BTH.61-	Pengawasan Pemerintahan	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara			Inspektorat
BTH.61.01-	Pendampingan dan Asistensi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan		Inspektorat
BTH.61.01.01-	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan korupsi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.01-Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
BTH.61.01.02-	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pemberantasan korupsi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.01-Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
BTH.61.01.03-	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.01-Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.61.01.04-	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.01-Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
BTH.61.02-	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan		Inspektorat
BTH.61.02.01-	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.02-Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
BTH.61.02.02-	Pengawasan dengan tujuan tertentu	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.02-Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
BTH.61.03-	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan		Inspektorat
BTH.61.03.01-	Kerjasama pengawasan internal	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
BTH.61.03.02-	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
BTH.61.03.03-	tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
BTH.61.03.04-	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
BTH.61.03.05-	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.07. Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat

3.3. Arsitektur Data

A. Katalog Entitas Data

Data yang dikelola pada SPBE merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari obyek-obyek kerja untuk memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan suatu pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat publik dan memungkinkan bersifat privat. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh OPD di Kota Batam. Selanjutnya daftar data yang ada selaraskan dengan referensi arsitektur data SPBE nasional. Berikut ini disajikan daftar data secara mendetail yang dikelola oleh OPD di Kota Batam.

Tabel 3.3.1 Daftar Data yang dikelola oleh OPD di Kota Batam

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 001	Data Anjab dan ABK	Data Anjab dan ABK	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.51.03.01-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Layanan Anjab dan ABK	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 002	Data Kebutuhan Pegawai	Data Bezetting, Peta Jabatan dan Analisis Jabatan	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.04-Pelaksanaan Pengadaan ASN	Layanan Pengadaan Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 003	Data Cuti	Data Cuti	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Cuti	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 004	Data Gaji dan Tunjangan TPP	Data Gaji dan Tunjangan	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.38.02.02-Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan Pengelolaan Gaji ASN (PNS dan PPPK)	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 005	Data Hukuman Disiplin	Data Hukuman Disiplin	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.02-Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Hukuman Disiplin	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 006	Data Jabatan	Data Informasi Kepegawaian (Pendidikan, Kompetensi, Rekam Jejak)	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.51.03.01-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Layanan Administrasi ASN dan Honorer	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 007	Data Jumlah Diklat	Data Jumlah Diklat	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.01.04-Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	Layanan Diklat Teknis/Fungsional	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 008	Data Kartu Identitas Pegawai	Data Kartu Identitas Pegawai	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Kartu Identitas Pegawai ASN	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 009	Data Kartu Identitas Suami/Istri	Data Kartu Identitas Suami/Istri	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Kartu Identitas Suami/Istri	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 010	Data Kehadiran Pegawai/Data Disiplin Pegawai	Data Kehadiran Pegawai/Data Disiplin Pegawai	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.02-Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Kehadiran Pegawai/Data Disiplin Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 011	Data Kenaikan Pangkat	Data Kenaikan Pangkat ASN	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.51.05.01-Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Pangkat	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 012	Data Profil Pegawai	Data Kepegawaian	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Kepegawaian	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 013	Data Modul Penerimaan Negara	Data Iuran Wajib Pegawai (1%, 4%, dan 8%)	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.38.02.02-Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan Pengelolaan Gaji ASN (PNS dan PPPK)	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 014	Data Pencetakan Badge Pegawai	Data Pencetakan Badge Pegawai	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.01-Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Layanan Pencetakan Badge Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 015	Data Pengadaan Pegawai	Data Pengadaan Pegawai	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.04-Pelaksanaan Pengadaan ASN	Layanan Pengadaan Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 016	Data Penghargaan	Data Penghargaan	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.03-Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Layanan Penghargaan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 017	Data Penilaian Kinerja Pegawai	Data Penilaian Kinerja Pegawai	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Penilaian Kinerja Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 018	Data Pensiun Pegawai	Data Pensiun Pegawai	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Pensiun	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 019	Data SK dan Perjanjian Kerja	Data SK dan Perjanjian Kerja	Terbatas	Teks	Tahunan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.01-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Layanan Penilaian Kinerja Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 020	Data Tabungan atau Asuransi (TASPEN)	Data Tabungan atau Asuransi (TASPEN)	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Asuransi dan Tunjangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 021	Data Tugas Belajar	Data Tugas Belajar	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.01.03-Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 022	Data Ormas tidak berbadan hukum	Data informasi organisasi masyarakat yang	Terbuka	Teks	Enam Bulanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.01.01.10-Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Layanan Pendaftaran Ormas	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		tidak berbadan hukum								
Data 023	Data Pengajuan Laporan Masyarakat	Data Laporan Keluhan dan Tanggapan Masyarakat	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03. Data Informasi
Data 024	Data Alat Rekam Pajak	Data Alat Rekam Pajak	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.05-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Layanan Pajak Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 025	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Data Pendapatan Daerah (PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah) Data Belanja Daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga) Data Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.01-Anggaran dan Akuntansi	Layanan Anggaran/Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 026	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Data Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, MBLB, Reklame, PPJ	Tertutup	Teks	Bulanan	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.02.01-Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Layanan Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk Wajib Retribusi (untuk yang baru	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
								maupun yang lama) baik untuk pelatihan dan pengecekan berkala		
Data 027	Data Pembayaran Pajak	Data Pembayaran Pajak	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.02-Pengagihan Pajak Daerah	Layanan Pajak Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 028	Data Piutang Pajak	Data Piutang Pajak	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.05-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 029	Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.05-Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 030	Data Realisasi Pendapatan	Data Realisasi Pendapatan	Terbuka	Teks	Harian	Badan Pendapatan Daerah	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 031	Data Pengajuan SPP, SPM, SPJ	Data Pengajuan SPP, SPM, SPJ	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.43.01.03-Pembuatan	Layanan pencairan anggaran (SPP,	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							SPD/SPP/SPM	SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Pengujian)		
Data 032	Data Anggaran / Keuangan	Data Keuangan Daerah	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.42.01-Anggaran dan Akuntansi	Layanan Anggaran/Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 033	Data Aset / Barang Milik daerah	Data Aset / Barang Milik daerah	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01.04-Pemeliharaan Aset	Layanan Aset Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 034	Data E-Billing Pembayaran Pajak	Data E-Billing Pembayaran Pajak	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.42.03.02-Pengagihan Pajak Daerah	Layanan Pajak Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 035	Data Iuran Wajib Pegawai (BPJS)	Pembayaran BPJS	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 036	Data Kendaraan Milik Daerah	Data Identitas Kendaraan, Masa Berlaku STNK dan Pajak, dan Pengguna Kendaraan	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01.04-Pemeliharaan Aset	Layanan Aset Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 037	Data Rencana Barang Milik Daerah	Data Rencana Barang Milik Daerah	Terbuka	Teks	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01.01-Pengadaan Aset	Layanan Aset Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 038	Data Laporan DAK Fisik	Data Anggaran DAK Fisik	Terbuka	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 039	Data Laporan DAK Non Fisik	Data Anggaran BOKB	Terbuka	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 040	Data Pengajuan Ganti Uang	Data Pengajuan Ganti Uang	Tertutup	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 041	Data Persediaan Barang dan Jasa	Data Persediaan Barang dan Jasa / Aset	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.05-Pengelolaan Barang dan Jasa	Layanan Penatausahaan Barang Persediaan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 042	Data Persediaan Barang Habis Pakai dan Stok	Data Persediaan Barang Habis Pakai dan Stok	Terbatas	Teks	Tiga Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Penatausahaan Barang	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 043	Data Pertanggungjawaban BLUD	Data Pertanggungjawaban BLUD	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.12.01.01-Pembinaan BLUD		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 044	Data Pertanggungjawaban/Keuangan	Data Pertanggungjawaban/Keuangan	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.44.01.02-Penyusunan Laporan Akuntansi	Layanan Laporan Fisik dan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 045	Data Rekonsiliasi	Data Rekonsiliasi ganti uang (GU), tambah uang (TU) dan belanja bulanan	Terbatas	Teks	Realtime	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Rekonsiliasi	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 046	Data RKBMD Dan RKPBM	Data RKBMD dan RKPBM	Terbatas/Tertutup	Teks	Tiga Bulanan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01-Pengelolaan Aset	Layanan Aset Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data 047	Data Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	Data Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	Terbatas	Teks	Bulanan	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah		Layanan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data 048	Data Perencanaan Program, Anggaran dan Kegiatan	Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik	Terbatas	Teks	Harian	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 049	Data Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Data Rencana Strategis, Data RKPD dan Rencana Kerja Anggaran	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	BTH.16.01.08-Penyusunan Dokumen RENJA	Layanan Perencanaan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data 050	Data Tokoh Agama	Data Tokoh Agama penerima insentif dari IPIM, PMB, IPMB dan BMGQ	Terbuka	Teks	Tiga Bulanan	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Layanan Pemberian Insentif Kepada Tokoh Agama (Mubaligh, Imam, dan Guru TPQ)	RAD.08. Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.01. Data Agama
Data 051	Data Produk Hukum	<i>Perda, Perwako, MoU, Perjanjian Kerjasama, Putusan PN/TUN, Artikel, Jurnal, Majalah, E-Kliping dll</i>	Terbuka	Teks	Tiga Bulanan	Bagian Hukum	BTH.49.02.05-Pembahasan Peraturan Daerah / Produk Hukum	Layanan Informasi Produk Hukum	RAD.05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01. Data Hukum
Data 052	Data Program Usulan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Data Program Usulan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terbatas	Teks	Harian	Bagian Kerjasama	BTH.34.01.02-Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Layanan Usulan Rekonsiliasi Bulanan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data 053	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Organisasi	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 054	Data Evaluasi Jabatan	Data Evaluasi Jabatan	Terbuka	Teks	Realtime	Bagian Organisasi	BTH.51.03.01-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Layanan Penilaian Kinerja Pegawai	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 055	Data Evaluasi Kelembagaan	Hasil evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja seluruh Perangkat	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Organisasi	BTH.51.03.01-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Layanan Evaluasi Kelembagaan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		Daerah sesuai dengan Tipologi Perangkat Daerahnya								
Data 056	Data Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Terkait dengan IKM, Sebanyak minimal 150 responden berupa pendapat, pengalaman serta respon terhadap 9 indikator penilaian seperti, sarana prasarana, harga, keramah tamahan, standar pelayanan maupun integritas dan ketersediaan kotak saran	Terbuka	Teks	Realtime	Bagian Organisasi	BTH.54.01.01-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Layanan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 057	Data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Data KIPP terkait dengan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 79 Tahun 2012	Terbuka	Teks	Enam Bulanan	Bagian Organisasi	BTH.55.01.01-Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 058	Data Laporan Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan	Laporan Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terbatas/Tertutup	Teks	Tahunan	Bagian Organisasi	BTH.53.01-Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Reformasi Birokrasi									
Data 059	Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Organisasi	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan Anggaran	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 060	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terkait dengan Data PMPRB, pelaksanaan indeks RB yang terkait dengan 8 area perubahan, baik tingkat Kota (Pusat) maupun Unit (Perangkat Daerah)	Terbuka	Teks	Bulanan	Bagian Organisasi	BTH.53.01.01-Penyusunan Roadmap dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Layanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 061	Data Perwako yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi	Data Perwako yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Organisasi	BTH.01.01.04-Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 062	Data Proses Bisnis dan SOP	Data Proses Bisnis dan SOP	Terbuka	Teks	Realtime	Bagian Organisasi	BTH.55.01.03-Penyusunan Peta Proses Bisnis	Layanan Proses Bisnis dan SOP	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 063	Data SOTK Organisasi Perangkat Daerah	<i>Data SOTK Organisasi Perangkat Daerah</i>	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Organisasi	BTH.39.01-Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Pembangunan: Dashboard Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 064	Data Unit Layanan Publik	Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pemberian	Terbuka	Teks	Harian	Bagian Organisasi	BTH.55.02-Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik	Layanan Informasi Publik	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		pelayanan publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Batam								
Data 065	Data Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Organisasi	BTH.51.01-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Layanan Evaluasi Kelembagaan	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.01. Data Kebijakan Pemerintah
Data 066	Data Laporan Rencana Umum Pengadaan	Dokumen Laporan	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Rencana Umum Pengadaan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 067	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Data capaian realisasi pengadaan barang dan jasa dan data capaian realisasi paket pekerjaan (fisik dan keuangan)	Terbuka	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 068	Data Pelaksanaan Paket Belanja Kegiatan	Paket Belanja Penyedia/SwaKelola, KAK, Kontrak, SP2D dan Bukti Pengadaan	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.50.02.04-Pelaksanaan Pengadaan ASN	Layanan Pengadaan Pegawai	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 069	Data Pemaketan Tender/Seleksi	Data Pemaketan Tender/Seleksi	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.01.01-Pengadaan Aset	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 070	Data Penggunaan Produk Dalam Negeri	Data Barang dan Jasa	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.01.01-Pengadaan Aset	Layanan Aset Daerah	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 071	Data Realisasi P3DN	Data Realisasi P3DN	Terbatas	Teks	Tiga Bulanan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan Konsultasi P3DN	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 072	Data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 073	Data Vendor Tender/Seleksi	Data Vendor Tender/Seleksi	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 074	Data Paket Penyedia Dan Realisasi Paket Produk Dalam Negeri	Data Paket Penyedia Dan Realisasi Paket Produk Dalam Negeri	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 075	Data Paket Penyedia, Swakelola Dan Realisasi Paket	Data Paket Penyedia, Swakelola Dan Realisasi Paket	Tertutup	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 076	Data Kinerja Penyedia	Data Kinerja Penyedia	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 077	Data Katalog Barang dan Jasa	Data Katalog Barang dan Jasa	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 078	Data Paket Pekerjaan	Data Paket Penyedia dan Data Paket SwaKelola	Terbatas/Tertutup	Teks		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.14-pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum		RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 079	Data Pencairan Anggaran	Data SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, DP	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 080	Data Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Data Anggaran / Keuangan dan Aset Daerah	Tertutup	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.58.01-Fasilitas Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 081	Data Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, RENJA)	Data Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.16.01.11-Penyusunan Dokumen RPJPD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 082	Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal	Data Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal	Terbatas	Teks	Tahunan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.34.02.01-Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Layanan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 083	Data Layanan Rekon BAST Belanja Modal	Data Layanan Rekon Bast Belanja Modal	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Layanan Rekon Bast Belanja Modal	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 084	Data Monitoring dan Evaluasi	Data Perencanaan Anggaran/Keuangan Daerah	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.49.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan	Layanan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Perencanaan dan Keuangan						Perangkat Daerah			
Data 085	Data Pelimpahan Bendahara Pengeluaran ke BPP	Data Pelimpahan Bendahara Pengeluaran ke BPP	Tertutup	Teks	Tiga Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 086	Data Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Data Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Tertutup	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 087	Data Pengelolaan Anggaran	Data Pengelolaan Anggaran	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.42.01-Anggaran dan Akuntansi	Layanan Akuntansi dan Pelaporan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 088	Data Realisasi Fisik Keuangan	Data Realisasi Fisik Keuangan	Tertutup	Teks	Realtime	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.51.04-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Layanan Realisasi Fisik dan Keuangan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02. Data Keuangan
Data 089	Data Pemantauan Kegiatan DAK Non Fisik	Pemantauan anggaran DAK	Terbatas	Teks	Realtime	Bagian Perencanaan dan Keuangan			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional
Data 090	Data Rekap Kunjungan ke Setdako	Data Rekap Kunjungan ke Setdako	Terbuka	Teks	Tahunan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BTH.58.01.02-Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.02. Data Manajemen Kegiatan
Data 091	Data Laporan Kegiatan Kecamatan	Data Laporan Kegiatan Kecamatan	Terbatas	Teks	Bulanan	Bagian Tata Pemerintahan	BTH.58.01.02-Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.02. Data Manajemen Kegiatan
Data 092	Data Laporan Penyelenggaraan	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terbatas/Tertutup	Teks	Tahunan	Bagian Tata Pemerintahan	BTH.16.01.02-Penelitian, Pengembangan		RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.02. Data Manajemen Kegiatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Pemerintah Daerah (LPPD)						Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Data 093	Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Data Laporan Standar Pelayanan Minimal	Terbatas/Tertutup	Teks	Tahunan	Bagian Tata Pemerintahan	BTH.43.01.03-Pembuatan SPD/SPP/SPM	Layanan pencairan anggaran (SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Penguji)	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 094	Data Drainase	Data Penanganan Titik Banjir, data Panjang Drainase	-	Teks	Tiga Bulanan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.14.02.12-Pembangunan sistem drainase perkotaan		RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 095	Data Jalan	Data Kondisi Jalan, Data Dasar Prasarana Jalan	Terbatas/Tertutup	Teks		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	BTH.14.02.15-Pemeliharaan rutin jalan	Layanan Pengaduan Jalan Rusak	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 096	Data Laporan Kegiatan PJU	Laporan Kegiatan Bidang PJU	Terbatas	Teks	Tiga Bulanan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 097	Data Penerangan Jalan Umum	Data Titik Tiang Lampu PJU, Data Panjang Jaringan PJU, Data SMS Center Pengaduan PJU	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 098	Data Pengaduan Banjir	Data Pengaduan Banjir	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	BTH.14.02.03-Operasi dan pemeliharaan kanal banjir	Layanan Pengaduan Banjir	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 099	Data Pengaduan Jalan Rusak	Data Pengaduan Jalan Rusak	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	BTH.14.02.29-Rekonstruksi jalan	Layanan Pengaduan Jalan Rusak	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 100	Data Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Data Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 101	Data Peralatan dan Pengujian Alat Berat	Data Kondisi Alat Berat dan Data Pengujian	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air			RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 102	Data Lokasi Kota Batam	Data Lokasi Kota Batam	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)			RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 103	Data Air Bersih dan Sanitasi	Data SR (Sambungan Rumah), Data Penambahan WTP dan Penambahan Sambungan Rumah	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 104	Data Bangunan Gedung dan Menara	Data Bangunan Gedung dan Menara	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 105	Data Bina Konstruksi	Data Informasi Jasa Konstruksi di Kota Batam	Terbatas, Terbuka	Teks		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.14.02.18-Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi	Layanan Bina Konstruksi	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 106	Data Pelanggan Air Bersih	Data pelanggan /pendapatan air	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 107	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 108	Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	BERITA ACARA FORUM PENATAAN RUANG (Data Pemohon, Dasar Hukum Pelaksanaan, Dasar Hukum Tata Ruang, Substansi Teknis, Hasil Kajian Tata Ruang dan Kesepakatan Peserta Rapat)	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.19.01-Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 109	Data Prasarana Bangunan Gedung	Data Prasarana Bangunan Gedung		Teks	Realtime	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 110	Data Tata Ruang	Data Tata Ruang		Teks		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.35.01.07-Pembuatan dan Pelaksanaan Klhs Rencana Tata Ruang		RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 111	Data UPT Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara	Data UPT Pengawasan Pengendalian Bangunan Gedung dan Menara		Teks		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		Layanan Pengawasan Menara dan bangunan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 112	Data Monitoring dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Air bersih dan Air Limbah	Data Monitoring dan Data Pelaporan	Terbatas	Teks		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 113	Data Pengajuan Usulan Kerja Air Bersih dan Air Limbah	Data Usulan Rencana Kegiatan DAK	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum
Data 114	Data Destinasi Wisata	Data Destinasi Wisata	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kota Batam	Layanan Informasi Destinasi Wisata	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11. Data Pariwisata
Data 115	Data Hotel / Penginapan	Data Hotel / Penginapan	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kota Batam		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11. Data Pariwisata
Data 116	Data Koleksi Museum	Data Koleksi Museum	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kota Batam	Layanan Informasi Koleksi Bersejarah dan Pengunjung Museum Raja Ali Haji	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11. Data Pariwisata
Data 117	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kota Batam	Layanan Informasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11. Data Pariwisata
Data 118	Data Pelaku Ekonomi Kreatif	Data Pelaku Ekonomi Kreatif	Terbuka	Teks	Tiga Bulanan	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kota Batam	Layanan Informasi Pelaku Ekonomi Kreatif	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11. Data Pariwisata
Data 119	Data Atlet Berprestasi	Data Atlet Berprestasi		Teks	Tahunan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.21-Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	Layanan Rekomendasi Atlet Berprestasi	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05. Data Olahraga

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 120	Data Peminjaman Sarana Kepemudaan (Ruang Serbaguna Gedung Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	Data Peminjaman Sarana Kepemudaan (Ruang Serbaguna Gedung Dinas Kepemudaan dan Olahraga)		Teks		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.11-Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Layanan Peminjaman Sarana Kepemudaan (Ruang Serbaguna Gedung Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04. Data Pemuda
Data 121	Data Peminjaman Sarana Kepramukaan (Bumi Perkemahan)	Data Peminjaman Sarana Kepramukaan (Bumi Perkemahan)		Teks		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.06-Partisipasi Keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	Layanan Peminjaman Sarana Kepramukaan (Bumi Perkemahan)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04. Data Pemuda
Data 122	Data Peminjaman Sarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki ,GOR)	Data Peminjaman Sarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki ,GOR)		Teks		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.03-Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Layanan Peminjaman Sarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki ,GOR)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05. Data Olahraga
Data 123	Data Purna Paskibraka	Data Purna Paskibraka		Teks		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.11-Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Layanan Seleksi Paskibraka	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.04. Data Pemuda
Data 124	Data Sarana Prasarana Olahraga	Data Sarana Prasarana Olahraga		Teks		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.03-Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Layanan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05. Data Olahraga
Data 125	Data Kependudukan	Data Kependudukan	Terbatas	Teks		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BTH.55.02.10-Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07. Data Kependudukan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 126	Data Fasilitas Kesehatan	Data Fasilitas Kesehatan	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 127	Data Aksi P4GN	Data Aksi P4GN	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 128	Data Bantuan Kesehatan Daerah	a. Data Peserta JKN PBPU-BP Pemda b. Data Penerima Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan c. Data Penerima Bantuan Rujukan	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Kesehatan		Layanan Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda)	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 129	Data Capaian Vaksinasi Covid19	Data Capaian Vaksinasi Covid19	Terbatas	Teks	Tiga Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Vaksinasi	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 130	Data Dahak	Data Dahak	Terbatas/Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.08-Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 131	Data Deteksi Dini NAPZA	Data Deteksi Dini NAPZA	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan		Layanan Deteksi Dini Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 132	Data Entry Layanan KB	Data Entry Layanan KB	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan		Layanan KB Gratis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 133	Data Gizi	Entry Data berat badan dan tinggi	Terbatas/Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.16-Pengelolaan Pelayanan	Layanan Gizi	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		badan bayi, balita setiap bulan					Kesehatan Gizi Masyarakat			
Data 134	Data Hasil Swab Antigen Covid19	Data Hasil Swab Antigen Covid19	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Tracking Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 135	Data Hasil Swab PCR Covid19	Data Hasil Swab PCR Covid19	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Tracking Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 136	Data HIV dan AIDS	Data HIV dan AIDS	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.07-Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Layanan HIV & AIDS	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 137	Data Ibu Hamil dan Melahirkan	Data Ibu Hamil dan Melahirkan	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.05-Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 138	Data Imunisasi Dasar dan Rutin	Data Imunisasi Dasar dan Rutin	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.01-Pelaksanaan kesehatan Bayi Baru Lahir	Layanan Imunisasi Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 139	Data Imunisasi, Vaksinasi, P2PTM dan Pencegahan Penyakit	Data Imunisasi, Vaksinasi, P2PTM dan Pencegahan Penyakit	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.23.01.03-Pengadaan obat dan vaksin	Layanan Imunisasi Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 140	Data Kasus Covid19	Data Kasus Covid19	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 141	Data Kegiatan Program P2PTM	Data Kegiatan Program P2PTM	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 142	Data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.01-Pelaksanaan kesehatan Bayi Baru Lahir	Layanan Imunisasi Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 143	Data Keluarga Sehat	Program indonesia dengan pendekatan keluarga melihat 12 indikator keluarga sehat	Terbatas/Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan		Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 144	Data Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Data Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 145	Data Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Data Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 146	Data Kontak Erat Kasus Covid19	Data Kontak Erat Kasus Covid19	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Tracking Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 147	Data Limbah Medis	Data Limbah Medis	Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Pengolahan Limbah Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 148	Data Monitoring Kasus Covid19	Data Monitoring Kasus Covid19	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 149	Data Pasien Penyakit Tidak menular	Data Pasien Penyakit Tidak menular	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 150	Data Pasien TB	Data Pasien TB	Terbatas/Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.08-Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Layanan Tuberkulosis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 151	Data Pasien Rawat Inap	Data Pasien Rawat Inap	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 152	Data Pengawasan Kualitas Air Minum	Data Pengawasan Kualitas Air Minum	Tertutup	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 153	Data Penyakit bersumber Vektor dan Zoonotic	Data penyakit bersumber vektor dan zoonotic	Terbatas/Tertutup	Teks		Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 154	Data Penyakit Frambusia	Data Penyakit Frambusia	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 155	Data Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Data Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Terbatas/Tertutup	Teks		Dinas Kesehatan	BTH.23.01.03-Pengadaan obat dan vaksin	Layanan Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 156	Data Record Vaksin Covid-19	Data Record Vaksin Covid-19	Terbatas/Tertutup	Teks		Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 157	Data Rekomendasi Perizinan SDM Kesehatan	Data Rekomendasi Perizinan Bidang Sumber Daya Kesehatan Kota Batam	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.01-Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 158	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.25.02-Penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi tempat pengelolaan	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							makanan(TPM)			
Data 159	Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Data sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.23.01.01-Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 160	Data SDM Kesehatan	Sistem informasi SDM meliputi pemetaan keadaan SDM, Perencanaan, pendayagunaan, pengadaan SDM dan Peningkatan Mutu	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.01-Pemberian izin praktik tenaga kesehatan	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 161	Data Sistem Manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas	Data Sistem Manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 162	Data Supervisi Pelaksanaan Covid19	Data Supervisi Pelaksanaan Covid19	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 163	Data Tuberkulosis	Data Tuberkulosis	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.08-Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Layanan Tuberkulosis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 164	Data Tracking Covid-19	Data Tracking Covid-19	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Tracking Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 165	Data Surveilans	Data Surveilans	Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 166	Data Tempat Fasilitas Umum	Data Tempat Fasilitas Umum	Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 167	Data Pengolah Makan	Data Pengolah Makan	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 168	Data Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	Data Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 169	Data Malaria	Data Malaria	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Layanan Laporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 170	Data Logistik Vaksin Covid-19	Logistik Vaksin Covid-19	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Covid-19	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 171	Data BPJS	Data BPJS	Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 172	Data Imunisasi Bayi dan Balita	Data Imunisasi Bayi dan Balita	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.01-Pelaksanaan kesehatan Bayi Baru Lahir	Layanan Imunisasi Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 173	Data Kesehatan Ibu dan Anak	Data Kesehatan Ibu dan Anak	Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.04-Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Layanan Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 174	Data Kesehatan Kerja dan Olahraga	Data Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 175	Data Kesehatan Haji	Data Kesehatan Haji	Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 176	Data Gizi Balita	Status Gizi Balita, Data cakupan vitamin A	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.16-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Layanan Gizi	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 177	Data Harga Produksi Pertanian	Data Harga Produksi Pertanian	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Layanan Harga Produksi Pertanian	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 178	Data Kelembagaan Pertanian	Data Kelembagaan Pertanian	Terbuka	Teks	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Layanan Informasi Kelembagaan Pertanian	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 179	Data Kesehatan Hewan Veteriner	Data Kesehatan Hewan Veteriner	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.06-Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Layanan Kesehatan hewan veteriner	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 180	Data Pembayaran Non Tunai	Data Pembayaran Non Tunai Retribusi	Terbuka	Teks	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Layanan Pembayaran Non Tunai (Penebusan Pupuk Subsidi)	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 181	Data Produksi Pertanian	Data Produksi Pertanian BPP Belakang Padang	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Layanan Informasi Produksi Pertanian	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 182	Data Statistik Pertanian	Data Statistik Pertanian	Terbuka	Teks	Mingguan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Layanan Informasi Produksi Pertanian	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 183	Data Pemetaan lahan Pertanian	Data Pemetaan lahan Pertanian	Terbuka	Teks	Bulanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian
Data 184	Data Aplikasi	Data Aplikasi yang dibuat dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.03-Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	Layanan Inventarisasi Aplikasi	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 185	Data Laporan Gawat Darurat	Data laporan gawat darurat yang disampaikan masyarakat	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Gawat Darurat	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 186	Data Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat	Data Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat	Layanan Publik Pengaduan Masyarakat	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 187	Data layanan kamera pengawas CCTV	Data penyelenggaraan layanan CCTV yang terdiri dari jumlah titik kamera, jumlah	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.10-Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Sewa Link	Layanan Informasi dan Permintaan Rekaman CCTV	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		perangkat yang digunakan dan monitoring trafik serta status CCTV setiap titik					CCTV)			
Data 188	Data Pelaksanaan Video Conference dan live streaming	Jumlah pelaksanaan fasilitasi Video Conference dan Live Streaming sesuai dengan permintaan Pimpinan dan OPD	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.49.02.11-Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Layanan Fasilitas Video Conference pimpinan dan Live Streaming OPD	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 189	Data Pemohon Rekaman	Data masyarakat/aparat hukum yang meminta rekaman CCTV	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 190	Data Penerbitan Sertifikat Elektronik	Data Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Sertifikat Elektronik	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 191	Data Permohonan Informasi	Data dan informasi yang diminta oleh masyarakat	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 192	Data Sektoral	Kompilasi Data Statistik Sektoral sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.46.01.02-Membangun Metadata Statistik Sektoral	Layanan Data Statistik Sektoral	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 193	Data Server	Jumlah server milik Dinas Komunikasi	Terbatas	Teks	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Ruang server (penitipan)	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
		dan Informatika dan yang dititipkan di ruang server						server dan aplikasi)		
Data 194	Data Subdomain	Data subdomain yang digunakan untuk website atau aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.02-Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain	Layanan Pembuatan Sub Domain	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 195	Data Trafik Internet	Data penggunaan internet setiap OPD yang terhubung dengan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.09-Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Penyediaan Jaringan Internet	Layanan internet Pemerintah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 196	Data Layanan Konsultasi TIK	Data Layanan Konsultasi TIK	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Pengelolaan IT Support	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 197	Data Pengetahuan	Data Pengetahuan	Terbuka	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Data Statistik Sektoral	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 198	Data Email	Data Email	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 199	Data SMS Gateway	Data SMS Gateway	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan SMS Gateway	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 200	Data Jaringan	Data Jaringan	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Jaringan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 201	Data SPBE	Data SPBE	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 202	Data Media	Data Media	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 203	Data Dokumen	Data Dokumen	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 204	Data Projek	Data Projek	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 205	Data Berita dan Informasi	Data Berita dan Informasi	Terbuka	Teks	Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika		Layanan Data Statistik Sektoral	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 206	Data Koperasi dan UMKM	Data Koperasi dan UMKM	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	BTH.11.01-Pertumbuhan UMKM	Layanan Permintaan Data Usaha Mikro/Koperasi	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 207	Data Manajemen Blanko	Data Manajemen Blanko	Terbatas	Teks	Harian/Bulanan/Tahunan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 208	Data Informasi Dinas	Data Informasi Dinas	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03. Data Informasi
Data 209	Data Informasi Inovasi Nasional	Data Informasi Inovasi Nasional	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03. Data Informasi
Data 210	Data Informasi Pasar Rakyat	Data Informasi Pasar Rakyat	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 211	Data Informasi Pelaporan Peserta	Data Informasi Pelaporan Peserta	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 212	Data Pelaporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Data Pelaporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 213	Data Pelaporan Tera Tera Ulang	Data Pelaporan Tera Tera Ulang dan	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Layanan Tera/Tera Ulang	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	dan Pengawasan Daerah	Pengawasan Daerah								
Data 214	Data Pembayaran Pajak dan Transaksi Bendahara	Data Pembayaran Pajak dan Transaksi Bendahara	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 215	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Tera Tera Ulang	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Tera Tera Ulang	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 216	Data Verifikasi SKA	Data Verifikasi SKA	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		Layanan Surat Keterangan Asal (SKA)	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi
Data 217	Data Pengelolaan Lingkungan dan Penilaian AMDAL	Data Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan, Data Upaya Pemantauan Lingkungan, Data Penilaian Amdal		Teks	Realtime	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.01-Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Layanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Penilaian Amdal	RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup
Data 218	Data Pengaduan Persampahan			Teks	Harian	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.10-Penganganan Sampah	Layanan Pengaduan Persampahan	RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup
Data 219	Data Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan	Data Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan		Teks		Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.01-Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan		RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan					Kewajiban Izin Lingkungan			
Data 220	Data Pos Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Pelaporan Persetujuan Lingkungan, Status Lingkungan Hidup, Status Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Teks		Dinas Lingkungan Hidup			RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup
Data 221	Data Retribusi Persampahan	Data Retribusi Persampahan		Teks	Enam Bulanan	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.10-Penganganan Sampah	Layanan Retribusi Persampahan	RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup
Data 222	Data GPS Mobil Damkar		Terbatas	Teks		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial
Data 223	Data Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan (Call Center Terpadu)		Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial
Data 224	Data Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk Wajib Retribusi (untuk yang baru maupun yang	Data Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk Wajib Retribusi (untuk yang baru maupun yang lama) baik untuk pelatihan	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	lama) baik untuk pelatihan dan pengecekan berkala	dan pengecekan berkala								
Data 225	Data Titik Kebakaran	Data Titik Kebakaran	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial
Data 226	Data Stunting	Data Stunting	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.22.01-Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Layanan Stunting	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial
Data 227	Data Alat Obat dan Kontrasepsi (Alokon)	Data Akseptor	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Layanan KB Gratis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 228	Data Forum anak	Data Forum anak Se Kota Batam	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 229	Data Gender, Disabilitas	Data Gender, Disabilitas	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.33.01.14-Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 230	Data Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Data Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Terbatas	Teks		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak:	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 231	Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Terbatas	Teks	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 232	Data Organisasi Perempuan	Data Organisasi Perempuan yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Perempuan Kota Batam		Teks	Harian, Bulanan, Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk		RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 233	Data Pelayanan KB	Data Pelayanan KB	Terbuka	Teks		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Layanan KB Gratis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 234	Data Pelayanan Keluarga	Data Pelapor dalam Layanan Puspaga	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.26.01.18-Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 235	Data Pemilahan PUG	Jumlah Peserta yang terlatih dalam Pelatihan pada lingkup Dinas P3APKB		Teks	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 236	Data Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan	Data Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan	Terbatas	Teks		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 237	Data Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah		Teks	Bulanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 238	Data Terpilah Gender dan Anak	Data OPD, Kecamatan, Instansi Vertikal	Terbatas	Teks		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 239	Data Keluarga KB	Data Keluarga KB	Terbatas	Teks	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.26.01.18-Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Layanan KB Gratis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 240	Data Stok Gudang	Data Stok Gudang	Terbatas	Teks	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan
Data 241	Data Online Sistem Substitution Risk	Data Online Sistem Substitution Risk	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	BTH.08.01.04-Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08. Data Investasi
Data 242	Data Perizinan dan Non Perizinan	Data perizinan dan non perizinan	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu		Layanan Perizinan Online	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08. Data Investasi
Data 243	Data Peserta Didik Baru	Data Penerimaan Siswa Baru (PPDB)	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Pendidikan		Layanan Peserta Didik Baru	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01. Data Pendidikan
Data 244	Data Peserta Didik	Data Peserta Didik	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Pendidikan		Layanan Peserta Didik Baru	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01. Data Pendidikan
Data 245	Data Perencanaan BOS	Data Perencanaan BOS	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Pendidikan			RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01. Data Pendidikan
Data 246	Data Streaming ATCS	Data Informasi ATCS(Area Traffic Control System)	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perhubungan		Layanan ATCS(Area Traffic Control System)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi
Data 247	Data Uji Kendaraan Bermotor	Data Uji Kendaraan Bermotor	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Perhubungan		Layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi
Data 248	Data dan Informasi Produk Perikanan	Data Jumlah Produksi Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Layanan Pembinaan Pemasar Produk Perikanan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 249	Data Jenis Alat Tangkap	Data Jenis Alat Tangkap	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 250	Data Luas Lahan Budidaya	Data Jumlah Luas Lahan Budidaya	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.04.01.07-Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 251	Data Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan KUSUKA	Data Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan yang Terdaftar KUSUKA	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 252	Data Pembudidaya KUSUKA	Data Jumlah Pembudidaya yang Terdaftar KUSUKA	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Layanan Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 253	Data Jumlah Produksi Budidaya	Data Jumlah Produksi Budidaya	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 254	Data Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	Data Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.04.01.07-Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 255	Data Jumlah Surat/Rekomendasi Usaha Skala Kecil	Data Surat/Rekomendasi Baru		Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 256	Data Jumlah UPI (Unit Pengolah Ikan)	Data Jumlah UPI (Unit Pengolah Ikan)	Terbatas	Teks		Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 257	Data Kelompok Perikanan (KUB, POKDAKAN, dan POKLAHSAR)	Data Jumlah Kelompok yang Terdaftar di Dinas Perikanan	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 258	Data Perikanan Budidaya	Data Jumlah RTP Budidaya	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Perikanan	BTH.04.01.07-Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 259	Data Perikanan Tangkap	Data Rumah Tangga Perikanan	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.07.01.03-Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Layanan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 260	Data Produksi Tangkap	Data Produksi Tangkap	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Layanan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan
Data 261	Data Surat Keterangan Asal	Data Surat Keterangan Asal	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BTH.33.01.15-Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Layanan Pembinaan Hubungan Industrial	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01. Data Industri

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 262	Data Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok	Data Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok	Terbatas	Teks	Enam Bulanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01. Data Industri
Data 263	Data Pendapatan Konsumen Bio solar Subsidi	Data Pendapatan Konsumen Bio solar Subsidi	Terbatas	Teks	Realtime	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01. Data Industri
Data 264	Data Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Data Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 265	Data Kearsipan	Data Kearsipan	Terbatas	Teks	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 266	Data Kode Klasifikasi Arsip	Data Kode Klasifikasi Arsip	Terbuka	Teks	Harian/Bulan an/Tahunan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 267	Data Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)	Data Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)	Terbuka	Teks	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.57.01-Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah		RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 268	Data Surat Masuk dan Surat Keluar	Data Surat masuk, Surat Keluar, Disposisi, Tindak Lanjut dan Arsiparis Badan	Terbatas/Tertutup	Teks	Harian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.37.01.05-Pengelolaan Surat Masuk	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 269	Data Tata Naskah Dinas	Data Tata Naskah Dinas	Terbuka	Teks	Realtime	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 270	Data Lahan Prasarana Sarana			Teks	Harian	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan	BTH.17.01.05-Penyediaan Prasarana,	Layanan Informasi Status Penyerahan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
	dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman					Pertamanan	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman		
Data 271	Data Pemakaman Umum	Data Pemakaman Umum		Teks		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	BTH.17.01.02-Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya (Pemakaman)	Layanan Pemakaman Umum	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 272	Data Pemangkasan Pohon	Data Pemangkasan Pohon		Teks		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan		layanan Pemangkasan Pohon	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 273	Data Rumah Susun Sewa	Data Rumah Susun Sewa		Teks		Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan		Layanan Rumah Susun Sewa	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06. Data Aparatur Negara
Data 274	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Teks	Bulanan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BTH.26.01.16-Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Layanan Pendataan Fakir Miskin	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial
Data 275	Data Bursa Kerja Khusus (BKK)	Data Bursa Kerja Khusus (BKK) Daerah	Terbuka	Teks	Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Pertimbangan Teknis Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 276	Data ID CPMI	Profil CPMI (Data Hak, Kewajiban dan P3MI)	Terbatas	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.12-Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/	Layanan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran (CPMI)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
							Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Data 277	Data Laporan PHK	Data Laporan PHK (Pekerja)	Tertutup	Teks	Harian	Dinas Tenaga Kerja		Layanan Pembuatan Laporan keputusan Hubungan Kerja (PHK)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 278	Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Data Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Daerah	Terbuka	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.07-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 279	Data Lowongan Pekerjaan Pencari Kerja	Data Lowongan Pekerjaan Pencari Kerja Daerah	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.17-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Layanan Penerbitan AK1/Kartu Pencari Kerja	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 280	Data Layanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Data Kontak Person Direktur/HRD/Alamat	Terbuka	Teks	Harian	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.07-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Layanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 281	Data Pencatatan LKS Bipartie	Data Pencatatan LKS Bipartie Daerah	Tertutup	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.09-Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartie	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 282	Data Pencatatan PKWT	Data Pencatatan PKWT	Tertutup	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Pencatatan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan

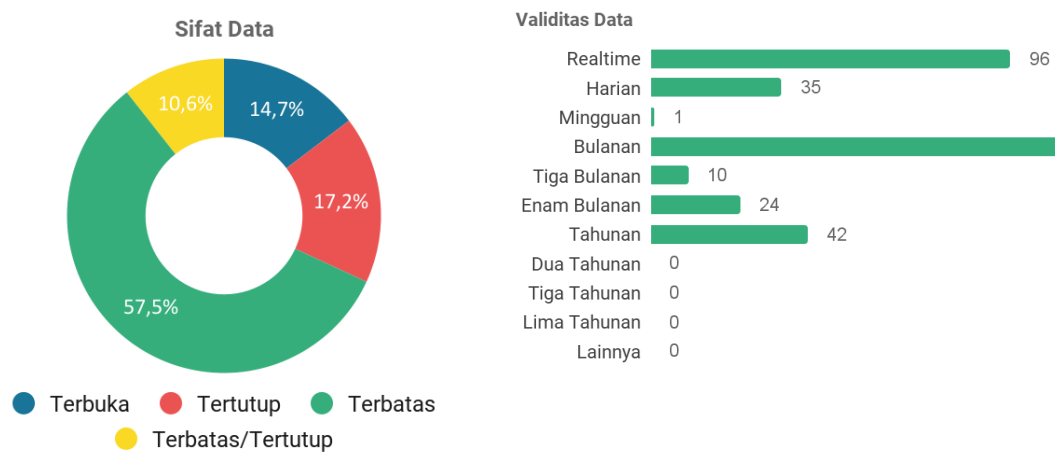
ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 283	Data Pencatatan SP/SB	Data Pencatatan SP/SB Daerah	Tertutup	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja			RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 284	Data Penempatan dan Pemulangan PRT	Data Penempatan dan Pemulangan PRT	Tertutup	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKD) Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 285	Data Perselisihan Hubungan Industrial	Data Perselisihan Hubungan Industrial (Perorangan/Perusahaan)	Tertutup	Teks	Harian	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.08-Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 286	Data Perusahaan	Data Kontak Person Direktur/HRD/Alamat	Terbuka	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 287	Data Perusahaan Penampungan (PPRT)	Data Perusahaan Penampungan (PPRT)	Terbuka	Teks	Bulanan/Tahunan	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKD) Lembaga	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
								Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		
Data 288	Data Struktur Skala Upah (SUSU)	Data Struktur Skala Upah (SUSU) Daerah	Tertutup	Teks	Harian	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Layanan Pembuatan Struktur Skala Upah	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan
Data 289	Data Jadwal Pengawasan	Data Jadwal Pengawasan	Terbatas/Tertutup	Teks	Bulanan/Tahunan	Inspektorat	BTH.59.03.05-Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data 290	Data Pelaporan POL PP	Data Pelaporan POL PP	Terbatas	Teks	Lainnya	Inspektorat			RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data 291	Data Konsultasi Pengawasan	Data Konsultasi Pengawasan	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Inspektorat	BTH.59.03.05-Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data 292	Data Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal	Data Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal	Terbatas/Tertutup	Teks	Lainnya	Inspektorat		Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data 293	Data Tim Pengawasan	Data Tim Pengawasan	Terbatas/Tertutup	Teks	Lainnya	Inspektorat	BTH.59.03-Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengukuran Kinerja Program Kerja Pengawasan	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara
Data 294	Data Harta Kekayaan ASN	Data Harta Kekayaan ASN	Terbatas	Teks	Lainnya	Inspektorat	BTH.59.03.04-Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09. Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07. Data Kesekretariatan Negara

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)
Data 295	Data Akreditasi Rumah Sakit	Data Kelengkapan Akreditasi Rumah Sakit	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah			RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 296	Data indikator mutu Nasional	Data indikator mutu Nasional	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah			RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 297	Data Insiden Keselamatan Pasien	Data Insiden Keselamatan Pasien	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Medis	RAD.04. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan
Data 298	Data Pelayanan Maternal dan Neonatal	Data Pelayanan Maternal dan Neonatal	Terbatas	Teks	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	Layanan Medis	RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 299	Data Pengaduan RS	Data pengaduan pelayanan	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat		RAD.10. Data Pendukung Umum	RAD.10.04. Data Dukung Lainnya
Data 300	Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terbatas	Teks	Realtime	SatpolPP	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAD.05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02. Data Keamanan
Data 301	Data Overbooking	Data Overbooking	Terbatas/Tertutup	Teks	Realtime	SatpolPP			RAD.05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02. Data Keamanan
Data 302	Data Perlindungan Masyarakat	Data Perlindungan Masyarakat		Teks	Bulanan	SatpolPP	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	Layanan Perlindungan Masyarakat	RAD.05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02. Data Keamanan

B. Analisis Diagram Data

Analisa terhadap kondisi data eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :

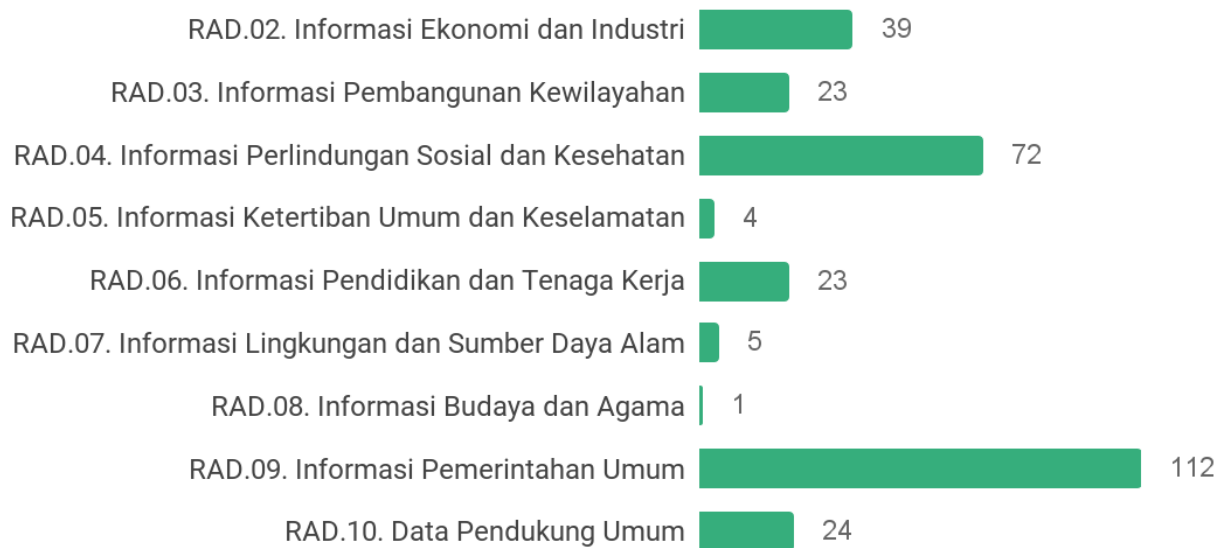


Grafik 3.3.1. Kondisi Data eksisting

Pada grafik 3.3.1 menunjukkan 2 diagram mengenai aplikasi eksisting yaitu sifat data dan validitas data. Terdapat lebih dari 300 data aplikasi eksisting yang berada di kota Batam. Data tersebut terbagi menjadi 4 sifat data dengan 14,9%(52 data) merupakan data yang bersifat terbuka atau dapat dilihat juga oleh publik, 17,2%(60 data) merupakan data yang bersifat tertutup atau rahasia, 57,5% (200 data) merupakan data yang bersifat terbatas, dan 10,6%(37 data) merupakan data yang bersifat terbatas/tertutup.

Untuk validitas data eksisting di kota Batam menunjukkan 6 sifat interval data yaitu 96 data merupakan data dengan interval update realtime, 35 data dengan interval update harian, 1 data dengan interval update mingguan, 115 data dengan interval update bulanan, 10 data dengan interval update tiga bulanan, 24 data dengan interval update enam bulanan, dan 42 data dengan interval update tahunan.

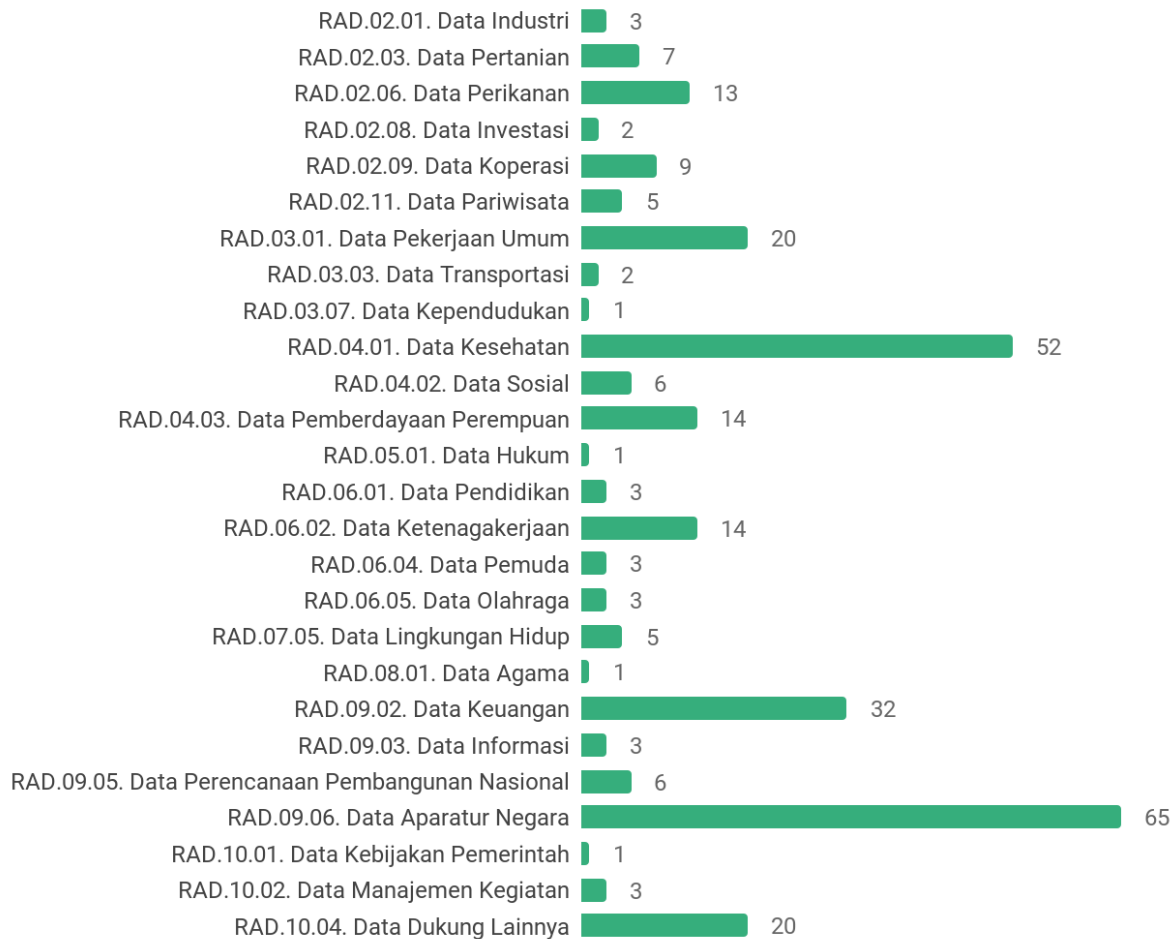
RAD Level 1



Grafik 3.3.2 RAD Level 1

Untuk Data Pokok penyesuaian dengan Standar Nasional. RAD Level 1 Dari 300 lebih data terbagi menjadi beberapa bagian dimana 39 Data Informasi Ekonomi dan Industri, 23 Data Informasi Pembangunan Kewilayahan, 72 Data Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan, 4 Data Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan, 23 Data Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja, 5 Data Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 1 Data Informasi Budaya dan Agama, 113 Data Informasi Pemerintahan Umum, dan 24 Data merupakan Data Pendukung Umum.

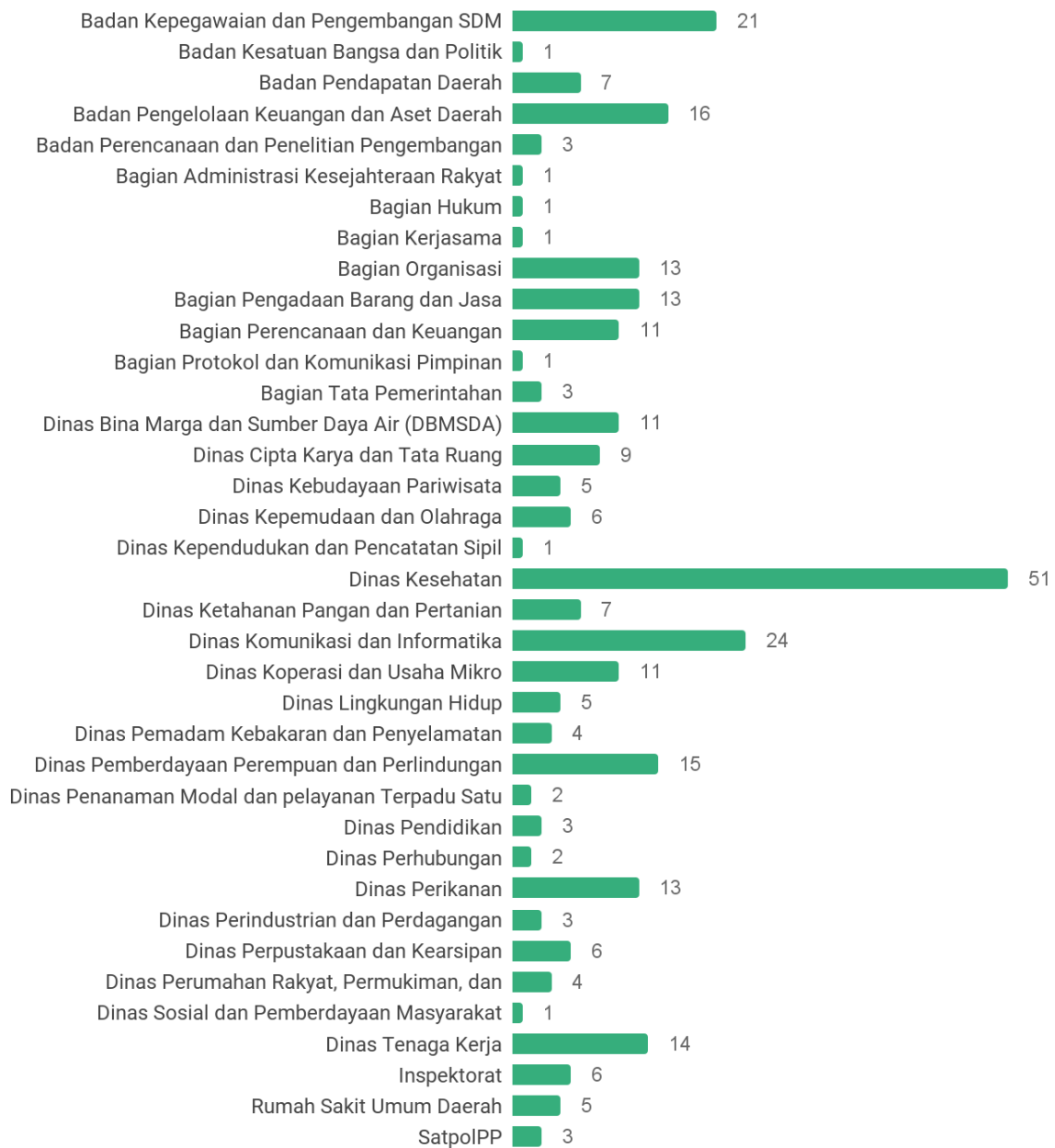
RAD Level 2



Grafik 3.3.3 RAD Level 2

Untuk Data Pokok penyesuaian dengan Standar Nasional RAD Level 2. Dari data yang ada terbagi menjadi beberapa bagian dimana 3 Data RAD.02.01. Data Industri, 7 Data RAD.02.03. Data Pertanian, 13 Data RAD.02.06. Data Perikanan, 2 Data RAD.02.08. Data Investasi, 9 Data RAD.02.09. Data Koperasi, 5 Data RAD.02.11. Data Pariwisata, 20 Data RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum, 2 Data RAD.03.03. Data Transportasi, 1 Data RAD.03.07. Data Kependudukan, 52 Data RAD.04.01. Data Kesehatan, 6 Data RAD.04.02. Data Sosial, 14 Data RAD.04.03. Data Pemberdayaan Perempuan, 1 Data RAD.05.01. Data Hukum, 3 Data RAD.06.01. Data Pendidikan, 14 Data RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan, 3 Data RAD.06.04. Data Pemuda, 3 Data RAD.06.05. Data Olahraga, 5 Data RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup, 1 Data RAD.08.01. Data Agama, 32 Data RAD.09.02. Data Keuangan, 3 Data RAD.09.03. Data Informasi, 6 Data RAD.09.05. Data Perencanaan Pembangunan Nasional, 66 Data RAD.09.06. Data Aparatur Negara, 1 Data RAD.10.01. Data Kebijakan Pemerintah, 3 Data RAD.10.02. Data Manajemen Kegiatan, 20 Data RAD.10.04. Data Dukung Lainnya.

Produsen Data/Penanggung Jawab Data



Grafik 3.3.4 OPD Penanggung Jawab Data

Pada Grafik 3.3.3 dapat dilihat OPD penanggung jawab Data. Terdapat 21 Data Pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2 Data Pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 7 Data Pada OPD Badan Pendapatan Daerah, 16 Data Pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 3 Data Pada OPD Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, 1 Data Pada OPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 1 Data Pada OPD Bagian Hukum, 1 Data Pada OPD Bagian Kerjasama, 13 Data Pada OPD Bagian Organisasi, 13 Data Pada OPD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 11 Data Pada OPD Bagian Perencanaan dan Keuangan, 1 Data Pada OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 3 Data Pada OPD Bagian Tata Pemerintahan, 4 Data Pada OPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), 9 Data Pada OPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 5 Data Pada OPD Dinas Kebudayaan Pariwisata, 6 Data Pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 1 Data Pada OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 51 Data Pada OPD Dinas Kesehatan, 7 Data Pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 24 Data Pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, 11 Data Pada OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 5 Data Pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, 7 Data pada OPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, 4 Data Pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 15 Data Pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2 Data Pada OPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3 Data Pada OPD Dinas Pendidikan, 2 Data Pada OPD Dinas Perhubungan, 13 Data Pada OPD Dinas Perikanan, 3 Data Pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 6 Data Pada OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 4 Data Pada OPD Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan, 1 Data Pada OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 14 Data Pada OPD Dinas Tenaga Kerja, 6 Data Pada OPD Inspektorat, 5 Data Pada OPD Rumah Sakit Umum Daerah, 3 Data Pada OPD SatpolPP.

3.4. Arsitektur Layanan

A. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi

Diagram ini menjelaskan hubungan antara layanan, data, aplikasi di masing-masing OPD khusus pada layanan yang di evaluasi oleh Kemenpan-RB dimulai dari indikator 32 hingga 47 dengan tujuan untuk memetakan mana saja proses yang perlu ditransformasi digitalkan dalam waktu dekat. Selain itu juga diagram ini menjelaskan layanan antar unit yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data yg ada di masing-masing OPD, sehingga terlihat jelas kedepan data-data mana saja yang bisa di berbagi pakaikan antar OPD dan juga ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem yang ada di Kota Batam. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan dari Layanan, Data, Aplikasi dan Teknologi.

1. Layanan Perencanaan

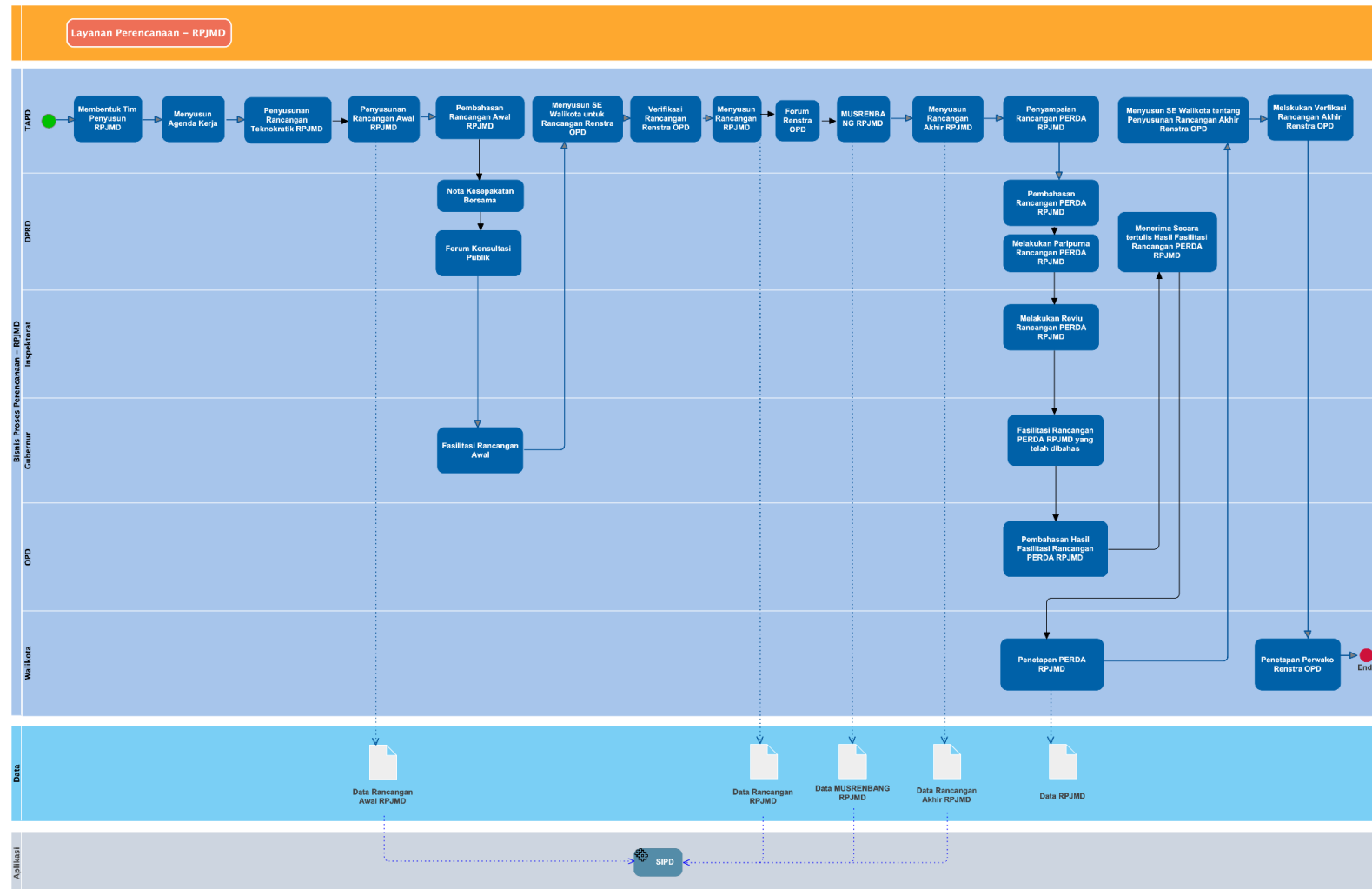
Dalam menunjang layanan perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batam yang mempunyai tugas melaksanakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda melaksanakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d) Pelaksanaan tugas Walikota sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan perencanaan yang terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah

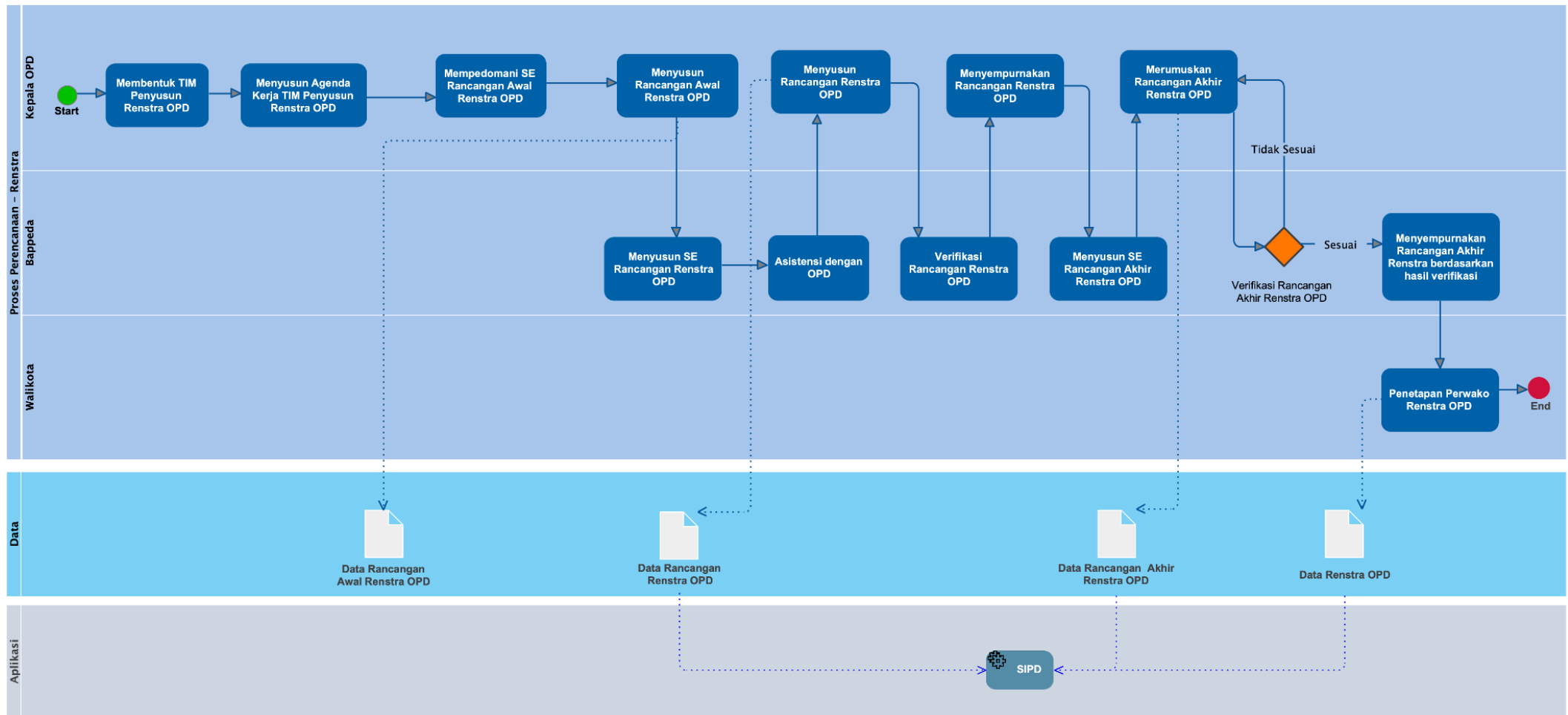
No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.01 Perencanaan dan Program
3	Kategori Layanan	RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKPD

Bappeda memiliki 3 kategori layanan perencanaan yang melibatkan Gubernur/DPRD, Walikota, Bappeda, dan OPD Batam. Pada layanan perencanaan ini Aplikasi yang digunakan adalah SIPD.

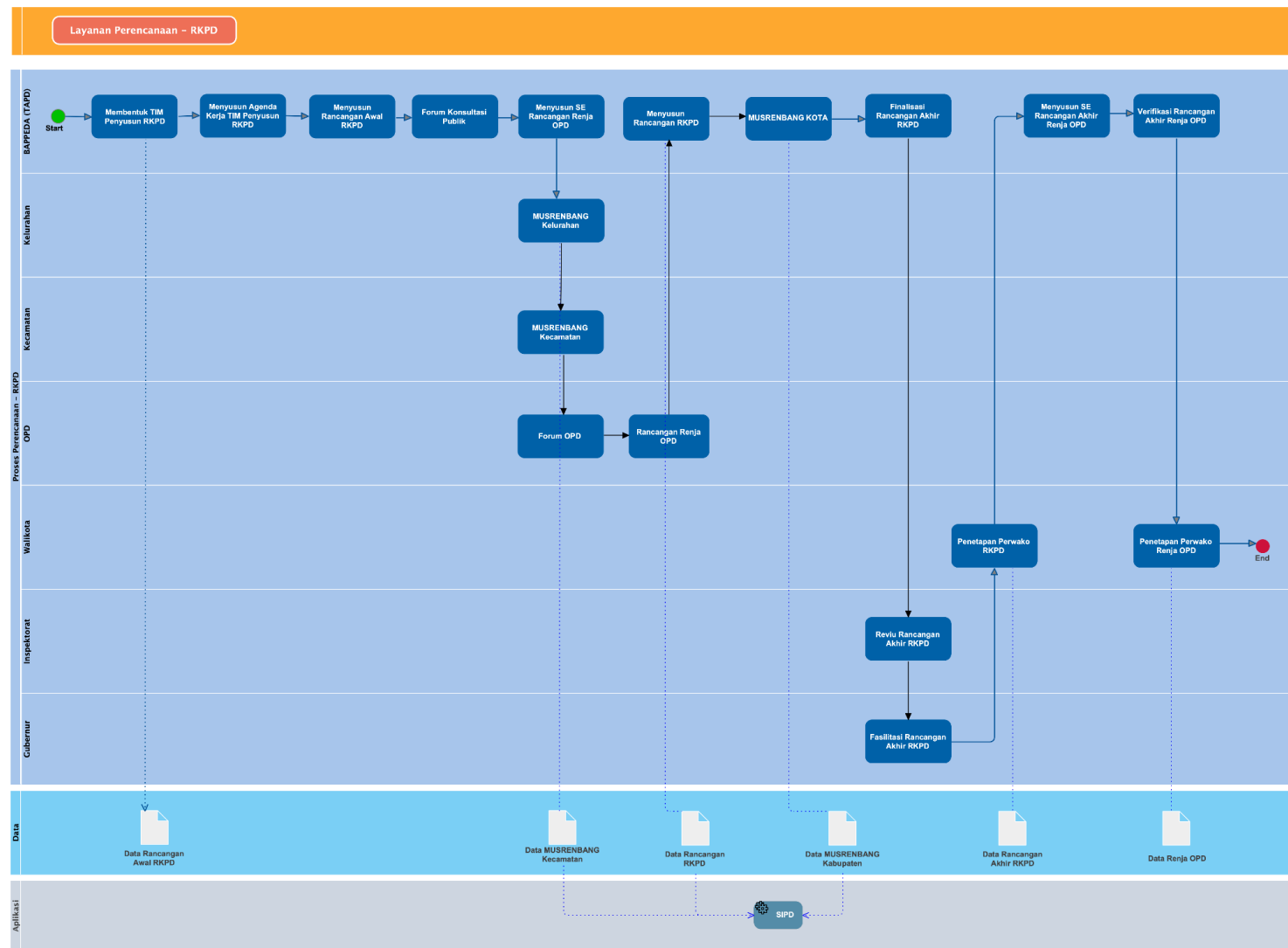


Gambar 3.4.1 RAL.02.01.01 Layanan Penyusunan Dokumen RPJMD

Layanan Perencanaan – Renstra



Gambar 3.4.2 RAL.02.01.02 Layanan Penyusunan Dokumen Renstra



Gambar 3.4.3 RAL.02.01.03 Layanan Penyusunan Dokumen RKPD

2. Layanan Penganggaran

Dalam menunjang layanan penganggaran diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

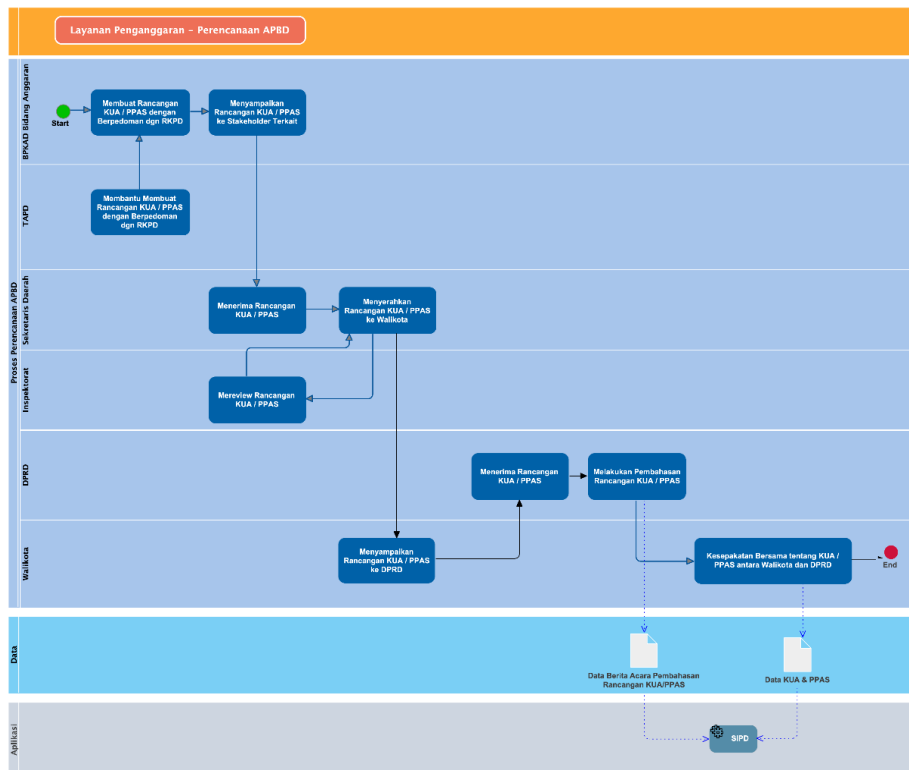
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, BPKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran.

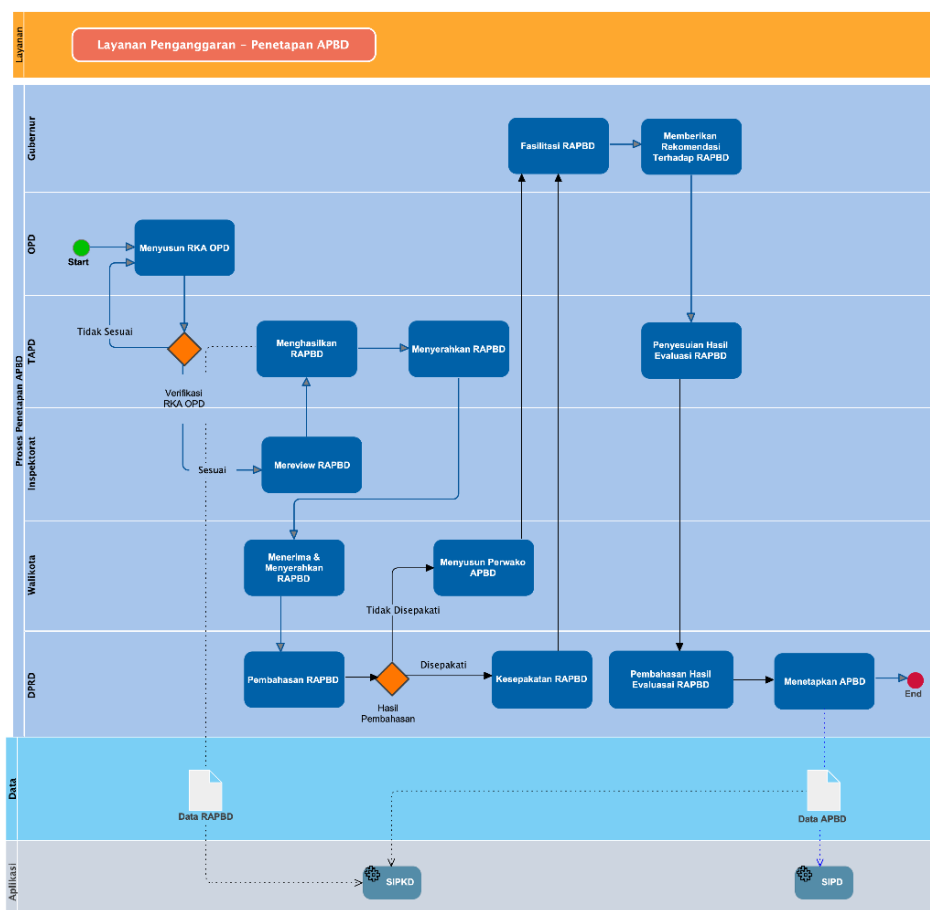
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan penganggaran yang terdapat di BPKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.01 Layanan Perencanaan APBD RAL.02.02.02 Layanan Penetapan APBD

Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 2 kategori layanan penganggaran yang melibatkan DPRD, Walikota, BPKAD, Ketua TAPD, OPD. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah SIPD dan SIPKD.



Gambar 3.4.4 RAL.02.02.01 Layanan Perencanaan APBD



Gambar 3.4.5 RAL.02.02.01 Layanan Perencanaan APBD

3. Layanan Keuangan

Dalam menunjang layanan keuangan yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

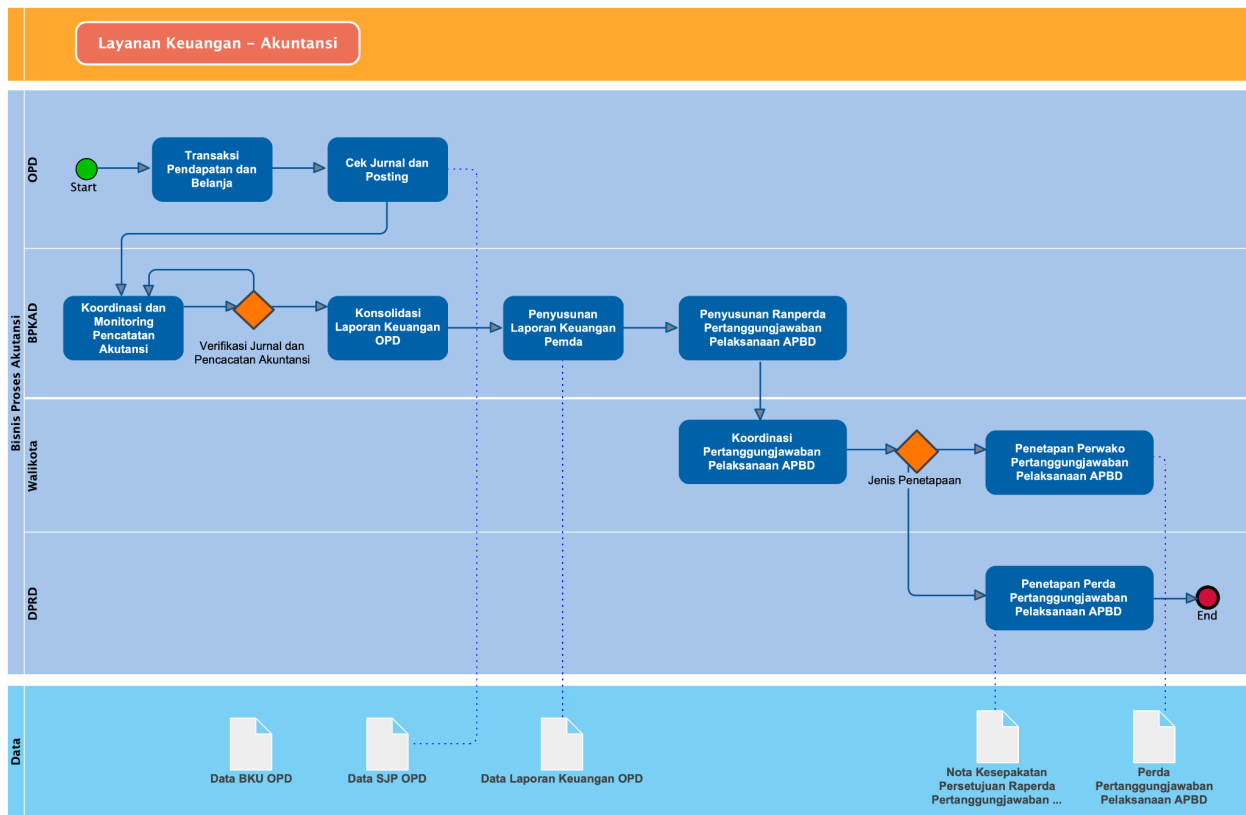
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah.

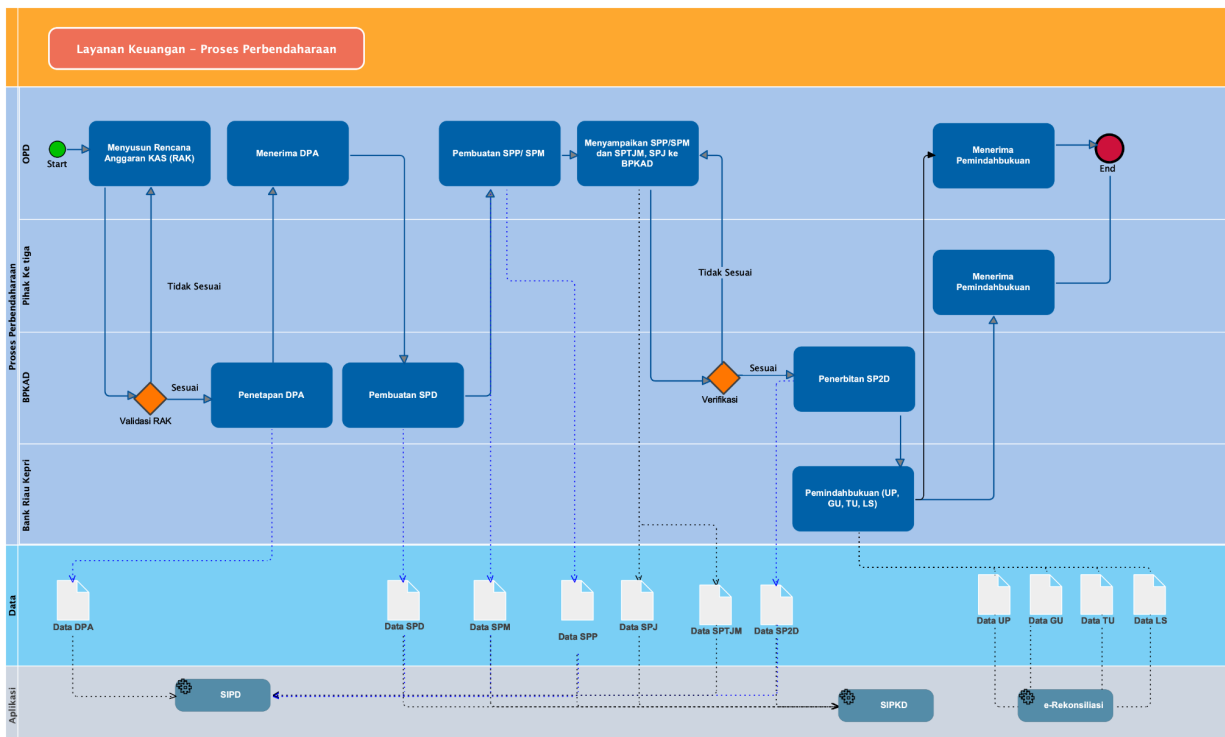
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan keuangan yang terdapat di BPKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.02 Keuangan
3	Kategori Layanan	RAL.02.02.01 Layanan Akuntansi RAL.02.02.02 Layanan Perbendaharaan RAL.02.02.03 Layanan Manajemen Penggajian

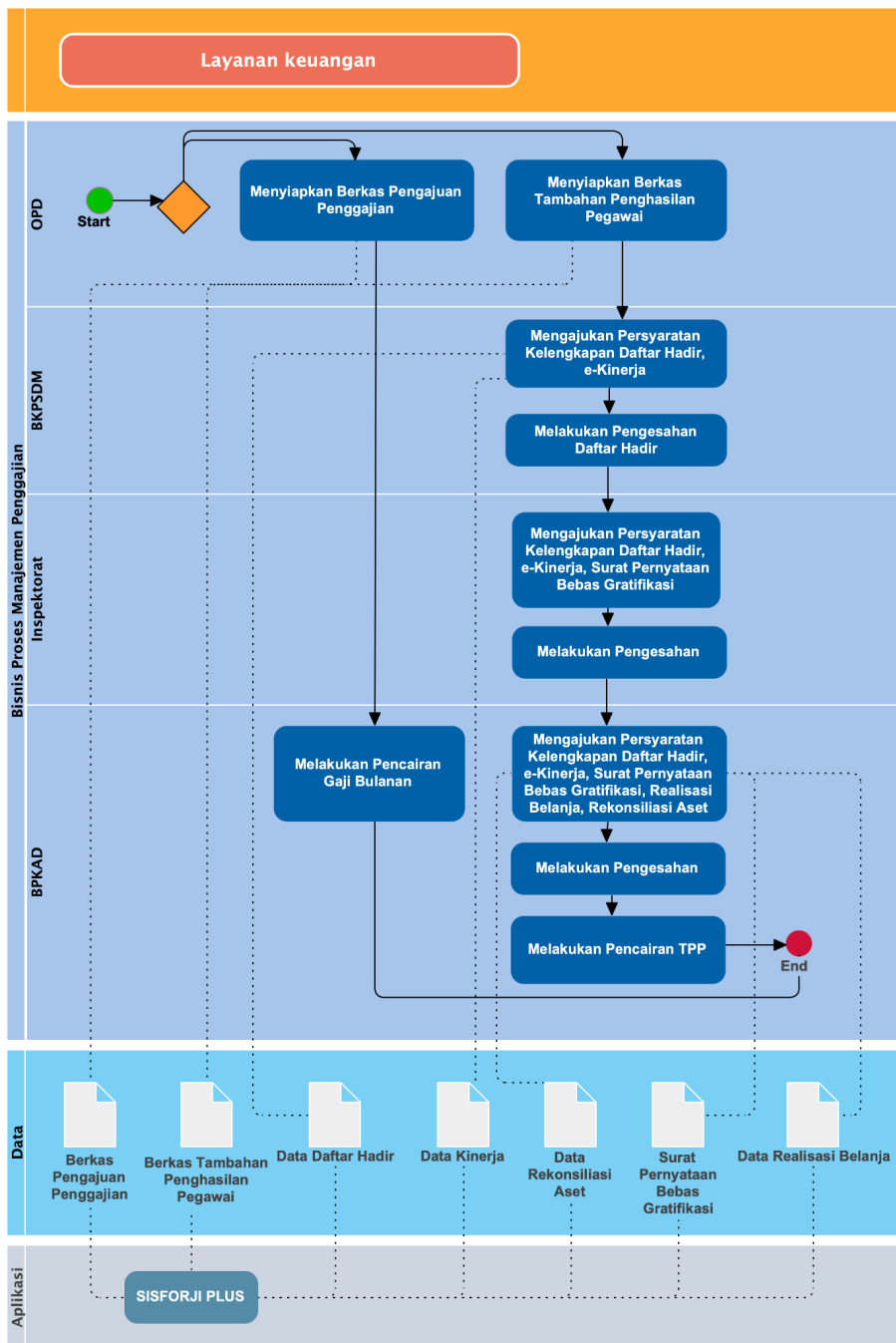
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 4 kategori layanan keuangan yang melibatkan Walikota, BPKAD, OPD, TAPD, BUD dan Bank Riau Kepri. Pada layanan keuangan ini Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi SPD, SPKD, e-Rekonsiliasi, SISFORJI PLUS .



Gambar 3.4.6 RAL.02.02.03 Layanan Akuntansi



Gambar 3.4.7 RAL.02.02.04 Layanan Perbendaharaan



Gambar 3.4.8 RAL.02.02.05 Layanan Manajemen Penggajian

4. Layanan Pengelolaan Aset

Dalam menunjang layanan pengelolaan aset yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

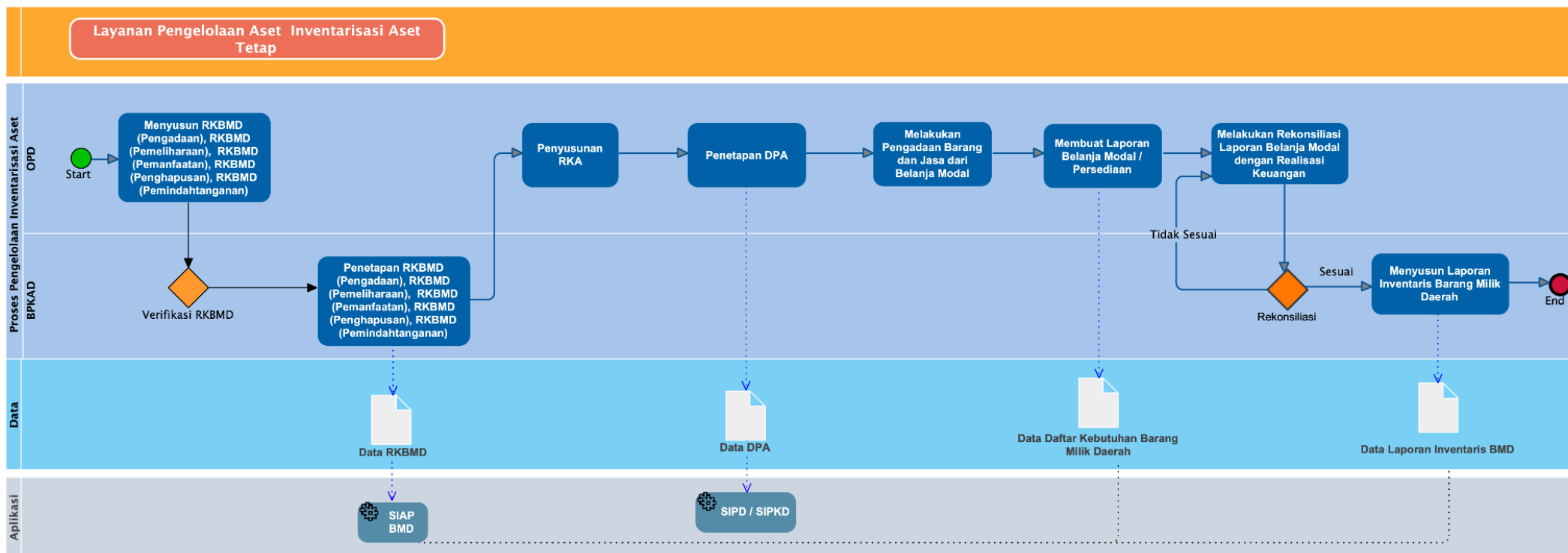
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD melaksanakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Aset Daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah; dan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Aset Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengelolaan aset yang terdapat di BPKAD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Dukungan Umum Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Pengelolaan Inventarisasi Aset

Badan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki 2 kategori layanan pengelolaan aset yang melibatkan Gubernur, Walikota, KPKNL, Bag. Hukum, Tim Peneliti, BPKAD, Sekda dan SKPD. Pada layanan pengelolaan aset ini Aplikasi yang digunakan adalah SIAP BMD, SIPD/SIPKD.



Gambar 3.4.9 RAL.02.07.01 Layanan Pengelolaan Inventarisasi Aset

5. Layanan Kepegawaian

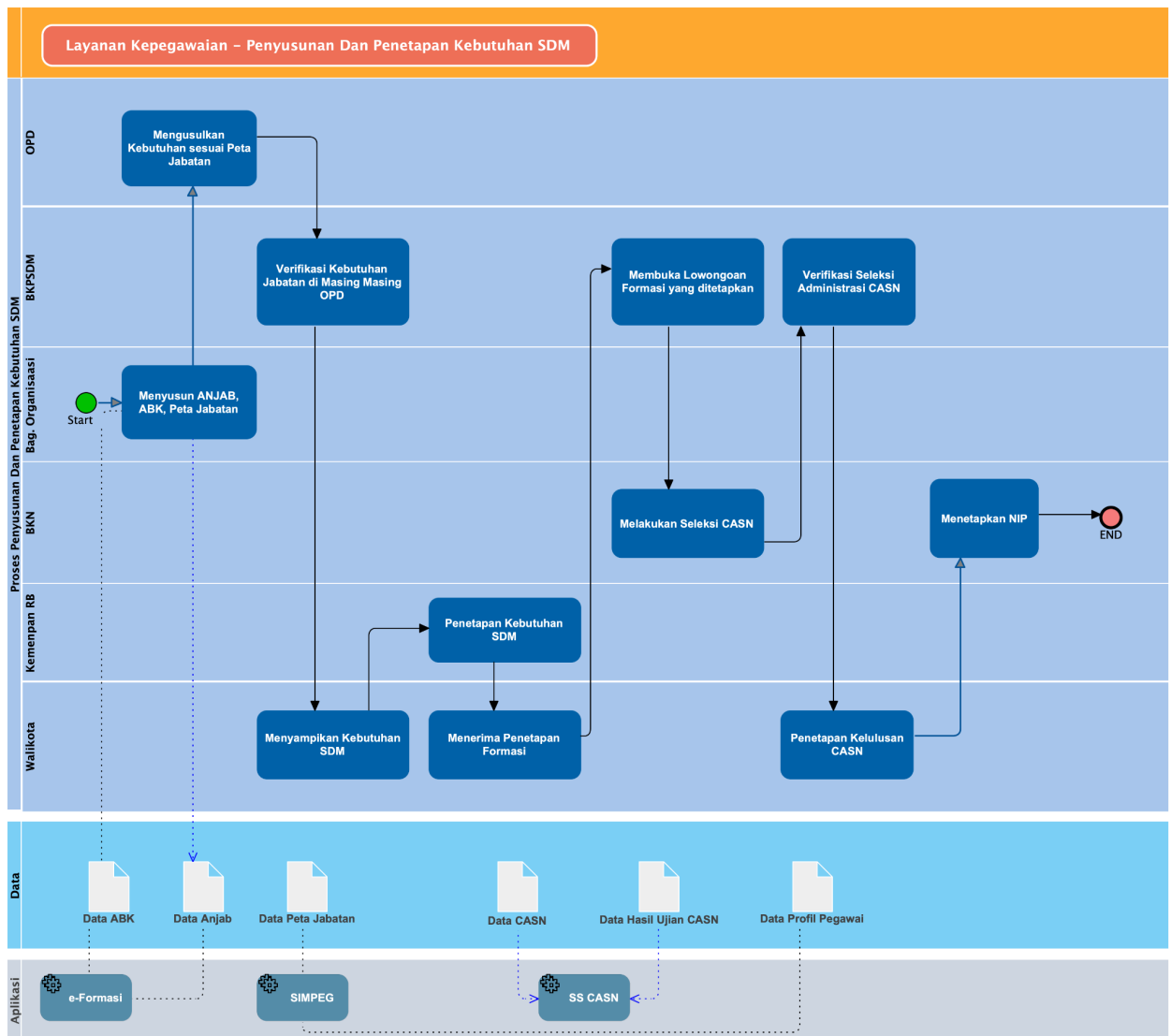
Dalam menunjang layanan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

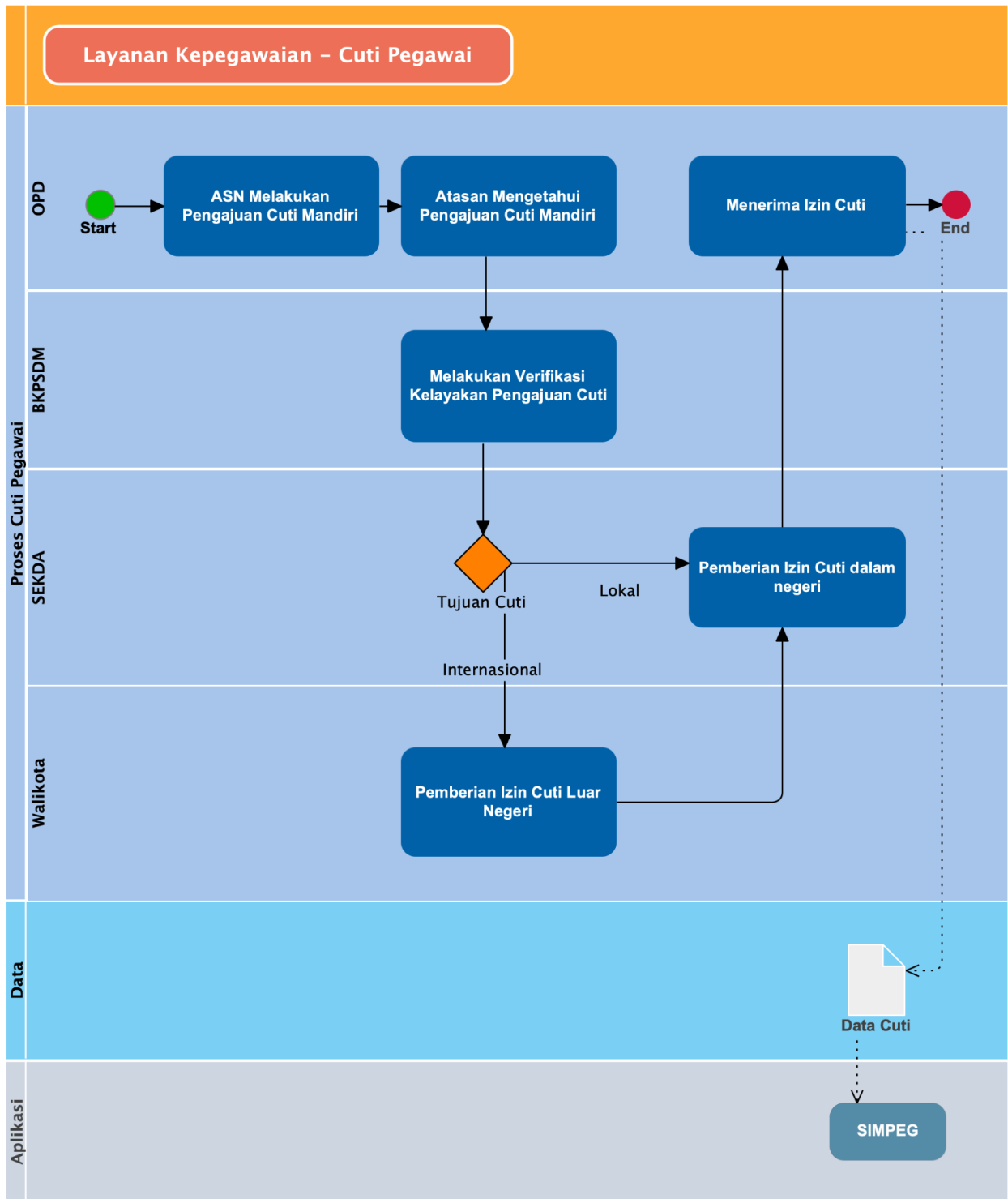
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di BKPSDMD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.04 Aparatur Negara
3	Kategori Layanan	RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Persiapan Kebutuhan SDM RAL.02.04.02 Layanan Cuti Pegawai RAL.02.04.03 Layanan Peningkatan kompetensi

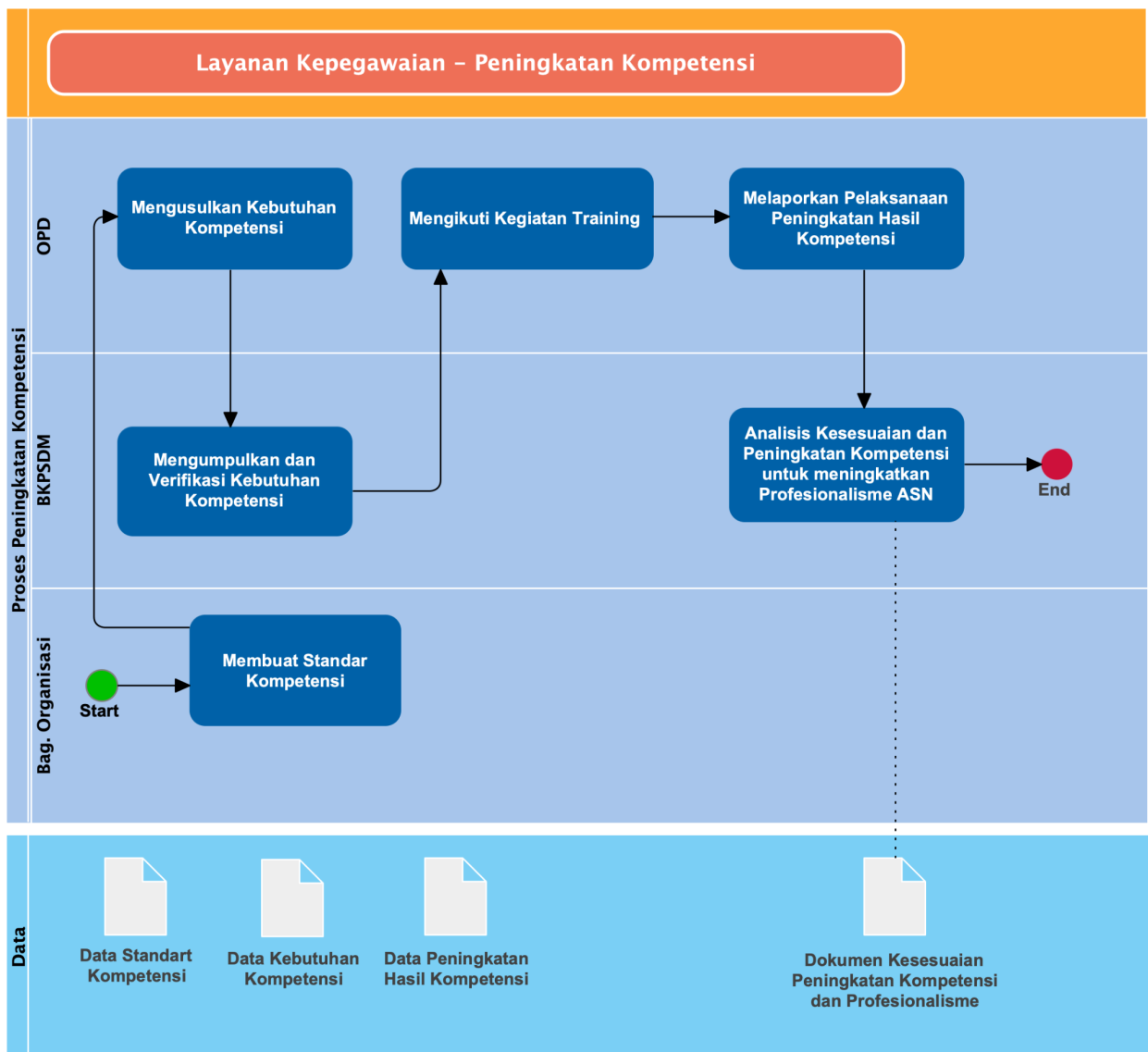
Badan Kepegawaian Daerah Daerah memiliki 6 kategori layanan kepegawaian yang melibatkan BKPSDMD, BKN, Walikota, Gubernur, Bag. Organisasi, OPD, Kemenpan RB. Pada layanan Kepegawaian ini Aplikasi yang digunakan adalah e-Formasi, SIMPEG, SS CASN, e-Kinerja.



Gambar 3.4.10 RAL.02.04.01 Layanan Penyusunan dan Persiapan Kebutuhan SDM



Gambar 3.4.11 RAL.02.04.02 Layanan Cuti Pegawai



Gambar 3.4.12 RAL.02.04.04 Layanan Peningkatan kompetensi

6. Layanan Kinerja Pegawai

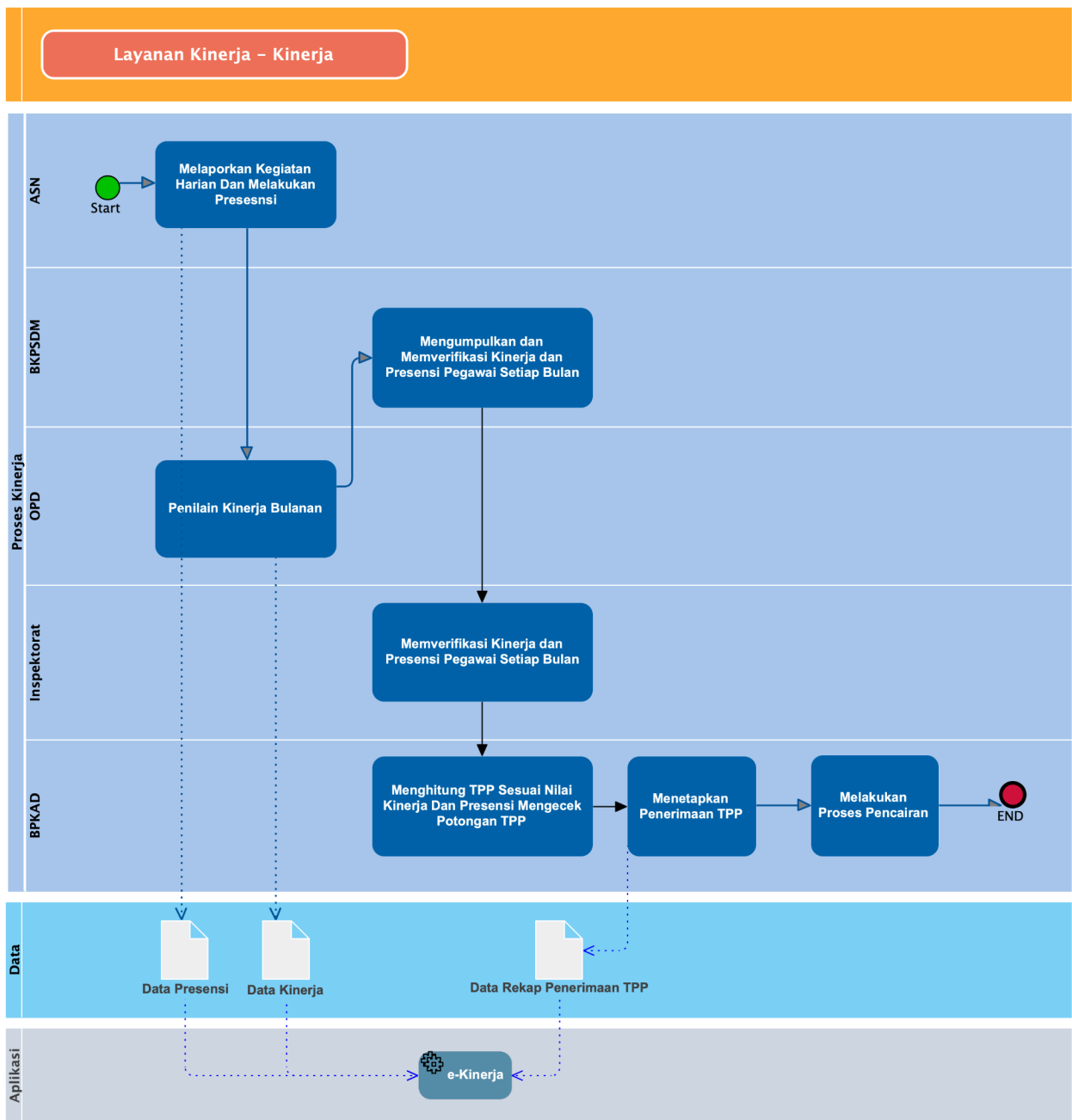
Dalam menunjang layanan Kinerja Pegawai yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

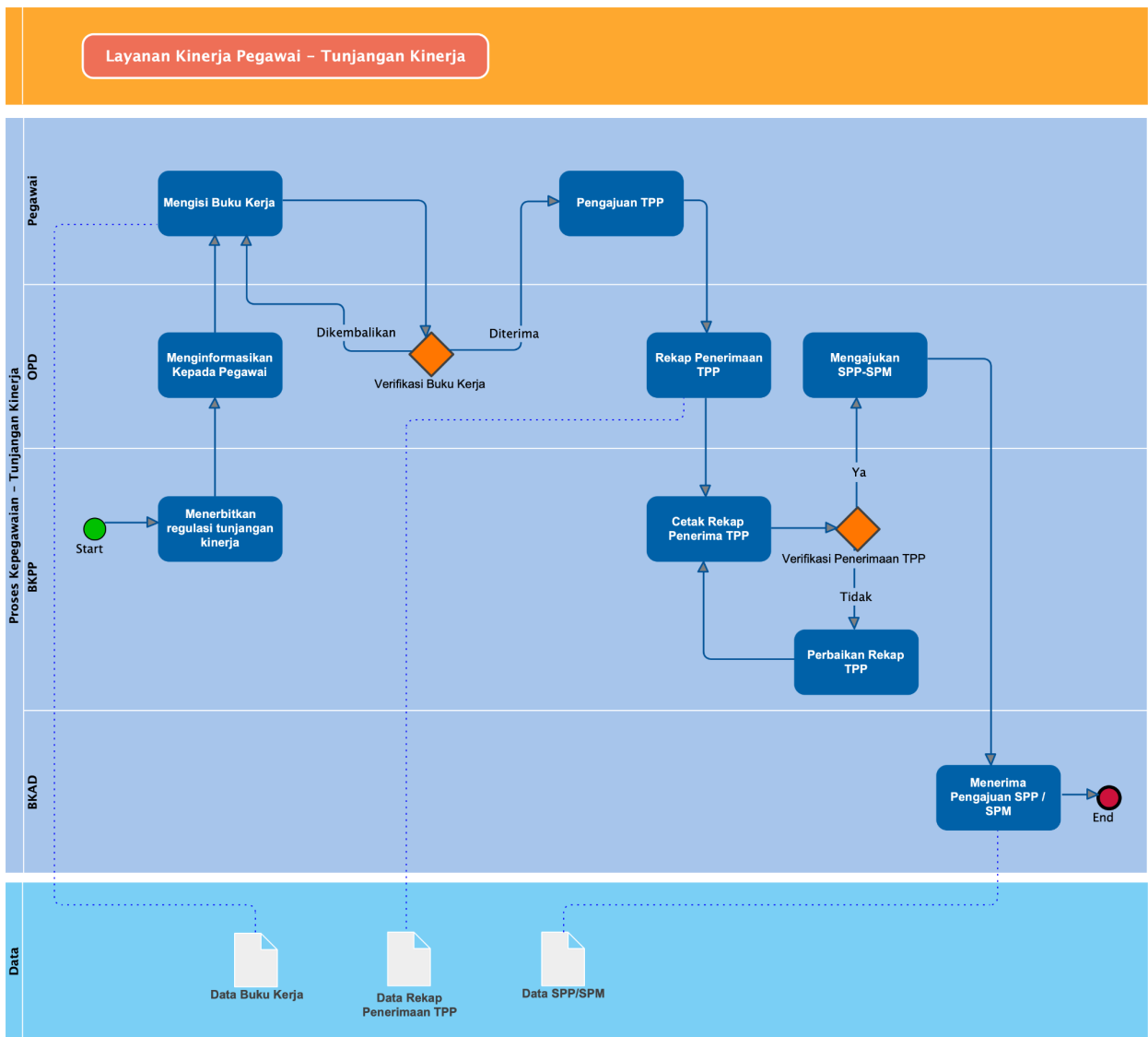
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kinerja pegawai yang terdapat di BKPSDMD adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.03 Sumber Daya Manusia
3	Kategori Layanan	RAL.02.04.01 Layanan Tunjangan Kinerja RAL.02.04.01 Layanan Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Daerah memiliki 1 kategori layanan kinerja pegawai yang melibatkan BKN, BKAD, BKPSDMD, dan OPD dan ASN.



Gambar 3.4.13 RAL.02.04.03 Layanan Kinerja



Gambar 3.4.14 RAL.02.04.07 Layanan Kinerja

7. Layanan Kearsipan Dinamis

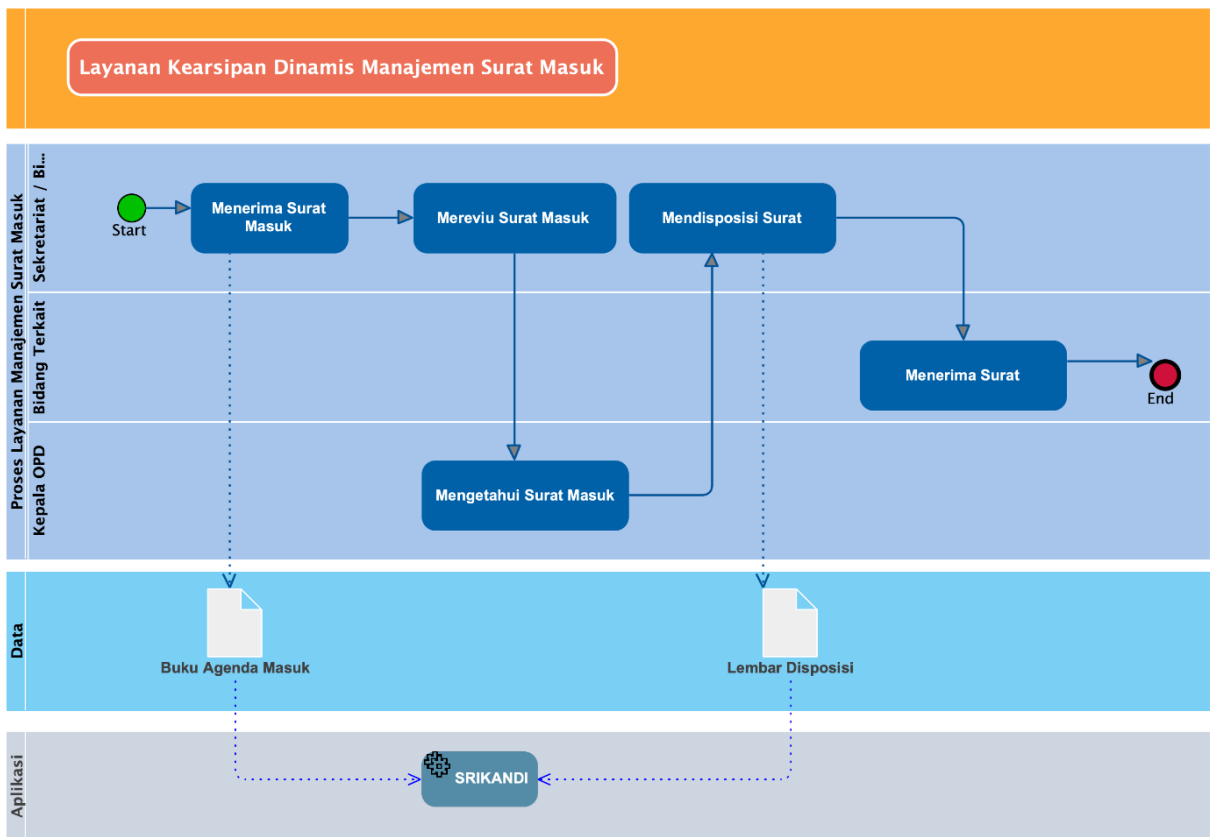
Dalam menunjang layanan kearsipan yang diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c) Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan; dan
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.

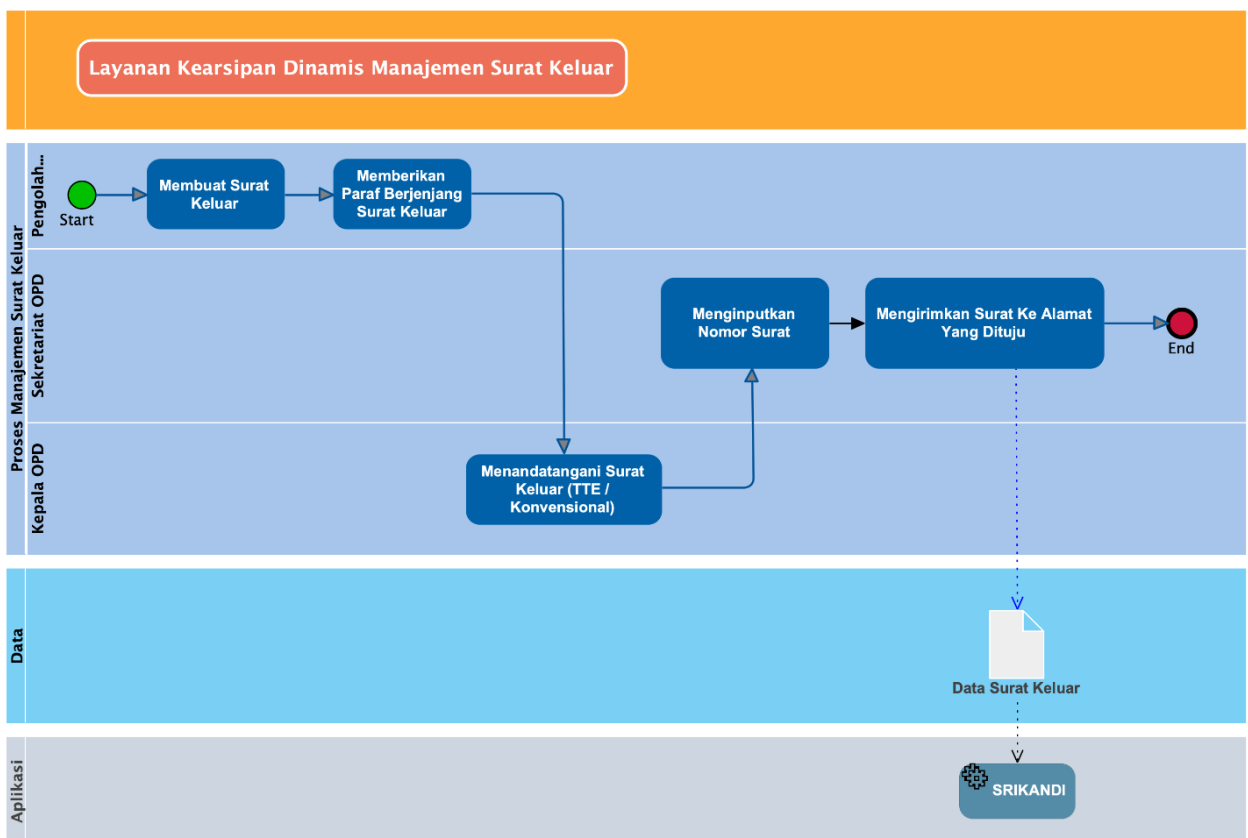
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kearsipan yang terdapat di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Surat Masuk RAL.02.06.02 Layanan Surat Keluar RAL.02.06.03 Layanan Kearsipan Dinamis

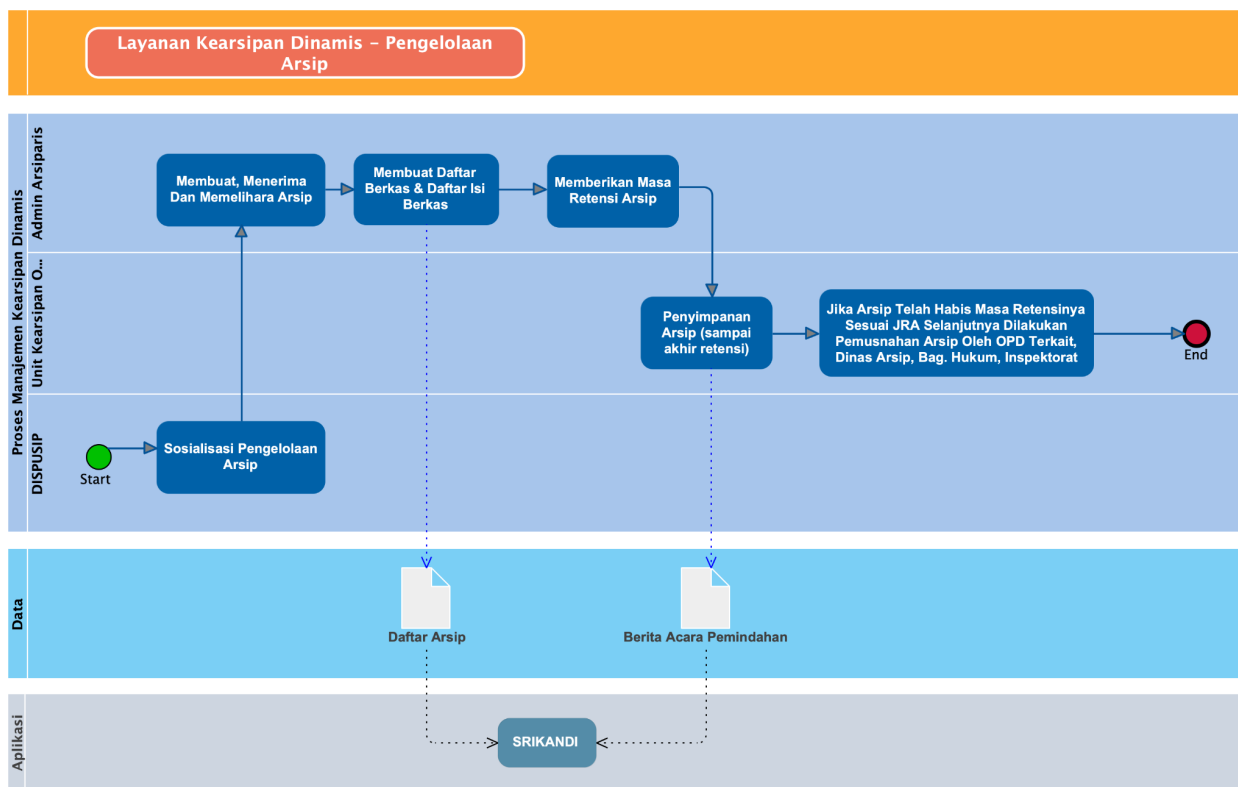
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan memiliki 3 kategori layanan kearsipan yang melibatkan, Kepala Dinas, Kepala OPD, Unit Pengelola Arsip, Sekda. Aplikasi yang digunakan pada layanan ini adalah SRIKANDI.



Gambar 3.4.15 RAL.02.06.01 Layanan Surat Masuk



Gambar 3.4.16 RAL.02.06.02 Layanan Surat Keluar



Gambar 3.4.17 RAL.02.06.02 Layanan Kearsipan Dinamis

8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

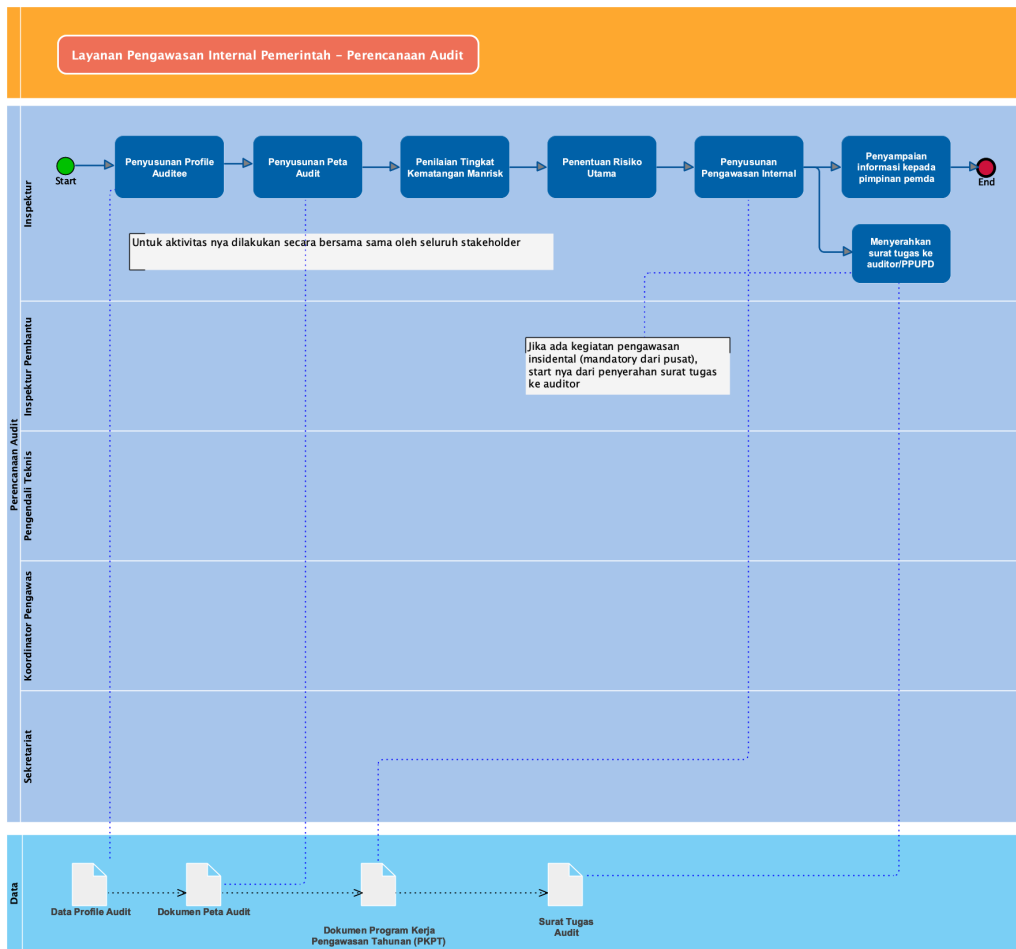
Dalam menunjang layanan pengawasan internal pemerintah (SPIP) yang diampu oleh Inspektorat dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan program pengawasan;
- b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan;
- c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

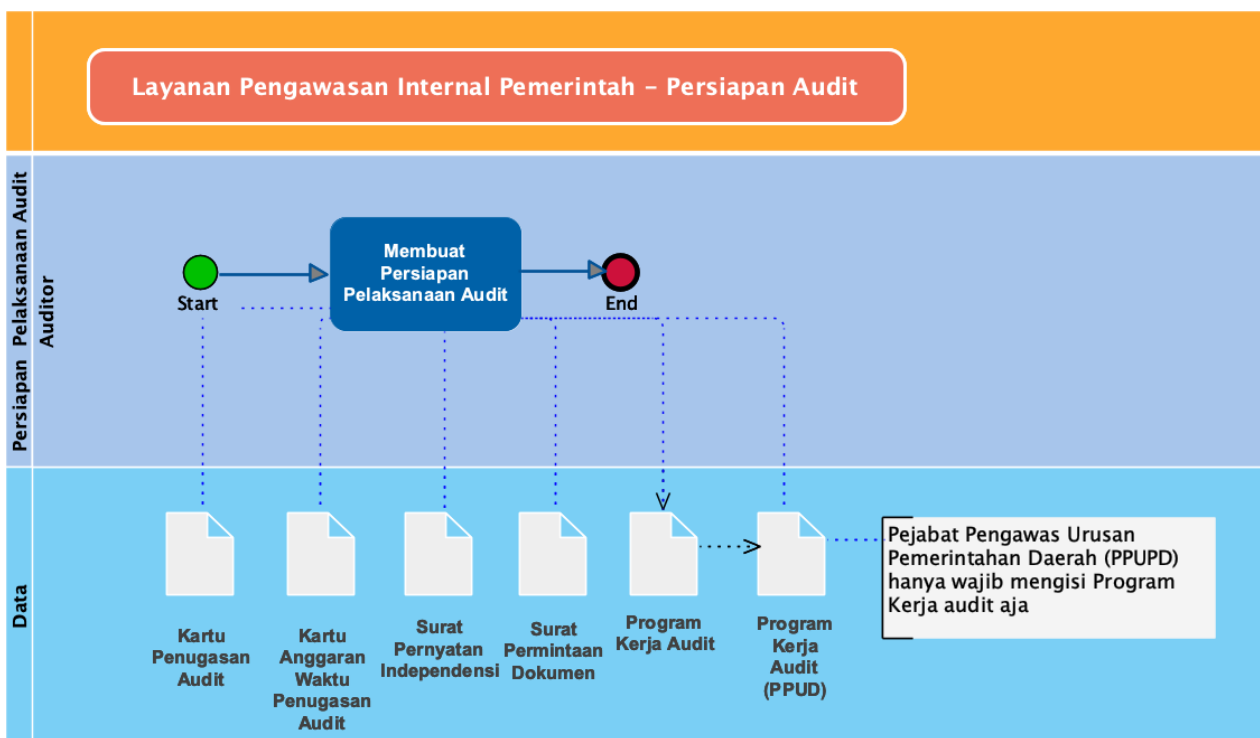
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan SPIP yang terdapat di Inspektorat adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
3	Kategori Layanan	RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit RAL.02.05.02 Layanan Persiapan Pelaksanaan Audit RAL.02.05.03 Layanan Pelaksanaan Audit RAL.02.05.04 Layanan Tindak Lanjut Audit

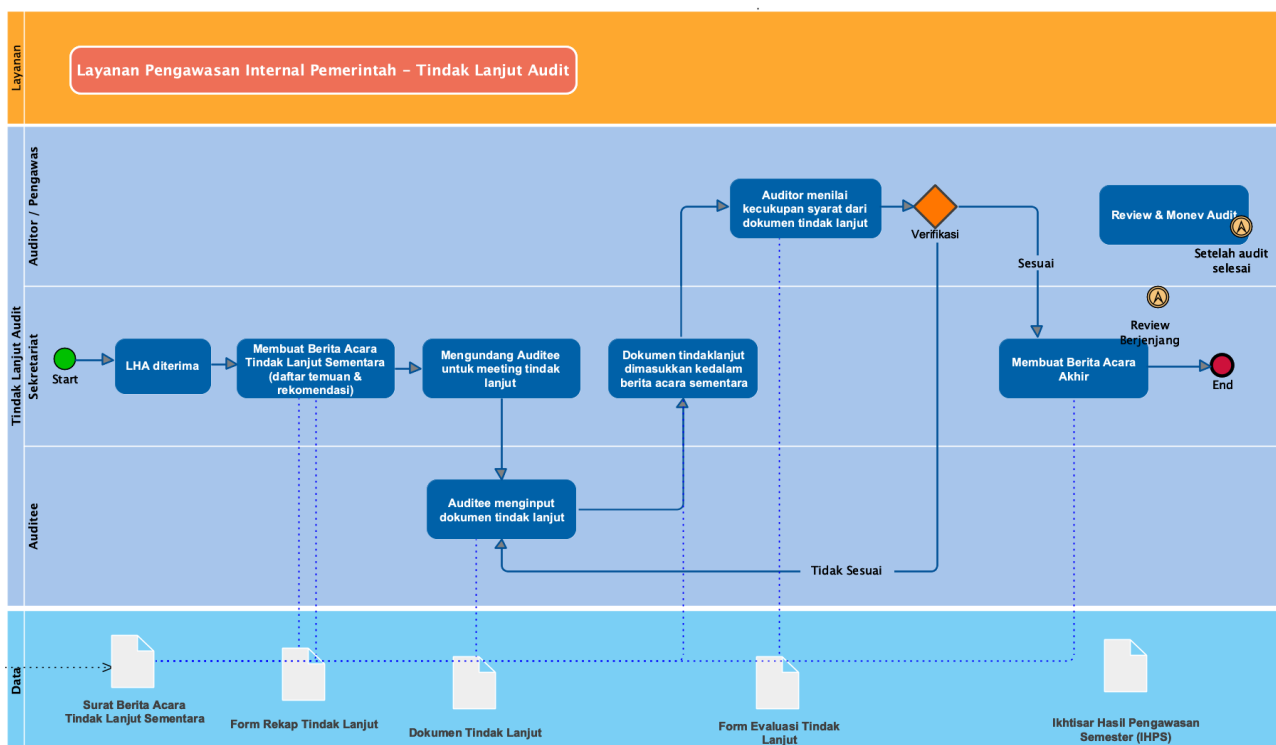
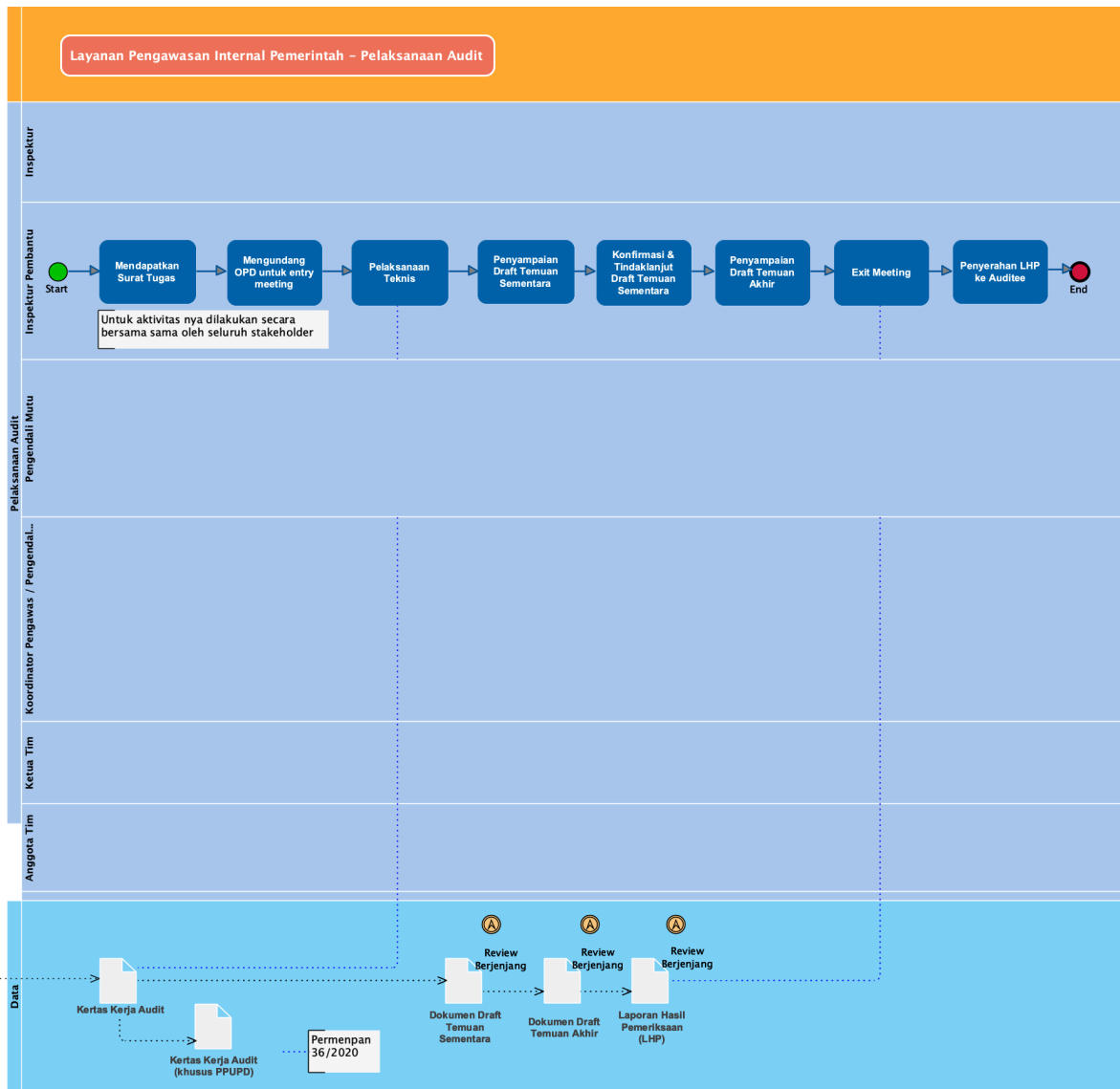
Inspektorat memiliki 5 kategori layanan SPIP yang melibatkan Inspektorat, Irban, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim, Auditee .



Gambar 3.4.18 RAL.02.05.01 Layanan Perencanaan Audit



Gambar 3.4.19 RAL.02.05.02 Layanan Persiapan Pelaksanaan Audit



9. Layanan Pengaduan Publik

Dalam menunjang layanan pengaduan publik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempunyai Tugas untuk melaksanakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

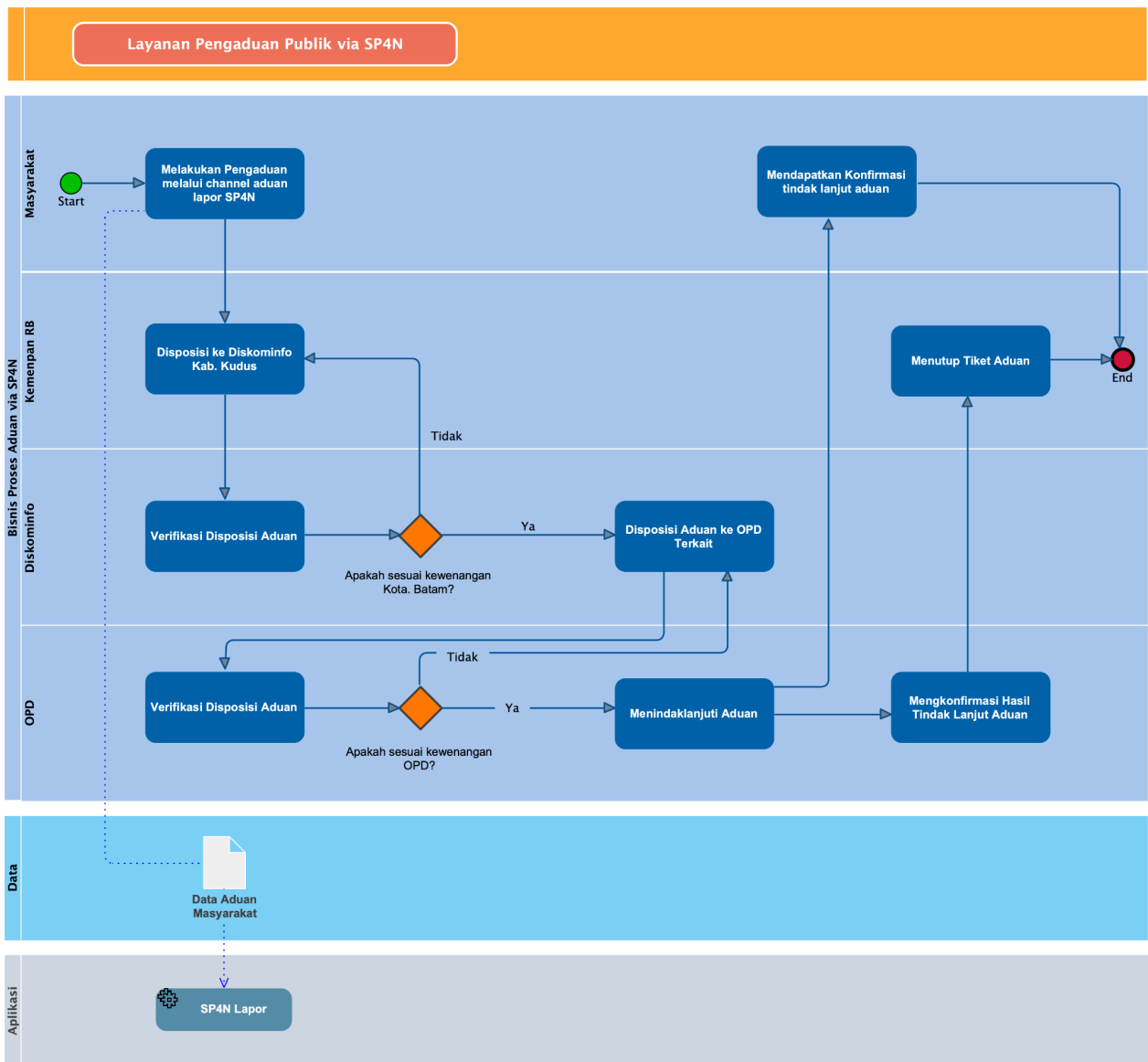
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengaduan publik Diskominfo dijelaskan sebagai berikut

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Layanan Publik
2	Area Layanan	RAL.01.44 Informasi
3	Kategori Layanan	RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan pengaduan publik yang melibatkan Kemenpan-RB, Diskominfo dan Masyarakat. Pada layanan pengaduan publik ini Aplikasi yang digunakan adalah SP4N Lapor.



Gambar 3.4.22 RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Publik via SP4N Lapor

10. Layanan Data Terbuka

Dalam menunjang layanan data terbuka yang diampu oleh Diskominfo yang mempunyai fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

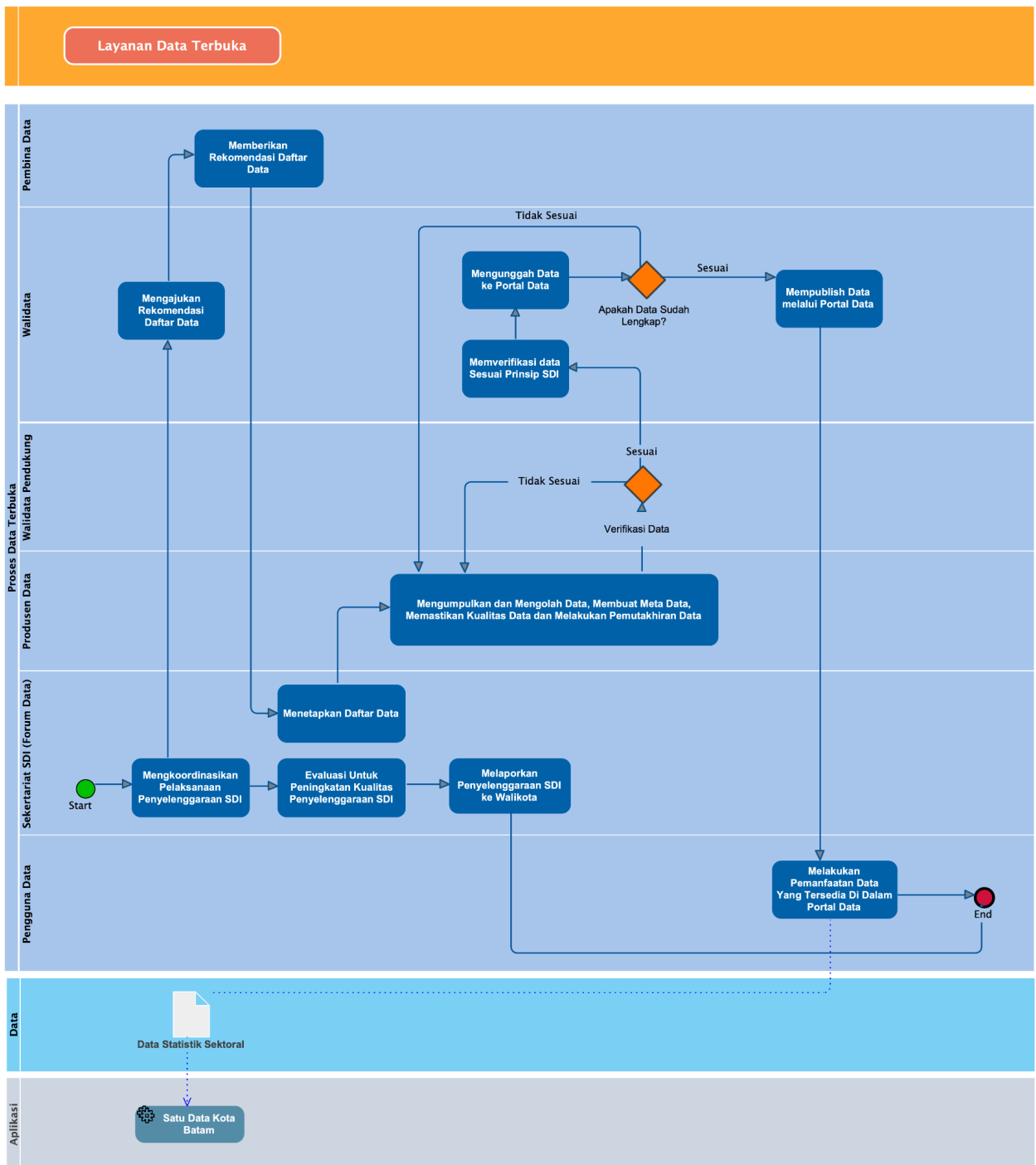
Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- b) pelaksanaan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral,
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Adapun berdasarkan fungsinya maka proses bisnis yang terdapat di Diskominfo adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan
3	Kategori Layanan	RAL.02.09.01 Layanan Data Terbuka

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 kategori layanan data terbuka yang melibatkan Pembina Data, Walidata, Wali Data Pendukung, Produsen Data dan Pengguna Data. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah Satu Data Kota Batam.



Gambar 3.4.23 RAL.02.09.01 Layanan Data Terbuka

11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam menunjang layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang diampu oleh Bag. Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi.

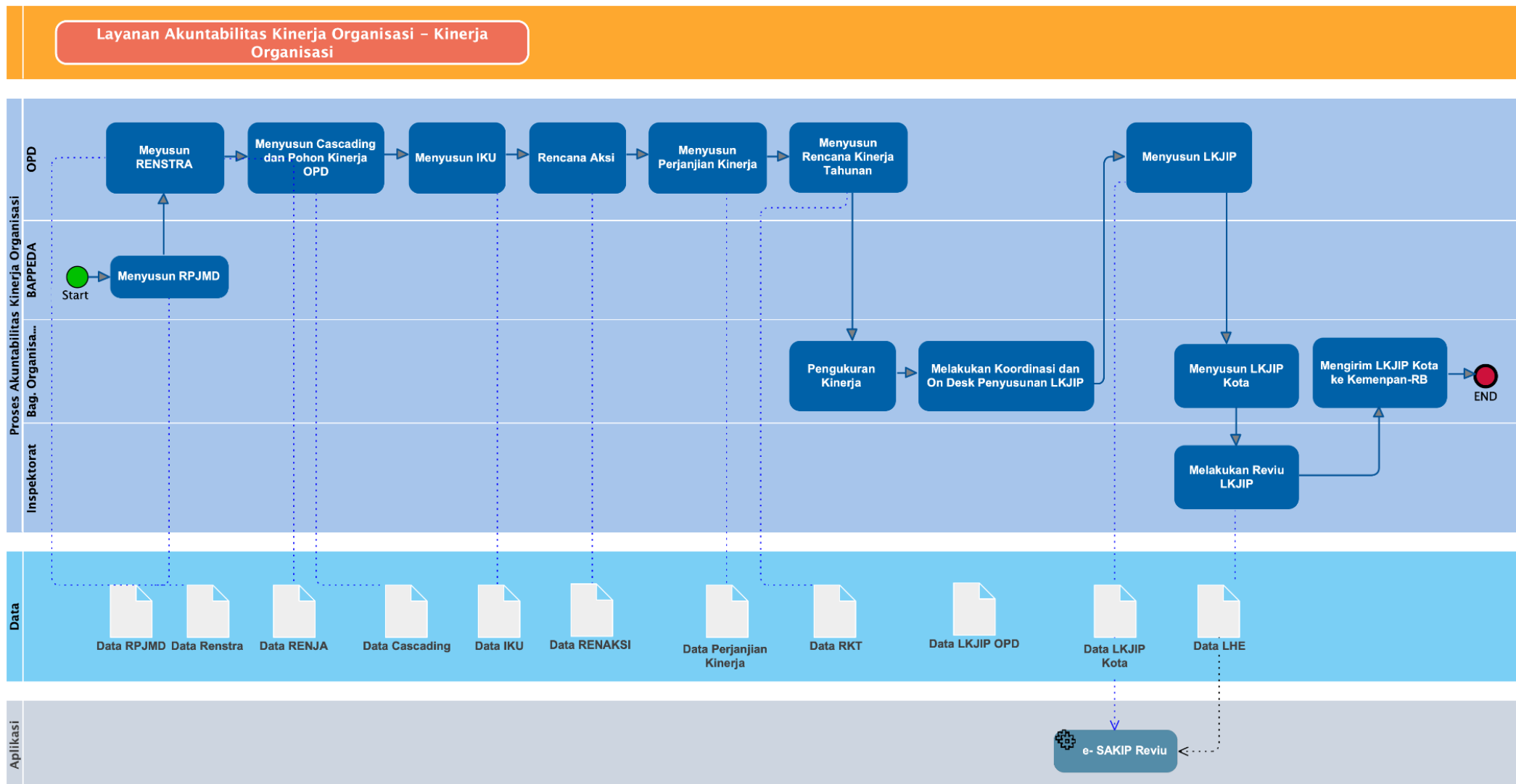
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bag. Organisasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bag. Organisasi;
- b. penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang terdapat di Bagian Organisasi adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja
3	Kategori Layanan	RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Bagian Organisasi memiliki 1 kategori layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang melibatkan Inspektorat, Bagian Organisasi, OPD, dan Bappelitbanda. Pada layanan penganggaran ini Aplikasi yang digunakan adalah e-SAKIP Reviu.



Gambar 3.4.24 RAL.02.07.01 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menunjang layanan pengadaan barang dan jasa yang diampu oleh Bag. Pengadaan Barang & Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

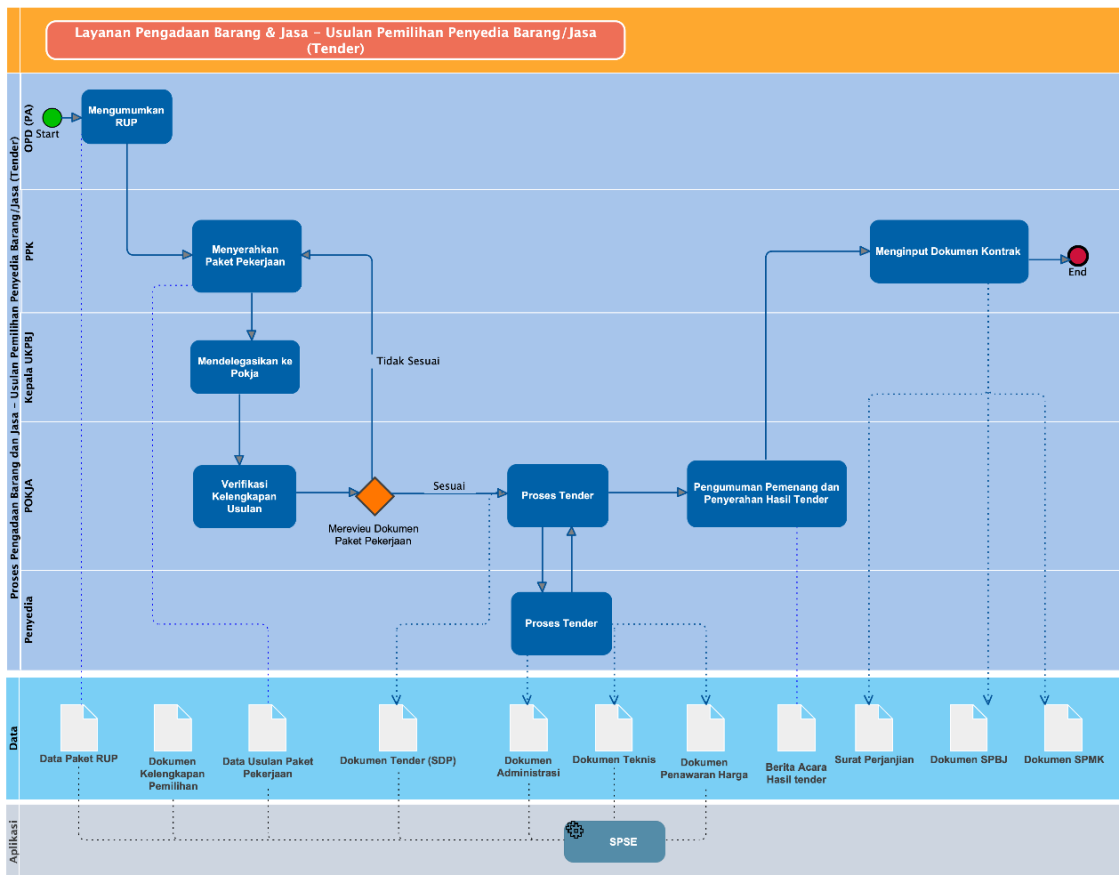
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan dibidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

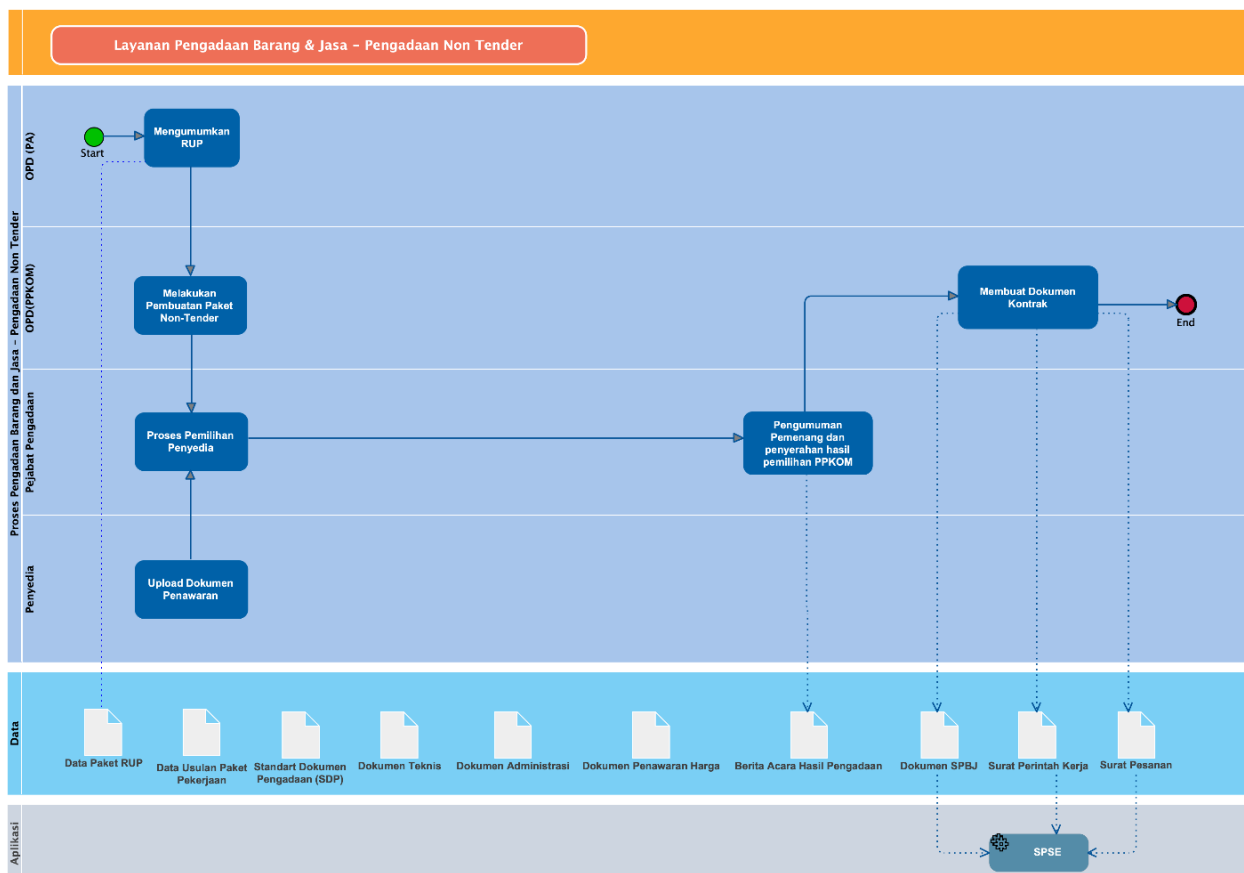
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengadaan barang dan jasa yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi
3	Kategori Layanan	RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) RAL.02.06.02 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Non Tender)

Bagian Pengadaan Barang & Jasa memiliki 2 kategori layanan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Pokja, Kepala UKPBJ, OPD, Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Pada layanan pengadaan barang dan jasa ini Aplikasi yang digunakan adalah SPSE.



Gambar 3.4.25 RAL.02.06.01 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender)



Gambar 3.4.26 RAL.02.06.02 Layanan Usulan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Non Tender)

13. Layanan JDIH

Dalam menunjang layanan JDIH yang diampu oleh Bag. Hukum melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, sebagai wakil pemerintah pusat bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum.

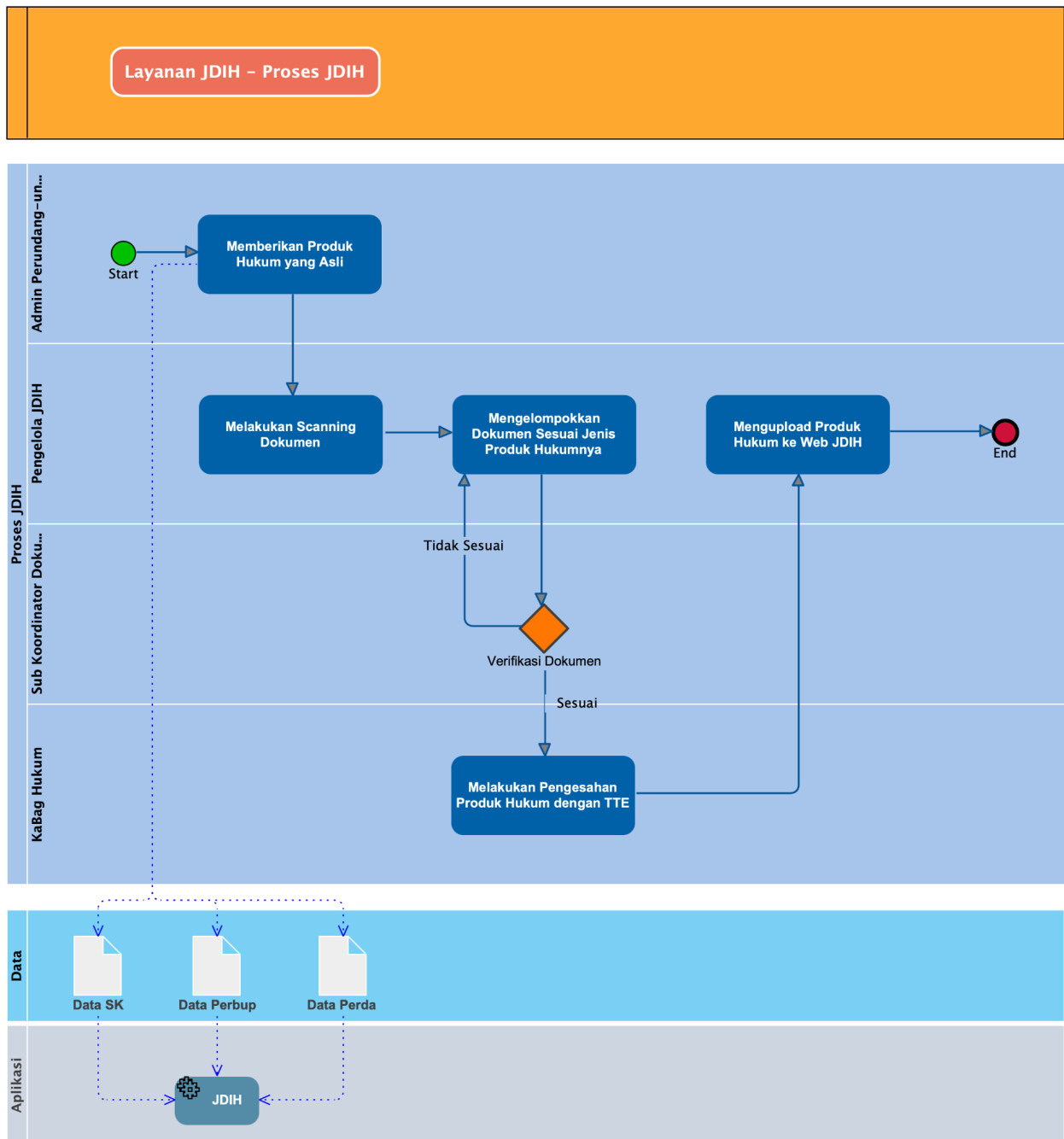
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum melaksanakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; dan
- e) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

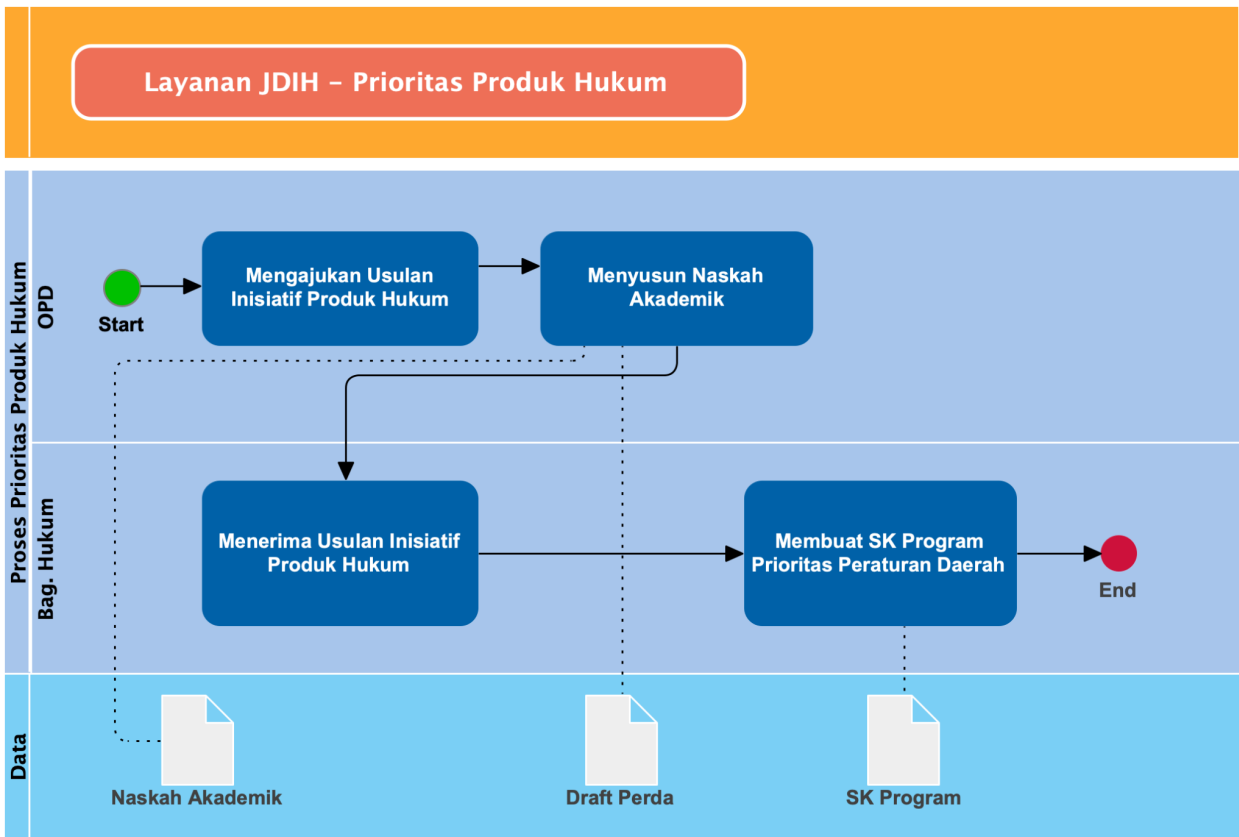
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan JDIH yang terdapat di Bag. Hukum adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.28 Hukum
3	Kategori Layanan	RAL.01.28.01 Layanan JDIH RAL.01.28.02 Layanan Produk Hukum RAL.01.28.03 Layanan Penyusunan Perda RAL.01.28.04 Layanan Penerbitan Perwako

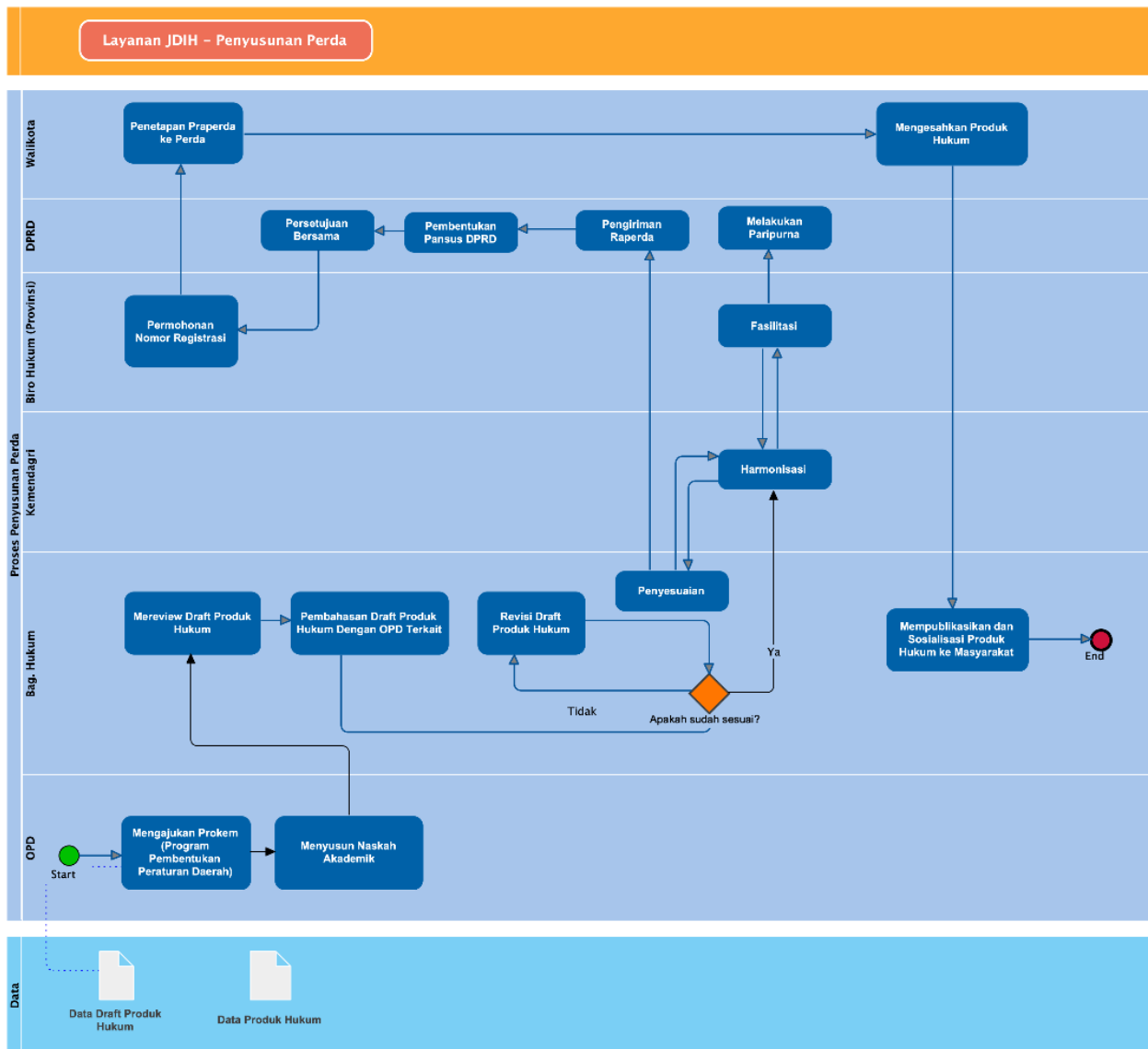
Bagian Hukum memiliki 4 kategori layanan JDIH yang melibatkan beberapa OPD yaitu Kemenkumham, Kemendagri, DPRD, Gubernur, Sekda, Biro Hukum dan Bagian Hukum. Pada layanan JDIH ini Aplikasi yang digunakan adalah JDIH dan JDIHN.



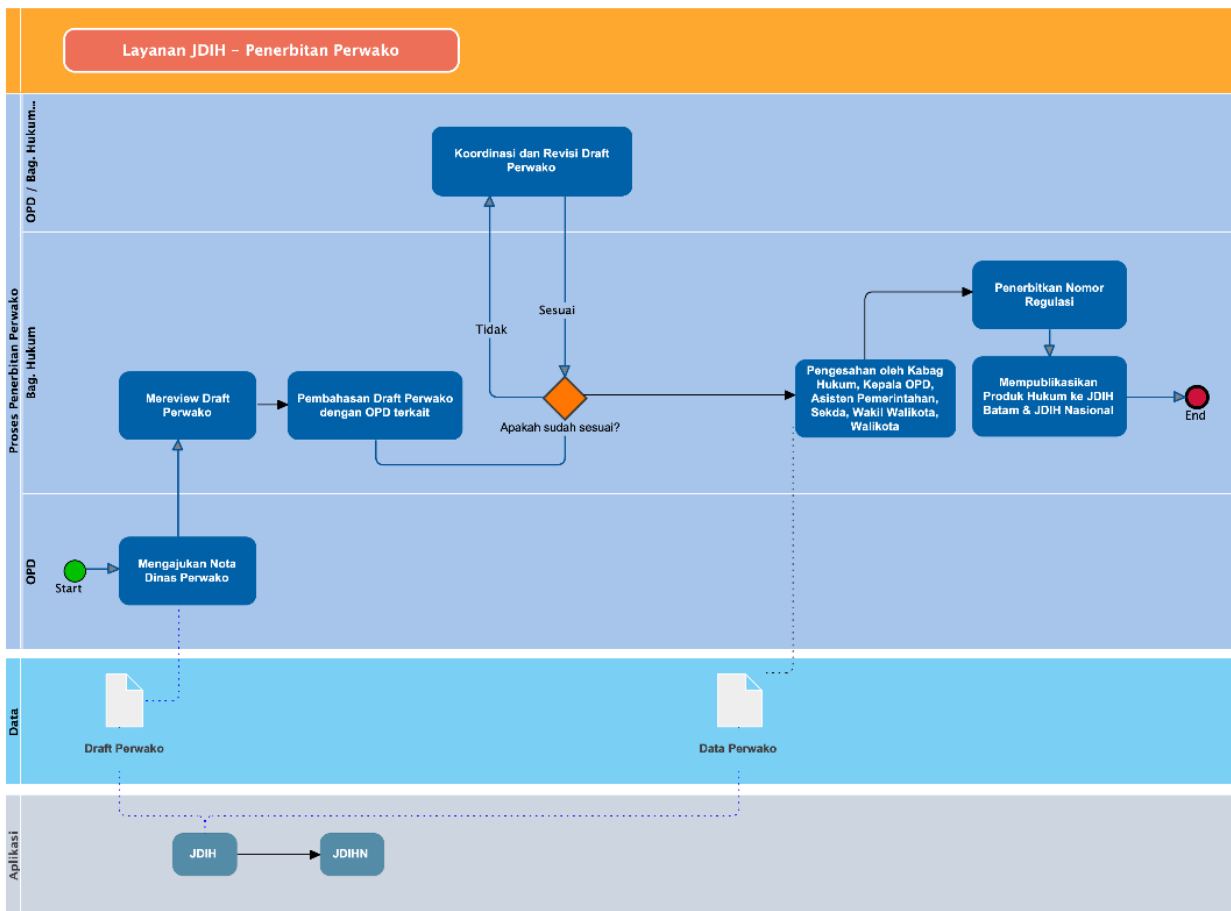
Gambar 3.4.27 RAL.01.28.01 Layanan JDIH



Gambar 3.4.28 RAL.01.28.01 Layanan Produk Hukum



Gambar 3.4.29 RAL.01.28.01 Layanan Penyusunan PERDA



Gambar 3.4.30 RAL.01.28.02 Layanan Penerbitan Perwako

14. Layanan Perizinan

Dalam menunjang layanan Perizinan yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

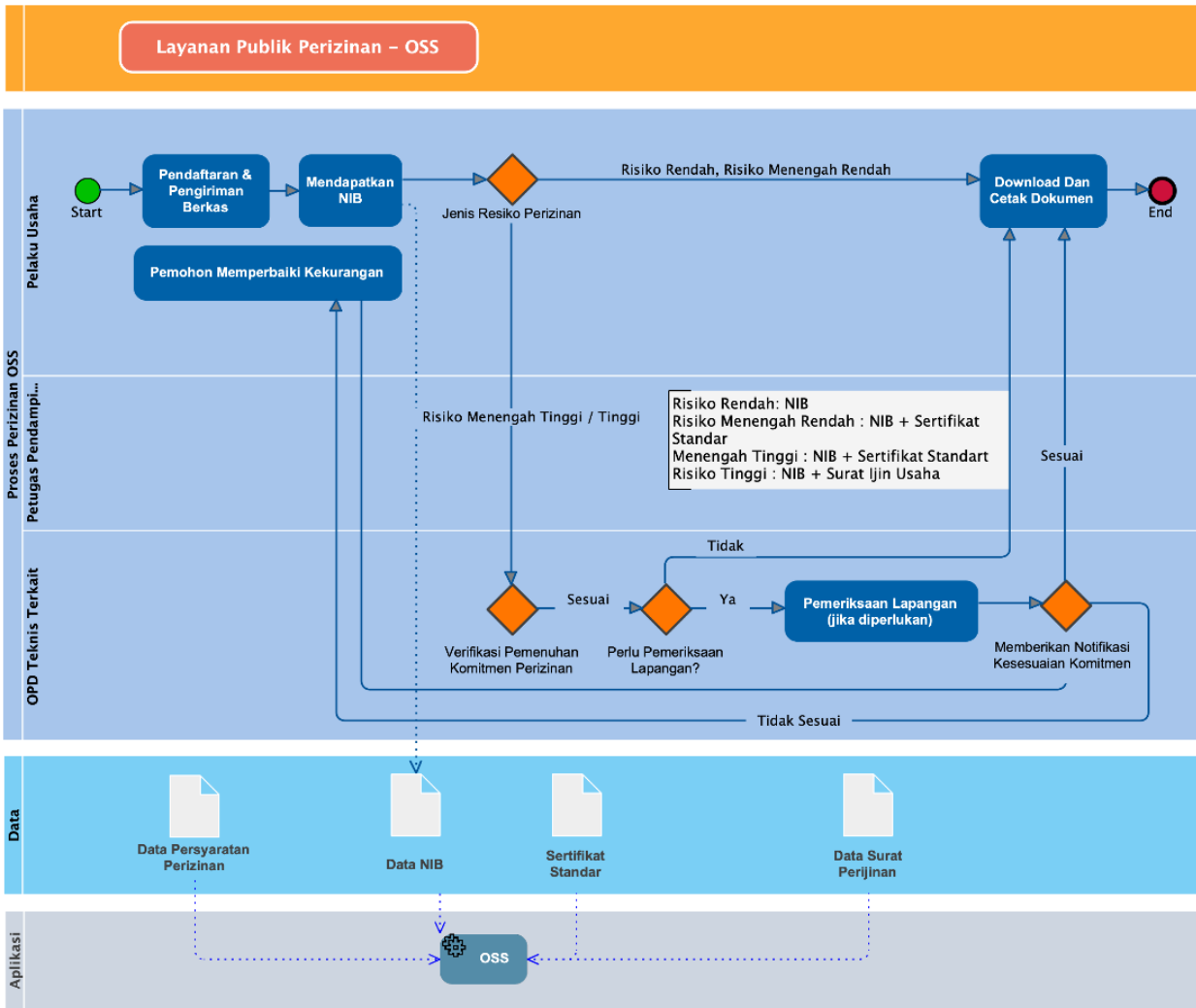
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, DPMPTSP melaksanakan fungsi:

- a) Pengekoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

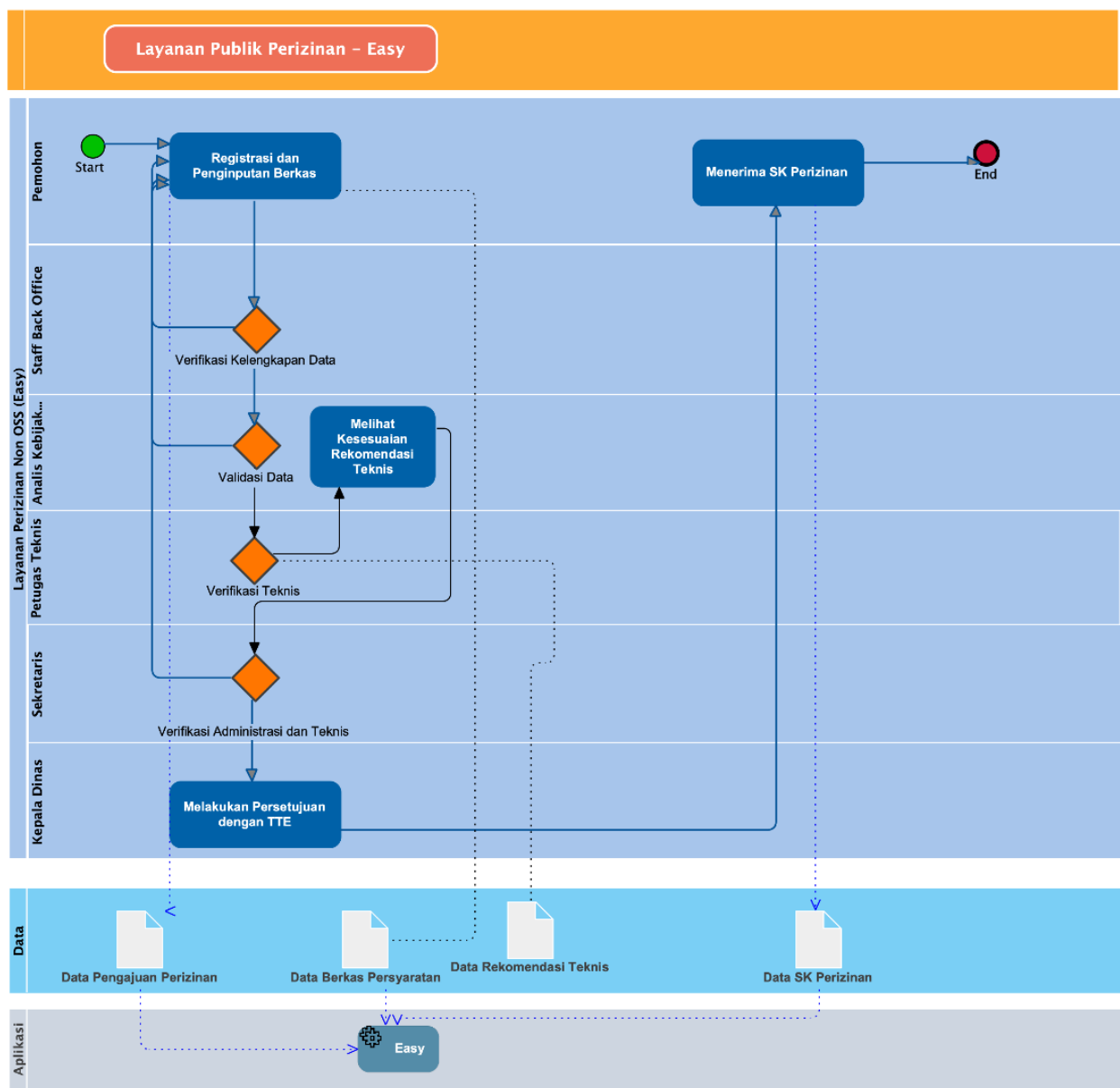
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Perizinan yang terdapat di DPMPTSP adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.16 Perizinan
3	Kategori Layanan	RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS RAL.01.16.02 Layanan Perizinan Easy

DPMPTSP memiliki 2 kategori layanan perizinan yang melibatkan OPD Terkait, DPMPTSP, dan Masyarakat. Pada layanan perizinan ini Aplikasi yang digunakan adalah OSS dan Easy.



Gambar 3.4.31 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan OSS



Gambar 3.4.32 RAL.01.16.01 Layanan Perizinan Easy

15. Layanan Kesehatan

Dalam menunjang layanan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

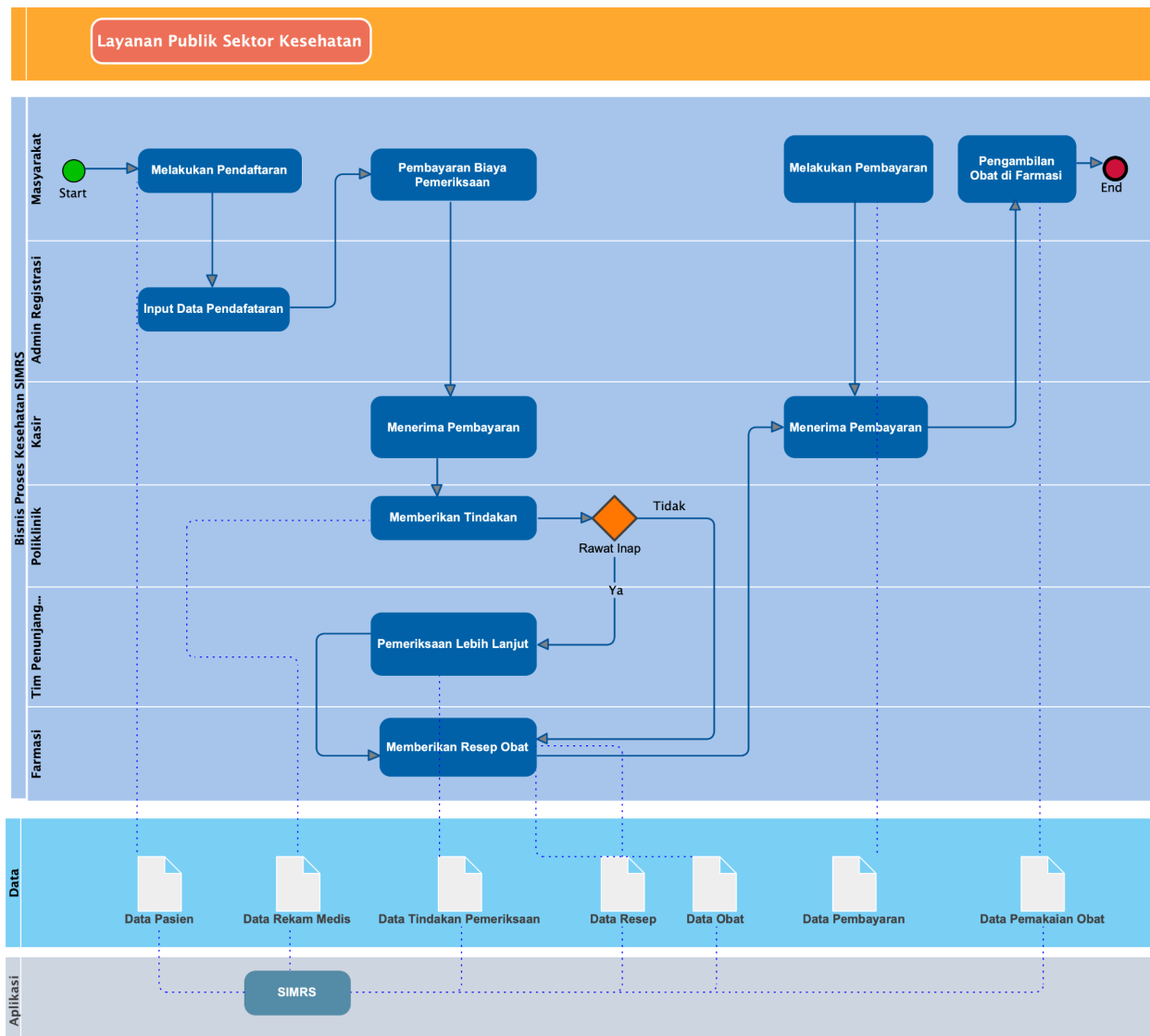
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi, dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Administrasi Pemerintahan
2	Area Layanan	RAL.01.25 Kesehatan
3	Kategori Layanan	RAL.01.25.01 Layanan SIMRS

Dinas Kesehatan memiliki 1 kategori layanan kesehatan yang melibatkan Admin Registrasi, Kasir, Poli, Farmasi dan Masyarakat. Pada layanan kesehatan ini Aplikasi yang digunakan adalah SIMRS.



Gambar 3.4.33 RAL.01.25.01 Layanan SIMRS

16. Layanan Pendidikan

Dalam menunjang layanan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

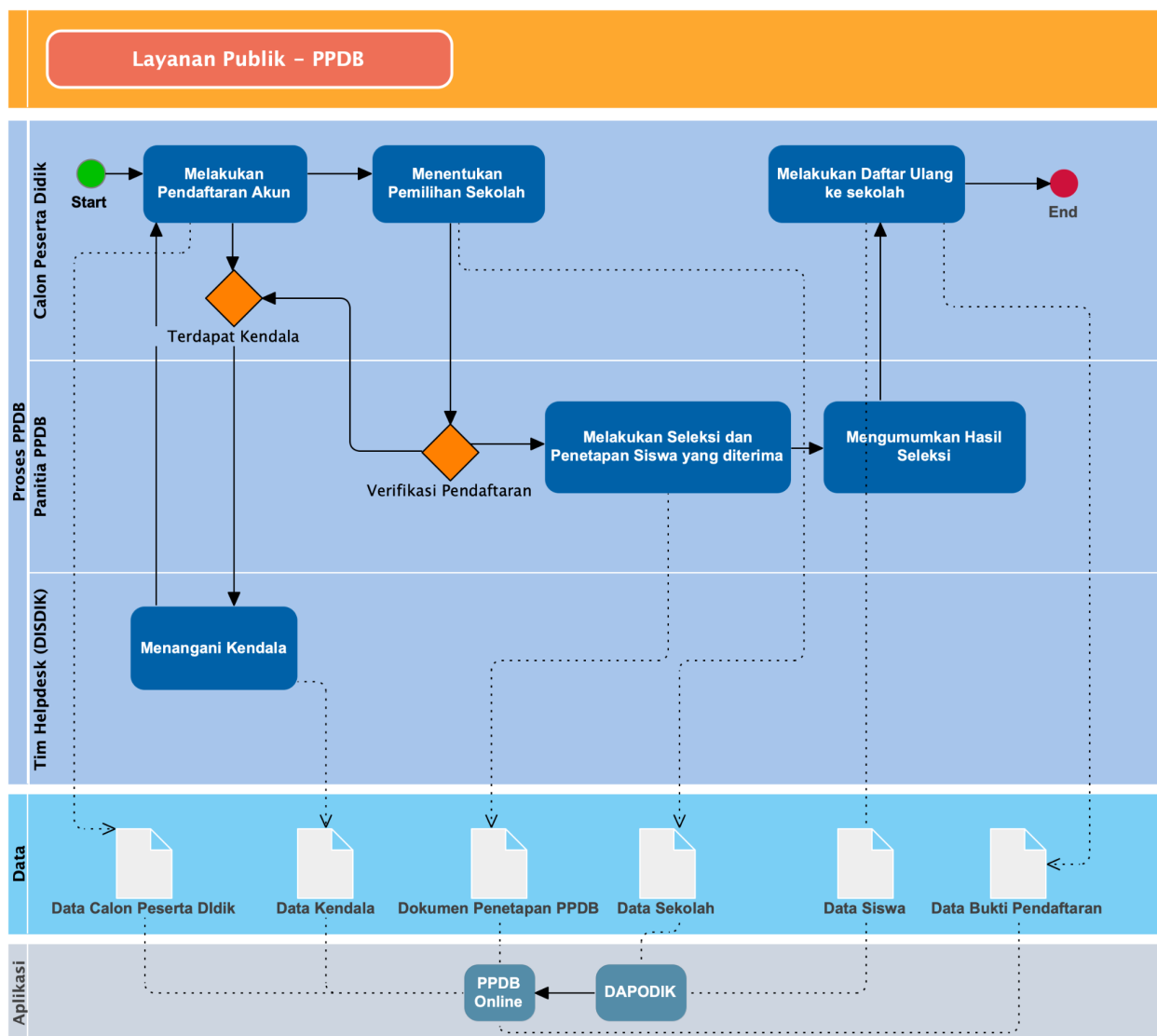
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang guru dan Kependidikan, bidang pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan Koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pendidikan yang terdapat di Dinas Pendidikan adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL.01 Layanan Publik
2	Area Layanan	RAL.01.31 Pendidikan
3	Kategori Layanan	RAL.01.31.01 Layanan PPDB

Dinas Kesehatan memiliki 1 kategori layanan kesehatan yang melibatkan Dinas Pendidikan, Calon Peserta Didik, dan Panitia PPDB. Pada layanan kesehatan ini Aplikasi yang digunakan adalah PPDB Online dan DAPODIK.



Gambar 3.4.34 RAL.01.25.01 Layanan PPDB

17. Layanan Kependudukan

Dalam menunjang layanan Kependudukan yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kependudukan melaksanakan fungsi:

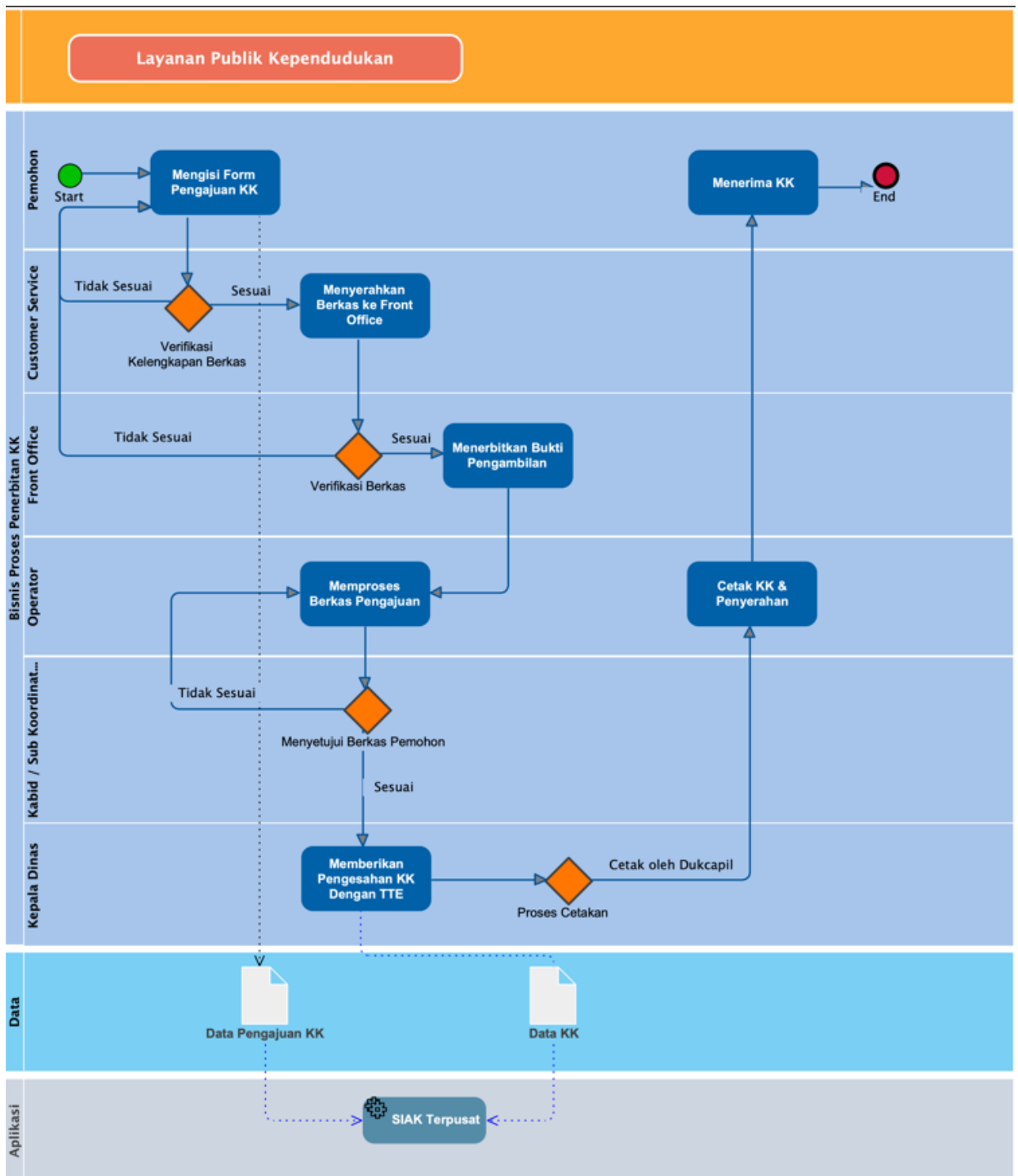
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta menerbitkan Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak.
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pengesahan dan pengangkatan anak, perubahan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing
- Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mengelola perubahan status kewarganegaraan

- d) Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, serta mencatat pembatalan perkawinan dan perceraian

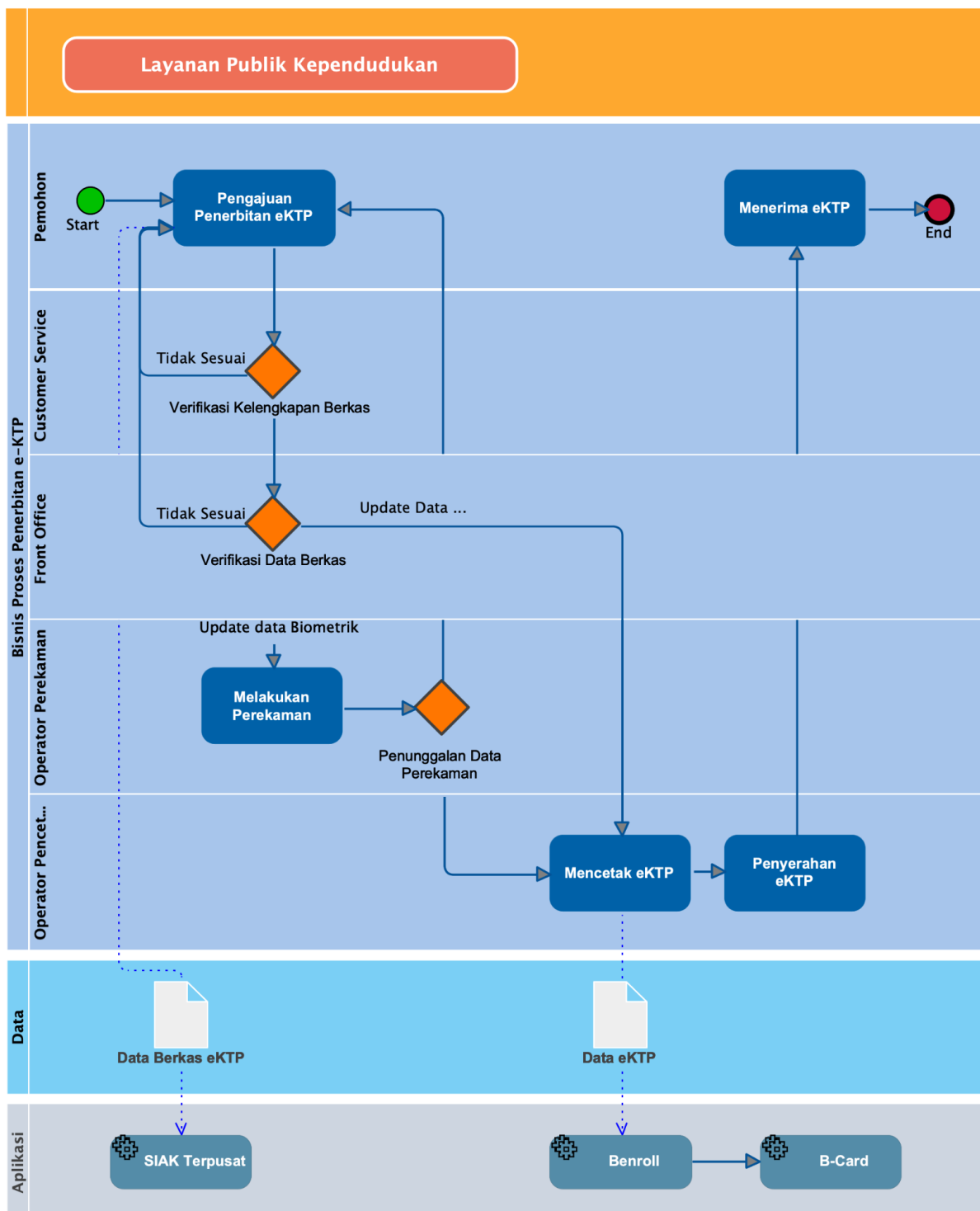
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Kependudukan yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

No.	Deskripsi	Uraian
1	Domain Layanan	RAL 01 Layanan Publik
2	Area Layanan	01.23 Kependudukan
3	Kategori Layanan	RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran RAL.01.23.04 Layanan Akta Kematian RAL.01.23.05 Layanan KIA RAL.01.23.06 Layanan Perkawinan RAL.01.23.07 Layanan Perceraian RAL.01.23.08 Layanan Surat Pindah

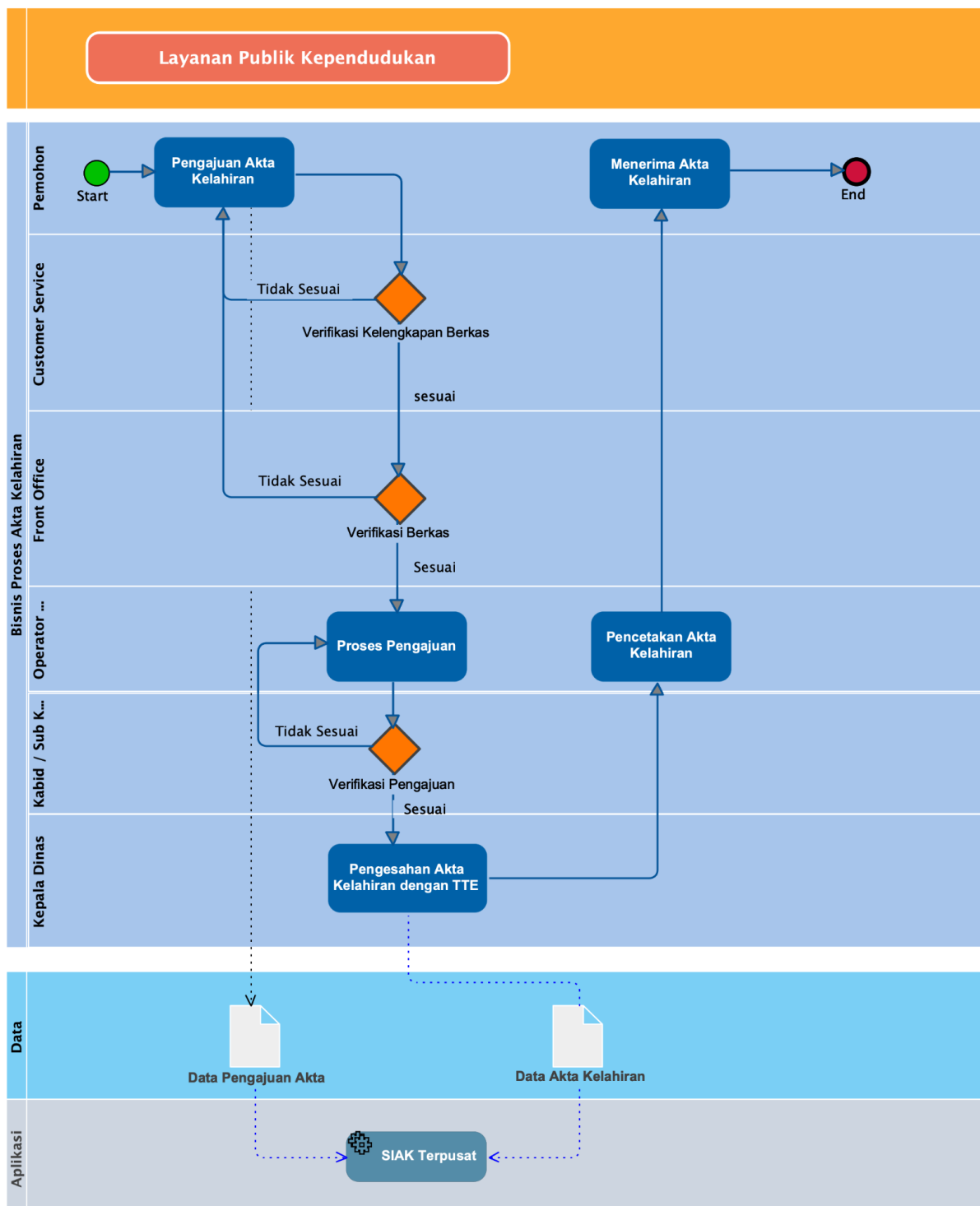
Dinas Kependudukan memiliki 5 kategori layanan Kependudukan yang melibatkan DISDUKCAPIL, Kabid/Kasi, Kepala Dinas, Petugas dan Masyarakat. Pada layanan Kependudukan ini Aplikasi yang digunakan adalah SIAK Terpusat.



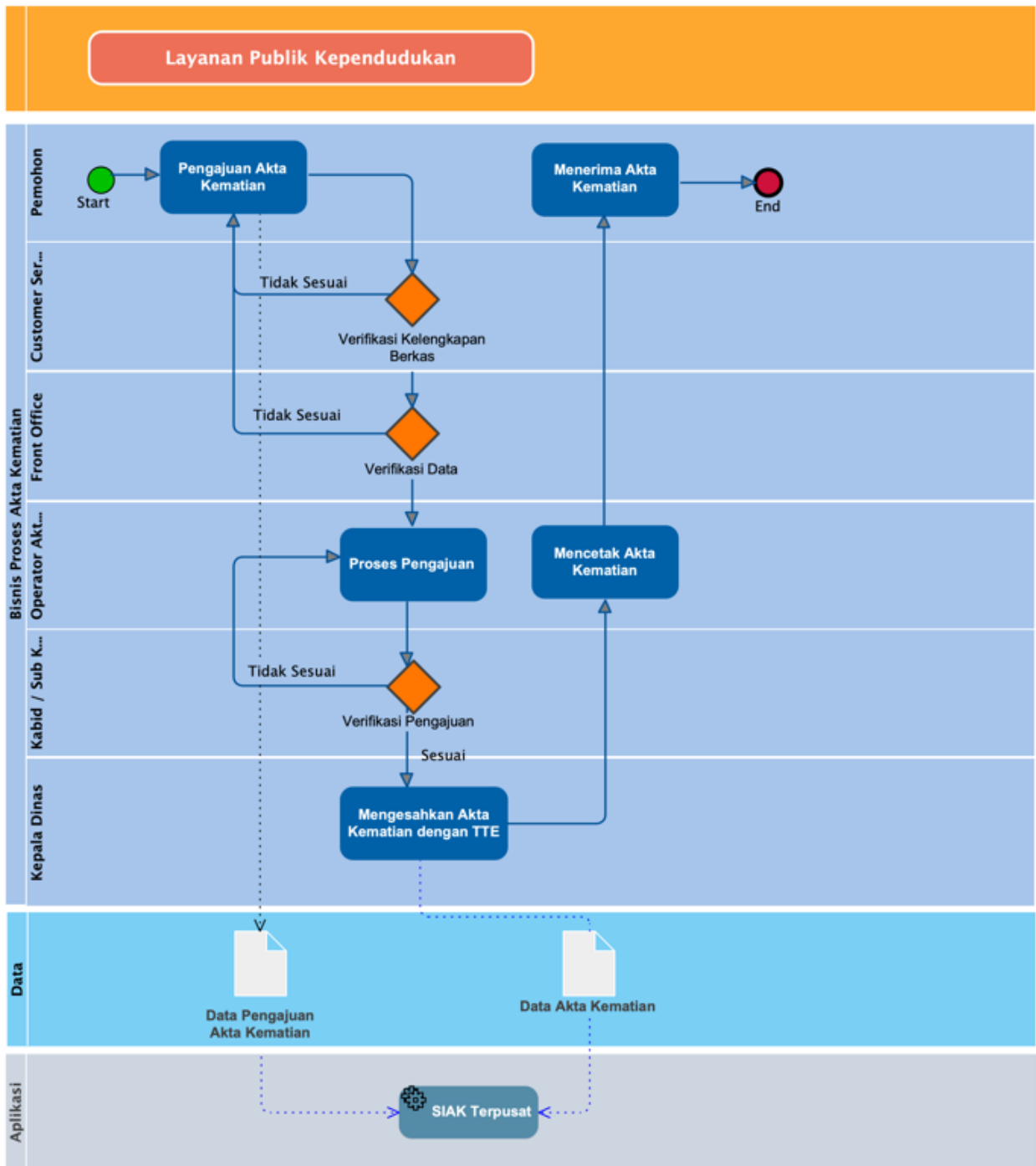
Gambar 2.6.3.36 RAL.01.23.01 Layanan Penerbitan KK



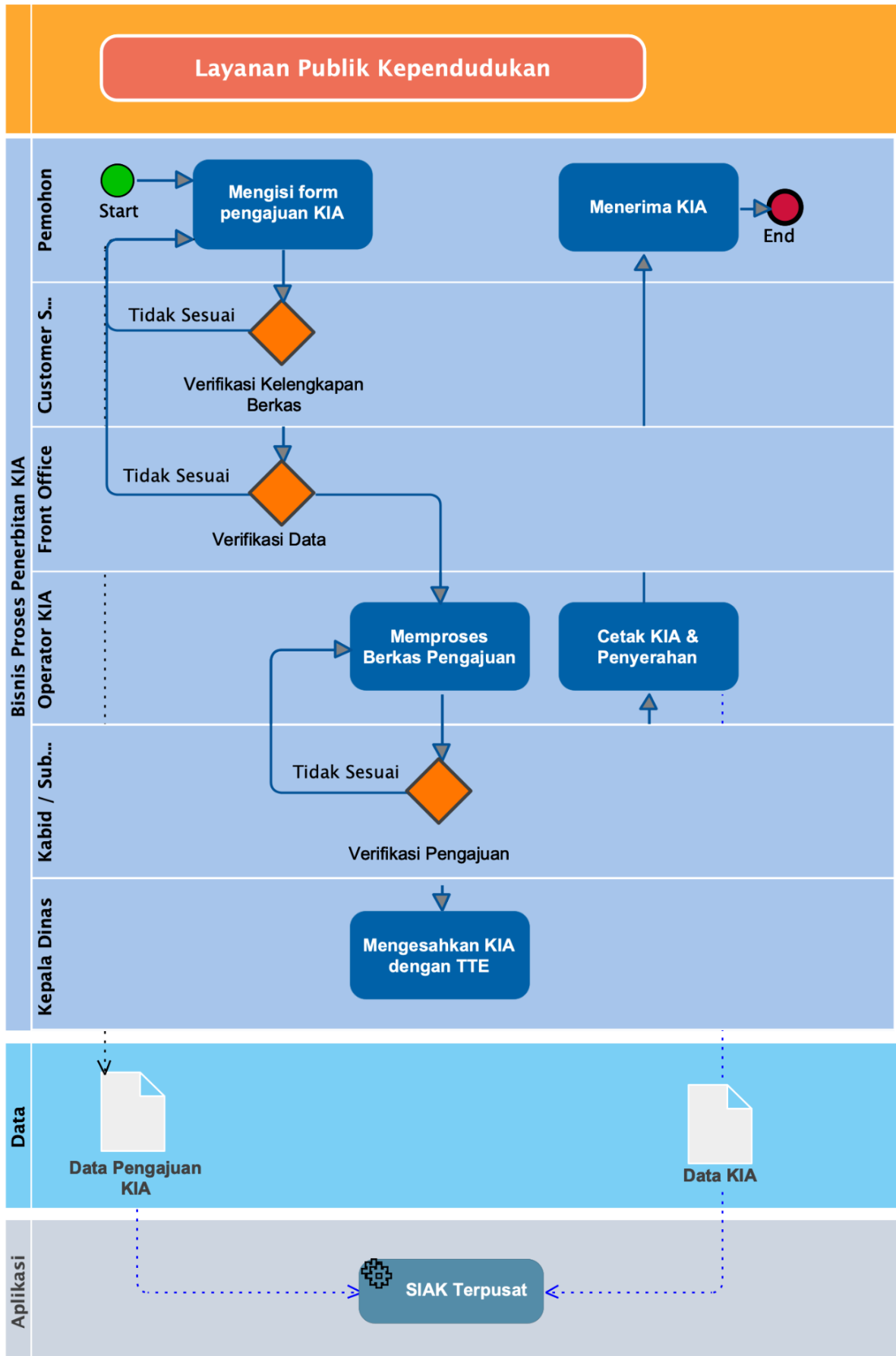
Gambar 2.6.3.37 RAL.01.25.02 Layanan Penerbitan e-KTP



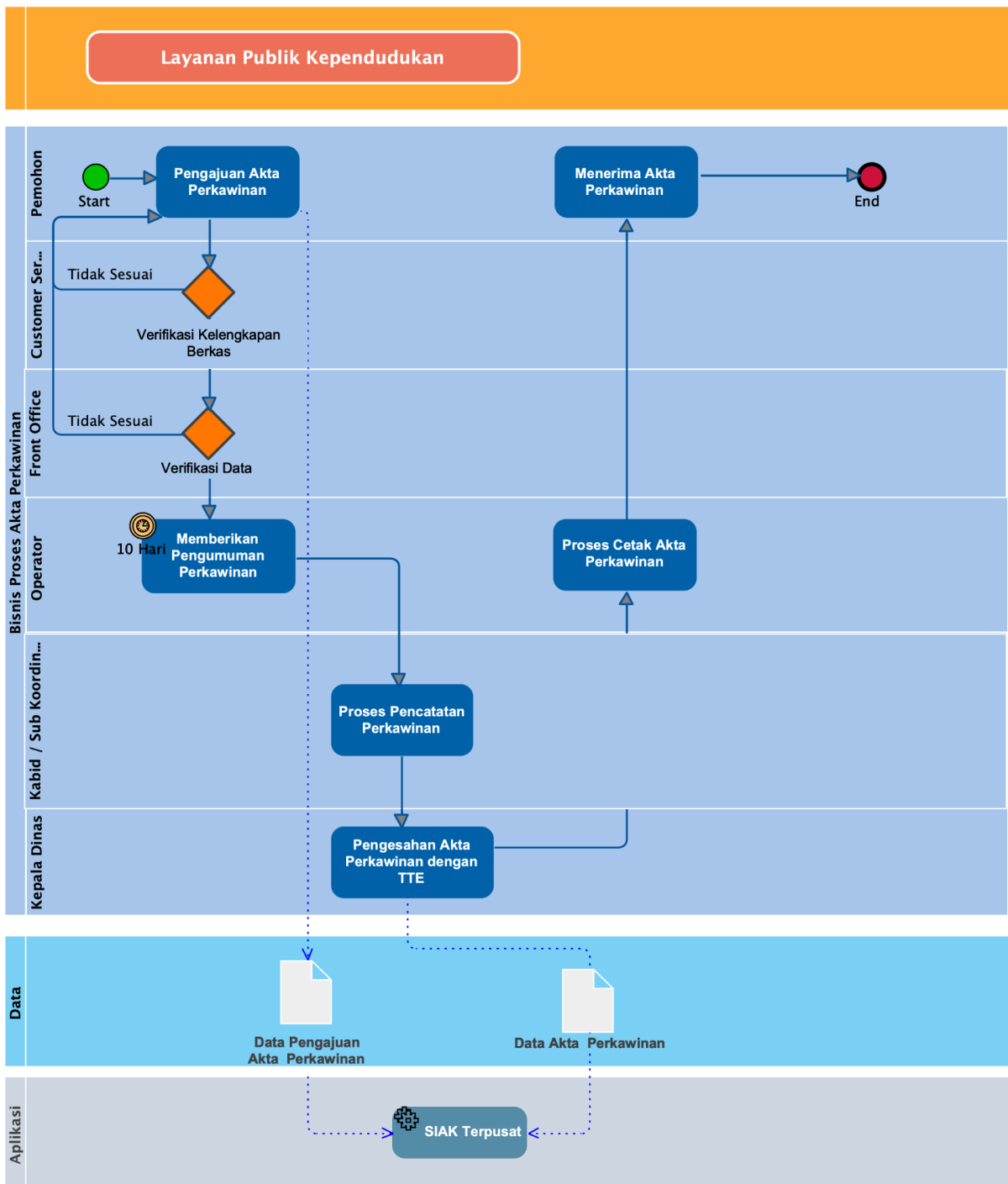
Gambar 2.6.3.38 RAL.01.23.03 Layanan Akta Kelahiran



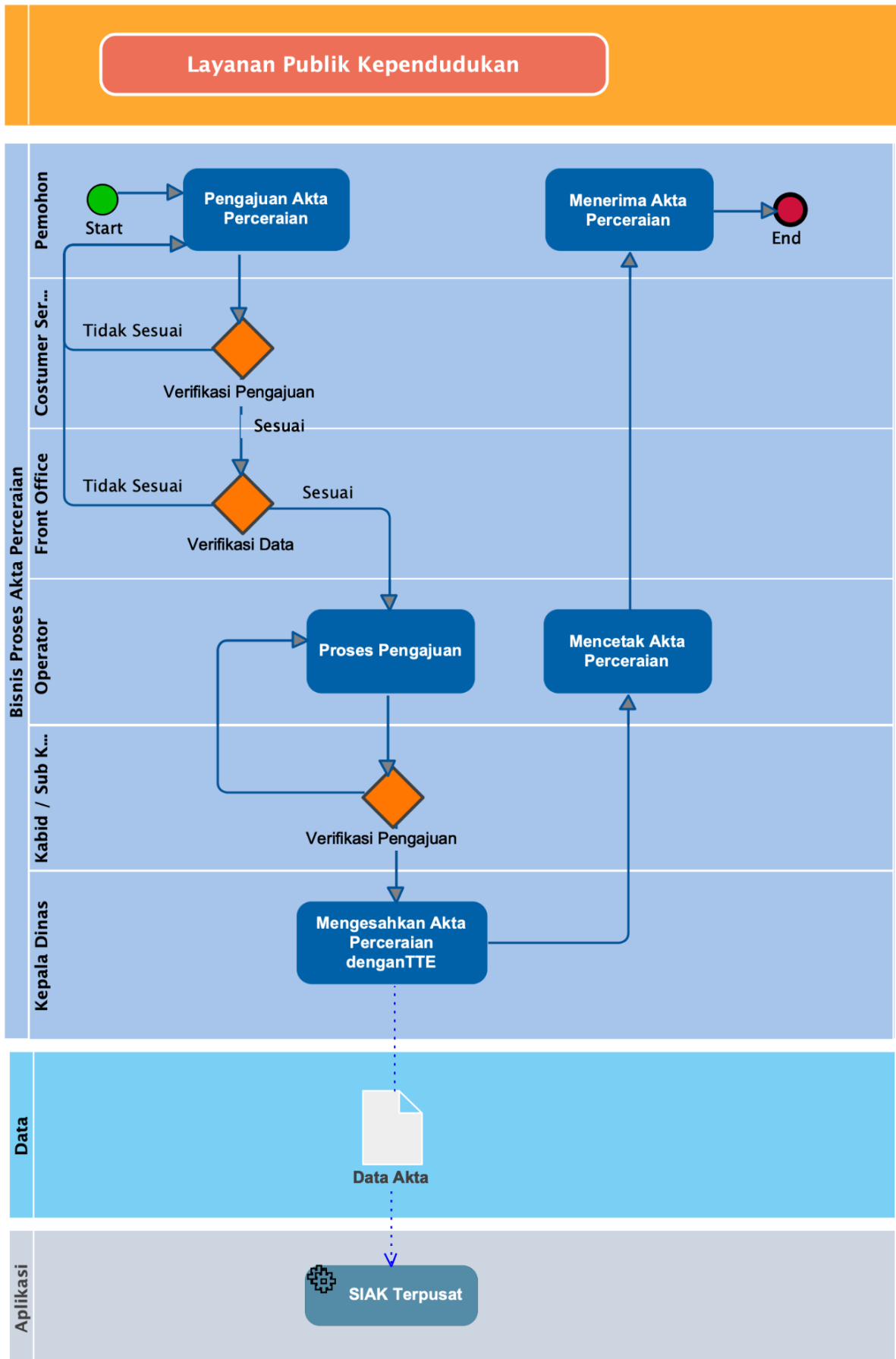
Gambar 2.6.3.39 RAL.01.25.04 Layanan Akta Kematian



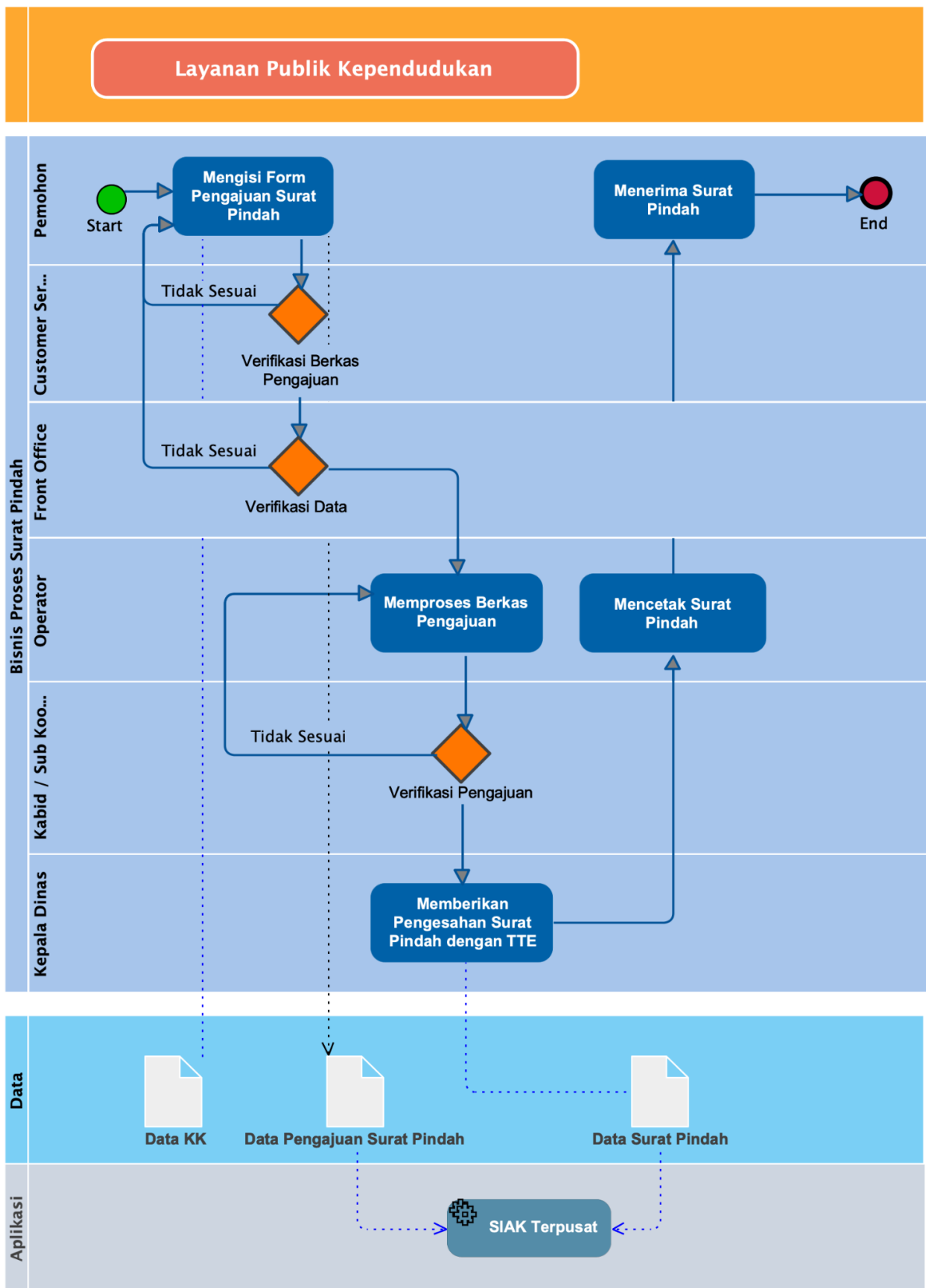
Gambar 2.6.3.40 RAL.01.25.04 Layanan KIA



Gambar 2.6.3.41 RAL.01.25.04 Layanan Perkawinan



Gambar 2.6.3.42 RAL.01.25.04 Layanan Perceraian



Gambar 2.6.3.43 RAL.01.25.04 Layanan Surat Pindah

B. Katalog Layanan

Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh OPD di pemerintah kota batam. Dimana untuk Level 1 & 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada layanan yang ada diseluruh OPD.

Tabel 3.4.1 Katalog Layanan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-001	Layanan Cuti	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-001 Layanan Cuti
Layanan BTM-002	Layanan Diklat Teknis/Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.01.04-Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-002 Layanan Diklat Teknis/Fungsional
Layanan BTM-003	Layanan Hukuman Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.02-Pembinaan Disiplin ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-003 Layanan Hukuman Disiplin
Layanan BTM-004	Layanan Kartu Identitas Suami/Istri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-004 Layanan Kartu Identitas Suami/Istri
Layanan BTM-005	Layanan Kartu Identitas Pegawai ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-005 Layanan Kartu Identitas Pegawai ASN
Layanan BTM-006	Layanan Kehadiran Pegawai/Data Disiplin Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.02-Pembinaan Disiplin ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-006 Layanan Kehadiran Pegawai/Data Disiplin Pegawai
Layanan BTM-007	Layanan Kenaikan Pangkat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.51.05.01-Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-007 Layanan Kenaikan Pangkat
Layanan BTM-008	Layanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-008 Layanan Kepegawaian
Layanan BTM-009	Layanan Konsultasi Pengembangan Kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.01.05-Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-009 Layanan Konsultasi Pengembangan Kompetensi

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			Tinggi, Jabatan Fungsional			
Layanan BTM-010	Layanan Pelatihan Dasar CPNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.01.04-Penyelenggaraa n Diklat Prajabatan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-010 Layanan Pelatihan Dasar CPNS
Layanan BTM-011	Layanan Pencantuman Gelar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-011 Layanan Pencantuman Gelar
Layanan BTM-012	Layanan Pengadaan Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.04-Pelaksanaan Pengadaan ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-012 Layanan Pengadaan Pegawai
Layanan BTM-013	Layanan Penghargaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.54.01.03-Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-013 Layanan Penghargaan
Layanan BTM-014	Layanan Pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-014 Layanan Pensiun
Layanan BTM-015	Layanan Asuransi dan Tunjangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.38.02.02-Gaji dan Tunjangan ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-015 Layanan Asuransi dan Tunjangan
Layanan BTM-016	Layanan Pencetakan Badge Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-016 Layanan Pencetakan Badge Pegawai
Layanan BTM-017	Layanan Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.59.03.05-Pengawasan kinerja pemerintah daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-017 Layanan Penilaian Kinerja Pegawai
Layanan BTM-018	Layanan Perbaikan SK dan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.50.02.02-Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-018 Layanan Perbaikan SK dan Perjanjian Kerja
Layanan BTM-019	Layanan Anjab dan ABK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BTH.51.03.01-Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-019 Layanan Anjab dan ABK
Layanan BTM-020	Layanan Pendaftaran Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.01.01.08-Pendaftaran dan Pemberdayaan Ormas	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-020 Layanan Pendaftaran Ormas
Layanan BTM-021	Layanan Pendataan Aset	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.45.01.04-Pemeliharaan Aset	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-021 Layanan Pendataan Aset

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-022	Layanan Pendataan Kondisi dan Situasi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-022 Layanan Pendataan Kondisi dan Situasi Daerah
Layanan BTM-023	Layanan Pendataan Paguyuban	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.26.01.11-Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-023 Layanan Pendataan Paguyuban
Layanan BTM-024	Layanan Pendataan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.01.01.05-Perwakilan dan Partai Politik	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-024 Layanan Pendataan Partai Politik
Layanan BTM-025	Layanan Pengajuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.01.01.08-Pendaftaran dan Pemberdayaan Ormas	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-025 Layanan Pengajuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas
Layanan BTM-026	Layanan Penyusunan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTH.49.01.01-Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.24. Pemerintah Daerah	Layanan BTM-026 Layanan Penyusunan Program
Layanan BTM-027	Layanan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.02.02-Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-027 Layanan Pajak Daerah
Layanan BTM-028	Layanan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi serta Publikasi Informasi	Badan Pendapatan Daerah		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-028 Layanan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi serta Publikasi Informasi
Layanan BTM-029	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.02.01-Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-029 Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
Layanan BTM-030	Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.03-Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-030 Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
Layanan BTM-031	Layanan Pajak Lingkup Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, MBLB dan Reklame; Monitoring Alat Rekam Pajak.	Badan Pendapatan Daerah	BTH.42.03.03-Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-031 Layanan Pajak Lingkup Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, MBLB dan Reklame; Monitoring Alat Rekam Pajak.

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-032	Layanan Realisasi Fisik dan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.40.01-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-032 Layanan Realisasi Fisik dan Keuangan
Layanan BTM-033	Layanan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-033 Layanan Keuangan
Layanan BTM-034	Layanan Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.44.01.02-Penyusunan Laporan Akuntansi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-034 Layanan Akuntansi dan Pelaporan
Layanan BTM-035	Layanan Data Kendaraan Pemko	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.14.02.23-Penyediaan Sarpras Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-035 Layanan Data Kendaraan Pemko
Layanan BTM-036	Layanan Penatausahaan Barang Persediaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.03-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-036 Layanan Penatausahaan Barang Persediaan
Layanan BTM-037	Layanan pencairan anggaran (SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Penguji)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.43.01.03-Pembuatan SPD/SPP/SPM	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-037 Layanan pencairan anggaran (SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Penguji)
Layanan BTM-038	Layanan Pengelolaan Gaji ASN (PNS dan PPPK)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.38.02.02-Gaji dan Tunjangan ASN	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-038 Layanan Pengelolaan Gaji ASN (PNS dan PPPK)
Layanan BTM-039	Layanan Perencanaan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.56.01.13-Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-039 Layanan Perencanaan Anggaran
Layanan BTM-040	Layanan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01.04-Pemeliharaan Aset	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-040 Layanan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Layanan BTM-041	Layanan Rekonsiliasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-041 Layanan Rekonsiliasi
Layanan BTM-042	Layanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.03-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-042 Layanan Barang Milik Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-043	Layanan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BTH.45.01.01-Pengadaan Aset	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-043 Layanan Aset Daerah
Layanan BTM-044	Layanan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-044 Layanan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah
Layanan BTM-045	Layanan Pengumpulan Data Kinerja Internal dan Pengukuran Kinerja	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	BTH.53.01-Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-045 Layanan Pengumpulan Data Kinerja Internal dan Pengukuran Kinerja
Layanan BTM-046	Layanan Surat Elektronik	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-046 Layanan Surat Elektronik
Layanan BTM-047	Layanan Verifikasi Dokumen Perencanaan	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	BTH.34.02.03-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-047 Layanan Verifikasi Dokumen Perencanaan
Layanan BTM-048	Layanan Pemberian Insentif Kepada Tokoh Agama(Mubaligh ,Imam , dan Guru TPQ	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.41. Agama	Layanan BTM-048 Layanan Pemberian Insentif Kepada Tokoh Agama(Mubaligh ,Imam , dan Guru TPQ
Layanan BTM-049	Layanan Verifikasi Rumah Ibadah & Lembaga Keagamaan Lainnya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.41. Agama	Layanan BTM-049 Layanan Verifikasi Rumah Ibadah & Lembaga Keagamaan Lainnya
Layanan BTM-050	Layanan Administrasi Pembangunan: Dashboard Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD	Bagian Administrasi Pembangunan	BTH.44.01.01-Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-050 Layanan Administrasi Pembangunan: Dashboard Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD
Layanan BTM-051	Layanan Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum	BTH.49.02.05-Pembahasan Peraturan Daerah / Produk Hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.28. Hukum	Layanan BTM-051 Layanan Informasi Produk Hukum
Layanan BTM-052	Layanan Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Kerjasama	BTH.34.01.02-Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.01. Dalam Negeri	Layanan BTM-052 Layanan Kerjasama Dalam Negeri

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-053	Layanan Kerjasama Luar Negeri	Bagian Kerjasama		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.02. Urusan Luar Negeri	Layanan BTM-053 Layanan Kerjasama Luar Negeri
Layanan BTM-054	Layanan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Bagian Kerjasama	BTH.34.01.01-Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-054 Layanan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Layanan BTM-055	Layanan dan Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi	Bagian Organisasi		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-055 Layanan dan Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi
Layanan BTM-056	Layanan Evaluasi Kelembagaan	Bagian Organisasi	BTH.01.01.04-Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-056 Layanan Evaluasi Kelembagaan
Layanan BTM-057	Layanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-057 Layanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan BTM-058	Layanan Proses Bisnis dan SOP	Bagian Organisasi	BTH.55.01.03-Penyusunan Peta Proses Bisnis	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-058 Layanan Proses Bisnis dan SOP
Layanan BTM-059	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Bagian Organisasi	BTH.54.01.03-Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-059 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Layanan BTM-060	Layanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	BTH.48.01.08-Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola	Layanan BTM-060 Layanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Layanan BTM-061	Layanan Helpdesk Penyedia di SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Layanan BTM-061 Layanan Helpdesk Penyedia di SPSE
Layanan BTM-062	Layanan Katalog Elektronik Lokal bagi Penyedia dan PP/PPK	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-062 Layanan Katalog Elektronik Lokal bagi Penyedia dan PP/PPK
Layanan BTM-063	Layanan Konsultasi P3DN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Layanan BTM-063 Layanan Konsultasi P3DN
Layanan BTM-064	Layanan Konsultasi Perencanaan/Kontrak Tender/Seleksi bagi PPK	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Layanan BTM-064 Layanan Konsultasi Perencanaan/Kontrak Tender/Seleksi bagi PPK

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-065	Layanan Pembuktian Kualifikasi Penyedia	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-065 Layanan Pembuktian Kualifikasi Penyedia
Layanan BTM-066	Layanan Pendaftaran Auditor dan Agensi di SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-066 Layanan Pendaftaran Auditor dan Agensi di SPSE
Layanan BTM-067	Layanan Pendaftaran PP/PPK/Pokja di SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-067 Layanan Pendaftaran PP/PPK/Pokja di SPSE
Layanan BTM-068	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-068 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan BTM-069	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-069 Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender
Layanan BTM-070	Layanan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-070 Layanan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Layanan BTM-071	Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-071 Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi
Layanan BTM-072	Layanan Permasalahan/Helpdesk untuk PP/PPK/Pokja/Auditor/Agensi di SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.44. Komunikasi	Layanan BTM-072 Layanan Permasalahan/Helpdesk untuk PP/PPK/Pokja/Auditor/Agensi di SPSE
Layanan BTM-073	Layanan Personil UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-073 Layanan Personil UKPBJ
Layanan BTM-074	Layanan Rencana Umum Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-074 Layanan Rencana Umum Pengadaan
Layanan BTM-075	Layanan Toko Daring bagi Penyedia dan PP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-075 Layanan Toko Daring bagi Penyedia dan PP
Layanan BTM-076	Layanan Verifikasi Penyedia di SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-076 Layanan Verifikasi Penyedia di SPSE
Layanan BTM-077	Layanan Rencana Umum Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BTH.45.05.02-Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-077 Layanan Rencana Umum Pengadaan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-078	Layanan Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-078 Layanan Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Layanan BTM-079	Layanan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.37.01.16-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja Modal)	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-079 Layanan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Layanan BTM-080	Layanan Penerbitan SPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.43.01.03-Pembuatan SPD/SPP/SPM	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-080 Layanan Penerbitan SPD
Layanan BTM-081	Layanan Pengajuan Ganti Uang	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-081 Layanan Pengajuan Ganti Uang
Layanan BTM-082	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.34.02.02-Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-082 Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Layanan BTM-083	Layanan Rekon Bast Belanja Modal	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-083 Layanan Rekon Bast Belanja Modal
Layanan BTM-084	Layanan Usulan Rekonsiliasi Bulanan	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-084 Layanan Usulan Rekonsiliasi Bulanan
Layanan BTM-085	Layanan Anggaran/Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.42.01-Anggaran dan Akuntansi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-085 Layanan Anggaran/Keuangan
Layanan BTM-086	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan	BTH.52.01-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-086 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Layanan BTM-087	Layanan Laporan Fisik dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-087 Layanan Laporan Fisik dan Keuangan
Layanan BTM-088	Layanan Perencanaan	Bagian Perencanaan dan Keuangan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional	Layanan BTM-088 Layanan Perencanaan
Layanan BTM-089	Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bagian Umum	BTH.45.03-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-089 Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-090	Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Bagian Umum	BTH.58.01.02-Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-090 Layanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Layanan BTM-091	Layanan Pengaduan Banjir	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.14.02.03-Operasi dan pemeliharaan kanal banjir	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-091 Layanan Pengaduan Banjir
Layanan BTM-092	Layanan Pengaduan Jalan Rusak	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.14.02.29-Rekonstruksi jalan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-092 Layanan Pengaduan Jalan Rusak
Layanan BTM-093	Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.14.02.27-Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-093 Layanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Layanan BTM-094	Layanan penginputan laporan kerja Bidang PJU	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	BTH.14.02.27-Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-094 Layanan penginputan laporan kerja Bidang PJU
Layanan BTM-095	Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.19.01-Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-095 Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Layanan BTM-096	Layanan Air Bersih dan Sanitasi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-096 Layanan Air Bersih dan Sanitasi
Layanan BTM-097	Layanan Bina Konstruksi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.14.02.21-Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-097 Layanan Bina Konstruksi
Layanan BTM-098	Layanan Air Bersih	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	BTH.15.01-Pengelolaan Infrastruktur, Air Bersih dan Sanitasi	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-098 Layanan Air Bersih
Layanan BTM-099	Layanan Pengawasan Menara dan bangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.17. Pekerjaan Umum	Layanan BTM-099 Layanan Pengawasan Menara dan bangunan
Layanan BTM-100	Layanan Informasi Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan BTM-100 Layanan Informasi Destinasi Wisata
Layanan BTM-101	Layanan Informasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Kebudayaan Pariwisata		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan BTM-101 Layanan Informasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-102	Layanan Informasi Kalender Event Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Batam	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan BTM-102 Layanan Informasi Kalender Event Kebudayaan dan Pariwisata
Layanan BTM-103	Layanan Informasi Koleksi Bersejarah dan Pengunjung Museum Raja Ali Haji	Dinas Kebudayaan Pariwisata	BTH.13.01-Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Batam	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan BTM-103 Layanan Informasi Koleksi Bersejarah dan Pengunjung Museum Raja Ali Haji
Layanan BTM-104	Layanan Informasi Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan Pariwisata		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.04. Ekonomi	Layanan BTM-104 Layanan Informasi Pelaku Ekonomi Kreatif
Layanan BTM-105	Layanan Surat Rekomendasi Event(Acara)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.15. Pariwisata	Layanan BTM-105 Layanan Surat Rekomendasi Event(Acara)
Layanan BTM-106	Layanan Peminjaman Sarana Kepemudaan (Ruang Serbaguna Gedung Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.11-Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.34. Pemuda	Layanan BTM-106 Layanan Peminjaman Sarana Kepemudaan (Ruang Serbaguna Gedung Dinas Kepemudaan dan Olahraga)
Layanan BTM-107	Layanan Peminjaman Sarana Kepramukaan (Bumi Perkemahan)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.20-Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.34. Pemuda	Layanan BTM-107 Layanan Peminjaman Sarana Kepramukaan (Bumi Perkemahan)
Layanan BTM-108	Layanan Peminjaman Sarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki ,GOR)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.03-Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.35. Olahraga	Layanan BTM-108 Layanan Peminjaman Sarana Olahraga (Lapangan Bola Kaki ,GOR)
Layanan BTM-109	Layanan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.03-Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.35. Olahraga	Layanan BTM-109 Layanan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Layanan BTM-110	Layanan Rekomendasi Atlet Berprestasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.21-Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.35. Olahraga	Layanan BTM-110 Layanan Rekomendasi Atlet Berprestasi
Layanan BTM-111	Layanan Seleksi Paskibraka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BTH.26.01.11-Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.34. Pemuda	Layanan BTM-111 Layanan Seleksi Paskibraka
Layanan BTM-112	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BTH.55.02.07-Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan BTM-112 Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-113	Layanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BTH.55.02.06-Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan BTM-113 Layanan Pencatatan Sipil
Layanan BTM-114	Layanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.23. Kependudukan	Layanan BTM-114 Layanan Pendaftaran Penduduk
Layanan BTM-115	Layanan Imunisasi Anak	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.01-Pelaksanaan kesehatan Bayi Baru Lahir	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-115 Layanan Imunisasi Anak
Layanan BTM-116	Layanan Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda)	Dinas Kesehatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-116 Layanan Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda)
Layanan BTM-117	Layanan Covid-19	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-117 Layanan Covid-19
Layanan BTM-118	Layanan Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Dinas Kesehatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-118 Layanan Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Layanan BTM-119	Layanan Deteksi Dini Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Kesehatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-119 Layanan Deteksi Dini Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Layanan BTM-120	Layanan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Kesehatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-120 Layanan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Layanan BTM-121	Layanan Vaksinasi	Dinas Kesehatan	BTH.23.01.03-Pengadaan obat dan vaksin	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-121 Layanan Vaksinasi
Layanan BTM-122	Layanan Laporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-122 Layanan Laporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Layanan BTM-123	Layanan Monev-Virat	Dinas Kesehatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-123 Layanan Monev-Virat
Layanan BTM-124	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.03-Peningkatan kompetensi teknis sumber	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Layanan BTM-124 Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			daya manusia kesehatan			
Layanan BTM-125	Layanan HIV & AIDS	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.07-Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-125 Layanan HIV & AIDS
Layanan BTM-126	Layanan Tracking Covid-19	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-126 Layanan Tracking Covid-19
Layanan BTM-127	Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat	Dinas Kesehatan	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-127 Layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Cepat
Layanan BTM-128	Layanan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	BTH.24.04.08-Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-128 Layanan Tuberkulosis
Layanan BTM-129	Layanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	BTH.24.01.01-Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-129 Layanan Kesehatan Masyarakat
Layanan BTM-130	Layanan Harga Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-130 Layanan Harga Produksi Pertanian
Layanan BTM-131	Layanan Informasi Kelembagaan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-131 Layanan Informasi Kelembagaan Pertanian
Layanan BTM-132	Layanan informasi Pemetaan Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.10-Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-132 Layanan informasi Pemetaan Tanaman Pangan
Layanan BTM-133	Layanan Informasi Produksi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.03-Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-133 Layanan Informasi Produksi Pertanian
Layanan BTM-134	Layanan Inventarisasi Barang Modal Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.45.03-Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-134 Layanan Inventarisasi Barang Modal Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-135	Layanan Inventarisasi Barang Persediaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.10-Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-135 Layanan Inventarisasi Barang Persediaan Pangan
Layanan BTM-136	Layanan Keluar Masuk Hewan Kesayangan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.06-Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	Layanan BTM-136 Layanan Keluar Masuk Hewan Kesayangan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan BTM-137	Layanan Kesehatan hewan veteriner	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BTH.03.01.06-Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.09. Peternakan	Layanan BTM-137 Layanan Kesehatan hewan veteriner
Layanan BTM-138	Layanan Pembayaran Non Tunai : Pemotongan Hewan (Sapi dan Kambing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-138 Layanan Pembayaran Non Tunai : Pemotongan Hewan (Sapi dan Kambing)
Layanan BTM-139	Layanan Pembayaran Non Tunai (Penebusan Pupuk Subsidi)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-139 Layanan Pembayaran Non Tunai (Penebusan Pupuk Subsidi)
Layanan BTM-140	Layanan Pendampingan Statistik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.07. Pertanian	Layanan BTM-140 Layanan Pendampingan Statistik
Layanan BTM-141	Layanan Fasilitas Video Conference pimpinan dan Live Streaming OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.58.01.02-Fasilitas Komunikasi Pimpinan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-141 Layanan Fasilitas Video Conference pimpinan dan Live Streaming OPD
Layanan BTM-142	Layanan Informasi dan Permintaan Rekaman CCTV	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.10-Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Sewa Link CCTV)	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-142 Layanan Informasi dan Permintaan Rekaman CCTV
Layanan BTM-143	Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.48.01.06-Pelayanan Informasi Publik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-143 Layanan Informasi Publik
Layanan BTM-144	Layanan internet Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.09-Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Penyediaan Jaringan Internet	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-144 Layanan internet Pemerintah

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-145	Layanan Inventarisasi Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.03-Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-145 Layanan Inventarisasi Aplikasi
Layanan BTM-146	Layanan Konsultasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.13-Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-146 Layanan Konsultasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Layanan BTM-147	Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Dinas Komunikasi dan Informatika		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-147 Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Layanan BTM-148	Layanan Pembuatan Sub Domain	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.02-Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-148 Layanan Pembuatan Sub Domain
Layanan BTM-149	Layanan Pengaduan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-149 Layanan Pengaduan Masyarakat
Layanan BTM-150	Layanan Pengelolaan IT Support	Dinas Komunikasi dan Informatika		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi	Layanan BTM-150 Layanan Pengelolaan IT Support
Layanan BTM-151	Layanan Pengembangan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.03-Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-151 Layanan Pengembangan Aplikasi
Layanan BTM-152	Layanan Penyediaan Hosting Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.04-Pendampingan Pembangunan Aplikasi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-152 Layanan Penyediaan Hosting Aplikasi
Layanan BTM-153	Layanan Ruang server (penitipan server dan aplikasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.04-Pendampingan Pembangunan Aplikasi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-153 Layanan Ruang server (penitipan server dan aplikasi)
Layanan BTM-154	Layanan Sertifikat Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-154 Layanan Sertifikat Elektronik
Layanan BTM-155	Layanan SMS Gateway	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.07-Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Komunikasi Pemerintah Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-155 Layanan SMS Gateway
Layanan BTM-156	Layanan Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.56.01.07-Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Komunikasi Pemerintah Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-156 Layanan Jaringan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-157	Layanan Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	BTH.46.01.02-Membangun Metadata Statistik Sektoral	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.09. Data dan Informasi Pemerintahan	Layanan BTM-157 Layanan Data Statistik Sektoral
Layanan BTM-158	Layanan Belanja Modal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	BTH.37.01.16-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Belanja Modal)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-158 Layanan Belanja Modal
Layanan BTM-159	Layanan Monev Program dan Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-159 Layanan Monev Program dan Keuangan
Layanan BTM-160	Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, Program dan Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-160 Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, Program dan Anggaran
Layanan BTM-161	Layanan Pendataan lengkap KUMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.14. Usaha Kecil dan Menengah	Layanan BTM-161 Layanan Pendataan lengkap KUMKM
Layanan BTM-162	Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-162 Layanan Perizinan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam
Layanan BTM-163	Layanan Penerbitan Nomor Induk Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-163 Layanan Penerbitan Nomor Induk Koperasi
Layanan BTM-164	Layanan Penyelesaian Sengketa Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-164 Layanan Penyelesaian Sengketa Koperasi
Layanan BTM-165	Layanan Permintaan Data Usaha Mikro/Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-165 Layanan Permintaan Data Usaha Mikro/Koperasi
Layanan BTM-166	Layanan Registrasi Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-166 Layanan Registrasi Pelaku Usaha Mikro
Layanan BTM-167	Layanan Surat Dukungan Penyelenggaraan Pameran Dalam Kota Oleh Pihak Ketiga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-167 Layanan Surat Dukungan Penyelenggaraan Pameran Dalam Kota Oleh Pihak Ketiga
Layanan BTM-168	Layanan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Pengurusan HKI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-168 Layanan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Pengurusan HKI
Layanan BTM-169	Layanan Pendaftaran Notaris Selaku Pembuat Akta Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-169 Layanan Pendaftaran Notaris Selaku Pembuat Akta Koperasi

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-170	Layanan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-170 Layanan Pengawasan Koperasi
Layanan BTM-171	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-171 Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Layanan BTM-172	Layanan Penyuluhan, Pendirian & Perubahan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-172 Layanan Penyuluhan, Pendirian & Perubahan Koperasi
Layanan BTM-173	Layanan Teknis Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.13. Koperasi	Layanan BTM-173 Layanan Teknis Usaha Simpan Pinjam
Layanan BTM-174	Layanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Penilaian Amdal	Dinas Lingkungan Hidup		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Layanan BTM-174 Layanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Penilaian Amdal
Layanan BTM-175	Layanan Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.05-Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Layanan BTM-175 Layanan Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
Layanan BTM-176	Layanan Pengaduan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.10-Penanganan Sampah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Layanan BTM-176 Layanan Pengaduan Persampahan
Layanan BTM-177	Layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.10-Penanganan Sampah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Layanan BTM-177 Layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan
Layanan BTM-178	Layanan Retribusi Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	BTH.35.01.10-Penanganan Sampah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.40. Lingkungan Hidup	Layanan BTM-178 Layanan Retribusi Persampahan
Layanan BTM-179	Layanan Informasi untuk mengetahui titik api kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-179 Layanan Informasi untuk mengetahui titik api kebakaran
Layanan BTM-180	Layanan Pemasangan GPS di mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-180 Layanan Pemasangan GPS di mobil Pemadam Kebakaran
Layanan BTM-181	Layanan Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan (Call Center Terpadu)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-181 Layanan Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan (Call Center Terpadu)

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-182	Layanan Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk Wajib Retribusi (untuk yang baru maupun yang lama) baik untuk pelatihan dan pengecekan berkala	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-182 Layanan Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran untuk Wajib Retribusi (untuk yang baru maupun yang lama) baik untuk pelatihan dan pengecekan berkala
Layanan BTM-183	Jenis Layanan Penyuluhan Bahaya Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-183 Jenis Layanan Penyuluhan Bahaya Kebakaran
Layanan BTM-184	Layanan Konsultasi korban kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-184 Layanan Konsultasi korban kekerasan terhadap perempuan
Layanan BTM-185	Layanan Konsultasi korban kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-185 Layanan Konsultasi korban kekerasan terhadap anak
Layanan BTM-186	Layanan Mediasi Kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-186 Layanan Mediasi Kasus kekerasan terhadap anak
Layanan BTM-187	Layanan Mediasi Kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-187 Layanan Mediasi Kasus kekerasan terhadap perempuan
Layanan BTM-188	Layanan Pendampingan Hukum Terhadap Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-188 Layanan Pendampingan Hukum Terhadap Anak
Layanan BTM-189	Layanan Pendampingan Hukum Terhadap Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-189 Layanan Pendampingan Hukum Terhadap Perempuan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-190	Layanan Pengaduan korban kekerasan terhadap anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-190 Layanan Pengaduan korban kekerasan terhadap anak
Layanan BTM-191	Layanan Pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-191 Layanan Pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan
Layanan BTM-192	Layanan Informasi Data Gender dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-192 Layanan Informasi Data Gender dan Anak
Layanan BTM-193	Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-193 Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Layanan BTM-194	Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.28.01-Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-194 Layanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak:
Layanan BTM-195	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.26.01.14-Peningkatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga (ABCV)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-195 Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Layanan BTM-196	Layanan Stunting	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-196 Layanan Stunting

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
		dan Keluarga Berencana				
Layanan BTM-197	Layanan KB Gratis	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BTH.26.01.18-Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-197 Layanan KB Gratis
Layanan BTM-198	Layanan Perizinan Online	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BTH.08.01.03-Pengelolaan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan BTM-198 Layanan Perizinan Online
Layanan BTM-199	Layanan Administrasi Kurikulum (Kesetaraan, LKP, Pelaporan)	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-199 Layanan Administrasi Kurikulum (Kesetaraan, LKP, Pelaporan)
Layanan BTM-200	Layanan Administrasi Pendidik/Guru (Surat Tugas, Kontrak Guru, mutasi, absensi, cuti)	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-200 Layanan Administrasi Pendidik/Guru (Surat Tugas, Kontrak Guru, mutasi, absensi, cuti)
Layanan BTM-201	Layanan Administrasi ASN dan Honorer	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-201 Layanan Administrasi ASN dan Honorer
Layanan BTM-202	Layanan Keuangan (TPP, TPG, Tamsil, Gaji Guru Honor, PNS, P3K)	Dinas Pendidikan		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.02. Keuangan	Layanan BTM-202 Layanan Keuangan (TPP, TPG, Tamsil, Gaji Guru Honor, PNS, P3K)
Layanan BTM-203	Layanan Konsultasi Pendidikan (Guru, Orang tua)	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-203 Layanan Konsultasi Pendidikan (Guru, Orang tua)
Layanan BTM-204	Layanan Pengelolaan Aset Sekolah	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-204 Layanan Pengelolaan Aset Sekolah
Layanan BTM-205	Layanan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-205 Layanan Peserta Didik Baru
Layanan BTM-206	Layanan Publik Legalisir Ijazah	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-206 Layanan Publik Legalisir Ijazah
Layanan BTM-207	Layanan Publik Pengaduan Masyarakat	Dinas Pendidikan	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-207 Layanan Publik Pengaduan Masyarakat
Layanan BTM-208	Layanan Publik Perbaikan Ijazah	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-208 Layanan Publik Perbaikan Ijazah

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-209	Layanan Publik Pindah Rayon	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-209 Layanan Publik Pindah Rayon
Layanan BTM-210	Layanan Untuk Siswa (Penyediaan Ijazah, Beasiswa, KIA)	Dinas Pendidikan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.31. Pendidikan	Layanan BTM-210 Layanan Untuk Siswa (Penyediaan Ijazah, Beasiswa, KIA)
Layanan BTM-211	Layanan ATCS(Area Traffic Control System)	Dinas Perhubungan	BTH.14.02.17-Pemeliharaan Traffic Light	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-211 Layanan ATCS(Area Traffic Control System)
Layanan BTM-212	Layanan Kartu Pengawasan Penumpang	Dinas Perhubungan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-212 Layanan Kartu Pengawasan Penumpang
Layanan BTM-213	Layanan Parkir	Dinas Perhubungan	BTH.14.02.06-Pembangunan Fasilitas Parkir	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-213 Layanan Parkir
Layanan BTM-214	Layanan Transportasi Darat (Bus Trans Batam)	Dinas Perhubungan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-214 Layanan Transportasi Darat (Bus Trans Batam)
Layanan BTM-215	Layanan Transportasi Laut	Dinas Perhubungan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-215 Layanan Transportasi Laut
Layanan BTM-216	Layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	Dinas Perhubungan	BTH.14.02.23-Penyediaan Sarpras Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.19. Transportasi	Layanan BTM-216 Layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
Layanan BTM-217	Layanan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	BTH.07.01.02-Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-217 Layanan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap
Layanan BTM-218	Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya	Dinas Perikanan	BTH.04.01.07-Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-218 Layanan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya
Layanan BTM-219	Layanan Fasilitas Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Dinas Perikanan	BTH.04.01.06-Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-219 Layanan Fasilitas Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
Layanan BTM-220	Layanan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Perikanan	BTH.04.01.03-Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (Pemantauan Kesehatan Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-220 Layanan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			dan Kualitas Air)			
Layanan BTM-221	Layanan Pembinaan Pemasar Produk Perikanan	Dinas Perikanan	BTH.04.01.06-Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-221 Layanan Pembinaan Pemasar Produk Perikanan
Layanan BTM-222	Layanan Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok (Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR))	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-222 Layanan Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok (Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR))
Layanan BTM-223	Layanan Pendampingan/Pembinaan Kelompok	Dinas Perikanan	BTH.04.01.06-Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-223 Layanan Pendampingan/Pembinaan Kelompok
Layanan BTM-224	Layanan Penerbitan Kartu E-Kusuka (Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR))	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-224 Layanan Penerbitan Kartu E-Kusuka (Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR))
Layanan BTM-225	Layanan Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Dinas Perikanan	BTH.04.01.06-Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-225 Layanan Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
Layanan BTM-226	Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-226 Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Layanan BTM-227	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan Klaim Asuransi Nelayan	Dinas Perikanan	BTH.07.01.01-Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-227 Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan Klaim Asuransi Nelayan
Layanan BTM-228	Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-228 Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi
Layanan BTM-229	Layanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-229 Layanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-230	Layanan Pengaduan Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-230 Layanan Pengaduan Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan
Layanan BTM-231	Layanan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Perikanan	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-231 Layanan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Perikanan
Layanan BTM-232	Layanan Penilaian Kinerja Individu	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-232 Layanan Penilaian Kinerja Individu
Layanan BTM-233	Layanan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-233 Layanan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan
Layanan BTM-234	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-234 Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan
Layanan BTM-235	Layanan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-235 Layanan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan
Layanan BTM-236	Layanan Perpanjangan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.10. Perikanan	Layanan BTM-236 Layanan Perpanjangan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi
Layanan BTM-237	Layanan Sertifikasi Halal Produk Olahan Perikanan	Dinas Perikanan	BTH.06.01.04-Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Layanan BTM-237 Layanan Sertifikasi Halal Produk Olahan Perikanan
Layanan BTM-238	Layanan Sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)	Dinas Perikanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.16. Perizinan dan Akreditasi	Layanan BTM-238 Layanan Sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
Layanan BTM-239	Layanan Pasar Pemerintah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-239 Layanan Pasar Pemerintah
Layanan BTM-240	Layanan Surat Keterangan Asal (SKA)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-240 Layanan Surat Keterangan Asal (SKA)

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-241	Layanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-241 Layanan Tera/Tera Ulang
Layanan BTM-242	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BTH.57.01.02-Penciptaan dan Pembangunan Arsip Dinamis	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.04. Aparatur Negara	Layanan BTM-242 Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis
Layanan BTM-243	Layanan Izin Peralihan Hak Di Atas Lahan HPL	Dinas Pertanahan	BTH.19.01-Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.22. Pertanahan	Layanan BTM-243 Layanan Izin Peralihan Hak Di Atas Lahan HPL
Layanan BTM-244	Layanan Perubahan Dokumen Alokasi Lahan	Dinas Pertanahan	BTH.19.01-Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.22. Pertanahan	Layanan BTM-244 Layanan Perubahan Dokumen Alokasi Lahan
Layanan BTM-245	Layanan Informasi Status Penyerahan Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	BTH.17.01.07-Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan BTM-245 Layanan Informasi Status Penyerahan Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman
Layanan BTM-246	Layanan Kinerja dan Program	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan BTM-246 Layanan Kinerja dan Program
Layanan BTM-247	Layanan Pemakaman Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	BTH.17.01.02-Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya (Pemakaman)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan BTM-247 Layanan Pemakaman Umum
Layanan BTM-248	layanan Pemangkasan Pohon	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan BTM-248 layanan Pemangkasan Pohon
Layanan BTM-249	Layanan Rumah Susun Sewa	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan BTM-249 Layanan Rumah Susun Sewa
Layanan BTM-250	Layanan Izin Tanda Daftar Yayasan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-250 Layanan Izin Tanda Daftar Yayasan
Layanan BTM-251	Layanan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-251 Layanan Izin Undian Gratis Berhadiah
Layanan BTM-252	Layanan Konsultasi LK3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BTH.26.01.18-Penguatan Lembaga Konsultasi	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-252 Layanan Konsultasi LK3

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
			Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
Layanan BTM-253	Layanan Pendataan Fakir Miskin	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BTH.26.01.09-Pengelolaan Data Fakir Miskin	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-253 Layanan Pendataan Fakir Miskin
Layanan BTM-254	Layanan Penerima Program Bantuan Sosial Kemensos Meliputi Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-254 Layanan Penerima Program Bantuan Sosial Kemensos Meliputi Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai
Layanan BTM-255	Layanan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-255 Layanan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar)
Layanan BTM-256	Layanan Rekomendasi BBM Bersubsidi	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BTH.37.01.06-Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-256 Layanan Rekomendasi BBM Bersubsidi
Layanan BTM-257	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-257 Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
Layanan BTM-258	Layanan Rekomendasi Pengangkatan Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	BTH.26.01.14-Peningkatan Pelayanan Reunifikasi Keluarga (ABCV)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-258 Layanan Rekomendasi Pengangkatan Anak
Layanan BTM-259	Layanan Rekomendasi Pengumpulan Dana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-259 Layanan Rekomendasi Pengumpulan Dana
Layanan BTM-260	Layanan Rekomendasi untuk Membuat Identitas NIK & Akte Lahir Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-260 Layanan Rekomendasi untuk Membuat Identitas NIK & Akte Lahir Anak
Layanan BTM-261	Layanan Surat Keterangan Berobat untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa & Disabilitas yang Memerlukan Identitas	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.26. Sosial	Layanan BTM-261 Layanan Surat Keterangan Berobat untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa & Disabilitas yang Memerlukan Identitas
Layanan BTM-262	Layanan Konsultasi Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.15-Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-262 Layanan Konsultasi Hubungan Industrial
Layanan BTM-263	Layanan Pembinaan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.15-Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-263 Layanan Pembinaan Hubungan Industrial

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-264	Layanan Pembuatan Laporan keputusan Hubungan Kerja (PHK)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.15-Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-264 Layanan Pembuatan Laporan keputusan Hubungan Kerja (PHK)
Layanan BTM-265	Layanan Pembuatan Struktur Skala Upah	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-265 Layanan Pembuatan Struktur Skala Upah
Layanan BTM-266	Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartie	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.09-Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-266 Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartie
Layanan BTM-267	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-267 Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Layanan BTM-268	Layanan Pencatatan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-268 Layanan Pencatatan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)
Layanan BTM-269	Layanan Penerbitan AK1/Kartu Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.17-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-269 Layanan Penerbitan AK1/Kartu Pencari Kerja
Layanan BTM-270	Layanan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran (CPMI)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.12-Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-270 Layanan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran (CPMI)
Layanan BTM-271	Layanan Pengesahan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran (CPMI)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.12-Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-271 Layanan Pengesahan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran (CPMI)
Layanan BTM-272	Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.08-Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-272 Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-273	Layanan Pertimbangan Teknis Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.17-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.05. Industri	Layanan BTM-273 Layanan Pertimbangan Teknis Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK)
Layanan BTM-274	Layanan Pertimbangan Teknis Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.17-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-274 Layanan Pertimbangan Teknis Izin Lembaga Pelatihan Kerja
Layanan BTM-275	Layanan Pertimbangan Teknis Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.07-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-275 Layanan Pertimbangan Teknis Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal (AKL)
Layanan BTM-276	Layanan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Paspor PMI	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-276 Layanan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Paspor PMI
Layanan BTM-277	Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKAD) dan Perjanjian Lembaga Penampungan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.01-Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-277 Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKAD) dan Perjanjian Lembaga Penampungan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT)
Layanan BTM-278	Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKAD) Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Dinas Tenaga Kerja		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-278 Layanan Pertimbangan Teknis Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RKTAKAD) Lembaga Penampungan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
Layanan BTM-279	Layanan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)	Dinas Tenaga Kerja		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-279 Layanan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)
Layanan BTM-280	Layanan Pendampingan Verifikasi Lapangan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Dinas Tenaga Kerja		RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-280 Layanan Pendampingan Verifikasi Lapangan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

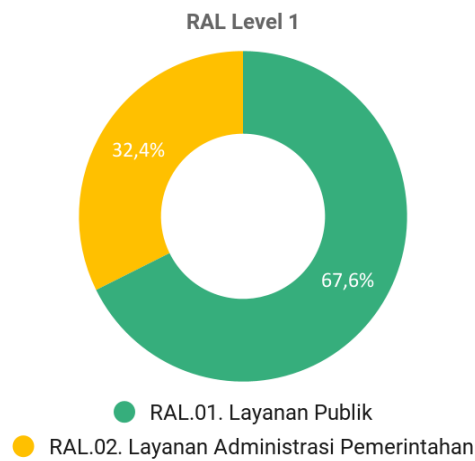
ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-281	Layanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja	BTH.33.01.07-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.32. Ketenagakerjaan	Layanan BTM-281 Layanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Layanan BTM-282	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat		RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-282 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Layanan BTM-283	Layanan Pengaduan Inspektorat	Inspektorat	BTH.48.01.10-Monitoring Aduan Masyarakat	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-283 Layanan Pengaduan Inspektorat
Layanan BTM-284	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan	Inspektorat	BTH.59.03.02-Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-284 Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan
Layanan BTM-285	Layanan Pengukuran Kinerja Program Kerja Pengawasan	Inspektorat	BTH.59.03.01-Kerjasama pengawasan internal	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL 02.05. Kesekretariatan Negara	Layanan BTM-285 Layanan Pengukuran Kinerja Program Kerja Pengawasan
Layanan BTM-286	Layanan Ambulance	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-286 Layanan Ambulance
Layanan BTM-287	Layanan Sterilisasi Alat Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.23.01.01-Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-287 Layanan Sterilisasi Alat Rumah Sakit
Layanan BTM-288	Layanan Forensik	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-288 Layanan Forensik
Layanan BTM-289	Layanan Gawat Darurat	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-289 Layanan Gawat Darurat
Layanan BTM-290	Layanan Gizi	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04.16-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-290 Layanan Gizi
Layanan BTM-291	Layanan IT Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.07-Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-291 Layanan IT Rumah Sakit

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-292	Layanan Kefarmasian	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.23.01-Pemberian izin apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-292 Layanan Kefarmasian
Layanan BTM-293	Layanan Laboratorium	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.03.01.05-Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-293 Layanan Laboratorium
Layanan BTM-294	Layanan Laundry	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-294 Layanan Laundry
Layanan BTM-295	Layanan Medical Check Up	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-295 Layanan Medical Check Up
Layanan BTM-296	Layanan Medis	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-296 Layanan Medis
Layanan BTM-297	Layanan Radiologi	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-297 Layanan Radiologi
Layanan BTM-298	Layanan Rawat Inap	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-298 Layanan Rawat Inap
Layanan BTM-299	Layanan Rawat Jalan	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-299 Layanan Rawat Jalan
Layanan BTM-300	Layanan rekam medis	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-300 Layanan rekam medis
Layanan BTM-301	Layanan muatan Metadon	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-301 Layanan muatan Metadon
Layanan BTM-302	Layanan Penatausahaan Barang	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-302 Layanan Penatausahaan Barang

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
Layanan BTM-303	Layanan Pengolahan Limbah Medis	Rumah Sakit Umum Daerah	BTH.24.04-Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.25. Kesehatan	Layanan BTM-303 Layanan Pengolahan Limbah Medis
Layanan BTM-304	Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan BTM-304 Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Layanan BTM-305	Layanan Perlindungan Masyarakat	SatpolPP	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan BTM-305 Layanan Perlindungan Masyarakat
Layanan BTM-306	Data Pratoli	SatpolPP	BTH.01.02-Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	RAL.01. Layanan Publik	RAL 01.29. Keamanan	Layanan BTM-306 Data Pratoli

C. Analisis Diagram Layanan

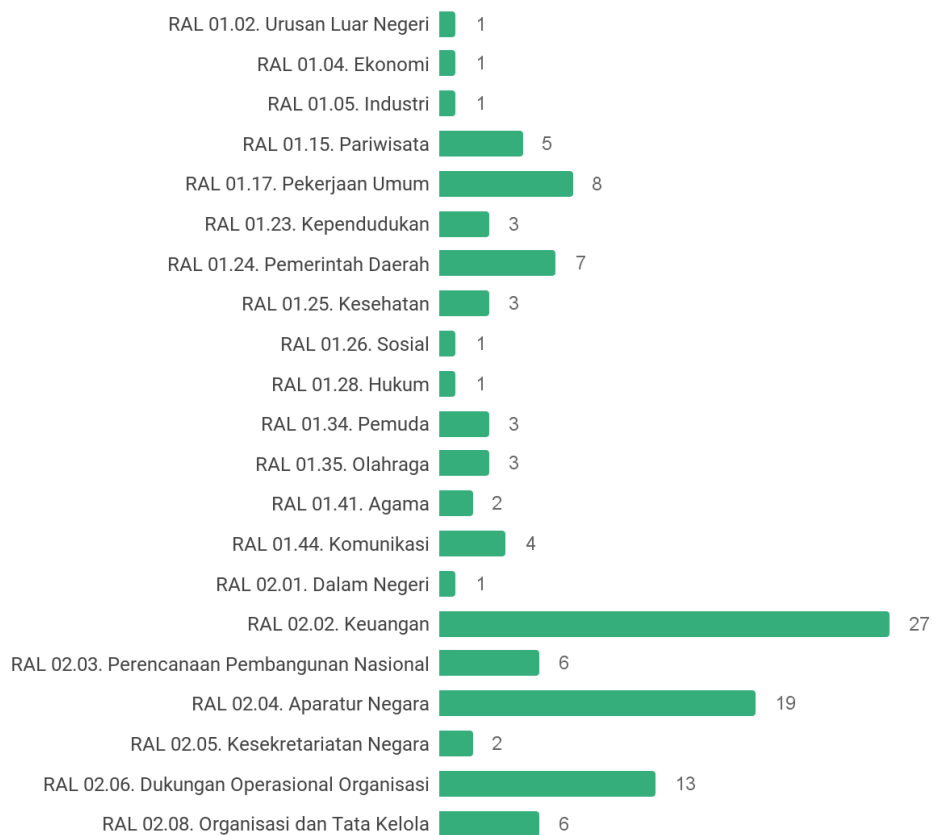
Analisa terhadap kondisi Layanan eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut :



Grafik 3.4.1 RAL Level 1

Untuk RAL Level 1 penyesuaian dengan Standar Nasional, dimana ada 67,6% (207 Layanan) Merupakan Layanan Publik, dan 32,4% (99 Layanan) Merupakan Layanan Administrasi Pemerintahan.

RAL Level 2



Grafik 3.4.2 RAL Level 2

Untuk RAL Level 2 penyesuaian dengan Standar Nasional, 1 Data RAL 01.02. Urusan Luar Negeri, 1 Data RAL 01.04. Ekonomi, 1 Data RAL 01.05. Industri, 5 Data RAL 01.15. Pariwisata, 8 Data RAL 01.17. Pekerjaan Umum, 3 Data RAL 01.23. Kependudukan, 7 Data RAL 01.24. Pemerintah Daerah, 3 Data RAL 01.25. Kesehatan, 1 Data RAL 01.26. Sosial, 1 Data RAL 01.28. Hukum, 3 Data RAL 01.34. Pemuda, 3 Data RAL 01.35. Olahraga, 2 Data RAL 01.41. Agama, 4 Data RAL 01.44. Komunikasi, 1 Data RAL 02.01. Dalam Negeri, 27 Data RAL 02.02. Keuangan, 6 Data RAL 02.03. Perencanaan Pembangunan Nasional, 19 Data RAL 02.04. Aparatur Negara, 2 Data RAL 02.05. Kesekretariatan Negara, 13 Data RAL 02.06. Dukungan Operasional Organisasi, 6 Data RAL 02.08. Organisasi dan Tata Kelola.

3.5. Arsitektur Aplikasi Eksisting

A. Katalog Aplikasi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan untuk mendapatkan data terkait aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan layanan yang dimilikinya. Penggalan data aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam dilakukan dengan pengisian mandiri tiap OPD dan survey. Setelah data didapatkan akan dilakukan rekap data dan disusun katalog aplikasi eksisting keseluruhan Kota Batam Hasil dari kondisi eksisting dijadikan acuan untuk Menyusun kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Batam. Berikut ini disajikan daftar aplikasi eksisting yang digunakan di lingkungan pemerintah Kota Batam baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah.

Tabel 3.5.1 Daftar Aplikasi yang dikelola oleh OPD di Kota Batam.

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-001	ANJAB SIMONA	Sistem Informasi Analisis Jabatan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anjab dan ABK	Layanan Anjab dan ABK
APP-002	e-ANJAB ABK	Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anjab dan ABK	Layanan Anjab dan ABK
APP-003	e-FORMASI	Sistem Informasi Penyusunan Kebutuhan ASN	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kebutuhan Pegawai	Layanan Pengadaan Pegawai
APP-004	e-SLKS	Sistem Informasi Penghargaan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Penghargaan	Layanan Penghargaan
APP-005	IDIS	Sistem Informasi Pelaporan Proses Hukum Disiplin	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Hukuman Disiplin	Layanan Hukuman Disiplin

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-006	My SAPK BKN	Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Kepegawaian
APP-007	SIASN/MyS APK	Layanan SIASN untuk memberikan bantuan hukum kepegawaian bagi ASN dan/atau pemangku kepentingan terkait	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Kepegawaian
APP-008	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kepegawaian	Layanan Kepegawaian
APP-009	SIMASBRO	Daftar Penilaian PMPRB OPD	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
APP-010	SIOLA	Sistem Informasi Online Layanan Administrasi	Web Based	Open Source	PHP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Ormas tidak berbadan hukum	Layanan Administrasi ASN dan Honorar
APP-011	Dashboard Analytical Bapenda	Sistem Informasi terintegrasi dengan SIMAPATDA dan Tapping Box, yang digunakan sebagai sumber data analisis untuk pengambilan keputusan di Bapenda	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
APP-012	e-Billing	Sistem generate kode billing pembayaran pajak daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pendataan dan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Penagihan dan Pemeriksaan Objek dan/atau

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										Subjek Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
APP-013	e-BPHTB	Sistem Informasi Transaksi BPHTB secara elektronik, informasi perolehan hak tanah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
APP-014	e-Pemeriksaan	Sistem Informasi Pengembangan yang dibuat sesuai Perwako No. 30 Tahun 2019 yaitu dokumen perubahan dari Perwako No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
APP-015	e-Pendaftaran	Sistem Informasi Manajemen pendaftaran wajib pajak dan objek pajak daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Daerah
APP-016	e-SKPD	Sistem Penetapan SKPD	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Satuan Kerja Perangkat Daerah	Layanan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah
APP-017	e-SPPT PBB-P2	Sistem Informasi terintegrasi Database PBB untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk melihat kewajiban pajak PBB-P2 terhutang serta mencetak SPPT PBB-P2 secara mandiri	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Lingkup PBB-P2, BPHTB, PPJ
APP-018	Penelitian	Sistem informasi Manajemen Penelitian Pembayaran Pajak Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Pembayaran Pajak	Layanan Pajak Daerah
APP-019	SIE-PENDA	Dashboard yang menampilkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah secara RealTime	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
APP-020	SIMAPATDA	Sistem Informasi Manajemen pendataan, pembayaran, dan pelaporan pajak daerah Non-PBB dan BPHTB. Merupakan core Dbase dan System pajak daerah Non PBB dan BPHTB	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Daerah
APP-021	SISMIOP/SIMPBB	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak	Desktop	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pendataan dan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Penagihan dan Pemeriksaan Objek dan/atau Subjek Pajak Lingkup Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, MBLB dan Reklame; Monitoring Alat Rekam Pajak.
APP-022	Sistem Informasi Pajak Online	Sistem Informasi untuk memonitor pajak secara online dan kinerja peralatan Tapping Box yang dikelola PT. Raharja Sinergi Komunikasi (Rekanan Bank Riau Kepri).	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-023	SPTPD	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pajak Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pendapatan Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Daerah
APP-024	ALADIN	Sistem Informasi Manajemen DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Laporan DAK Fisik, Data Laporan DAK Non Fisik	
APP-025	DJP Online	Sistem Informasi Pembayaran Pajak dan Transaksi Bendahara	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
APP-026	e-MONEV	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Realisasi Fisik Keuangan	Layanan Realisasi Fisik dan Keuangan
APP-027	e-REKONSILIASI	Sistem Informasi Pengajuan rekon Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Bulanan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Rekonsiliasi	Layanan Pengajuan Ganti Uang
APP-028	e-VEHICLE	Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Milik Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kendaraan Milik Daerah	Layanan Data Kendaraan Pemko
APP-029	MORENA DAK	Sistem Informasi Manajemen DAK Non Fisik	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Laporan DAK Non Fisik	
APP-030	OM SPAN	Sistem Informasi Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Laporan DAK Fisik	Layanan Anggaran/Keuangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-031	PK2UKM	Sistem Informasi Pemantau DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Laporan DAK Fisik, Data Laporan DAK Non Fisik	
APP-032	SIAP BMD	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Aset / Barang Milik daerah	Layanan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
APP-033	SIPD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-034	SIPKD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-035	SIPTASI	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Anggaran/Keuangan
APP-036	SISBAPER	Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Persediaan Barang Habis Pakai dan Stok	Layanan Penatausahaan Barang Persediaan
APP-037	SISFORJI PLUS	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Gaji dan Tunjangan TPP	Layanan Asuransi dan Tunjangan
APP-038	SISWAS P3DN	Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penggunaan Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
APP-039	SKPD online (Bank Riau Kepri)	Implementasi transaksi non tunai pada Bank Riau Kepri	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Anggaran/Keuangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-040	SPIP	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal	Web Based	Open Source	PHP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Hasil Pengawasan	Layanan Konsultasi Pengawasan
APP-041	e-GOV	Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Paket-paket pekerjaan	Desktop	Open Source	PHP	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Realisasi Fisik Keuangan	Layanan Realisasi Fisik dan Keuangan
APP-042	SEPP	Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD, RKP, Renstra, RENJA)	Layanan Administrasi Pembangunan: Dashboard Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD
APP-043	SIPD-Perencanaan	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Web Based	Open Source	PHP	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Program, Anggaran dan Kegiatan	Layanan Administrasi Pembangunan: Dashboard Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD
APP-044	SITOGA	Sistem Manajemen Penerima Insentif dari Tokoh Agama	Desktop	Open Source	PHP	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Tokoh Agama	Layanan Pemberian Insentif Kepada Tokoh Agama (Mubaligh, Imam, dan Guru TPQ)
APP-045	JDIH	Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Mobile (Android), Web Based	Open Source	PHP	Bagian Hukum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Produk Hukum	Layanan Informasi Produk Hukum
APP-046	TSP	Sistem Informasi Manajemen TSP	Web Based, Desktop, Mo	Open Source	PHP	Bagian Kerjasama	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Program Usulan	Layanan Tanggung Jawab

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
			bile,Cloud						Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Sosial Perusahaan
APP-047	e-SAKIP REVIU	Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Organisasi	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
APP-048	PMPRB Online	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Organisasi	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Layanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
APP-049	SINOVIK	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Organisasi	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Layanan Informasi Publik
APP-050	LPSE	Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-051	SIPAKET	Sistem Informasi Pemaketan Pengadaan	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pemaketan Tender/Seleksi	Layanan Pengadaan secara Seleksi/Tender
APP-052	SiRUP	Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang Jasa	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-053	e-PLANING	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Anggaran	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Perencanaan dan Keuangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Program, Anggaran dan Kegiatan	Layanan Perencanaan Anggaran

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-054	KRISNA	Sistem Informasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Perencanaan dan Keuangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Perencanaan Program, Anggaran dan Kegiatan	Layanan Anggaran/Keuangan
APP-055	SIERA BPKP (P3DN)	Sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Perencanaan dan Keuangan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-056	e-LPPD	Sistem Informasi Pelaporan Data LPPD	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Tata Pemerintahan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
APP-057	e-SPM	Sistem Informasi Pelaporan Data SPM	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Tata Pemerintahan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan pencairan anggaran (SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Penguji)
APP-058	e-Catalog / e-Purchasing BPBJ	Sistem Informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Umum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Katalog Barang dan Jasa	Layanan Penatausahaan Barang Persediaan
APP-059	SIKAP BPBJ	Sistem Informasi Kinerja Penyedia	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Umum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kinerja Penyedia	Layanan Pembuktian Kualifikasi Penyedia

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-060	SIMONA	Sistem Informasi Monitoring pelaksanaan Anjab, ABK, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Umum	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anjab dan ABK	Layanan Anjab dan ABK
APP-061	Toko Daring	Platform E-Purchasing pengadaan barang/jasa pemerintah	Web Based	Open Source	PHP	Bagian Umum	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Katalog Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
APP-062	DIREKTORI	Sistem Informasi Seputar Lokasi di Kota Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Lokasi Kota Batam	Layanan Informasi Destinasi Wisata
APP-063	POSPBB	Sistem Informasi dan Cetak SPPT	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pajak Daerah
APP-064	e-MON DAK	Sistem Informasi Monitoring dan data pelaporan Air Bersih dan Air Limbah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Air bersih dan Air Limbah	Layanan Pengawasan Menara dan bangunan
APP-065	Pendapatan Air Bersih	Sistem Informasi Pendapatan Air Bersih	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih
APP-066	SIJAKON	Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kota Batam	Web Based dan Mobile	Open Source	PHP	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Proyek, Badan Usaha, Material, Peralatan, Tenaga Kerja Konstruksi dan Data Orderan Pesan Tukang	
APP-067	SIMBG	Sistem Informasi Pelayanan terkait Bangunan Gedung	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Bangunan Gedung dan Menara	Layanan Pengawasan Menara dan bangunan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-068	BCARD	Sistem Informasi Pencetakan KTP Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan
APP-069	BENROLL	Sistem Informasi Perekaman KTP Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan
APP-070	Komunikasi (Pindah Datang) antar DISDUKCAPIL	Aplikasi Komunikasi (Pindah Datang) antar DISDUKCAPIL	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependudukan	
APP-071	SIAK TERPUSAT	Sistem Informasi Kependudukan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan
APP-072	ASIK	Sistem Informasi Data Imunisasi, Vaksinasi, P2PTM dan Pencegahan Penyakit	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Imunisasi, Vaksinasi, P2PTM dan Pencegahan Penyakit	Layanan Vaksinasi
APP-073	ASPAK	Sistem Penginputan dan informasi Data sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	
APP-074	DASHBOAR D BIAN	Sistem Informasi Imunisasi Dasar dan Rutin	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Imunisasi Dasar dan Rutin	Layanan Imunisasi Anak
APP-075	Dashboard Kasus Covid-19	Sistem Informasi Kasus Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kasus Covid19	Layanan Covid-19
APP-076	Dashboard Vaksin Covid-19	Sistem Informasi Vaksinasi Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Record Vaksin Covid-19	Layanan Vaksinasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-077	e-IKM	Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Indeks Kepuasan Masyarakat	Layanan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
APP-078	e-KLAIM BPJS	Sistem Informasi Layanan BPJS	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-079	e-KOHORT	Sistem Informasi Pemantauan terintegrasi bagi ibu, bayi, dan balita yang mencakup implementasi pencatatan-el, pemantauan-el, dan pelaporan-el pelayanan KIA berbasis teknologi informasi	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ibu Hamil dan Melahirkan	Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
APP-080	e-Monev Limbah	Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pengawasan Air Limbah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Air bersih dan Air Limbah	Layanan Pengolahan Limbah Medis
APP-081	e-Monev PKAM	Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pengawasan Kualitas Air Minum	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pengawasan	Layanan Air Bersih dan Sanitasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
									Kualitas Air Minum	
APP-082	e-Monev STBM	Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Layanan Air Bersih dan Sanitasi
APP-083	e-Monev TFU	Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Tempat Fasilitas Umum	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Tempat Fasilitas Umum	
APP-084	e-Monev TPM	Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Tempat Pengolah Makanan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pengolah Makan	
APP-085	e-Puskesmas	Sistem Informasi Manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Sistem Manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas	
APP-086	e-SILANTOR	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-087	InpresP4GN bnn.go.id	Sistem Informasi Aksi P4GN	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Aksi P4GN	
APP-088	Keamanan Vaksin	Sistem Informasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Imunisasi, Vaksinasi, P2PTM dan Pencegahan Penyakit	Layanan Imunisasi Anak
APP-089	Keluarga SEHAT	Sistem Informasi Program Indonesia dengan pendekatan keluarga melihat 12 indikator keluarga sehat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Keluarga Sehat	Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										(BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
APP-090	KESJAOR	Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga	Web Based,Desktop,Mobile,Cloud	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kesehatan Kerja dan Olahraga	
APP-091	KPCPEN	Sistem Informasi Capaian Vaksinasi Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Capaian Vaksinasi Covid19	Layanan Vaksinasi
APP-092	Monev-Virat	Sistem Informasi Supervisi Pelaksanaan Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Capaian Vaksinasi Covid19	Layanan Covid-19
APP-093	MPN G3	Sistem Informasi Pembuatan E-Billing Pembayaran Pajak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data E-Billing Pembayaran Pajak	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
APP-094	New All Data Record (NAR) Antigen	Sistem Informasi Hasil Swab Antigen Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Hasil Swab Antigen Covid19	Layanan Covid-19

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-095	New All Data Record (NAR) PCR	Sistem Informasi Hasil Swab PCR Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Hasil Swab PCR Covid19	Layanan Covid-19
APP-096	Pcare BPJS	Sistem Informasi Pasien BPJS	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-097	PJTLI COVID19	Sistem Informasi Monitoring Kasus Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring Kasus Covid19	Layanan Covid-19
APP-098	PWS KIA	Sistem Informasi Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kesehatan Ibu dan Anak	
APP-099	SEHAT NEGERIKU	Sistem Informasi Data Imunisasi Anak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Imunisasi Bayi dan Balita	Layanan Imunisasi Anak
APP-100	Si-SDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data SDM Kesehatan	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan
APP-101	SIHA	Sistem Informasi HIV AIDS	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data HIV dan AIDS	Layanan HIV & AIDS
APP-102	SILACAK	Sistem Informasi Data Kontak Erat Kasus Covid19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kontak Erat Kasus Covid19	Layanan Tracking Covid-19
APP-103	SILANTOR	Sistem Surveilans Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penyakit bersumber Vektor dan Zoonotic	Layanan Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan
APP-104	SIMKESWA	Sistem Informasi Data Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Layanan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										Zat Adiktif Lainnya
APP-105	SINAPZA	Sistem Informasi Deteksi Dini NAPZA	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Deteksi Dini NAPZA	Layanan Deteksi Dini Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
APP-106	SIPBLUD	Sistem informasi laporan BLUD	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Anggaran/Keuangan
APP-107	<u>SIPP BPJS KESEHATAN</u>	Sistem Informasi Pelaporan Peserta	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-108	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit tidak Menular	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pasien Penyakit Tidak menular	Layanan Laporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
APP-109	SIREK SDK	Sistem Informasi Rekomendasi Perizinan Bidang Sumber Daya Kesehatan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Rekomendasi Perizinan SDM Kesehatan	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan
APP-110	SIS-MAL	Sistem Informasi Surveilans Malaria	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Malaria	Layanan Laporan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
APP-111	SISBAPER-OBAT	Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan Obat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	
APP-112	SISFO GIZI TERPADU	Sistem Informasi Gizi Terpadu , e-PPGBM (Elektronik Pencatatan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Gizi Balita	Layanan Gizi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
		Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)								
APP-113	SITKO	Sistem Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Keuangan
APP-114	SITRUST	Sistem Informasi pengantaran Dahak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Dahak	Layanan Tuberkulosis
APP-115	SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
APP-116	SKPD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Anggaran/Keuangan
APP-117	SMILE	Sistem Informasi Logistik Vaksin Covid-19	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Logistik Vaksin Covid-19	Layanan Vaksinasi
APP-118	SPM	Sistem Informasi Standart Pelayanan Minimal	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Kesehatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Layanan pencairan anggaran (SPP, SPM, SPTJM, SPJ, SP2D, Daftar Penguji)
APP-119	I-SIKHNAS	Sistem Informasi Kesehatan Hewan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kesehatan Hewan Veteriner	Layanan Kesehatan hewan veteriner
APP-120	KOSTRATANI	Sistem Informasi Manajemen Balai Penyuluhan Pertanian	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Produksi Pertanian	Layanan Informasi Kelembagaan Pertanian
APP-121	PANEL HARGA PANGAN	Sistem Informasi Manajemen Harga Produksi Pertanian	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Harga Pasar Produksi Pertanian	Layanan Harga Produksi Pertanian

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-122	PORTAL TAPAM	Sistem Informasi Manajemen Pemetaan Lahan Pertanian	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pemetaan lahan Pertanian	Layanan Perubahan Dokumen Alokasi Lahan
APP-123	SIMDA/SIPD	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Anggaran / Keuangan	Layanan Anggaran/Keuangan
APP-124	SIMLUHTAN	Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kelembagaan Pertanian	Layanan Informasi Kelembagaan Pertanian
APP-125	CACTI	Sistem Informasi monitoring trafik untuk layanan kamera pengawas CCTV	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data layanan kamera pengawas CCTV	Layanan Informasi dan Permintaan Rekaman CCTV
APP-126	DEV SHARE	Sistem Informasi Sharing Dokumen	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Dokumen	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan
APP-127	GITLAB BATAM	Tools Project Management Tenaga Ahli	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Proyek	
APP-128	Layanan Email	Sistem Informasi Layanan Email	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Email	Layanan Pembuatan Sub Domain
APP-129	Layanan Service Desk	Sistem Informasi IT Support	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Layanan Konsultasi TIK	
APP-130	Media Center	Website Media Center yaitu mediacenter.batam.go.id yang terletak di Kota Batam yang memfasilitasi aktivitas informasi secara online di Kota Batam, sehingga masyarakat, wartawan maupun pelajar dapat melihat dan memberikan aspirasinya dalam membangun Kota Batam menjadi kota yang madani.	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Berita dan Informasi	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-131	Portal Batam	Portal batam.go.id adalah sebuah website yang menyediakan semua informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Portal ini terdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu pengaduan online, daftar aplikasi, media center dan website OPD.	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Aplikasi	Layanan Pengembangan Aplikasi
APP-132	PPID	Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Permohonan Informasi	
APP-133	PRTG	Sistem Informasi Monitoring Trafik Layanan Internet	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Trafik Internet	Layanan internet Pemerintah
APP-134	SATU DATA PORTAL	Satu Data Indonesia	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Satu Data Indonesia	
APP-135	SIDIA	Sistem Informasi Publikasi Media	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Media	Layanan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi serta Publikasi Informasi
APP-136	SMS BATAM	Sistem Informasi Layanan SMS Pemerintahan Kota Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data SMS Gateway	
APP-137	SP4N Lapor	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Publik
APP-138	SPBE Kota Batam	Sistem Informasi Pengisian Data SPBE	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data SPBE	Layanan Konsultasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
APP-139	Video Expert	Sistem Informasi penggunaan kamera CCTV	Desktop	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data layanan kamera	Layanan Informasi dan Permintaan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
									pengawas CCTV	Rekaman CCTV
APP-140	WIKI BATAM	Sistem Informasi Dokumen Pengetahuan Pemerintah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pengetahuan	
APP-141	WINBOX	Sistem Informasi Penggunaan Manajemen Jaringan	Desktop	Open Source	PHP	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jaringan	
APP-142	BENDONLINE	Sistem Informasi Penerimaan Retribusi Pasar & Pelayanan Tera Ulang	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Tera Ulang	
APP-143	e-Payment	Sistem Informasi Manajemen Blanko	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Manajemen Blanko	
APP-144	e-SPIP	Sistem Informasi Manajemen Laporan Kinerja	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Layanan Penilaian Kinerja Pegawai
APP-145	FUEL CARD / PERTA	Sistem Informasi Pendaftaran Konsumen Biosolar Subsidi dan Verifikasi	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pendapatan Konsumen Bio solar Subsidi	
APP-146	ODS	Online Data System Koperasi dan UMKM	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Koperasi dan UMKM	Layanan Penerbitan Nomor Induk Koperasi
APP-147	P3DN	Sistem Informasi Pelaporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Penggunaan Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
APP-148	PL KUMKM	Sistem Informasi Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Koperasi dan UMKM	Layanan Penerbitan Nomor Induk Koperasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-149	SI INAS	Sistem Informasi Inovasi Nasional	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Monitoring dan Evaluasi Kinerja	
APP-150	SIMPLE	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pelaporan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Daerah	Layanan Tera/Tera Ulang
APP-151	SIPR	Sistem Informasi Pasar Rakyat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Informasi Pasar Rakyat	Layanan Pasar Pemerintah
APP-152	SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok	
APP-153	AMDALNET	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Lingkungan Hidup	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Pengelolaan Lingkungan dan Penilaian AMDAL	Layanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Penilaian Amdal
APP-154	Onlimo	Sistem Informasi Online Monitoring Kualitas Air	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Lingkungan Hidup	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Air Bersih dan Sanitasi	Layanan Air Bersih dan Sanitasi
APP-155	SI-Pepen Resah (Mobile)	Sistem Informasi Retribusi Sampah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Lingkungan Hidup	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Retribusi Persampahan	Layanan Retribusi Persampahan
APP-156	SILH	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Lingkungan Hidup	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Pengelolaan	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
									Lingkungan dan Penilaian AMDAL	
APP-157	Aplikasi Monitoring Mobil DAMKAR	Sistem Informasi Monitoring Mobil Pemadam kebakaran	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data GPS Mobil Damkar	Layanan Pemasangan GPS di mobil Pemadam Kebakaran
APP-158	Aplikasi Retribusi	Sistem Informasi untuk Wajib Retribusi (untuk yang barumaupun yang lama) baik untuk pelatihan dan pengecekan berkala	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Layanan Pencatatan/Penerimaan Periodik Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah
APP-159	Aplikasi Titik Kebakaran	Sistem Informasi untuk mengetahui titik api kebakaran diseluruh wilayah Kota Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Titik Kebakaran	Layanan Informasi untuk mengetahui titik api kebakaran
APP-160	Call Center Terpadu	Sistem Informasi Call Center	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan (Call Center Terpadu)	Layanan Penanggulangan Kebakaran & Penyelamatan (Call Center Terpadu)
APP-161	e-SIPUGA	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Terpilah Gender dan Anak	Layanan Informasi Data Gender dan Anak
APP-162	ELSIMIL	Sistem Informasi Kueisoner yang ditujukan untuk para calon pengganti agar dapat	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Stunting	Layanan Stunting

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
		mendeteksi dini dan mempersiapkan kesehatan diri agar terhindar dari kemungkinan stunting pada calon bayi sebelum memulai proses pernikahan.				Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
APP-163	Kampung KB	Sistem Informasi Perkembangan Kampung KB	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pelayanan KB	Layanan KB Gratis
APP-164	MIM TOOL	Terdiri dari SIRIKA dan STOKU untuk memonitor stok barang yang ada digudang	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Stok Gudang	
APP-165	MONIKA	Sistem Informasi Bidan yang telah bersertifikat (bidan yang telah CTU)	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data SDM Kesehatan	Layanan Perizinan Sumber Daya Manusia Kesehatan
APP-166	NEW SIGA	Sistem Informasi Manajemen Bangga Kencana (Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB)	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan	Layanan Akuntansi dan Pelaporan
APP-167	PK 21	Sistem Informasi Data Kependudukan / Data Keluarga yang Beresiko Stunting	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Keluarga Sehat	Layanan Kelompok Kegiatan : Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
										Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
APP-168	RUMAH DATAKU	Pencatatan Pelaporan Rumah dataku	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Keluarga KB	Layanan KB Gratis
APP-169	SIMFONI PPA	Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Layanan Konsultasi korban kekerasan terhadap perempuan
APP-170	SIPERINDU	Sistem informasi Peringatan dini pengendalian penduduk	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kependudukan	Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan
APP-171	EASY/ PTSP Online	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan dan Non Perizinan	Layanan Perizinan Online

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-172	OSS	Sistem Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perizinan dan Non Perizinan	Layanan Perizinan Online
APP-173	BOS SALUR	Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Perencanaan BOS	
APP-174	DAPODIK	Sistem Informasi Kependidikan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Kependidikan	Layanan Pengelolaan Aset Sekolah
APP-175	e-TPG	Sistem Informasi Pencairan Tunjangan Profesi Guru secara Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Gaji dan Tunjangan TPP	Layanan Asuransi dan Tunjangan
APP-176	PPDB	Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Peserta Didik Baru	Layanan Peserta Didik Baru
APP-177	Public SIASN	Sistem Informasi Pemutakhiran Data	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kepegawaian	Layanan Kepegawaian
APP-178	SDM PUSDATIN	Sistem Informasi Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kependidikan dan Data Kebudayaan	Layanan Pengelolaan Aset Sekolah
APP-179	SIPBOS ASET	Sistem Informasi Usulan DAK	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Aset	
APP-180	SIPBOS-BA TAM	Sistem Informasi Mengelola perencanaan dan belanja sekolah dalam penyaluran Dana BOS	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Perencanaan BOS	
APP-181	SIPINTAR	Sistem Informasi untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Pendidikan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Peserta Didik	Layanan Peserta Didik Baru
APP-182	ATCS	Sistem Informasi Data Informasi ATCS(Area Traffic Control System)	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perhubungan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Streaming ATCS	Layanan ATCS(Area Traffic Control System)

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-183	BRT Nusantara	Sistem Informasi Tikecting & Pembayaran	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perhubungan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Penumpang & Pendapatannya	Layanan Transportasi Darat (Bus Trans Batam)
APP-184	SIMPKB	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Desktop	Open Source	PHP	Dinas Perhubungan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Uji Kendaraan Bermotor	Layanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
APP-185	SIP TB	Sistem Informasi Penumpang Trans Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perhubungan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penumpang, Data Rute & Pembelian Tiket	Layanan Transportasi Darat (Bus Trans Batam)
APP-186	SatuData KKP	Sistem Informasi Satu Data Kementerian Kelautan & Perikanan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perikanan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Perikanan Tangkap	Layanan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap
APP-187	SiKAN	Sistem Informasi Perikanan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perikanan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data dan Informasi Produk Perikanan	Layanan Pengaduan Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan
APP-188	e-ESKA	Sistem Informasi Verifikasi SKA	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Surat Keterangan Asal	Layanan Surat Keterangan Asal (SKA)
APP-189	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Sistem Informasi Kearsipan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kearsipan	Layanan Persuratan Elektronik dan Kearsipan Dinamis
APP-190	SRIKANDI	Sistem Informasi Surat Menyurat dan Arsip Elektronik secara online serta terintegrasi.	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Kearsipan	Layanan Surat Elektronik
APP-191	Perumahan	Sistem Informasi Perumahan Kota Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)	Layanan Informasi Status Penyerahan Lahan Prasarana Sarana

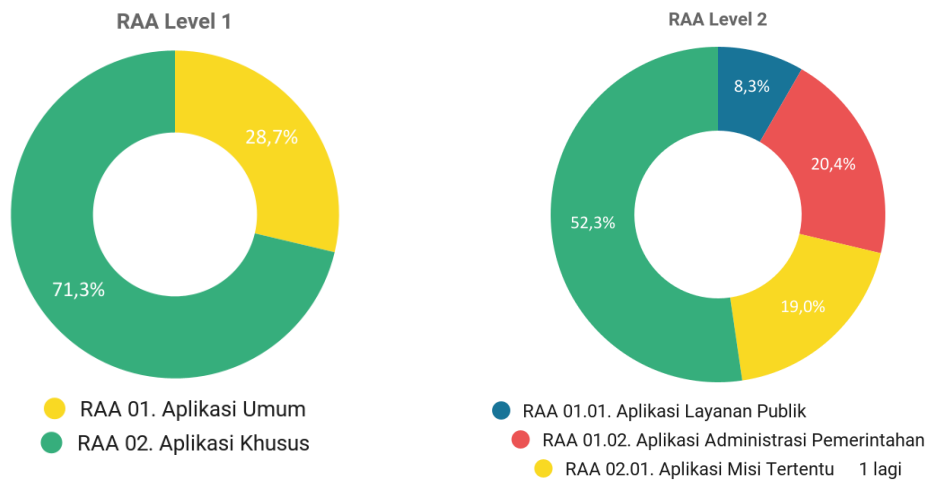
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
									Perumahan Permukiman	dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman
APP-192	PSU	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Umum Perumahan	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman	Layanan Informasi Status Penyerahan Lahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Permukiman
APP-193	RUSUNAWA	Sistem Informasi Rumah Susun Sewa Kota Batam	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Rumah Susun Sewa	Layanan Rumah Susun Sewa
APP-194	SIKS	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Web Based	Open Source	PHP	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Layanan Penerima Program Bantuan Sosial Kemensos Meliputi Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai
APP-195	e-LHKPN	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Web Based	Open Source	PHP	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-196	SIERA	Manajemen Penggunaan Produk Dalam Negeri	Web Based	Open Source	PHP	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Penggunaan Produk Dalam Negeri	Layanan Konsultasi P3DN
APP-197	SIHARKA	Sistem Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Web Based	Open Source	PHP	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Harta Kekayaan ASN	
APP-198	SIPTL	Sistem Informasi Manajemen Hasil Temuan BPK	Web Based	Open Source	PHP	Inspektorat	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Temuan Hasil Pengawasan Eksternal dan Internal	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-199	APLICARES	Sistem Informasi yang dikembangkan oleh tim BPJS Kesehatan untuk memeriksa ketersediaan kamar atau tempat tidur di rumah sakit	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-200	e-DOKTER	Sistem Dokter Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data SDM Kesehatan	Layanan Medis
APP-201	HFIS BPJS	Sistem Informasi fasilitas kesehatan untuk tujuan profiling, monitoring, serta pelaporan data terkait penanggung jawab, jumlah dokter, alamat buka praktik, jam kerja, teknologi, dan sebagainya	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Fasilitas Kesehatan	Layanan Medis
APP-202	LIS	Laboratorium Information System	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Fasilitas Kesehatan	Layanan Laboratorium
APP-203	Pasien Safety	Sistem Informasi Insiden Keselamatan Pasien	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Insiden Keselamatan Pasien	Layanan Medis
APP-204	SIMARS	Sistem Informasi Data Indikator Mutu Nasional	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data indikator mutu Nasional	
APP-205	SIMOLEK	Sistem Informasi Mendaftar Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pendaftar RSUD	Layanan Surat Elektronik
APP-206	SIMRS	Sistem Manajemen Rumah Sakit	Web Based dan Desktop	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.01. Aplikasi Misi Tertentu	Data Management Rumah Sakit	Layanan Sterilisasi Alat Rumah Sakit
APP-207	Sirs Online	Sistem Informasi Pelaporan Data Rumah Sakit yang Berbasis Online	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Management Rumah Sakit	Layanan Pajak Daerah
APP-208	SISMADAK	Sistem Manajemen Manajemen Dokumen Dokumen Akreditasi	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.02. Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Data Akreditasi Rumah Sakit	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Nama Basis Data	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)	→ Layanan (Dependency)
APP-209	SISRANAP	Sistem Informasi Rawat Inap	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pasien Rawat Inap	Layanan Rawat Inap
APP-210	SISRUTE	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-211	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Tuberkulosis	Layanan Tuberkulosis
APP-212	TELEMEDICINE	Sistem Informasi Layanan Medis	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 01. Aplikasi Umum	RAA 01.01. Aplikasi Layanan Publik	Data Fasilitas Kesehatan	Layanan Medis
APP-213	V-claim BPJS	Sistem Informasi Pembuatan SEP atau Surat Eligibilitas Peserta dan penagihan klaim pengguna layanan rumah sakit	Web Based	Open Source	PHP	Rumah Sakit Umum Daerah	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data BPJS	Layanan Rekomendasi Jamkesda (BPJS)
APP-214	PATROLI	Sistem Informasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pelaporan kegiatan patroli dan mencetak laporan kegiatan.	Web Based	Open Source	PHP	SatpolPP	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Surat Keterangan Berobat untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa & Disabilitas yang Memerlukan Identitas
APP-215	SIMPOL PP	Sistem Informasi Pengumpulan data eksternal Pemerintah Terpusat Satpol PP	Web Based	Open Source	PHP	SatpolPP	RAA 02. Aplikasi Khusus	RAA 02.02. Aplikasi Fungsi Tertentu	Data SatpolPP	

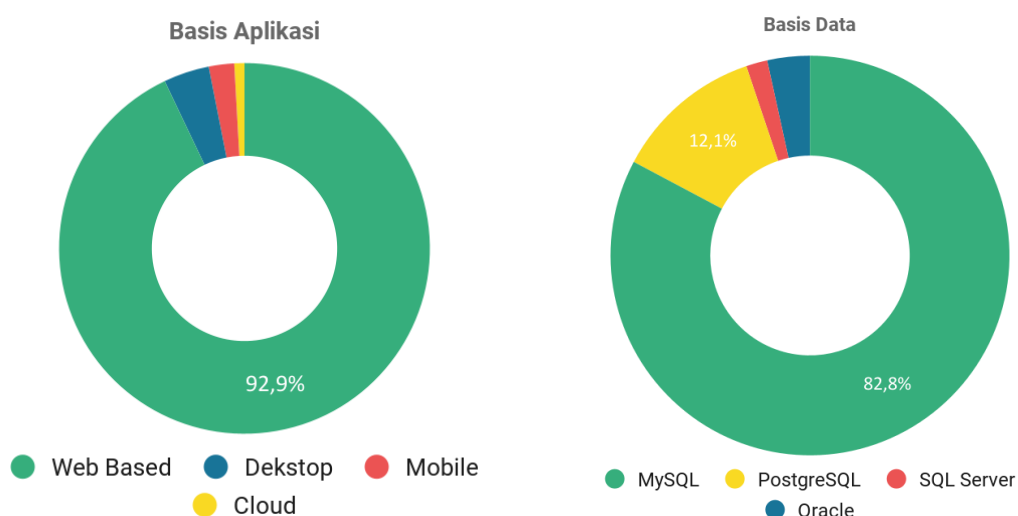
B. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

Analisa terhadap kondisi aplikasi eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.5.1 Referensi Arsitektur Aplikasi

Terdapat 216 aplikasi yang eksisting dimana sesuai Referensi Arsitektur Aplikasi Level 1, 28,7% (62 aplikasi) merupakan RAA 01. Aplikasi Khusus, dan 71,3% (154 aplikasi) merupakan RAA 02. Aplikasi Umum. Untuk Referensi Arsitektur Aplikasi Level 2 dimana 8,3% (18 Aplikasi) merupakan RAA 01.01 Aplikasi Layanan Publik, dilanjut 20,4% (44 Aplikasi) merupakan RAA 01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, dilanjut 19,0% (41 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.01 Misi Tertentu, dan 52,3% (113 Aplikasi) merupakan Aplikasi RAA 02.02 Fungsi Tertentu di Perangkat Daerah.

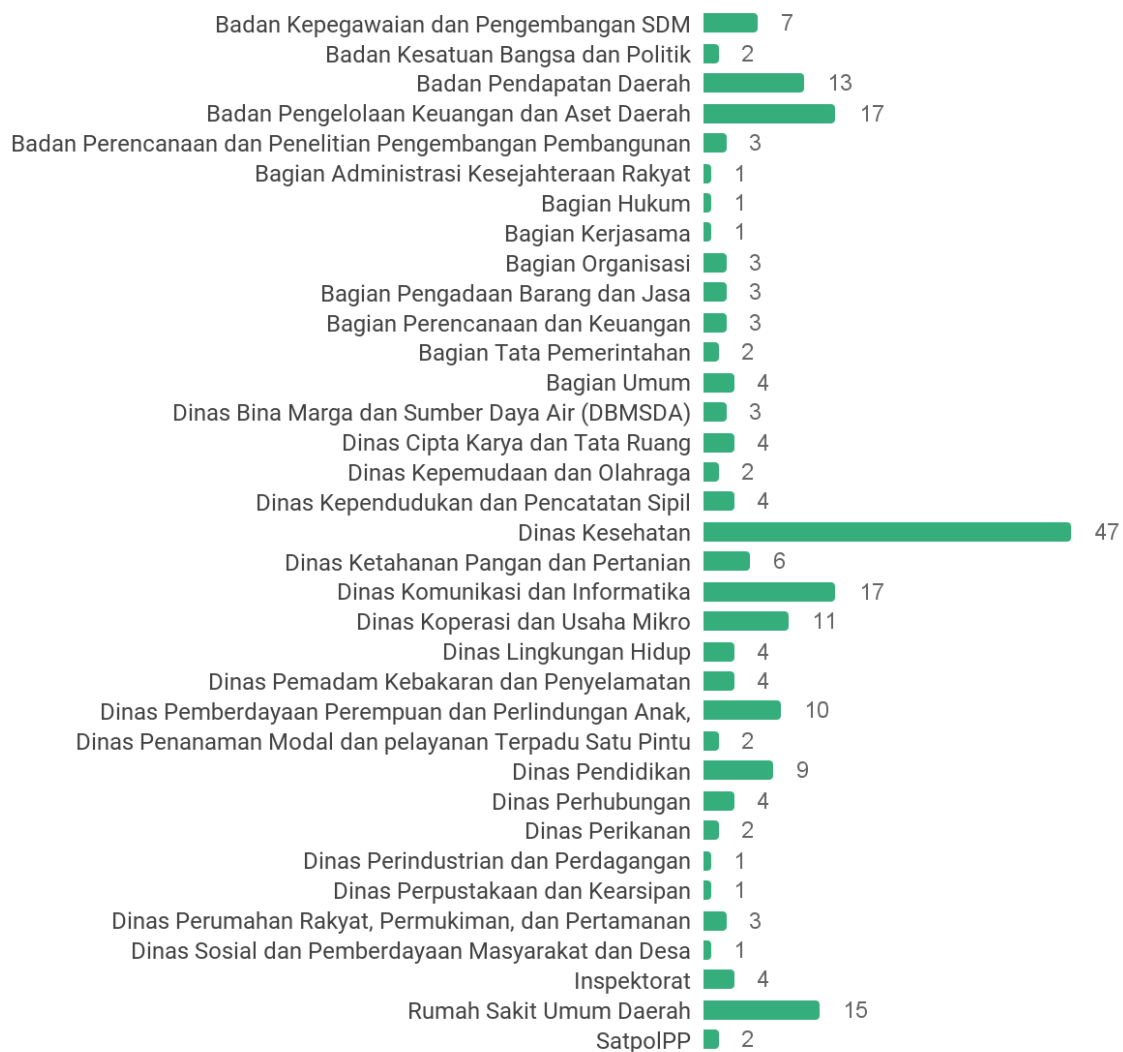


Grafik 3.5.2 Kondisi Teknologi Sistem Informasi (ii)

Untuk Kondisi Teknologi Basis Aplikasi yang digunakan untuk saat ini Web Based sebanyak 92,9% (210 aplikasi), dilanjut dengan Desktop sebanyak 4,0% (9 aplikasi) dan yang ketiga adalah platform Mobile dengan jumlah sebanyak 2,2% (5 Aplikasi) dan platform Cloud dengan jumlah

0,9% (2 aplikasi). Untuk Kondisi Teknologi Basis Data pada Aplikasi Eksisting dimana 82,8% (41 aplikasi) merupakan Database MySQL, 12,1% (6 aplikasi) merupakan Database PostgreSQL, 1,7% (1 aplikasi) merupakan Database SQL Server, dan 3,4% (6 aplikasi) merupakan Database SQL Oracle.

Unit Operasional Teknologi



Grafik 3.5.3 OPD Pengelola Aplikasi Eksisting

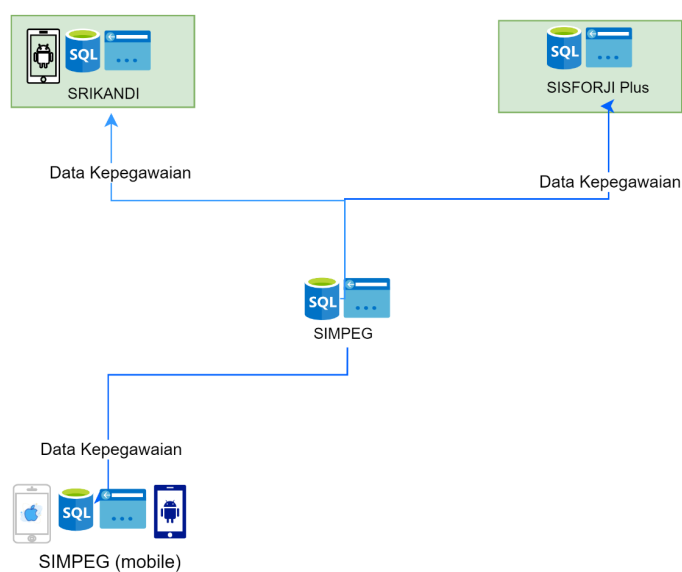
Pada Grafik 3.5.4 dapat dilihat OPD Pengelola Aplikasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM terdapat 7 aplikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 2 aplikasi, Badan Pendapatan Daerah terdapat 13 aplikasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 17 aplikasi, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah terdapat 3 aplikasi, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdapat 1 aplikasi, Bagian Hukum terdapat 1 aplikasi, Bagian Kerjasama terdapat 1 aplikasi, Bagian Organisasi terdapat 3 aplikasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat 3 aplikasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan terdapat 3 aplikasi, Bagian Tata Pemerintahan terdapat 2 aplikasi, Bagian Umum terdapat 4 aplikasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) terdapat 3 aplikasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdapat 4 aplikasi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdapat 2 aplikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 4 aplikasi, Dinas Kesehatan

terdapat 47 aplikasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat 6 aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 17 aplikasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat 11 aplikasi, Dinas Lingkungan Hidup terdapat 4 aplikasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat 4 aplikasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 10 aplikasi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 2 aplikasi, Dinas Pendidikan terdapat 9 aplikasi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat 1 aplikasi, Inspektorat terdapat 4 aplikasi, Rumah Sakit Umum Daerah terdapat 15 aplikasi, SatpolPP terdapat 3 aplikasi.

C. Diagram Integrasi Antar Aplikasi

Integrasi aplikasi ini dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Kebutuhan dari operasional pemerintahan mengharapkan data/informasi yang dimiliki oleh sebuah aplikasi dari suatu OPD harus dikirimkan ke aplikasi lain yang dimiliki OPD yang lain. Kebutuhan pertukaran data/informasi inipun bisa berlaku dalam skala lebih luas, Seperti integrasi antara pemerintah kota batam dengan instansi pusat untuk kepentingan pelaporan dan sebagainya. berikut ini digambarkan aplikasi yang sudah terintegrasi di lingkungan pemerintah kota batam.

Bidang Kepegawaian dan Kearsipan	
Komponen	Kepegawaian dan Kearsipan
Unit Primer	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



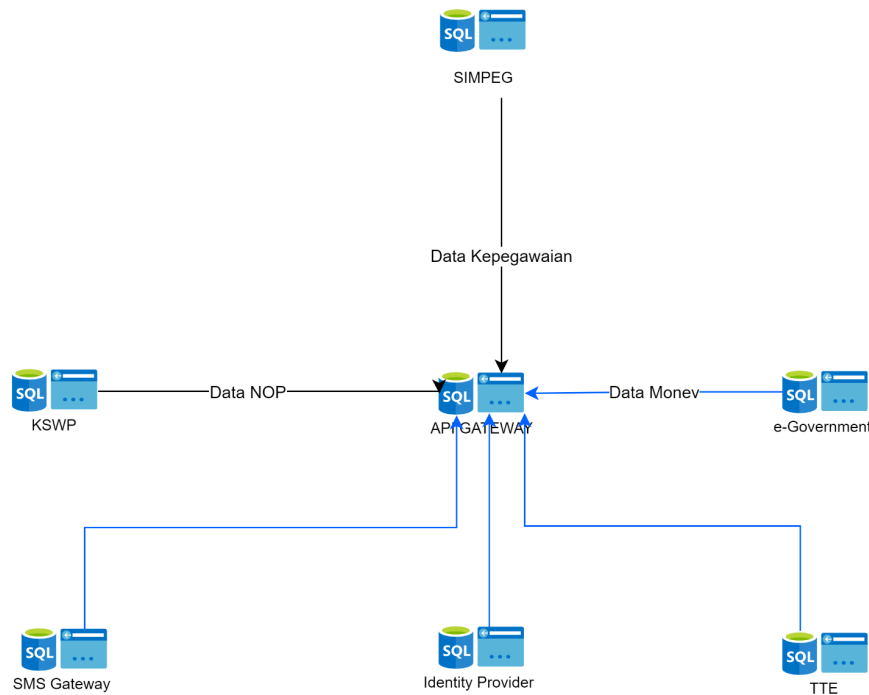
Gambar 3.5.1 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Urusan Kepegawaian dan Kearsipan

Pada gambar 3.5.1 menunjukkan diagram Integrasi antar aplikasi kota Batam di bidang Kepegawaian dan Kearsipan dengan unit primernya adalah badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dapat dilihat terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam bidang kepegawaian dan kearsipan yaitu aplikasi SIMPEG, SRIKANDI, SISFORJI Plus, SIMPEG Mobile. Pada diagram yang tercantum di atas terlihat bahwa SRIKANDI, SISFORJI Plus, SIMPEG Mobile melakukan pengambilan data pada aplikasi SIMPEG yaitu pengambilan data kepegawaian.

Bidang Komunikasi dan Informasi

Komponen Informasi

Unit Primer Dinas Komunikasi dan Informatika



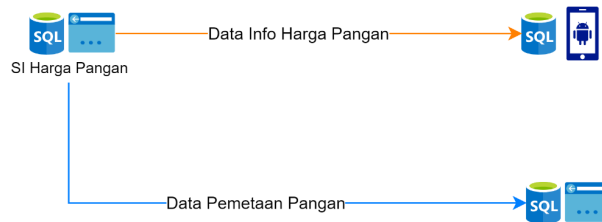
Gambar 3.5.2 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Komunikasi dan Informasi

Gambar 3.5.2 menunjukkan integrasi aplikasi kota Batam di bidang Komunikasi dan Informasi dengan unit primer adalah Dinas Informasi dan Informatika. Pada bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan oleh pemerintah antara lain API Gateway, SIMPEG, e-Government, TTE, Identity Provider, SMS Gateway, KSWP. API Gateway melakukan pengambilan data di TTE, Identity Provide, dan SMS Gateway. pengambilan data Monev dari aplikasi e-Government. Pengambilan data NOP dari KSWP dan data kepegawaian dari SIMPEG.

Bidang Pangan

Komponen Pangan

Unit Primer Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan



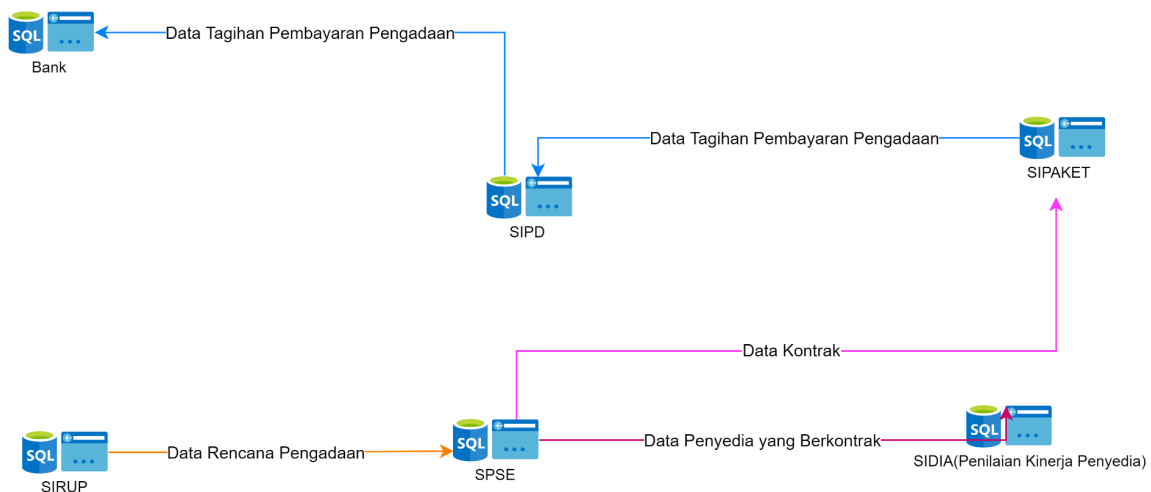
Gambar 3.5.3 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Pangan

Gambar 3.5.3 menunjukkan integrasi antar aplikasi di Kota Batam pada bidang Pangan. Dalam bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya adalah Si Harga Pangan, .

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Komponen Pengadaan Barang dan Jasa

Unit Primer Bag. Pengadaan Barang dan Jasa

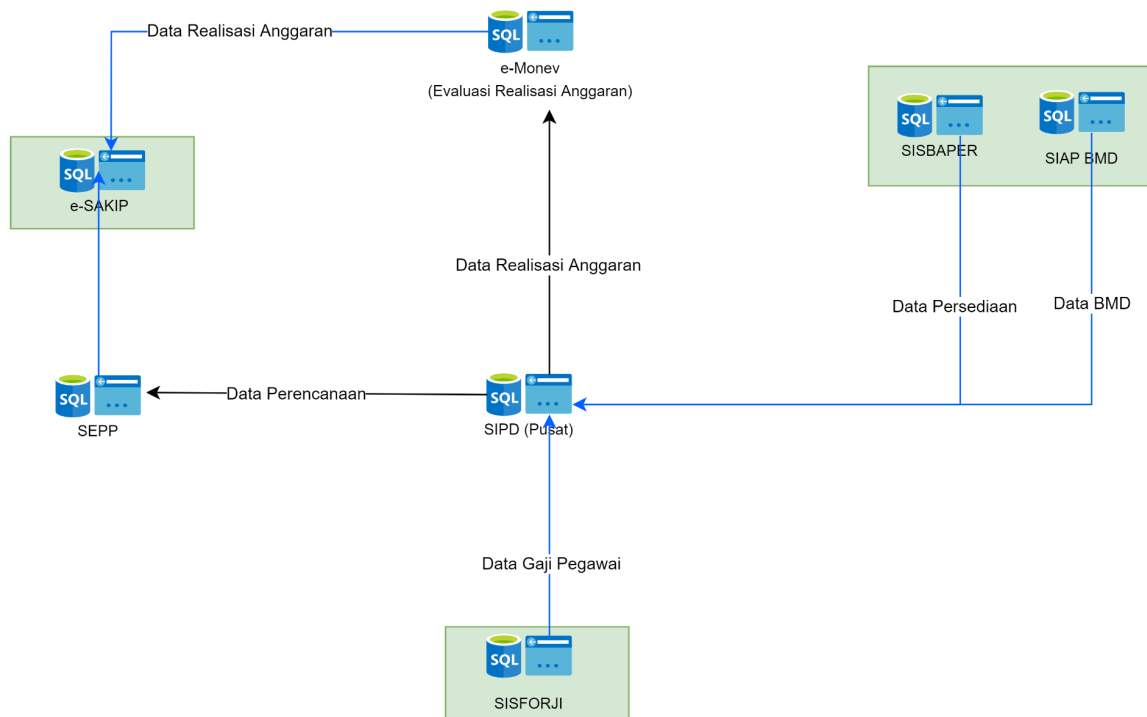


Gambar 3.5.4 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Gambar 3.5.4 menunjukkan integrasi antar aplikasi pada bidang pengadaan barang dan jasa dengan unit primernya adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu Bank, SIPD, SIPAKET, SIDIA, SPSE, SIRUP. Aplikasi Sirup melakukan pengiriman data rencana pengadaan ke SPSE. Kemudian SPSE melakukan pengiriman data penyedia yang berkontrak ke aplikasi SIDIA dan data kontrak ke SIPAKET.

SIPAKET melakukan pengiriman data tagihan pembayaran pengadaan ke SIPD. kemudian SIPD melakukan pengiriman data tagihan pembayaran pengadaan ke bank.

Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset	
Komponen	Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset
Unit Primer	Badan Perencanaan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah



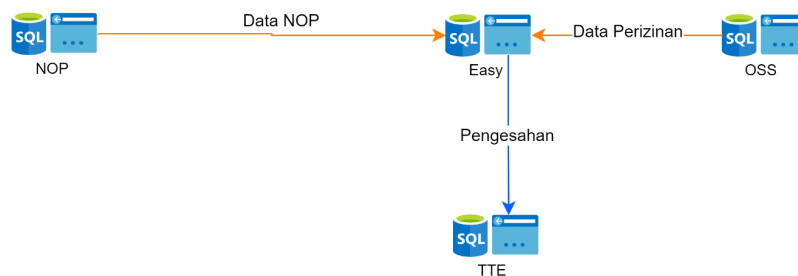
Gambar 3.5.5 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

Gambar 3.5.5 menunjukkan integrasi antar aplikasi di kota Batam pada bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset. dalam bidang tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya adalah SISBAPER, SIAP BMD, SIPD, SISFORJI, SEPP, e-Sakip, e-Monev. SIPD(pusat) melakukan pengambilan data persediaan dari SISBAPER, data BMD dari SIAP BMD, dan data Gaji Pegawai dari SISFORJI. kemudian SIPD melakukan pengiriman data realisasi anggaran dari e-Monev, dan data perencanaan dari SEPP. kemudian e-Sakip melakukan pengambilan data dari SEPP dan data realisasi anggaran dari aplikasi e-Monev.

Bidang Perizinan

Komponen Perizinan

Unit Primer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 3.5.6 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang perizinan

Pada Gambar 3.5.6 menunjukkan Integrasi antar aplikasi kota Batam pada Bidang Perizinan. Dalam bidang ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu Aplikasi NOP, Easy, OSS, TTE. Aplikasi Easy melakukan pengambilan data NOP dari aplikasi NOP dan data perizinan dari OSS. kemudian aplikasi Easy juga melakukan pengiriman data pengesahan ke aplikasi TTE.

Bidang Pendidikan

Komponen Pendidikan

Unit Primer Dinas Pendidikan

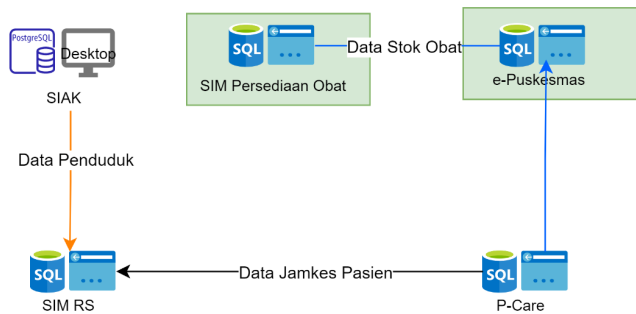


Gambar 3.5.7 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Pendidikan

Gambar 3.5.7 menunjukkan integrasi antar aplikasi di kota Batam di Bidang Pendidikan dengan unit primernya adalah Dinas Pendidikan. Beberapa aplikasi yang digunakan dalam bidang ini adalah PPDB Online, SIAK, dan Dapodik Pusat. Aplikasi PPDB Online (Pusat) melakukan pengambilan data dari aplikasi SIAK dan DAPODIK pusat.

Bidang Kesehatan

Komponen	kesehatan
Unit Primer	Dinas Kesehatan



Gambar 3.5.8 Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang kesehatan

Gambar 3.5.8 merupakan diagram integrasi antar aplikasi yang ada di kota Batam pada Bidang kesehatan. dalam diagram tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu SIM Persediaan Obat, e-Puskesmas, P-Care, SIM RS, dan SIAC. Sim persediaan obat saling terhubung dengan e-puskesmas. kemudian pada aplikasi P-Care melakukan pengiriman dat ke e-puskesmas dan data jamkes pasien ke SIM RS. kemudian SIM RS melakukan pengambilan data penduduk dari aplikasi SIAC.

3.6. Arsitektur Infrastruktur

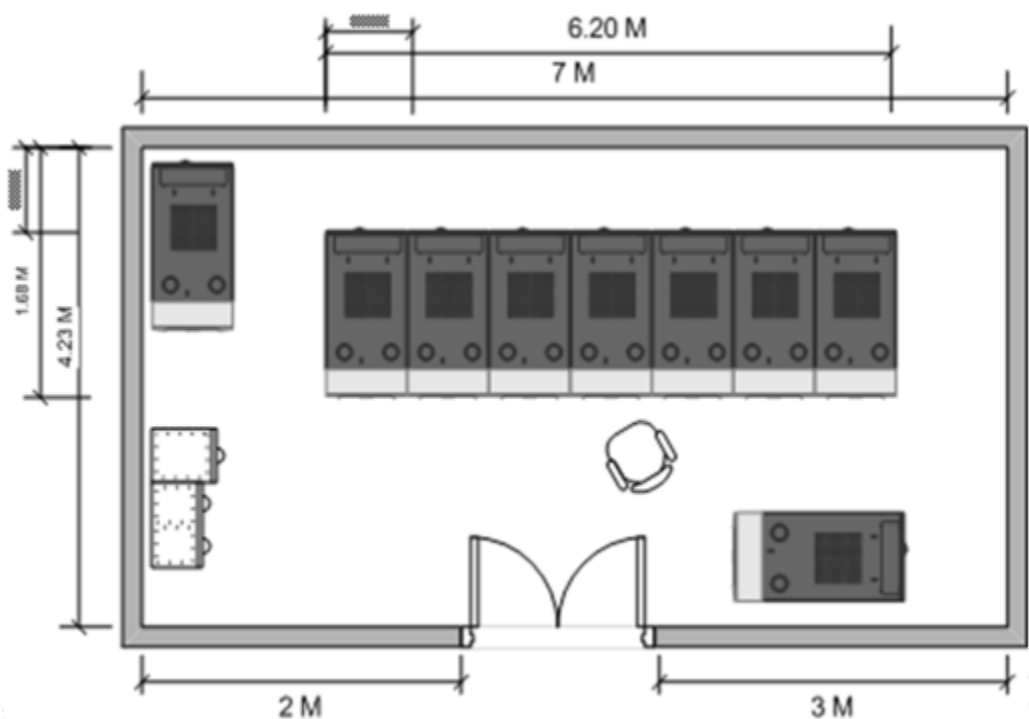
A. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

Infrastruktur SPBE yang telah dimiliki oleh Diskominfo Kota Batam meliputi Ruang Server, Jaringan Intra Pemko Batam, dan Sistem Penghubung Layanan Daerah.

1. Pusat Data Pemko Batam

Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya. Diskominfo Kota Batam telah memiliki pusat data untuk penempatan server – server aplikasi milik Pemko Batam. Pusat Data berukuran 7 x 4,23 meter yang terdiri dari satu ruang server dengan 9 (sembilan) Rack Server. Ukuran rak bervariasi yakni 42U, dan 32U dengan tipe desain tertutup (*closed rack*).



Gambar 3.6.1 Topologi Pusat Data Diskominfo Pemko Batam



Gambar 3.6.2 Kondisi Ruang Server di Pusat Data Diskominfo Pemko Batam

Fasilitas Pendukung



Gambar 3.6.3 Fasilitas Pendukung CCTV, Access Door, dan UPS

Untuk mendukung operasional pusat data maka diperlukan fasilitas pendukung meliputi:

- Lantai yang ditinggikan (*raised floor*)
Fungsi dari lantai ditinggikan adalah menciptakan ruang yang dapat digunakan untuk lalu lintas dan menciptakan pendinginan, listrik, dan mekanik. Selain itu juga sebagai cara mendistribusikan udara dingin. Dengan menggunakan *raised floor*, dapat mengurangi jumlah udara yang dibutuhkan untuk mendinginkan peralatan, dan membutuhkan lebih sedikit energi dan meningkatkan distribusi suhu di semua rack.
- Jalur Kabel (*Cable Tray*)
Befungsi sebagai media untuk meletakkan susunan kabel data, fiber optic agar rapi dan mudah ditelusuri. Pada gambar di atas terlihat lokasi *cable tray* berada di atas rack server. Hal ini lebih aman dibandingkan berada di bawah *raised floor*.
- Kamera Pengawas (*Closed-Circuit Television - CCTV*)

Berfungsi untuk merekam aktivitas di ruang server. Kondisi saat ini, CCTV yang ada menggunakan *infrared* dengan resolusi *Full HD* yang dapat menyimpan rekaman hingga 30 hari.

- Pintu Akses (*Access Door*)

Pintu akses untuk masuk ke ruang server menggunakan kartu dan sidik jari. Hanya kartu atau sidik jari yang sudah direkam yang dapat membuka pintu tersebut. Dalam keadaan listrik padam, pintu tetap terkunci dari luar karena pintu dilengkapi dengan baterai yang dapat bertahan sampai dengan 3 jam.

- Catu Daya Listrik Cadangan (*Uninterruptible Power Supply - UPS*)

Berfungsi sebagai catu daya listrik cadangan jika catu daya listrik utama dari PLN mengalami gangguan (pemadaman) dan aliran listrik belum pindah ke generator set (genset). Kapasitas UPS yang tersedia adalah 10 KVA.

- Sistem Pemadam Kebakaran (*Fire Suppression*)

Pusat data sudah dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran menggunakan media gas. Perangkat pendukung lainnya yakni *Fire Sprinkler* untuk penyiram air otomatis jika terjadi kebakaran, *alarm* sebagai penanda jika terjadi kenaikan suhu panas di ruangan server, dan *smoke detector* untuk mendeteksi jika adanya asap dan akan diteruskan ke alarm.



Gambar 3.6.4 Fasilitas Pendukung *Fire Suppression, Sprinkle, Alarm, dan Smoke Detector*

a. Perangkat Server – Server

Berikut ini adalah daftar perangkat server yang ada di ruang server Pusat Data Diskominfo Kota Batam beserta informasi lainnya seperti merk dan tipe. .

Tabel 3.6.1. Daftar Perangkat Server

No	Nama Server (Hostname)	Merk	Model	Virtualisasi Server	Status
1	local1.batam.go.id	CISCO	Rack Mount	Ya	Normal
2	local2.batam.go.id	CISCO	Rack Mount	Ya	Normal
3	local3.batam.go.id	CISCO	Rack Mount	Ya	Normal

4	local4.batam.go.id	IBM	Rack Mount	Ya	Normal
5	local5.batam.go.id	IBM	Rack Mount	Ya	Normal

Tabel 3.6.2. Daftar Perangkat Storage

No	Nama Server (Hostname)	Merk	Model	Tipe Storage	Status
1	Storage.batam.go.id	QNAP	Tower	Network Attached Storage (NAS)	Normal

b. Teknologi

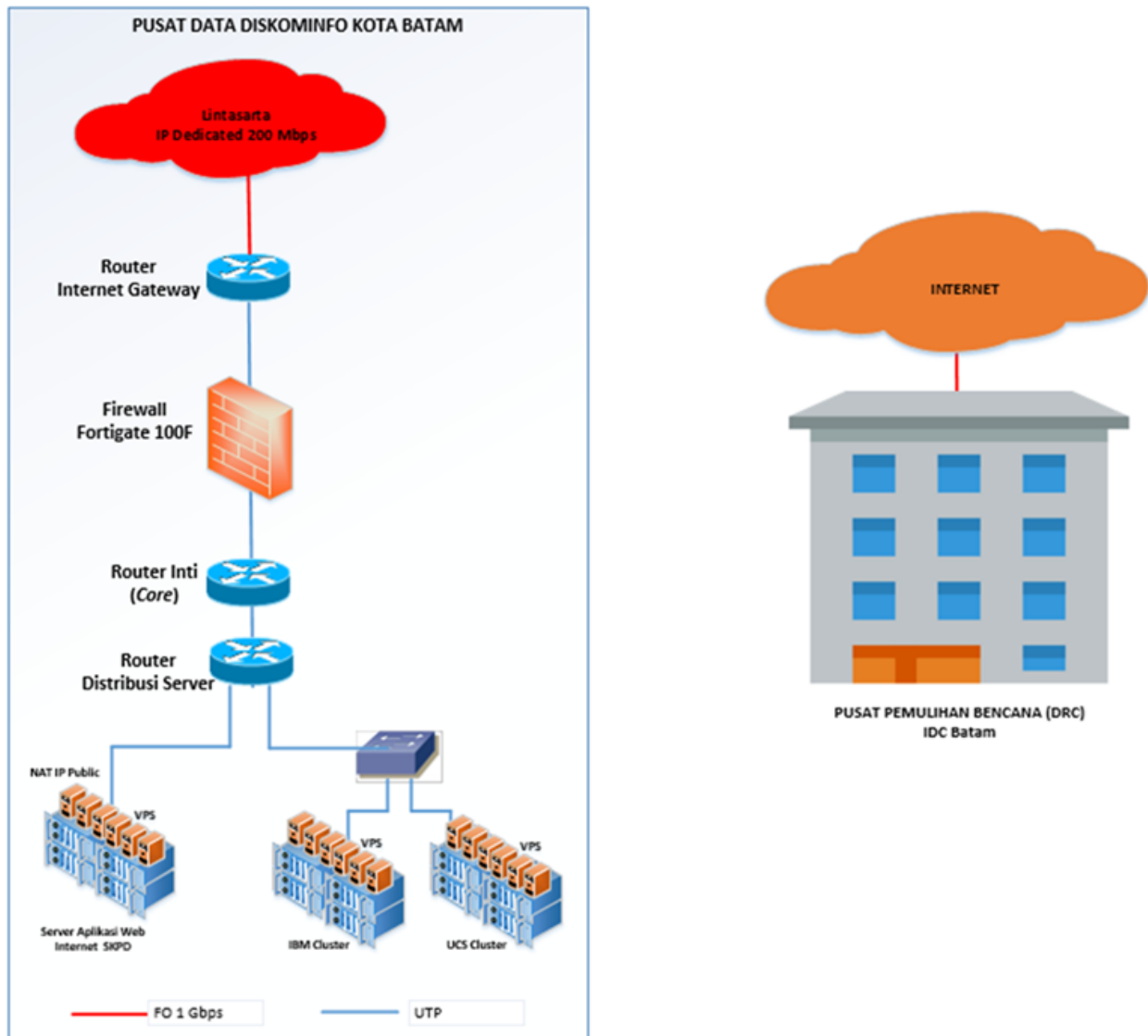
Sistem Informasi (SI) yang dikelola oleh Diskominfo Pemerintah Kota Batam sebagian besar berbasis web dan dapat diakses melalui internet. Beberapa SI sudah dalam bentuk *mobile apps* yang dapat diakses melalui telepon pintar.

Tabel 3.6.3. Daftar Teknologi Aplikasi

No	Kategori	Teknologi
1	Sistem Operasi	Ubuntu, CentOS
2	Bahasa Pemrograman	PHP, C#
3	Kerangka Kerja (<i>Framework</i>)	CodeIgniter, Laravel, Ms. ASP .Net
4	<i>Content Management System (CMS) / Platform</i>	WordPress, LimeSurvey, InLIS (perpustakaan)
5	Aplikasi Web Server	Apache, NginX
6	Pangkalan Data (Database)	Oracle, PostgreSQL, MySQL,

c. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Lokasi Pusat Pemulihan Bencana (DRC) berada di gedung IDC Batam. Kondisi saat ini, fungsi DRC belum optimal selain itu dari jarak Pusat Data Diskominfo dengan lokasi pusat pemulihan bencana kurang lebih 7 km sehingga kurang memenuhi praktik terbaik (*best practice*) dengan minimal 40 km dan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana.



Gambar 3.6.5. Topologi Pusat Data - Pusat Pemulihan Bencana

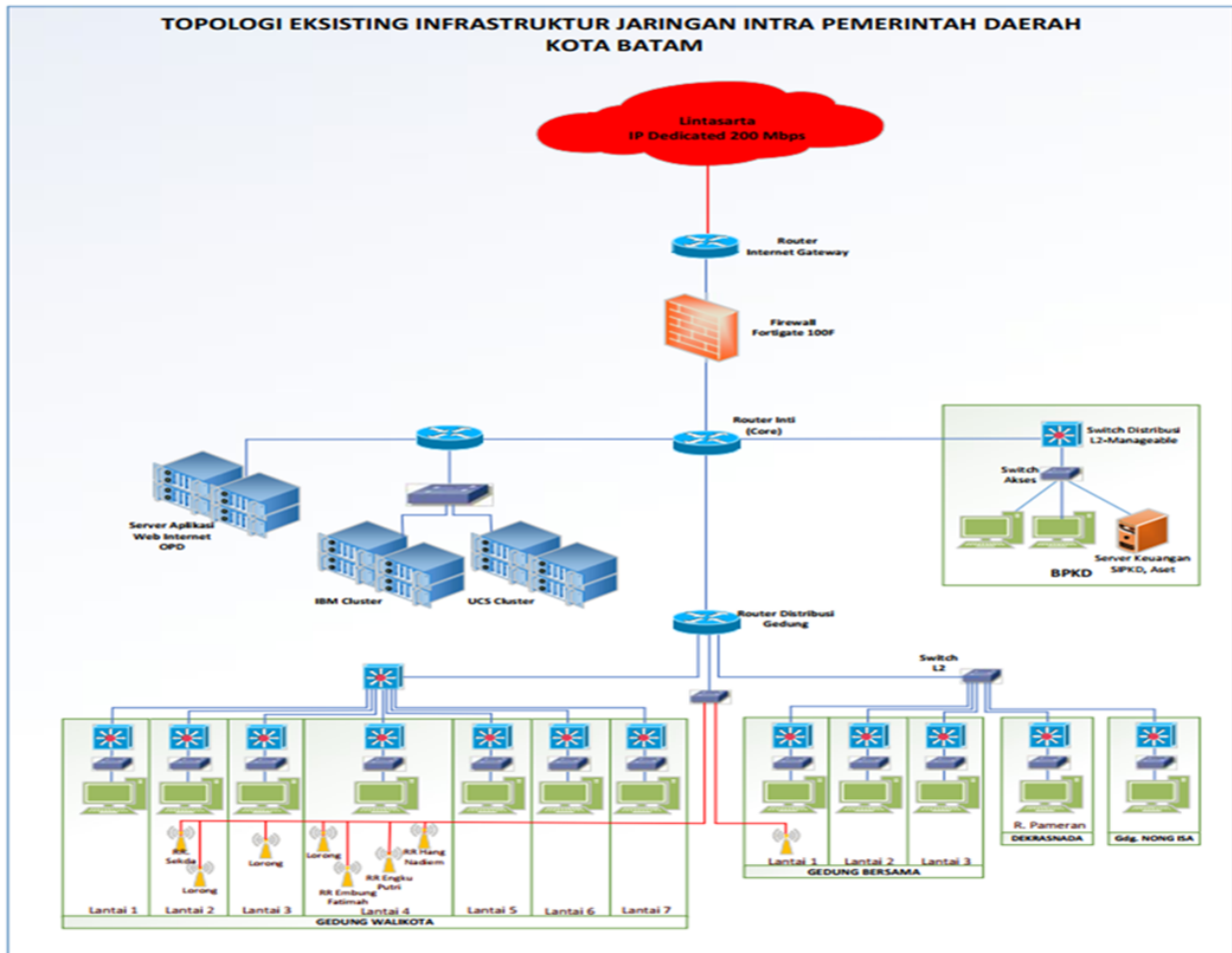
2. Jaringan Intra Daerah

Jaringan Intra Pemerintah Kota Batam adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar OPD/UPT dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam. Penyelenggara jaringan intra pemko Batam adalah Diskominfo Kota Batam.

a. Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah desain jaringan komputer yang menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain dengan perangkat pendukung berupa router, switch. Topologi jaringan digambarkan dalam bentuk grafik.

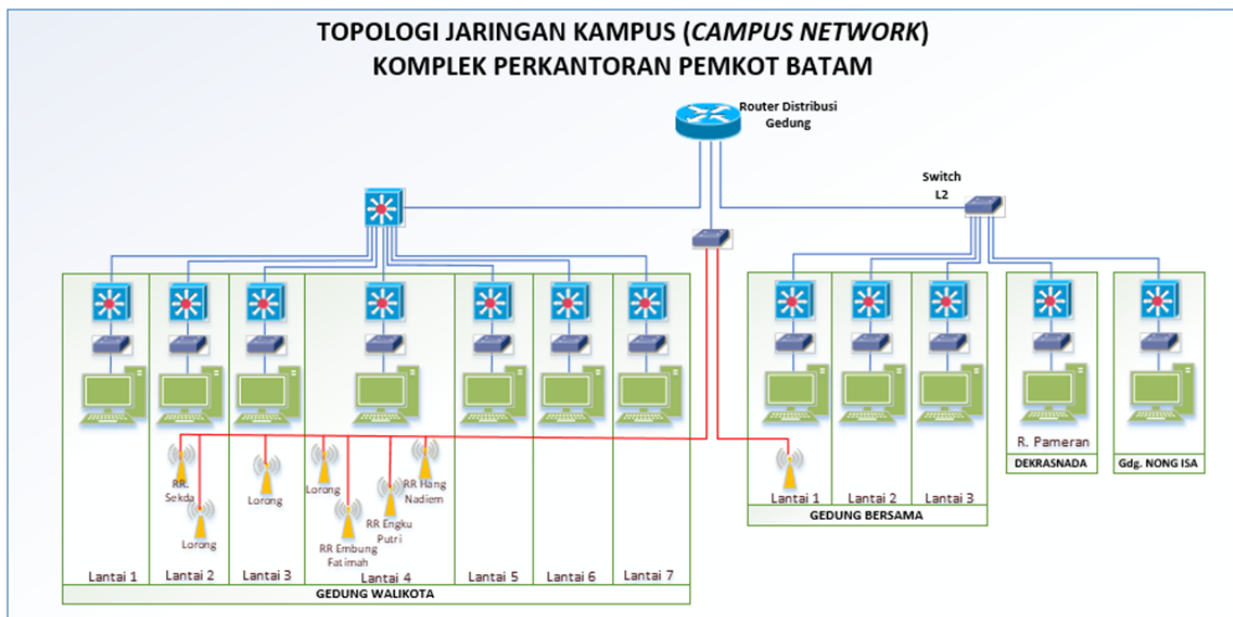
Topologi eksisting infrastruktur jaringan data Diskominfo Kota Batam menggambarkan interkoneksi jaringan data lokal di OPD/UPT, dan CCTV dengan jaringan inti (core network) Diskominfo. Kantor atau gedung yang berada di dalam kompleks perkantoran Pemkot Batam disebut sebagai jaringan kampus (*Campus Network*) meliputi: gedung Walikota, gedung Bersama, Dekrasnada, gedung Nong Isa, dan BPKD.



Gambar 3.6.6. Topologi Eksisting Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Jaringan Antar Gedung Komplek Pemko (Campus Network)

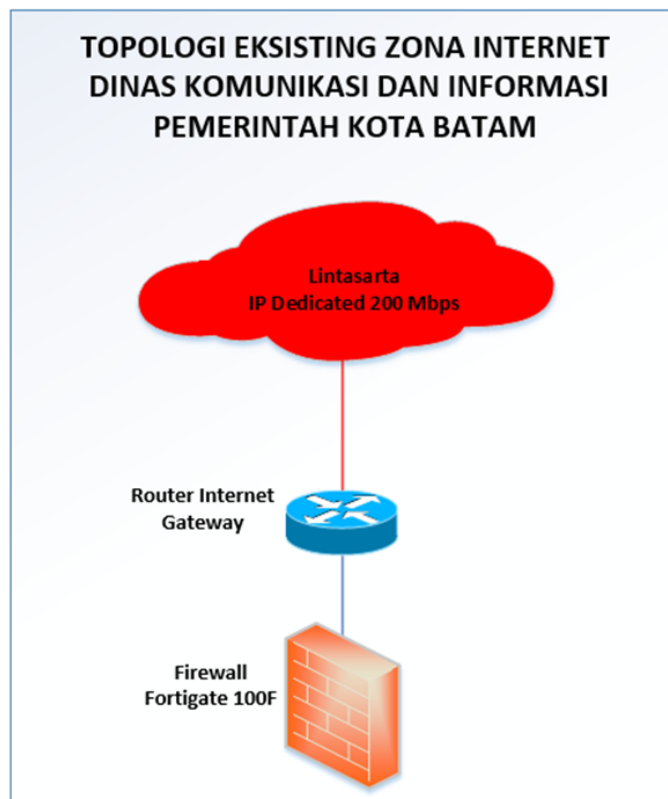
Jaringan antar gedung adalah jaringan data yang menghubungkan antar komputer, printer di dalam suatu ruangan atau lantai di gedung satu ke gedung lainnya. Perangkat pendukung jaringan data lokal yakni switch distribusi layer 2 (L2) *Manageable*, dan switch akses unmanageable. Perangkat *Access Point* untuk layanan jaringan nirkabel merupakan jaringan yang terpisah dari jaringan antar gedung.



Gambar 3.6.7. . Topologi Eksisting Jaringan Antar Gedung (*Campus Network*)

c. Jaringan Internet

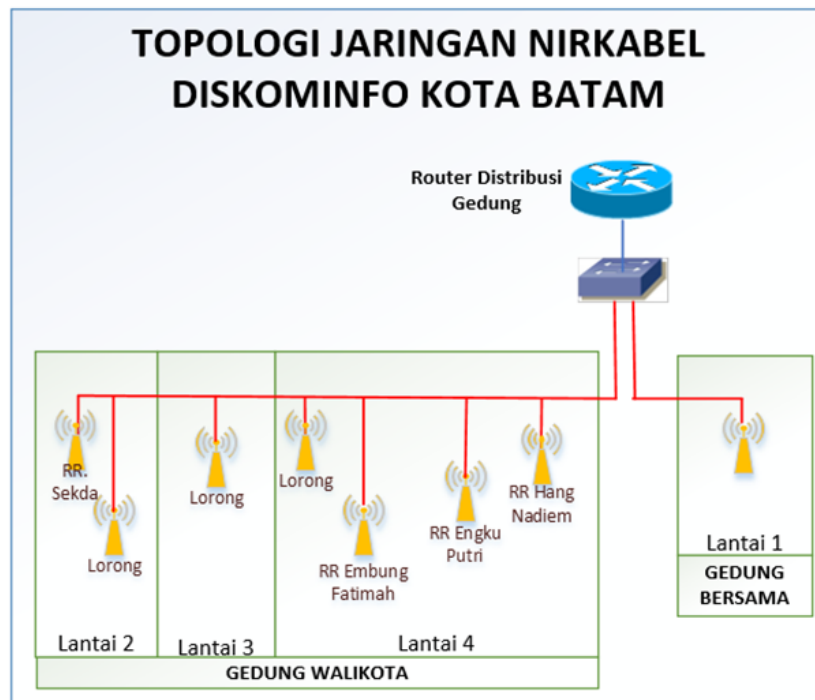
Infrastruktur jaringan data internet yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Batam terdiri dari perangkat Router Internet Gateway yang terkoneksi dengan jaringan penyedia jasa internet (*Internet Service Provider - ISP*), *Next-Generation Firewall Fortigate* tipe 100F. Kondisi saat ini Diskominfo Kota Batam belum memiliki alamat IP Public sendiri (*Autonomous System - AS Number*) sehingga Diskominfo Pemko Batam menyewa layanan Internet - IP Dedicated ke ISP Lintasarta. Aplikasi web internet Pemko Batam menggunakan alamat IP Public dari ISP Lintasarta. . Kondisi saat ini kapasitas *bandwidth* internet lokal (IIX) dan internasional (IX) yang sewa ke ISP Lintasarta sebesar 200 Mbps.



Gambar 3.6.8. Topologi Eksisting Zona Internet

d. Jaringan Nirkabel (WiFi)

Diskominfo Pemko Batam telah menyediakan layanan jaringan nirkabel (WiFi) yang tersedia di beberapa lokasi gedung, ruangan, ruang publik.



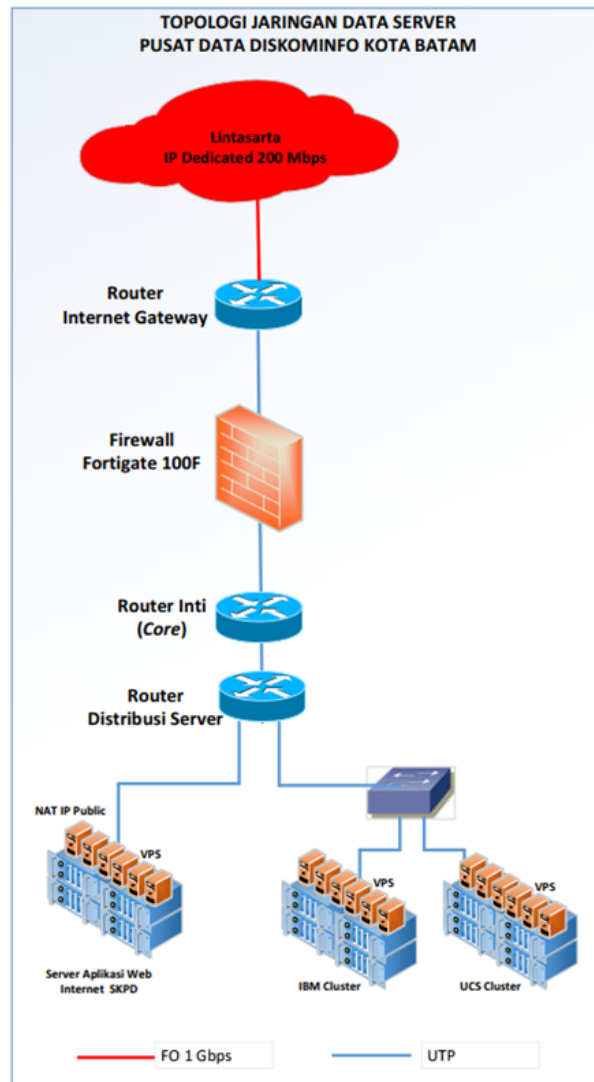
Gambar 3.6.9. Topologi Eksisting Jaringan Nirkabel

- A. Gedung Walikota
 - a. Lantai 2 sebanyak 2 unit Access Point (AP).
 - b. Lantai 3 sebanyak 1 unit AP;
 - c. Lantai 4 sebanyak 4 unit AP;
- B. Gedung Bersama
 - a. Lantai 1 sebanyak 1 unit AP

Protokol keamanan WiFi menggunakan WPA2-Personal dengan satu password (*Pre Shared Key*) dan WPA2-Enterprise dengan setiap pengguna memasukkan akun *username* dan *password* yang sudah terdaftar di perangkat LDAP Server.

e. Jaringan Server Farm

Jaringan Server Farm adalah interkoneksi antar perangkat server di Pusat Data Diskominfo. Kondisi saat ini terdapat 3 (tiga) cluster server yakni IBM, UCS Cisco, dan Server Aplikasi Web Internet SKPD. Cluster IBM, dan UCS Cisco sebagian besar digunakan untuk manajemen jaringan. Pemberian alamat IP Public server Aplikasi Web Internet SKPD langsung ke server tidak menggunakan *Name Address Translation* (NAT) dimanan alamat IP Lokal server akan diberikan alamat IP Publik di perangkat *router internet gateway* atau *firewall*.



Gambar 3.6.10. Topologi Eksisting Jaringan Server Farm

f. Perangkat Jaringan

Infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah Pemko Batam didukung oleh perangkat keras jaringan seperti tabel di bawah ini.

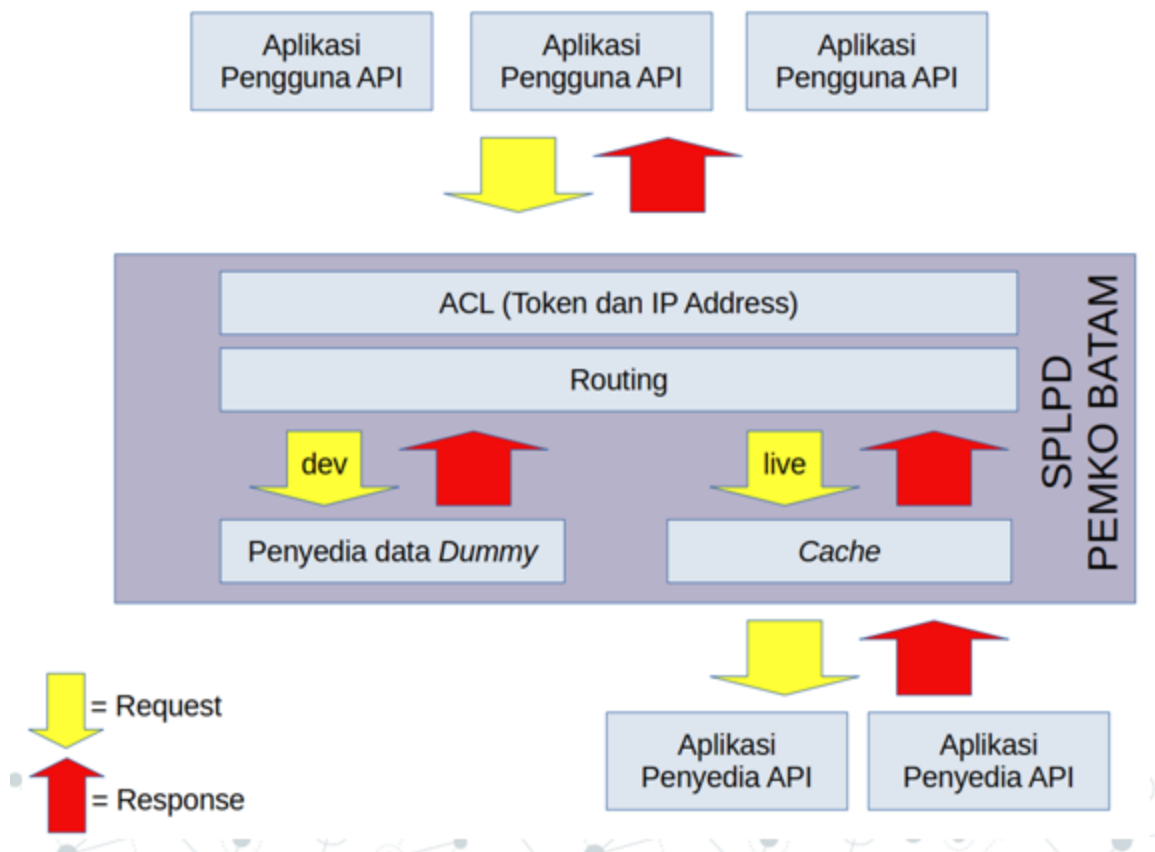
Tabel 3.6.4. Daftar Perangkat Keras Jaringan

No	Jenis Perangkat (Router, Switch)	Merk	Tipe/Seri	Redundan (Ya/Tidak)	Lokasi	Tahun Pembelian
1	Router	Mikrotik	CCR1036	Tidak	Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	2018
2	Router	Mikrotik	CCR1036	Tidak	Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	2018
3	Router	Mikrotik	RB1100AHx2	Tidak	Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Router	Mikrotik	RB1200	Tidak	Data Center IDC	
5	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 1 Kantor Walikota	
7	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 2 Kantor Walikota	
8	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 1 Kantor Walikota	
9	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 2 Kantor Walikota	
10	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 1 Kantor Walikota	
11	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 2 Kantor Walikota	
12	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 1 Kantor Walikota	
13	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 3 Gedung Bersama	
14	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 4 Gedung Bersama	
15	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Lantai 5 Gedung Bersama	
16	Switch	HP	V1910-48G	Tidak	Gedung Nong Isa	
17	Switch	Dlink	DES-1100-16	Tidak	Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	2020

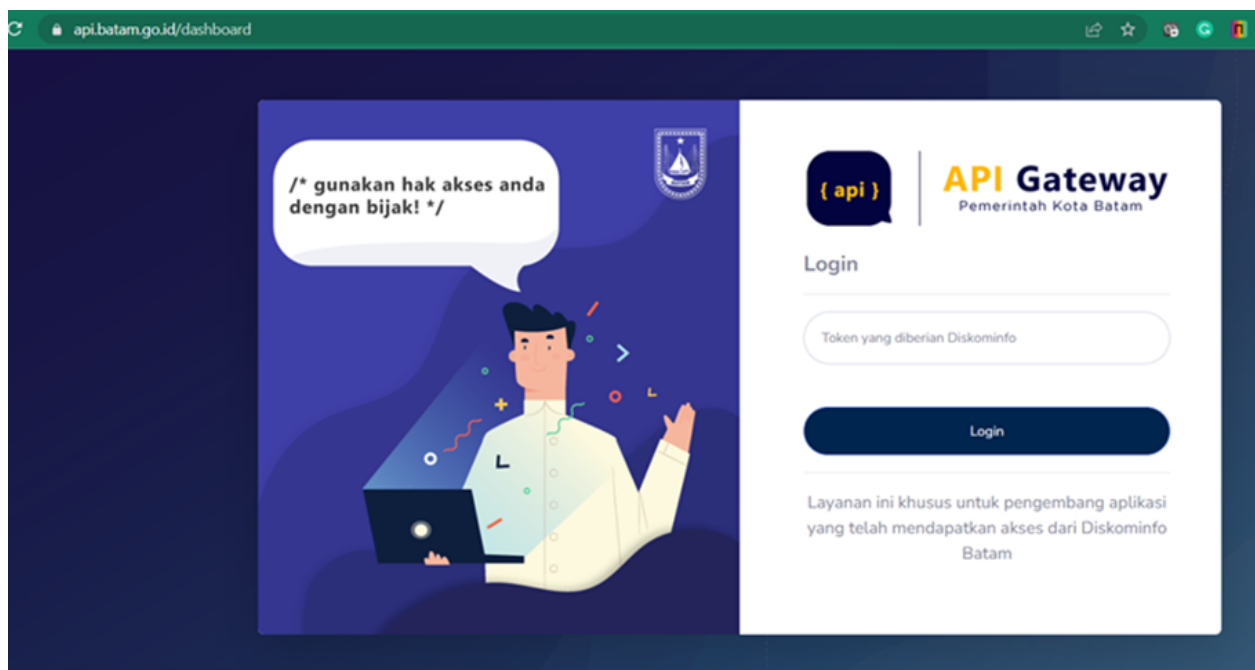
3. Sistem Penghubung Layanan Daerah

Sistem Penghubung layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.

Kondisi saat ini Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Diskominfo Kota Batam yakni berbagi pakai data, dan integrasi data. Berbagi pakai data antara aplikasi atau layanan menggunakan teknologi *Application Programming Interface* atau API. Sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, baik dari *platform* yang sama maupun lintas *platform*. Untuk kemudahan dalam pengaturan keamanan, lalu lintas data maka Diskominfo telah menerapkan API Gateway dengan alamat <https://api.batam.go.id>.

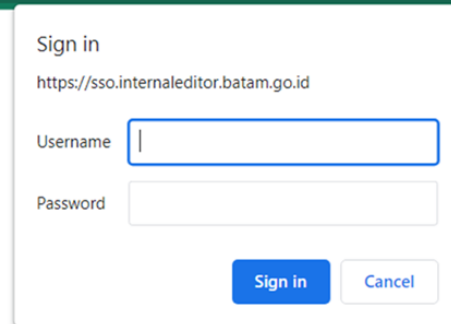


Gambar 3.6.11. Topologi API Gateway



Gambar 3.6.12. Halaman Depan API Gateway Pemko Batam (<https://api.batam.go.id>)

Sistem Penghubung Layanan Daerah jenis integrasi data pada tingkat pengguna aplikasi dengan implementasi teknologi Single Sign On (SSO). SSO ini diterapkan untuk login ke beberapa aplikasi web portal OPD/UPT dengan alamat <https://sso.internaeditor.batam.go.id>.



Sign in
https://sso.internaeditor.batam.go.id

Username

Password

Gambar 3.6.13. Halaman Depan *Single Sign On* (SSO)

3.7. Arsitektur Keamanan

Dalam pelaksanaan kegiatan SPBE, Pemerintah Kota Batam telah menerapkan keamanan SPBE yang meliputi kebijakan, standar operasi prosedur (SOP), dan dukungan perangkat keamanan.

A. Kebijakan Keamanan SPBE

Pemerintah Kota Batam telah memiliki beberapa kebijakan terkait Keamanan antara lain:

1. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Diundangkan pada tanggal 2 Juni 2022. Beberapa hal yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota tersebut antara lain:
 - Ruang Lingkup tercantum dalam BAB III - Pengamanan Informasi. Meliputi aset informasi, aset pengolahan informasi, dan penyimpanan informasi.
 - Penanggung Jawab tercantum dalam BAB IV - Penanggung Jawab dan Pelaksana Teknis. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pelaksanaan SMKI SPBE.
 - Perencanaan tercantum dalam BAB V – Perencanaan di pasal 9 sampai dengan pasal 10.
 - Dukungan Pengoperasioan tercantum dalam bab VI - Dukungan Pengoperasioan di pasal 11 sampai dengan pasal 15.
 - Evaluasi SPBE tercantum dalam BAB VII - Evaluasi Kinerja di pasal 16.
 - Perbaikan Berkelanjutan tercantum dalam BAB VIII – Perbaikan Berkelanjutan di pasal 17.



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Gambar 3.7.1. Halaman Depan Peraturan Wali Kota Batam Perihal Keamanan SPBE

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: 105/KI.01.04/VIII/2022 tentang Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 4 Agustus 2022.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : <https://kominfo.batam.go.id>
B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
NOMOR: *105*/K1.01.04/VIII/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

- Menimbang : Untuk memberikan arahan kepada manajemen dan memberikan dukungan untuk keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan kebutuhan bisnis serta hukum dan peraturan yang relevan, maka perlu dibuat Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Gambar 3.7.2. Halaman Depan SK Kadis Diskominfo Perihal Kebijakan Keamanan Informasi

B. Standar Operasi Prosedur (SOP)

Sebagai panduan dalam implementasi keamanan, Diskominfo Kota Batam telah mengeluarkan beberapa SOP antara lain:

1. Nomor 260/Kominfo-Bid. Persandian/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pengacak Sinyal (Jamming), tanggal 20 Maret 2019.
2. Nomor 01/SOP/Kominfo-PIPP/10/2021 tentang Penerimaan Berita Naskah Surat Biasa Melalui Surel SANAPATI, tanggal 07 Oktober 2021.
3. Nomor 02/SOP/Kominfo-PIPP/10/2021 tentang Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik, tanggal 07 Oktober 2021.

C. Perangkat Keamanan SPBE

Untuk mendukung keamanan dan pengamanan informasi dilingkungan Pemko Batam maka Diskominfo Kota Batam telah memasang beberapa perangkat keamanan.

Tabel 3.7.1. Daftar Perangkat Keras Keamanan

No	Perangkat	Merk	Tipe/Seri	Redundan (Ya/Tidak)	Status (Aktif/ Tidak)	Lokasi
1	Firewall	Fortinet	100F	Tidak	Aktif	Ruang Server Dinas Kominfo Kota Batam
2	Firewall	Fortinet	30E	Tidak	Tidak	Ruang Server Dinas Kominfo Kota Batam
3	Firewall	Cisco ASA	5506-x	Tidak	Tidak	Ruang Server Dinas Kominfo Kota Batam
4	Firewall	Netgate	Pfsense	Tidak	Tidak	Ruang Server Dinas Kominfo Kota Batam

D. Penilaian Keamanan

Untuk mengetahui tingkat kematangan keamanan informasi dalam pengelolaan Data Center (Ruang Server), dan Pengembangan Aplikasi e-Government / SPBE maka Diskominfo telah melaksanakan kegiatan *Onsite Assesment* (OA) Indeks KAMI bersama dengan BSSN. Pelaksanaan OA pada tanggal 6 April 2022 dengan hasil total score setelah verifikasi oleh BSSN menjadi 186 yang sebelumnya 282. Hasil evaluasi dinyatakan “Tidak Layak”. Pihak BSSN memberikan rekomendasi sebanyak 41 poin.

Bab IV

Analisa

Kesenjangan SPBE

4.1. Analisa Kesenjangan SPBE

Untuk mengetahui kebutuhan mendasar dari Pemerintah Kota Batam maka perlu dilakukan analisis kesenjangan agar pengembangan SPBE yang dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan dibandingkan dengan kondisi ideal. Berikut merupakan detail perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam.

Tabel 4.1.1 Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
1	Manajemen	Belum adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (Manajemen Risiko, Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan).	Adanya penerapan manajemen SPBE mengenai (Manajemen Risiko, Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan).
2	Manajemen	Belum melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.	Melakukan Audit TIK yang terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, Audit Keamanan Informasi.
3	Data	Belum ada awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.	Adanya awareness mengenai Forum Satu Data Indonesia.
4	Aplikasi	Beberapa aplikasi internal Batam belum terintegrasi dengan Aplikasi lainnya.	Adanya Integrasi antar aplikasi internal dengan pusat.
5	Aplikasi	Beberapa aplikasi tidak ada dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.	Kedepan dalam proses pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga harus menyertakan dokumentasi aplikasi dari pihak ketiga.
6	Infrastruktur (Pusat Data)	Luasan ruangan ruang server terbatas. Masih terdapat server yang berada di luar pusat data Diskominfo seperti di BPKD berupa server aplikasi keuangan SIPKD, dan Aset.	Ruang Pusat Data cukup luas dan terdapat pembagian ruang seperti staging, pemantauan, ruang UPS & baterai. Semua server milik Pemerintah Kota Batam berada di Pusat Data dan tidak ada lagi yang ada di tempat lain (OPD/UPT).
7	Infrastruktur (Pusat Data)	Jarak lokasi pusat pemulihan bencana dengan pusat data di bawah 10 km, dan berada di kota yang sama.	Jarak lokasi pusat data dengan pusat pemulihan bencana minimal 40 km dengan tingkat kerawanan bencana yang berbeda dengan lokasi pusat data.
8	Infrastruktur (Pusat Data)	Server aplikasi (<i>web, application, dan database</i>) belum ada rekam cadangnya (<i>backup</i>)	Perlunya dilakukan proses rekam cadangan (<i>backup</i>) terhadap server aplikasi di lokasi yang berbeda dengan pusat data yakni pusat pemulihan bencana.
9	Infrastruktur (Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	Lingkup jaringan intra pemerintah daerah baru menjangkau beberapa gedung, dan OPD/UPT.	Jaringan intra pemerintah daerah Pemko Batam dapat menjangkau semua OPD/UPT.
10	Keamanan (Keamanan Data dan Informasi)	Pemerintah Kota Batam sudah memiliki kebijakan keamanan informasi SPBE yang tertuang dalam:	Pemerintah Kota Batam perlu melengkapi standar teknis dan prosedur keamanan data dan informasi yang mengacu pada Peraturan

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: 105/KI.01.04/VIII/2022 tentang Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama 	Badan (Perban) BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11	Keamanan (Keamanan Aplikasi SPBE)	<p>Pemerintah Kota Batam sudah memiliki kebijakan keamanan informasi SPBE yang tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: 105/KI.01.04/VIII/2022 tentang Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama 	Pemerintah Kota Batam perlu melengkapi standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE yang mengacu pada Peraturan Badan (Perban) BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12	Keamanan (Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	<p>Pemerintah Kota Batam sudah memiliki kebijakan keamanan informasi SPBE yang tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: 105/KI.01.04/VIII/2022 tentang Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan 	Pemerintah Kota Batam perlu melengkapi standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Badan (Perban) BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#	Domain	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal
		Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama	
13	Keamanan (Keamanan Jaringan Intra Pemerintah)	<p>Pemerintah Kota Batam sudah memiliki kebijakan keamanan informasi SPBE yang tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor: 105/Kl.01.04/VIII/2022 tentang Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pimpinan Tinggi Pratama 	Pemerintah Kota Batam perlu melengkapi standar teknis dan prosedur keamanan jaringan intra pemerintah yang mengacu pada Peraturan Badan (Perban) BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14	Keamanan (Keamanan Pusat Data)	Pemerintah Kota Batam belum memiliki standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data.	Pemerintah Kota Batam perlu membuat standar teknis dan prosedur keamanan Pusat Data yang mengacu pada SNI 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data, dan SNI 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data..



**Pemerintah Kota Batam
2022-2026**